

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### Bab I PENDAHULUAN

Sejarah Bondowoso bermula dengan adanya pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah Selatan pada Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya beliau sebagai Demang di daerah yang baru dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa dikenal dengan Raden Bagus Assra.

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

Secara struktur wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada di wilayah bagian Timur Jawa Timur.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada 113°048'10"-113°048'26" Bujur Timur dan 7°050'10"-7°056'41" Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

- 1) Bagian Utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Bagian Selatan : Kabupaten Jember.
- 3) Bagian Timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
- 4) Bagian Barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di Jl. Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, memiliki 23 Kecamatan 10 Kelurahan 209 Desa serta dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terbagi : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, 7 Badan, 16 Dinas, Inspektorat, RSUD dr. H. Koesnadi, BUMD PDAM dan BUMD PT Bondowoso Gemilang.

Kemudian ketentuan perundang-undangan yang melandasi Kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 62).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku pengelola keuangan daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas akuntansi berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Daerah

Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso dimulai pada Tahun 2002, dimana Tahun 2022 merupakan tahun kedelapan penerapan basis akrual penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun dengan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basic Accounting*) dalam upaya menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

#### **Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :**

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
  - c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
  - d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :**

1. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
  1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 46);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluwarsa;
42. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso;
43. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 34);
44. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 60);
45. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 64);
46. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 59);
47. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 118);
48. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 60); dan
49. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 62).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I           Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1 Pendapatan-LRA;
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Transfer
	5.1.4 Surplus/(Defisit)
	5.1.5 Pembiayaan Netto
	5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
	5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
	5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan
	5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
	5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
	5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
	5.3 Neraca
	5.3.1 Aset
	5.3.2 Kewajiban
	5.3.3 Ekuitas
	5.4 Laporan Operasional
	5.4.1 Pendapatan – LO
	5.4.2 Beban
	5.4.3 Surplus/ Defisit dari Operasi
	5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
	5.4.6 Pos Luar Biasa
	5.4.7 Surplus/ Defisit LO
	5.5 Laporan Arus Kas
	5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
	5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
	5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
	5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
	5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Kas
	5.5.6 Saldo Akhir Kas Total
	5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.6.1 Ekuitas Awal
	5.6.2 Surplus/Defisit LO
	5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
	5.6.4 Ekuitas Akhir
	5.7 Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
BAB VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup

**Bab II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi melalui berbagai dana transfer daerah, tugas pembantuan dan dekonsentrasi serta peran pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**1. Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

**Tabel 2-1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022**

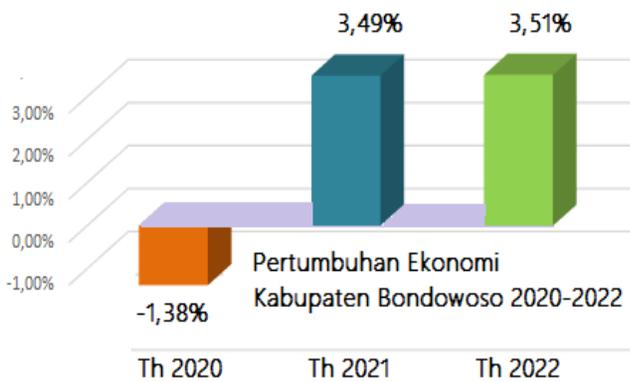
No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2020	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2021	Th 2022
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.729,46	3.818,35	3.756,87	5.946,49	6.204,93	6.489,78
2	Pertambangan dan Penggalian	252,97	257,49	272,71	373,69	388,06	425,65
3	Industri Pengolahan	3.235,13	3.358,39	3.567,46	4.762,09	5.140,41	5.788,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,78	6,94	7,41	8,59	9,01	9,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	11,35	12,06	11,97	14,50	15,68	16,12
6	Konstruksi	1.103,62	1.107,78	1.182,05	1.822,06	1.852,41	2.091,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.050,86	2.182,66	2.330,19	2.879,94	3.136,50	3.520,24
8	Transportasi dan Pergudangan	101,09	113,59	129,60	141,96	158,08	189,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,23	84,00	94,07	125,73	132,78	155,04
10	Informasi dan Komunikasi	974,90	1.041,68	1.073,90	1.110,70	1.188,01	1.236,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	395,12	399,27	403,80	575,49	596,56	641,28
12	Real Estat	173,40	175,91	185,14	238,22	243,67	259,97
13	Jasa Perusahaan	46,84	47,61	49,86	73,42	76,35	81,73
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	437,46	440,13	433,39	697,42	697,89	702,78
15	Jasa Pendidikan	518,54	529,62	539,84	724,71	741,71	764,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116,62	121,78	123,44	156,88	167,71	175,56
17	Jasa Lainnya	215,39	224,39	248,51	283,69	302,49	352,51
	<b>Jumlah</b>	<b>13.451,77</b>	<b>13.921,65</b>	<b>14.410,21</b>	<b>19.935,59</b>	<b>21.052,23</b>	<b>22.901,86</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.19,94 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp.21,05 triliun pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai Rp.22,90 triliun. Begitu pula PDRB ADHK meningkat dari Rp.13,45 triliun tahun 2020, meningkat menjadi Rp.13,92 triliun pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai angka sebesar Rp.14,41 triliun.

Pada tahun 2022, struktur ekonomi Bondowoso mengalami perubahan, beberapa sektor lapangan usaha mengalami peningkatan yang signifikan antara lain : Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, serta Jasa Lainnya. Enam sektor lapangan usaha diatas mengalami peningkatan nilai komoditas barang

dan jasa (atas dasar harga berjalan) di atas 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan sektor lainnya juga mengalami perubahan yang meningkat positif dengan kisaran dibawah 10%.



Ekonomi Bondowoso tahun 2022 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,51%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso selama 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari tahun 2020, 2021 dan 2022.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada tahun 2020, dengan merebaknya virus corona, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami tekanan yang sangat berat dengan kontraksi sebesar 1,38%. Pertumbuhan ekonomi minus menunjukkan melemahnya tingkat produktivitas dan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai beredarnya virus corona membawa dampak kepada menurunnya perekonomian. Masyarakat tidak leluasa dalam beraktivitas secara ekonomi dan dari sisi produksi mengalami penurunan yang sangat tajam karena rendahnya permintaan terhadap barang. Pada tahun 2021, khususnya pada triwulan III dan IV, dengan mulai melandainya pandemi Covid 19, aktivitas perekonomian mulai meningkat hingga akhir periode 2021 di Kabupaten Bondowoso ekonomi tumbuh positif pada angka 3,49%. Berbagai stimulan oleh pemerintah (pusat dan daerah) yang diintervensi kepada masyarakat baik program yang bersifat bantuan langsung tunai dan pemberdayaan ekonomi telah memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pada tahun 2022, dengan dilonggarkannya PPKM telah mendorong aktivitas perekonomian semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi Bondowoso mencapai angka 3,51%.

**Tabel 2-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022**

No	Uraian Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Th 2020	Th 2021	Th 2022
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,26%	2,38%	-1,61%
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,24%	1,79%	5,91%
3	Industri Pengolahan	0,33%	3,81%	6,23%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	2,34%	6,77%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	3,96%	6,31%	-0,77%
6	Konstruksi	-6,10%	0,38%	6,70%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	-8,23%	6,43%	6,76%
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,87%	12,37%	14,09%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-18,18%	2,15%	11,99%
10	Informasi dan Komunikasi	8,35%	6,85%	3,09%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,47%	1,05%	1,13%
12	Real Estat	2,77%	1,44%	5,25%
13	Jasa Perusahaan	-7,26%	1,65%	4,72%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-2,48%	0,61%	-1,53%
15	Jasa Pendidikan	2,53%	2,14%	1,93%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,32%	4,43%	1,36%
17	Jasa Lainnya	-14,02%	4,18%	10,75%
	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>-1,38%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,51%</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Dari sisi produksi, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang berkontraksi masing-masing sebesar 1,61%; 1,53%; dan 0,80%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,09%. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,99%. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya juga tumbuh diatas sepuluh persen, yaitu sebesar 10,75%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang tumbuh sebesar 6,76%. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 6,72%. Lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 6,70% di tahun 2022.

**Tabel 2-3 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022**

No	Uraian Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB		
		Th 2020	Th 2021	Th 2022
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29,83%	29,47%	28,34%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,87%	1,84%	1,86%
3	Industri Pengolahan	23,89%	24,42%	25,28%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,04%	0,04%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,07%	0,07%	0,07%
6	Konstruksi	9,14%	8,80%	9,13%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	14,45%	14,90%	15,37%
8	Transportasi dan Pergudangan	0,71%	0,75%	0,83%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63%	0,63%	0,68%
10	Informasi dan Komunikasi	5,57%	5,64%	5,40%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89%	2,83%	2,80%
12	Real Estat	1,19%	1,16%	1,14%
13	Jasa Perusahaan	0,37%	0,36%	0,36%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,50%	3,32%	3,07%
15	Jasa Pendidikan	3,64%	3,52%	3,34%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79%	0,80%	0,77%
17	Jasa Lainnya	1,42%	1,44%	1,54%
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso masih sangat tergantung pada sektor pertanian karena sektor ini masih menjadi penyumbang paling besar terhadap total PDRB 2022 yaitu sebesar 28,34%, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 29,47%. Perubahan terhadap struktur ekonomi Bondowoso mengarah kepada sektor Industri pengolahan dimana sektor ini memiliki angka distribusi PDRB terbesar kedua yang mencapai angka 25,28% meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2021) yang mencapai angka 24,42%.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,28%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,37%, Konstruksi sebesar 9,13%, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,40%.

## 2. PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2-4 PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso  
Tahun 2020-2022 (juta)**

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	ADHB (Rp)	25,706	27,041	29,30
2	ADHK (Rp)	17,345	17,882	18,441

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2022 mencapai Rp.29,30 juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas barang dan jasa sebesar Rp.2,44 juta/bulan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2022 mencapai angka Rp.18,44 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp.1,53 juta/per bulan.

PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terus mengalami peningkatan yang menunjukkan aktivitas perekonomian di Bondowoso bergeliat ke arah positif pada setiap penduduk. Kondisi ini didukung oleh situasi yang kondusif dengan semakin melandainya pandemi covid 19 dan kebijakan penanganan pandemi covid oleh pemerintah.

### 3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

**Tabel 2-5 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 2020-2022**

No	Uraian	Th 2020	Th 2021	Th 2022
1	2	3	4	5
1	Gini Rasio	0,329	0,334	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio) sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 0,365 atau meningkat 0,031 point dari tahun 2021. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Bondowoso cenderung meningkat meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah namun hal ini menjadi perhatian pemerintah agar ketimpangan yang ada dapat diperkecil sehingga gap pengeluaran antar penduduk tidak menjadi semakin lebar.

### 4. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2022**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	14,17	408.352	110,24	2,16	0,50
2021	14,73	423.150	115,18	2,19	0,49
2022	13,47	449.760	105,69	1,62	0,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kemiskinan di Bondowoso mengalami perkembangan yang berfluktuatif yang disebabkan oleh pandemic covid 19. Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2020 sebesar 14,47%, meningkat 0,56 point pada tahun 2021 menjadi sebesar 14,73%. Sedangkan pada tahun 2022, angka kemiskinan menunjukkan hasil yang positif menurun sebanyak 1,26 point dari tahun 2021 menjadi 13,47%.

Jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 mencapai 105,69 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 9,49 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 115,18 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sebesar Rp.449.760,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.26.610,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,29 persen, bila dibandingkan kondisi tahun 2021 yang sebesar Rp.423.150,00. Peningkatan Garis Kemiskinan yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat khususnya pada 40% penduduk di level bawah akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Permasalahan yang timbul pada kemiskinan tidak hanya pada jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga berkembang pada tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan nilai sebesar 0,57 poin menjadi 1,62 pada tahun 2022 sehingga tingkat pengeluaran penduduk miskin di Bondowoso semakin mendekati pada Garis kemiskinan. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk menangani tingkat kemiskinan menjadi lebih mudah khususnya pada bantuan langsung tunai dengan pembiayaan yang semakin mengecil.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,49 pada 2021, menjadi 0,33 pada 2022. Kondisi ini cenderung membaik karena karakter kemiskinan yang ada di Bondowoso menjadi lebih homogen sehingga penanganan kemiskinan lebih dapat difokuskan pada program-program tertentu.

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Sakernas Agustus 2022, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso mencapai 4,32% menurun sebanyak 0,14% dari tahun 2021 yang mencapai 4,46%. Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai angka 74,61% meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 73,89%. Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya tingkat partisipasi kerja menunjukkan bahwa kesempatan bekerja penduduk semakin besar dan peluang kerja di masyarakat juga semakin meningkat. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2-7 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2022**

No	Rincian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	5	6
1	Usia Kerja	628.608	632.700	636.559
2	Angkatan Kerja	472.018	467.488	474.928
3	Bukan angkatan Kerja	156.590	165.212	161.631
4	Bekerja	452.545	446.653	454.395
5	Pengangguran Terbuka	19.473	20.835	20.533
6	Tingkat pengangguran Terbuka	4,13%	4,46%	4,32%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,09%	73,89%	74,61%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Tahun 2022, jumlah pengangguran di Bondowoso mencapai 20.533 orang, menurun sebanyak 302 orang dari tahun 2021 yang mencapai 20.835 orang. Menurunnya jumlah pengangguran menjadikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bondowoso juga menurun dari 4,46% pada tahun 2021 menjadi 4,32% pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Penduduk yang bekerja sebanyak 454.395 orang, bertambah 7.742 orang dari Agustus 2021 yang sebesar 446.653 orang. Sektor jasa menjadi kontribusi terbesar dengan persentase orang yang bekerja mencapai 40,44%, berikutnya sektor pertanian dan manufaktur dengan persentase orang bekerja sebesar 38,31% dan 21,25%. Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, Jasa dan Manufaktur yang mengalami peningkatan persentase, berbanding terbalik dengan sektor pertanian yg turun sebesar 7,47 poin persen orang yang bekerja

**Tabel 2-8 Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2022**

No	Jenis Pekerjaan	Th 2020	Th 2021	Th 2022
1	Pertanian	218.713	204.486	174.079
2	Industri	91.676	87.302	96.559
3	Jasa	142.156	154.865	183.757
	<b>Jumlah</b>	<b>452.545</b>	<b>446.653</b>	<b>446.653</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

## 6. Indeks pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2020-2022 terus mengalami peningkatan.

**Tabel 2-9 Perkembangan IPM Tahun 2020-2022**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Indek pembangunan Manusia (IPM)	66,43	66,59	67,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 66,43 pada tahun 2020 menjadi 67,31 pada tahun 2022. Menurunnya kasus COVID-19 dibandingkan tahun sebelumnya memberikan dampak terhadap pembangunan manusia di Bondowoso.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dengan melihat capaian masing-masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing.

**Tabel 2-10 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2022**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,74 th	66,89 th	67,29 th
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,28 th	13,29 th	13,31 th
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,93 th	5,94 th	6,22 th
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.610,00	10.690,00	10.851,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Peningkatan IPM tahun 2020-2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Pada indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 tercatat sebesar 13,31 tahun lebih tinggi 0,02 poin dibanding sebelumnya (tahun 2021) yaitu 13,29 tahun, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25 thn +) tahun 2022 mencapai 6,22 tahun atau meningkat 0,28 poin dibanding tahun sebelumnya (tahun 2021) yang mencapai 5,94 tahun. Peningkatan komponen pendidikan dalam IPM menjadikan Indeks Pendidikan juga mengalami peningkatan, tahun 2022 mencapai 57,71 atau meningkat 0,99 poin dari tahun 2021 yang mencapai 56,72.

Komponen kesehatan, proyeksi dari bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup mencapai 67,29 tahun, lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021 yang mencapai 66,89 tahun. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menambah angka harapan hidup juga meningkatkan Indeks Kesehatan Masyarakat Bondowoso yang mencapai 72,75 pada tahun 2022 atau meningkat 0,62 poin dari tahun 2021 yang mencapai 72,14.

Dimensi standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Bondowoso yang disesuaikan mencapai Rp.10,85 juta per tahun, naik tipis 1,48% dibanding tahun 2021 lalu yang mencapai Rp.10,69 juta. Hal ini sejalan dengan adanya perbaikan kondisi ekonomi seiring menurunnya kasus Covid-19. Peningkatan pengeluaran per kapita penduduk Bondowoso memberikan perbaikan pada Indeks Pengeluaran yang mencapai 72,63 pada tahun 2022 atau meningkat 0,46 poin dari tahun 2021 yang mencapai 72,18.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kebijakan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan terutama peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan anggaran untuk pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bondowoso sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui upaya penertiban pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah;
2. Melakukan rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang potensial serta mendukung sektor perekonomian;
3. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
4. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Pengawasan obyek pajak pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidental (pagelaran musik, pertandingan olah raga, dan lain-lain);
6. Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian masalah data obyek dan subyek pajak;
7. Penetapan pengenaan pajak dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
8. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak;
9. Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

10. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
11. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, redistribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
12. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah; dan
13. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual.

## **B. Dana Perimbangan**

Kebijakan dana perimbangan yaitu:

1. Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa pendapatan bagi hasil bagi daerah;
2. Menetapkan target pajak / bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal; dan
3. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

## **C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

## **D. Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan setiap belanja yang dikeluarkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah selalu diperhatikan beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja daerah antara lain:

1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;
2. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah;
3. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat;
4. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
5. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat; dan
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

## **E. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan guna mengatasi defisit belanja daerah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan optimalisasi pengeluaran pembiayaan guna menjaga kesinambungan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Tahun 2022 melaksanakan peningkatan prioritas pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan urusan kearsipan.

Kemudian urusan pilihan mencakup urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan urusan transmigrasi. Serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan.

## 2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD

### Pendapatan

Pencapaian target kinerja APBD – Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2-11 Pencapaian Target Kinerja APBD – Pendapatan**

No	Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>186.393.243.802,00</b>	<b>189.504.490.467,06</b>	<b>101,67</b>	<b>223.136.567.608,59</b>
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	45.273.760.250,00	41.397.270.293,00	91,44	35.114.763.839,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	19.117.131.398,00	16.881.328.762,00	88,30	14.367.036.052,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.544.375.370,00	4.544.375.373,27	100,00	4.260.079.389,45
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	117.457.976.784,00	126.681.516.038,79	107,85	169.394.688.328,14
7	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.675.547.665.000,00</b>	<b>1.678.782.423.998,00</b>	<b>100,19</b>	<b>1.729.631.641.136,14</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>1.312.786.233.620,00</b>	<b>1.297.910.080.036,00</b>	<b>98,87</b>	<b>1.323.758.092.095,00</b>
9	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	124.623.041.000,00	163.050.876.593,00	130,84	142.767.234.998,00
10	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	829.617.676.619,00	829.591.176.619,00	100,00	843.159.769.000,00
11	Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.1.1.2.1.3	113.136.763.000,00	95.866.127.142,00	84,73	136.481.721.719,00
12	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	5.1.1.2.1.4	245.408.753.001,00	209.401.899.682,00	85,33	201.349.366.378,00
13	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>239.393.195.000,00</b>	<b>239.393.195.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>273.759.249.000,00</b>
14	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	7.725.363.000,00	7.725.363.000,00	100,00	37.542.241.000,00
15	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	231.667.832.000,00	231.667.832.000,00	100,00	236.217.008.000,00
16	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>5.1.1.2.3</b>	<b>123.368.236.380,00</b>	<b>141.479.148.962,00</b>	<b>114,68</b>	<b>132.114.300.041,14</b>
17	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	102.564.713.380,00	120.622.425.962,00	117,61	121.070.561.684,00
18	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	20.803.523.000,00	20.856.723.000,00	100,26	11.043.738.357,14
19	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>42.812.696.109,00</b>	<b>40.191.479.944,00</b>	<b>93,88</b>	<b>101.582.419.780,00</b>
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	11.601.665.000,00	11.601.665.000,00	100,00	0,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	31.211.031.109,00	28.589.814.944,00	91,60	101.582.419.780,00
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.904.753.604.911,00</b>	<b>1.908.478.394.409,06</b>	<b>100,20</b>	<b>2.054.350.628.524,73</b>

Dari pencapaian target kinerja pendapatan daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang disebabkan kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa target kinerja Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Dapat dijelaskan bahwa mekanisme pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Pajak hiburan dan pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak dengan sistem *self assessment*. Selanjutnya pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

### Belanja

Pencapaian target kinerja APBD – Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-12 Pencapaian Target Kinerja APBD – Belanja

No	Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	<b>BELANJA</b>					
2	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.564.265.715.283,00</b>	<b>1.377.797.615.369,66</b>	<b>88,08</b>	<b>1.410.349.479.042,56</b>
3	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	896.049.525.332,00	787.984.360.335,00	87,94	799.417.410.997,00
4	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	544.585.852.641,00	475.352.226.339,66	87,29	444.016.600.988,70
5	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	2.183.163.800,00	2.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00
6	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	96.551.774.010,00	93.266.283.855,00	96,60	130.514.844.220,06
7	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	24.895.399.500,00	19.011.581.040,00	76,37	35.217.459.036,80
8	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>218.487.359.953,00</b>	<b>190.396.577.000,00</b>	<b>87,14</b>	<b>196.554.645.695,81</b>
9	Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	94.925.081.919,00	86.205.466.900,00	90,81	95.221.279.024,00
10	Belanja Modal-Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.2	60.780.390.024,00	48.977.092.155,00	80,58	42.446.436.867,21
11	Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.3	54.591.526.965,00	48.386.382.840,00	88,63	51.677.563.443,60
12	Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	7.190.361.045,00	6.802.635.105,00	94,61	7.025.222.811,00
13	Belanja Modal-Aset Lainnya	5.1.2.2.5	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	184.143.550,00
14	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>2.976.361.105,00</b>	<b>1.149.787.428,00</b>	<b>38,63</b>	<b>1.006.063.700,00</b>
15	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	2.976.361.105,00	1.149.787.428,00	38,63	1.006.063.700,00
16	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.785.729.436.341,00</b>	<b>1.569.343.979.797,66</b>	<b>87,88</b>	<b>1.607.910.188.438,37</b>
17	<b>BELANJA TRANSFER</b>					
18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.3.1	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	100,00	4.154.754.200,00
19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	2.010.995.353,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.3	327.091.903.762,00	327.038.076.262,00	100,00	349.725.867.316,00
21	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>	<b>331.619.279.787,00</b>	<b>331.565.452.287,00</b>	<b>99,98</b>	<b>355.891.616.869,00</b>
22	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>2.117.348.716.128,00</b>	<b>1.900.909.432.084,66</b>	<b>89,78</b>	<b>1.963.801.805.307,37</b>
23	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>5.1.4</b>	<b>(212.595.111.217,00)</b>	<b>7.568.962.324,40</b>	<b>(3,56)</b>	<b>90.548.823.217,36</b>
24	<b>PEMBIAYAAN</b>					
25	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>227.595.111.217,00</b>	<b>227.726.349.216,93</b>	<b>100,02</b>	<b>137.046.287.999,57</b>
26	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	227.595.111.217,00	227.595.111.216,93	100,00	136.906.969.499,57
27	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	0,00	131.238.000,00	0,00	139.318.500,00
28	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
30	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>212.595.111.217,00</b>	<b>212.726.349.216,93</b>	<b>100,06</b>	<b>137.046.287.999,57</b>
31	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>5.1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>220.295.311.541,33</b>	<b>0,00</b>	<b>227.595.111.216,93</b>

### Bab III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas mulai Tahun 2015. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah meliputi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Koesnadi dan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS). Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2022 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.904.753.604.911,00 dan terealisasi sebesar Rp1.908.478.394.409,06 atau sebesar 100,20%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.054.350.628.524,73, realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp145.872.234.115,67 atau 7,10% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja dan belanja transfer untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan sebesar Rp2.117.348.716.128,00 dan terealisasi sebesar Rp1.900.909.432.084,66 atau sebesar 89,78%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.963.801.805.307,37 realisasi belanja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp62.892.373.222,71 atau sebesar 3,20%.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3-1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi dan Organisasi**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.904.753.604.911,00</b>	<b>1.908.478.394.409,06</b>	<b>100,20</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>121.195.337.148,00</b>	<b>125.822.115.198,12</b>	<b>103,82</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	121.025.620.000,00	125.667.902.148,12	103,84
	- Dinas Kesehatan	11.000.000.000,00	9.737.318.237,00	88,52
	- Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	110.025.620.000,00	115.930.583.911,12	105,37
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.717.148,00	154.213.050,00	90,86
	- Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi	169.717.148,00	154.213.050,00	90,86
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>6.004.802.250,00</b>	<b>6.648.241.395,00</b>	<b>110,72</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	121.608.000,00	154.046.000,00	126,67
	- Dinas Lingkungan Hidup	121.608.000,00	154.046.000,00	126,67
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.255.690.250,00	3.994.888.600,00	93,87
	- Dinas Perhubungan	4.255.690.250,00	3.994.888.600,00	93,87
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.436.104.000,00	1.704.826.045,00	118,71

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	%
-	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.436.104.000,00	1.704.826.045,00	118,71
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	648.883.050,00	0,00
-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	0,00	648.883.050,00	0,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	191.400.000,00	145.597.700,00	76,07
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	191.400.000,00	145.597.700,00	76,07
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>1.023.155.113,00</b>	<b>669.084.495,00</b>	<b>65,39</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	611.242.000,00	279.261.580,00	45,69
-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	611.242.000,00	279.261.580,00	45,69
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	411.913.113,00	389.822.915,00	94,64
-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	219.139.948,00	212.356.915,00	96,90
-	Dinas Peternakan dan Perikanan	192.773.165,00	177.466.000,00	92,06
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.776.530.310.400,00</b>	<b>1.775.338.953.320,94</b>	<b>99,93</b>
1	KEUANGAN	1.776.530.310.400,00	1.775.338.953.320,94	99,93
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.731.256.550.150,00	1.733.941.683.027,94	100,16
-	Badan Pendapatan Daerah	45.273.760.250,00	41.397.270.293,00	91,44
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.117.348.716.128,00</b>	<b>1.900.909.432.084,66</b>	<b>89,78</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.216.592.755.766,00</b>	<b>1.071.905.660.749,66</b>	<b>88,11</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	627.631.129.165,00	551.931.845.460,00	87,94
-	Dinas Pendidikan	627.631.129.165,00	551.931.845.460,00	87,94
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	404.475.147.584,00	361.480.693.179,66	89,37
-	Dinas Kesehatan	205.948.428.096,00	176.205.617.715,96	85,56
-	Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	198.526.719.488,00	185.275.075.463,70	93,33
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	124.377.177.909,00	114.042.944.942,00	91,69
-	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi	88.984.282.143,00	80.200.665.184,00	90,13
-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	35.392.895.766,00	33.842.279.758,00	95,62
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.764.344.771,00	16.196.776.028,00	56,31
-	Satuan Polisi Pamong Praja	10.306.063.387,00	9.622.041.656,00	93,36
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.458.281.384,00	6.574.734.372,00	35,62
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.344.956.337,00	28.253.401.140,00	90,14
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	31.344.956.337,00	28.253.401.140,00	90,14
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>125.708.282.326,00</b>	<b>111.464.397.917,00</b>	<b>88,67</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.123.155.971,00	5.543.769.366,00	90,54
-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	6.123.155.971,00	5.543.769.366,00	90,54
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.692.704.512,00	18.768.899.563,00	90,70
-	Dinas Lingkungan Hidup	20.692.704.512,00	18.768.899.563,00	90,70
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.569.812.860,00	5.134.716.393,00	92,19
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.569.812.860,00	5.134.716.393,00	92,19
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.999.330.353,00	14.960.430.048,00	88,01
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.999.330.353,00	14.960.430.048,00	88,01
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.448.495.300,00	23.460.913.284,00	95,96
-	Dinas Perhubungan	24.448.495.300,00	23.460.913.284,00	95,96
0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.994.294.562,00	14.615.171.247,00	97,47
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.994.294.562,00	14.615.171.247,00	97,47
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	33.087.037.484,00	25.581.408.483,00	77,32

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	%
-	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	33.087.037.484,00	25.581.408.483,00	77,32
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00
2	- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00
3	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
4	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.793.451.284,00	3.399.089.533,00	89,60
5	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.793.451.284,00	3.399.089.533,00	89,60
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00
6	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>79.154.961.317,00</b>	<b>68.891.968.368,00</b>	<b>87,03</b>
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	27.193.699.000,00	23.241.788.767,00	85,47
-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	27.193.699.000,00	23.241.788.767,00	85,47
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.961.262.317,00	45.650.179.601,00	87,85
-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.718.689.544,00	31.554.140.435,00	88,34
-	Dinas Peternakan dan Perikanan	16.242.572.773,00	14.096.039.166,00	86,78
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00
-	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>167.540.639.768,00</b>	<b>134.014.755.232,00</b>	<b>79,99</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH	119.886.056.453,00	95.384.801.673,00	79,56
-	Sekretariat Daerah	119.886.056.453,00	95.384.801.673,00	79,56
2	SEKRETARIAT DPRD	47.654.583.315,00	38.629.953.559,00	81,06
-	Sekretariat DPRD	47.654.583.315,00	38.629.953.559,00	81,06
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>458.383.419.610,00</b>	<b>447.776.464.843,00</b>	<b>97,69</b>
1	PERENCANAAN	8.972.315.424,00	8.237.190.583,00	91,81
-	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.972.315.424,00	8.237.190.583,00	91,81
2	KEUANGAN	440.309.944.145,00	431.897.741.261,00	98,09
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	432.178.475.713,00	424.343.831.866,00	98,19
-	Badan Pendapatan Daerah	8.131.468.432,00	7.553.909.395,00	92,90
3	KEPEGAWAIAN	9.101.160.041,00	7.641.532.999,00	83,96
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.101.160.041,00	7.641.532.999,00	83,96
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00
-	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>63.165.988.823,00</b>	<b>60.253.505.637,00</b>	<b>95,39</b>
1	INSPEKTORAT DAERAH	7.102.696.505,00	6.646.914.164,00	93,58
-	Inspektorat	7.102.696.505,00	6.646.914.164,00	93,58
2	KECAMATAN	56.063.292.318,00	53.606.591.473,00	95,62
-	Kecamatan Bondowoso	11.974.774.513,00	11.654.650.483,00	97,33
-	Kecamatan Tamanan	1.716.885.387,00	1.510.225.314,00	87,96
-	Kecamatan Tenggarang	3.434.209.350,00	3.282.671.942,00	95,59
-	Kecamatan Tegalampel	3.378.228.868,00	3.280.262.044,00	97,10
-	Kecamatan Curahdami	3.181.738.900,00	3.075.229.152,00	96,65
-	Kecamatan Wringin	1.735.011.760,00	1.550.470.074,00	89,36
-	Kecamatan Pakem	1.345.543.901,00	1.287.750.137,00	95,70
-	Kecamatan Binakal	1.734.301.495,00	1.709.025.825,00	98,54
-	Kecamatan Maesan	2.039.942.256,00	1.974.083.203,00	96,77
-	Kecamatan Grugugan	2.156.861.400,00	2.124.884.789,00	98,52
-	Kecamatan Pujer	2.177.149.600,00	2.108.160.366,00	96,83
-	Kecamatan Wonosari	1.995.283.654,00	1.922.131.287,00	96,33
-	Kecamatan Sukosari	1.654.135.245,00	1.451.237.755,00	87,73
-	Kecamatan Tlogosari	1.856.165.927,00	1.814.954.579,00	97,78
-	Kecamatan Tapen	1.828.671.399,00	1.755.832.803,00	96,02
-	Kecamatan Sumber Wringin	1.681.141.711,00	1.625.056.514,00	96,66
-	Kecamatan Prajekan	1.710.856.387,00	1.680.151.416,00	98,21
-	Kecamatan Klabang	1.864.881.348,00	1.830.894.036,00	98,18
-	Kecamatan Cermee	2.066.914.074,00	2.035.994.817,00	98,50
-	Kecamatan Ijen	1.488.635.310,00	1.467.473.371,00	98,58
-	Kecamatan Taman Krocok	1.609.532.449,00	1.422.358.108,00	88,37
-	Kecamatan Jambesari Darussholah	1.462.355.320,00	1.172.816.605,00	80,20
-	Kecamatan Botolinggo	1.970.072.064,00	1.870.276.853,00	94,93

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	%
VI	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.802.668.518,00	6.602.679.338,00	97,06
I	1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.802.668.518,00	6.602.679.338,00	97,06
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.802.668.518,00	6.602.679.338,00	97,06
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(212.595.111.217,00)</b>	<b>7.568.962.324,40</b>	<b>(3,56)</b>

### 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan daerah secara umum telah mencapai target yang direncanakan sebesar 100,20%. Salah satunya pencapaian pendapatan masih terdapat hambatan khususnya Pendapatan Pajak Daerah pencapaian realisasinya sebesar 91,44% dan Pendapatan Retribusi Daerah pencapaian realisasinya sebesar 88,30%. Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi pendapatan yang dapat dikelola secara luas oleh pemerintah daerah. Hambatan yang muncul menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelesaikannya dan sekaligus menjadikannya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan sesuai potensi daerah yang dimiliki.

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih adanya subyek pajak daerah yang menunda/menghindari ketentuan pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
2. Akurasi data wajib pajak dan retribusi serta pengembangan terhadap objek pajak dan retribusi perlu untuk ditingkatkan dengan terus melakukan updating data guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
3. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD;
4. Penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif, rincian obyek, prosedur / sistem pemungutan dan ketentuan umum lainnya, pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi langsung kepada wajib pajak atau melalui media elektronik, baliho, spanduk, dan lain lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada aparaturnya pemungut pajak daerah yang berprestasi;
6. Melakukan kegiatan pemuktahiran data obyek dan subyek pajak dan Retribusi daerah dengan survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap;
7. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta studi banding/lapang tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
9. Meningkatkan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan daerah.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan berbasis Tehnologi Informasi (TI), pajak dan retribusi daerah;
11. Perlunya peningkatan kinerja dan tanggungjawab petugas pemungut dalam pengelolaan sumber PAD; dan
12. Melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi atau kebijakan di atasnya serta dapat terus mengikuti perkembangan jaman khususnya dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya kepastian perhitungan dana perimbangan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pemerintah daerah harus memperhitungkan secara cermat pengalokasian dalam perencanaannya.

Kemudian penyerapan belanja pada tahun 2022 sebesar 87,88% masih perlu ditingkatkan dengan melakukan penajaman kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah perlu didorong dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya penyerapan belanja transfer pada tahun 2022 sebesar 99,98%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja transfer dalam membiayai pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan keuangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah. Sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan OPD, kemudian dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan entitas akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi
4. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Peternakan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. Dinas Perhubungan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Inspektorat
27. Kecamatan Bondowoso
28. Kecamatan Tamanan
29. Kecamatan Tenggarang
30. Kecamatan Tegalampel
31. Kecamatan Curahdami
32. Kecamatan Wringin
33. Kecamatan Pakem
34. Kecamatan Binakal
35. Kecamatan Maesan
36. Kecamatan Grujugan
37. Kecamatan Pujer
38. Kecamatan Wonosari
39. Kecamatan Sukosari
40. Kecamatan Tlogosari
41. Kecamatan Tapen
42. Kecamatan Sumber Wringin
43. Kecamatan Prajekan
44. Kecamatan Klabang
45. Kecamatan Cermee

46. Kecamatan Ijen
47. Kecamatan Taman Krocok
48. Kecamatan Jambesari Darussholah
49. Kecamatan Botolinggo
50. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan-pernyataan di dalam kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu basis akruaI untuk penyusunan laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas sedangkan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akruaI baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas; dan

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akruaI, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Neraca**

###### **A. Pengukuran Aset**

1. Pengukuran aset lancar, adalah sebagai berikut :
  - a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
  - b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
  - c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
  - d. Persediaan dicatat sebesar :
    - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
    - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
5. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

###### **B. Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **4.3.2 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Laporan Realisasi Anggaran**

###### **A. Pengukuran Pendapatan**

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang diterima; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

## **B. Pengukuran Belanja**

1. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

#### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

##### **A. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

##### **Pengakuan**

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Kabupaten Bondowoso mulai Tahun Anggaran 2016 sehingga saldo dana BOS akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
  - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
  - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;
  - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah; dan
  - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;
  3. Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD;
  4. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
  5. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD;
  6. Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD); dan

8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

### **Pengukuran**

1. Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran;
2. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD;
3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD);
4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
6. Pendapatan dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian**

1. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan daerah;
2. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah-LRA;
  - b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA;
3. Pendapatan Asli Daerah–LRA, Transfer–LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dalam mata uang rupiah serta rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

## **B. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

### **Pengakuan**

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*); dan
  - c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
4. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Pendapatan Non Operasional;
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan dan PAD dari hasil eksekusi jaminan;

a. PAD melalui penetapan terdiri dari :

1) *Official Assesment*

Yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan, misalnya pendapatan pajak reklame; Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;

2) *Self Assesment*

Yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut; Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan; Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP);

b. PAD tanpa penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Retribusi, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pendapatan telah diterima;

c. PAD dari hasil eksekusi jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya; Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan; Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan;

6. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/Provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut kecuali DAU; Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali terdapat dokumen yang sah dari pemerintah yang mengakui adanya utang dana transfer kepada daerah maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakuinya sebagai pendapatan transfer; Dokumen dari pemerintah tersebut dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan surat pemberitahuan;

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur transfer disampaikan entitas penyalur sebelum Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan laporan keuangan; Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan; Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso setelah laporan keuangan diterbitkan; Apabila terjadi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut;

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan; Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan; Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang; Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa;

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi; Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah

negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta;

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diakui sebagai pendapatan; Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

#### 7. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya; Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan; Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut; Untuk itu pengakuan pendapatan hibah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah;

#### 8. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya; Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima;

9. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

1. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan Transfer-LO diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan transfer-LO dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang Ekuitas.
5. Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan *transfer*.

### **Penyajian**

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

##### A. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

##### Pengakuan

1. Beban diakui pada saat :
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pembelian BBM kendaraan dinas.
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.
5. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso maka pengakuan beban terdiri dari:
  - a. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran LS; dan
  - b. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran UP/GU/TU.
7. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan adanya dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan adanya bukti- bukti pengeluaran kas yang berasal dari uang persediaan dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
  - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
    - 1) Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/OPD.

- 2) Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika dibayarkan dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang belanja/beban.
- c. Beban Persediaan
- 1) Beban persediaan diakui sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
  - 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
  - 3) Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan untuk alasan kepraktisan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu dengan mencatat akun “Beban Persediaan” setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, namun pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun “Beban Persediaan” ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi pada tahun anggaran yang berkenaan.
- d. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- e. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- f. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- g. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- h. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode yang sudah ditetapkan.
- i. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
- j. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui oleh pihak yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### **Penyajian**

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
  - a. Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;
  - b. Beban Transfer;
  - c. Beban Non Operasional;
  - d. Beban Luar Biasa;
  - e. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
2. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

## B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

### Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat kas telah dikeluarkan:
  - a. Dari RKUD; atau
  - b. Oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
  - c. Oleh OPD langsung dari pendapatan yang belum disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima pendapatan wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah;
  - d. Untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari RKUD, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
3. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar pada akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
4. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
5. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat :
  - a. Kas telah dikeluarkan dari Rekening kas BLUD; dan
  - b. Kas telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BLUD dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

### Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya;
2. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU; dan
3. Belanja dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

### Penyajian

1. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
3. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
  - a. Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx

- Hibah xxx
  - Bantuan Sosial xxx
- b. Belanja Modal:
- Belanja Aset Tetap xxx
  - Belanja Aset Lainnya xxx
  - Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx
4. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
  5. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  6. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :
    - Pelayanan Umum xxx
    - Pertahanan xxx
    - Ketertiban dan Keamanan xxx
    - Ekonomi xxx
    - Perlindungan Lingkungan Hidup xxx
    - Perumahan dan Permukiman xxx
    - Kesehatan xxx
    - Pariwisata dan Budaya xxx
    - Agama xxx
    - Pendidikan xxx
    - Perlindungan sosial xxx
  7. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
  8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
  9. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
  10. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang atau lebih dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
2. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

Terdapat jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan/menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan. Dengan

kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

##### **A. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

##### **Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

##### **Pengukuran**

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

##### **B. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

##### **Pengakuan**

1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

##### **Pengukuran**

1. Pengeluaran Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah.
2. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### **4.4.5 Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/ Daerah/ Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya**

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.

Hal-hal yang diungkapkan adalah :

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;

- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

#### **4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi :

1. Saldo Kas pada BUD  
Saldo Kas pada BUD yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Saldo Rekening Kas Umum Daerah.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan per tanggal neraca. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan  
Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan dapat berbentuk bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca; atau Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ketiga dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.
5. Kas di BLU  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan daerah, termasuk didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD. Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6. Setara kas.

Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

**Pengakuan**

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :
  - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
  - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
6. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

**Pengukuran**

1. Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.
2. Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Apabila penerimaan/pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam rekening mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan/pengeluaran kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.
5. Jika pada penerimaan transfer diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan.
6. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.

**Penyajian**

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset nonlancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

**4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan**

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau.
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.  
Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang

berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

### **Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan**

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

### **Pengakuan Piutang Perikatan**

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

### **Pengukuran Piutang Perikatan**

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pemberian Pinjaman  
Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang Penjualan Kredit  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang Kemitraan  
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- d. Pemberian Fasilitas/Jasa  
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

### **Pengakuan Piutang Yang Berasal Dari Transfer Antar Pemerintahan**

Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya.

#### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil ini diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

#### **Dana Alokasi Umum**

Di antara bentuk dana transfer, dapat dikatakan DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.

### **Transfer Lainnya**

Selain ketiga jenis transfer di atas, pemerintah dalam setiap tahunnya dapat mengeluarkan kebijakan transfer yang lain. Ada dua kemungkinan mekanisme penyaluran, pertama bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan tambahan dan kedua bertahap dengan persyaratan tertentu.

Piutang transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah pusat karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan piutang atau utang dari pemerintah pusat dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan menteri atau laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah pusat apabila akan mengakui piutang atau utang transfer.

### **Bagi Hasil Dari Provinsi**

Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Piutang bagi hasil dari provinsi diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah provinsi karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan utang dari pemerintah provinsi dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan gubernur atau laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah provinsi apabila akan mengakui piutang transfer.

### **Transfer Antar Daerah**

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah yang bersangkutan atau aturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah tersebut. Dalam hal demikian terjadi, besar kemungkinan pelaksanaan transfer didasarkan pada realisasi pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah penghasil/pemungut. Mekanisme demikian sama dengan yang diterapkan untuk pelaksanaan transfer DBH oleh pemerintah pusat ke daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi bagian daerah penerima yang belum ditransfer. Jika nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah penerima belum ditransfer seluruhnya hingga akhir periode laporan keuangan, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat lainnya yang sah jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui sebagai piutang transfer antar daerah.

### **Piutang Karena Kerugian Daerah**

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundangan yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

### **Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tuntutan Perbendaharaan (TP)**

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pengakuan Piutang Karena Kerugian Daerah**

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

### **Nilai Bersih Piutang Yang Dapat Direalisasikan**

Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) (NRV).

Untuk menyajikan piutang sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

### **Kualitas Piutang**

Kualitas piutang adalah kemungkinan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas piutang digolongkan sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

### **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada setiap akhir periode akuntansi ditentukan sebagai berikut:

- a. 0% (nol per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 30% (tiga puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas kurang lancar;
- c. 70% (tujuh puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas diragukan; dan
- d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berlaku untuk piutang pokok dan bunga yang ditimbulkannya. OPD dan/atau SKPKD wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang yang menjadi tanggungjawabnya.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar di muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### **Pengakuan**

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pencatatan transaksi beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban ke nilai beban yang merupakan kewajiban pada tahun berjalan. Atas beban yang telah diakui dari kas yang dikeluarkan tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun beban dibayar dimuka.

##### **Pengukuran**

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan namun belum menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

##### **Penyajian**

Beban Dibayar di Muka disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4.9 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir**

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

##### **Pengakuan**

Pengeluaran dana bergulir diakui jika telah terjadi pengeluaran definitif dari rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

##### **Pengukuran**

Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

##### **Penyajian**

1. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas;
2. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
3. Dana Bergulir yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
4. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir; dan

5. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir.

#### **Kualitas Dana Bergulir**

1. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
2. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
3. Kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.
4. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan.

#### **Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir**

1. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
2. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
3. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.
4. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :
  - a. 0% (nol perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas lancar;
  - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas kurang lancar;
  - c. 70% (tujuh puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas diragukan; dan
  - d. 100% (Seratus perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.

#### **Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir**

Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan penghapusan Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

#### **4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

##### **Pengakuan**

1. Persediaan diakui:
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pencatatan persediaan pada kartu persediaan dilakukan setiap kali terjadi perolehan dan pengeluaran persediaan;
3. Pada akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi/penghitungan fisik persediaan (*stock opname*) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan;
4. Kartu persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan;

5. Jika terdapat selisih antara kartu persediaan dengan hasil *stock opname* yang disebabkan persediaan hilang, usang, kedaluwarsa atau rusak dan selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban persediaan;
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah abnormal, maka selisih persediaan ini dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah;
7. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan;
8. Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*); dan
9. Persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

#### **Pengukuran**

1. Persediaan disajikan sebesar :
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*;
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
5. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
7. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
9. Pengukuran pemakaian persediaan (*use of goods*) dihitung dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO; dan
10. Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

#### **Penyajian**

1. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

#### **Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **Pengukuran**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar; Sedangkan

untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar; Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Penilaian Investasi Jangka Pendek**

Penilaian investasi jangka pendek menggunakan metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan; Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### **Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

#### **4.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **Pengukuran**

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
3. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
4. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;

6. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya;
7. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
8. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
9. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut;
10. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium;
11. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional; dan
12. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan nilai wajar investasi tersebut.

### **Penilaian Investasi Jangka Panjang**

1. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
  - a. Metode biaya  
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - b. Metode ekuitas  
Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
  - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan  
Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan:
    - 1) Dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan,
    - 2) Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
  - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
  - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang**

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
2. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

3. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
6. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
8. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang**

1. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

#### **4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

##### **A. Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

## **B. Aset Tetap**

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## **C. Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **D. Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.

Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.

Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

#### **E. Akuntansi Tanah**

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten

Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

#### **F. Pengukuran**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

#### **G. Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **H. Komponen Biaya**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- e. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **I. Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **J. Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **K. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja

disebut sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (*carrying amount*). Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap tiga tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun keenam adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama tujuh tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama tujuh tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah empat tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya (*revenue expenditure*).

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Perbedaan antara *capital expenditure* dan *revenue expenditure* selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau
- b. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Terkait dengan paragraf diatas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis sepuluh tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada tahun ketujuh pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan tiga tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari sepuluh tahun menjadi tujuh tahun;
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
- c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal;
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.

Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang *extracomptable*.

#### **L. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### **M. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi Renovasi, Restorasi dan Overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Dalam hal perbaikan aset tetap, OPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

#### N. Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan;  
Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.; dan
- Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada Tahun 2008 untuk pertama kalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan lima tahun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4-1 Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Untuk Pertama Kalinya**

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum penyusutan)
2003	90.000.000,00
2005	125.000.000,00
2006	150.000.000,00
2007	160.000.000,00
2008	180.000.000,00

#### O. Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk Tahun 2008 (1 tahun) saja, yaitu :

**Tabel 4-2 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan**

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4=(20% x 2)
2008	180.000.000,00	5	36.000.000,00

**P. Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan**

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

**Tabel 4-3 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan**

Tahun Awal (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2008	Penyusutan Per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	$4 = (20\% \times 2)$	$5 = 3 \times 4$	$6 = 4$	$7 = 5 + 6$
2005	125.000.000,00	3	25.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
2006	150.000.000,00	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
2007	160.000.000,00	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	64.000.000,00
Jumlah	435.000.000,00			167.000.000,00	87.000.000,00	254.000.000,00

**Q. Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal**

Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada Tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-4 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal**

tahun Neraca Awal (Akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (tahun)	Masa Manfaat antara Neraca awal s.d 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008 (tahun Pertama)		
					Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4	$5 = (30\% \times 2)$	$6 = 4 \times 5$	$7 = 5$	$8 = 6 + 7$
2005	90.000.000,00	3	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

**R. Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan**

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari Bupati.

**S. Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-5 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Telah Habis**

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	0	0	-	-	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	3	28.000.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(84.000.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-6 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Besar Dari Kebijakan Akuntansi Di Golongan Aset Yang Baru**

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	5	45	1.680.000,00	75.600.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	5	16.800.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(8.400.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-7 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Kecil Dari Kebijakan Akuntansi**

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	47	3	1.680.000,00	5.040.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	4	3	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Koreksi Ekuitas				(30.960.000,00)		

## T. Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.

Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.

Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000,00 dan masa manfaat tujuh tahun telah disusutkan lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00 Aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000,00 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000,00. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.

Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

#### **U. Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok**

Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.

Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

#### **V. Koreksi Kesalahan Pencatatan**

Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap:

- a. Aset Tetap; dan/atau
- b. Akumulasi Penyusutan; dan/atau
- c. Beban Penyusutan; dan/atau
- d. Ekuitas.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai:

- a. Beban Penyusutan dalam LO;
- b. Aset Tetap dalam Neraca;
- c. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
- d. Perubahan Ekuitas dalam LPE.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai:

- a. Beban Penyusutan dalam LO; dan
- b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

#### **W. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas.

#### **X. Akuntansi Aset Tetap Lainnya-Renovasi**

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya;
- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan;
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional; dan
- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

#### **Y. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

## **Z. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)**

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

## **AA. Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)**

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

### **Penyajian**

Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.

Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### **Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) Pelepasan;
- 2) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 3) Mutasi aset tetap lainnya; dan
- 4) Penambahan.

Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **Tabel Masa Manfaat Aset Tetap**

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel 4.8 Masa Manfaat I dan Tabel 4.9 Masa Manfaat II sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.

- 1) Tabel 4.8 Masa Manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun kedua dan selanjutnya.

**Tabel 4-8 Masa Manfaat I**

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	8	6	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

- 2) Tabel 4.9 Masa Manfaat II merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini diterapkan.

**Tabel 4-9 Masa Manfaat II**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	0% s.d 25%	0

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Komputer Komputer Unit	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Sumur	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Produksi	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
Alat Bantu Eksplorasi		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja	Overhaul	0% s.d 25%	1
Alat Deteksi		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Sar	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Peraga	Overhaul	0% s.d 25%	2
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2
Unit Peralatan Proses/Produksi		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu	Overhaul	0% s.d 25%	1
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0% s.d 25%	1
Peralatan Olah Raga		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 75% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 65% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi	> 0% s.d 100%	5
	Overhaul		

#### 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

##### Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, pernyataan kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut :

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
4. Apabila sebagian dari Aset Tetap yang dibangun telah selesai dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan; dan
6. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

#### **Pengukuran**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

#### **Penyajian**

KDP disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud**

ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

#### **Pengakuan**

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Batas minimal kapitalisasi Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dan nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung amortisasi.

Adapun tabel masa manfaat Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4-10 Masa Manfaat Aktiva Tak Berwujud**

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	5			ASET LAINNYA	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	Goodwill	20
1	5	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	20
1	5	3	04	Paten	20
1	5	3	05	Software	5

#### 4.4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

##### Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

##### Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### Penyajian

Kewajiban disajikan pada pos kewajiban di neraca yang rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4.18 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah kas yang diterima dari pihak lain namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan daerah, karena belum ada penyerahan barang/jasa yang merupakan hak dari pihak lain.

### **Pengakuan**

Pendapatan diterima dimuka diakui karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun pendapatan ke nilai pendapatan yang merupakan hak pemda pada tahun berjalan. Atas pendapatan yang telah diakui dari kas yang diterima tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

### **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima dimuka adalah sebesar nilai barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

### **Penyajian**

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4.19 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

**5.1.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan LRA adalah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan	1.904.753.604.911,00	1.908.478.394.409,06	2.054.350.628.524,73

Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.908.478.394.409,06. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp145.872.234.115,67 atau 7,10% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp2.054.350.628.524,73. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5-1 Rincian Pendapatan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	186.393.243.802,00	189.504.490.467,06	101,67	223.136.567.608,59
2	Pendapatan Transfer	1.675.547.665.000,00	1.678.782.423.998,00	100,19	1.729.631.641.136,14
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.812.696.109,00	40.191.479.944,00	93,88	101.582.419.780,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.904.753.604.911,00</b>	<b>1.908.478.394.409,06</b>	<b>100,20</b>	<b>2.054.350.628.524,73</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	186.393.243.802,00	189.504.490.467,06	223.136.567.608,59

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp33.632.077.141,53 atau 15,07%. Penurunan tersebut khususnya pada jenis Lain-lain PAD yang Sah.

**Tabel 5-2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah	45.273.760.250,00	41.397.270.293,00	91,44	35.114.763.839,00
2	Retribusi Daerah	19.117.131.398,00	16.881.328.762,00	88,30	14.367.036.052,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.544.375.370,00	4.544.375.373,27	100,00	4.260.079.389,45
4	Lain-lain PAD yang Sah	117.457.976.784,00	126.681.516.038,79	107,85	169.394.688.328,14
<b>Jumlah</b>		<b>186.393.243.802,00</b>	<b>189.504.490.467,06</b>	<b>101,67</b>	<b>223.136.567.608,59</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	45.273.760.250,00	41.397.270.293,00	35.114.763.839,00

Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp41.397.270.293,00 atau 91,44% dari anggaran sebesar Rp45.273.760.250,00 dengan obyek pendapatan pajak sebagai berikut:

**Tabel 5-3 Rincian Pajak Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.515.629.890,00	1.074.779.497,00	70,91	706.656.835,00
2	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.577.515.764,00	130,79	3.027.371.917,00
3	Pajak Hiburan	101.129.000,00	75.014.160,00	74,18	24.377.900,00
4	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.242.045.833,00	103,50	1.222.924.141,00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	14.896.328.061,00	99,31	11.439.546.682,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	133.130.330,00	88,75	75.027.250,00
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	226.185.251,00	113,09	194.652.003,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.001.360,00	2.193.500,00	12,90	1.080.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.090.000.000,00	13.371.289.634,00	83,10	11.135.040.318,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00	5.798.788.263,00	77,32	7.288.086.793,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.273.760.250,00</b>	<b>41.397.270.293,00</b>	<b>91,44</b>	<b>35.114.763.839,00</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Restoran merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 130,79%. Sementara itu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 12,90%.

**Tabel 5-4 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Pajak Hotel	Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
2	Pajak Restoran	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
3	Pajak Hiburan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 H Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
4	Pajak Reklame	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 B Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15	Official Assessment

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
		Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
6	Pajak Parkir	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 C Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/80/430.6.2/2013 tentang nilai perolehan air untuk menghitung pajak air tanah di Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 D Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Official Assessment
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1003/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Bupati Nomor 1 E Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Official Assessment
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	Self Assessment

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- b) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel;
- c) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
- d) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- e) Realisasi Pajak Hotel tahun 2022 adalah sebesar Rp1.074.779.497,00 atau 70,91% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.515.629.890,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-5 Rincian Pajak Hotel**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.515.629.890,00	1.074.779.497,00	70,91	706.656.835,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.515.629.890,00</b>	<b>1.074.779.497,00</b>	<b>70,91</b>	<b>706.656.835,00</b>

Realisasi Pajak Hotel tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp440.850.393,00 atau 70,91% dari target yang telah ditetapkan karena pelaku industri perhotelan masih menghadapi masa pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

2) Pajak Restoran

- a) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
- b) Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman;
- c) Objek pajak restoran adalah fasilitas penyewa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/ food court, toko roti/ bakery, jasa boga katering, stand makanan dan minuman insidental;
- d) Tarif Pajak Restoran untuk omset diatas Rp200.000,00 per hari sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan; dan
- e) Realisasi Pajak Restoran tahun 2022 adalah sebesar Rp4.577.515.764,00 atau 130,79% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-6 Rincian Pajak Restoran**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	4.577.515.764,00	130,79	3.027.371.917,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>4.577.515.764,00</b>	<b>130,79</b>	<b>3.027.371.917,00</b>

Realisasi Pajak Restoran tahun 2022 melebihi dari target sebesar Rp1.077.515.764,00 atau 130,79% dari target yang telah ditetapkan karena karena tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (Makan dan Minum) semakin meningkat dan lebih tertib.

3) Pajak Hiburan

- a) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- b) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan;
- c) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan;
- d) Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
  1. Tontonan film;
  2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  4. Pameran;
  5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  6. Sirkus, akrobat dan sulap;
  7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
  8. Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  10. Pertandingan olahraga.
- e) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar :
  1. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  4. Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  6. Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  7. Permainan bilyar, golf, dan boling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  8. Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  10. Pertandingan olahraga. ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- f) Realisasi Pajak Hiburan tahun 2022 adalah sebesar Rp75.014.160,00 atau 74,18% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp101.129.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-7 Rincian Pajak Hiburan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	101.129.000,00	10.883.000,00	10,76	0,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	0,00	64.131.160,00	0,00	24.377.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.129.000,00</b>	<b>75.014.160,00</b>	<b>74,18</b>	<b>24.377.900,00</b>

Realisasi Pajak Hiburan tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp26.114.840,00 atau 74,18% dari target yang telah ditetapkan karena pelaku industri hiburan masih menghadapi masa pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

4) Pajak Reklame

- a) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- b) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- c) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- d) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- e) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun 2022 adalah sebesar Rp1.242.045.833,00 atau 103,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-8 Rincian Pajak Reklame**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.200.000.000,00	1.242.045.833,00	103,50	1.222.924.141,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.242.045.833,00</b>	<b>103,50</b>	<b>1.222.924.141,00</b>

Realisasi Pajak Reklame tahun 2022 melebihi target sebesar Rp42.045.833,00 atau 103,50% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya intensifikasi penagihan serta optimalisasi kinerja Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

- a) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
- b) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- c) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- d) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud diatas meliputi seluruh pembangkit listrik; dan
- e) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 adalah sebesar Rp14.896.328.061,00 atau 99,31% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-9 Rincian Pajak Penerangan Jalan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000.000,00	14.896.328.061,00	99,31	11.439.546.682,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>14.896.328.061,00</b>	<b>99,31</b>	<b>11.439.546.682,00</b>

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 kurang dari target Rp103.671.939,00 atau 99,31% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan dampak penghematan konsumsi listrik yang bersumber dari PLN, di masa pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19.

6) Pajak Parkir

- a) Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
- b) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
- c) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya;
- d) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- e) Realisasi Pajak Parkir tahun 2022 adalah sebesar Rp133.130.330,00 atau 88,75% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-10 Rincian Pajak Parkir**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Parkir	150.000.000,00	133.130.330,00	88,75	75.027.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>133.130.330,00</b>	<b>88,75</b>	<b>75.027.250,00</b>

Realisasi Pajak Parkir tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp16.869.670,00 atau 88,75% dari target yang telah ditetapkan karena penerimaan pajak parkir terbesar dari RS Dr. H. Koesnadi. Besaran penerimaan pajak parkir sebanding dengan jumlah pengunjung atau pengguna parkirnya.

7) Pajak Air Tanah

- a) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah;

- b) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- c) Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- d) Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah, adalah :
  - 1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
  - 2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- e) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- f) Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2022 adalah sebesar Rp226.185.251,00 atau 113,09% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp200.000.000,00.

**Tabel 5-11 Rincian Pajak Air Tanah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	226.185.251,00	113,09	194.652.003,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>226.185.251,00</b>	<b>113,09</b>	<b>194.652.003,00</b>

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2022 melebihi target sebesar Rp26.185.251,00 atau 113,09% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya karena diberlakukannya tarif baru berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang harga dasar air sebagai dasar penghitungan nilai perolehan Air Tanah.

- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - a) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
  - b) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;
  - c) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
  - d) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
  - e) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 adalah sebesar Rp2.193.500,00 atau 12,90% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp17.001.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-12 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.001.360,00	2.193.500,00	12,90	1.080.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.001.360,00</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>12,90</b>	<b>1.080.000,00</b>

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp14.807.860,00 atau 12,90% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan karena kecilnya potensi mineral bukan logam dan batuan, yang mempunyai izin di Kabupaten Bondowoso hanya 1 (satu) wajib pajak.

- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
  - b) Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan;
  - c) Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
  - d) digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  - e) Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,13% dan 0,2%.
    - NJOP < 1 Milyar : 0,13% x (NJOP – NJOP TKP)
    - NJOP > 1 Milyar : 0,2% x (NJOP – NJOP TKP)
  - f) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sebesar Rp13.371.289.634,00 atau 83,10% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.090.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-13 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.090.000.000,00	13.371.289.634,00	83,10	11.135.040.318,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.090.000.000,00</b>	<b>13.371.289.634,00</b>	<b>83,10</b>	<b>11.135.040.318,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp2.718.710.366,00 atau 83,10% dikarenakan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak;
- Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan;
- Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus); dan
- Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 adalah sebesar Rp5.798.788.263,00 atau 77,32% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-14 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	7.500.000.000,00	5.798.788.263,00	77,32	7.288.086.793,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.500.000.000,00</b>	<b>5.798.788.263,00</b>	<b>77,32</b>	<b>7.288.086.793,00</b>

- Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp1.701.211.737,00 atau 77,32% dari target yang telah ditetapkan karena dampak kenaikan harga BBM mengakibatkan masyarakat cenderung menunda pembelian property dan lebih memprioritaskan pembelian barang primer.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	19.117.131.398,00	16.881.328.762,00	14.367.036.052,00

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp16.881.328.762,00 atau 88,30% dari anggaran sebesar Rp19.117.131.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-15 Retribusi Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	16.626.515.250,00	15.196.510.182,00	91,40	12.640.108.020,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.490.616.148,00	1.035.935.530,00	41,59	719.282.600,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	648.883.050,00	0,00	1.007.645.432,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.117.131.398,00</b>	<b>16.881.328.762,00</b>	<b>88,30</b>	<b>14.367.036.052,00</b>

Dari tabel di atas, Retribusi Jasa Umum merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 91,40%. Rincian Retribusi Daerah selama tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	16.626.515.250,00	15.196.510.182,00	12.640.108.020,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2022 sebesar Rp15.196.510.182,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp16.625.515.250,00 dengan obyek Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

**Tabel 5-16 Obyek Retribusi Jasa Umum**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.000.000.000,00	9.737.318.237,00	88,52	7.289.285.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	119.108.000,00	152.546.000,00	128,07	123.295.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.884.076.000,00	3.770.358.000,00	97,07	3.719.919.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.080.017.000,00	1.165.619.645,00	107,93	1.095.554.647,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	370.814.250,00	223.730.600,00	60,33	242.668.000,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase	Realisasi 2021
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	2.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	21.240.000,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.000.000,00	124.197.700,00	73,06	167.386.173,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.626.515.250,00</b>	<b>15.196.510.182,00</b>	<b>91,40</b>	<b>12.640.108.020,00</b>

**Tabel 5-17 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Retribusi Jasa Umum**

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	Retribusi Pelayanan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran, Los, dan Kios) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan jenis pelayanan, luas, jangka waktu pemakaian tempat dan kelas pasar.</li> <li>- Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, luas, lokasi dan tahun pembuatan dari pemakaian kekayaan daerah.</li> <li>- Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu dan frekuensi penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.</li> </ul>
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6	Retribusi dan/atau Penyediaan Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00.</li> <li>- 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas.</li> <li>- Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.</li> </ul>
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

- a) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di puskesmas, dan UPT Labkesda, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin

- pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat;
- b) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi, penjamin atau institusi yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh RSUD, Puskesmas, UPT. Labkesda dan Rumah Sakit khusus Paru;
  - c) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian serta pelayanan penunjang lainnya di RSUD, di puskesmas, UPT Labkesda dan rumah sakit khusus paru dikecualikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
  - d) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
  - e) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2022 adalah sebesar Rp9.737.318.237,00 atau 88,52% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-18 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	11.000.000.000,00	9.737.318.237,00	88,52	7.289.285.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.737.318.237,00</b>	<b>88,52</b>	<b>7.289.285.200,00</b>

Realisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp1.262.681.763,00 atau 88,52% dari target yang telah ditetapkan karena masyarakat lebih memilih berobat dengan Rawat Jalan daripada Rawat Inap selain itu terdapat pengurangan jumlah Tempat Tidur karena menyesuaikan dengan ketentuan dalam PMK No. 43 Tahun 2019 tentang puskesmas. Pendapatan retribusi rujukan tidak mencapai target karena imbas dari kunjungan Rawat Inap yang menurun. Sedangkan Pendapatan UGD tidak mencapai target karena kebanyakan pasien UGD sebagai peserta JKN/KIS dimana pelayanan UGD masuk dalam pembiayaan kapitasi. Pendapatan persalinan juga tidak memenuhi target karena program Jampersal baru dimulai bulan Agustus – Desember 2022, selain itu jumlah ibu hamil/bersalin, resiko tinggi dan komplikasi bersalin di FKTL atau Rumah Sakit.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
  - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - b) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah;
  - c) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya;
  - d) Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
    1. Perumahan/rumah tangga sebesar Rp1.000,00/bulan;
    2. Perusahaan Pemerintah/swasta sebesar Rp5.000,00/bulan;
    3. Hotel :
      - Hotel berbintang sebesar Rp50.000,00/bulan ;
      - Hotel melati sebesar Rp20.000,00/bulan;
    4. Restoran :
      - Restoran Talam Kencana sebesar Rp10.000,00/bulan;
      - Restoran Talam Selaka sebesar Rp7.500,00/bulan;
      - Restoran Talam Gangsa sebesar Rp5.000,00/bulan;
    5. Toko-toko, grosir, biro travel jasa angkutan Rp5.000,00/bulan ;
    6. Sekolah sebesar Rp3.000,00/bulan;
    7. Perguruan Tinggi sebesar Rp5.000,00/bulan;
    8. Toko dan Pedagang yang ada dalam pasar pemerintah daerah dan swasta sebesar Rp6.000,00/bulan;
    9. Toko-toko yang ada dalam pasar desa sebesar Rp6.000,00/bulan;
    10. Pedagang Kecil sebesar Rp1.000,00/hari;

11. Pedagang Musiman Kecil sebesar Rp2.000,00/hari;
  12. Pedagang Musiman Besar sebesar Rp5.000,00/hari;
  13. Wilayah pemakaman sebesar Rp100.000,00/prosesi;
- e) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2022 adalah sebesar Rp152.546.000,00 atau 128,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp119.108.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-19 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	119.108.000,00	152.546.000,00	128,07	123.295.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>119.108.000,00</b>	<b>152.546.000,00</b>	<b>128,07</b>	<b>123.295.000,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2022 melebihi dari target sebesar Rp33.438.000,00 atau 128,07% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan masyarakat mulai sadar akan kewajibannya.

- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - a) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - b) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
    1. Parkir di tempat umum :
      - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp2000,00 sekali parkir;
      - Bus dan Truk Engkel ditetapkan Rp4.000,00 sekali parkir;
      - Truk Gandengan dan sejenisnya ditetapkan Rp5.000,00 sekali parkir.; dan
      - Sepeda Motor ditetapkan Rp1.000,00 sekali parkir.
    2. Parkir tahunan berlangganan (khusus kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso/Khusus Nomor Polisi Bondowoso) untuk satu jenis kendaraan setiap tahun adalah sebagai berikut:
      - Sepeda Motor ditetapkan Rp25.000,00/tahun;
      - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp50.000,00/tahun; dan
      - Bus dan Truk dan Tronton ditetapkan Rp75.000,00/tahun.
  - d) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2022 adalah sebesar Rp3.770.358.000,00 atau 97,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.884.076.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.884.076.000,00	3.770.358.000,00	97,07	3.719.919.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.884.076.000,00</b>	<b>3.770.358.000,00</b>	<b>97,07</b>	<b>3.719.919.000,00</b>

Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp113.718.000,00 atau 97,07% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

- 4) Retribusi Pelayanan Pasar
  - a) Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
  - b) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Subjek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;
  - c) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan khusus disediakan untuk pedagang, penyediaan

fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Objek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

- d) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019; dan
- e) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 adalah sebesar Rp1.165.619.645,00 atau 107,93% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.080.017.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-21 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	595.860.000,00	576.196.000,00	96,70	524.008.500,00
2	Retribusi Los	148.599.000,00	148.732.880,00	100,09	151.028.900,00
3	Retribusi Kios	335.558.000,00	440.690.765,00	131,33	420.517.247,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.080.017.000,00</b>	<b>1.165.619.645,00</b>	<b>107,93</b>	<b>1.095.554.647,00</b>

Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 lebih dari target sebesar Rp85.602.645,00 atau 107,93% dari target dikarenakan bertambahnya jumlah pedagang dan adanya pembayaran piutang.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- a) Pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
- Besarnya retribusi pengujian berkala (kendaraan lama) ;
1. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat Bruto (JBB) kurang dari 3.500 kg sebesar Rp60.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp30.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
  2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
  3. Kendaraan gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
  4. Biaya numpang uji kendaraan bermotor.
    - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp65.000,00
    - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp75.000,00
  5. Biaya rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor.
    - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp40.000,00
    - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp50.000,00
    - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp60.000,00
  6. Biaya rekomendasi mutasi keluar kendaraan bermotor.
    - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00
    - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp90.000,00
    - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp100.000,00
  7. Biaya rekomendasi mutasi masuk kendaraan bermotor.
    - JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp20.000,00
    - JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp30.000,00
    - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp40.000,00
  8. Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan, dikenakan biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.

9. Kendaraan yang telah didaftarkan pengujiannya tetapi tidak datang dengan alasan yang sah, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.

Besarnya retribusi uji pertama (kendaraan baru berdasarkan pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi) kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
  2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
  3. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp90.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - Biaya jasa uji sebesar Rp60.000,00
    - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
- e) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022 adalah sebesar Rp223.730.600,00 atau 60,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp370.814.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-22 Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	370.814.250,00	223.730.600,00	60,33	242.668.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>370.814.250,00</b>	<b>223.730.600,00</b>	<b>60,33</b>	<b>242.668.000,00</b>

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp147.083.650,00 atau 60,33% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan berkurangnya pengguna jasa uji kelayakan kendaraan sehingga berpengaruh pada perolehan retribusi.

- 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- a) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b) Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:
    1. Besarnya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya;
    2. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
      - Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
      - Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
    3. Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
      - Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00;
      - 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas; dan
      - Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.
  - e) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2022 adalah sebesar Rp1.500.000,00 atau 60,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-23 Rincian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	2.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp1.000.000,00 atau 60,00% dari target dikarenakan menurunnya jumlah obyek pengguna jasa sedot kakus.

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2022 adalah sebesar Rp21.240.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-24 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	21.240.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;
- Subyek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi;
- Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
- Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh; dan
- Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 adalah sebesar Rp 124.197.700,00 atau 73,06% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp170.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-25 Rincian Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.000.000,00	124.197.700,00	73,06	167.386.173,00
<b>Jumlah</b>		<b>170.000.000,00</b>	<b>124.197.700,00</b>	<b>73,06</b>	<b>167.386.173,00</b>

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp45.802.300,00 atau 73,06% dari target.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	2.490.616.148,00	1.035.935.530,00	719.282.600,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 sebesar Rp1.035.935.530,00 atau 41,59% dari anggaran sebesar Rp2.490.616.148,00 dengan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

**Tabel 5-26 Obyek Retribusi Jasa Usaha**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.472.530.148,00	221.963.050,00	15,07	141.785.350,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	303.844.000,00	413.995.900,00	136,25	274.969.500,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	122.400.000,00	129.715.000,00	105,98	168.580.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	570.142.000,00	270.261.580,00	47,40	133.947.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.490.616.148,00</b>	<b>1.035.935.530,00</b>	<b>41,59</b>	<b>719.282.600,00</b>

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan pemakaian ruangan pesta dan rapat pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah dan lain sebagainya;
- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan pemakai kekayaan daerah, dikecualikan terhadap aparatur yang karena jabatannya mendapat fasilitas perumahan dari pemerintah daerah, setiap orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pemakaian kekayaan daerah dilarang merubah bentuk dan fungsi kekayaan daerah tanpa izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- c) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :
1. Pemakaian tanah;
  2. Pemakaian rumah;
  3. Pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
  4. Pemakaian alat berat; dan
  5. Laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
- d) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- e) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp221.963.050,00 atau 15,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.472.530.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-27 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	57.018.000,00	61.260.000,00	107,44	66.750.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	245.000.000,00	35.549.950,00	14,51	20.181.750,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	982.000.000,00	9.000.000,00	0,92	0,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	84.148.258,00	30.450.000,00	36,19	38.455.000,00
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	84.963.890,00	85.703.100,00	100,87	16.398.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.472.530.148,00</b>	<b>221.963.050,00</b>	<b>15,07</b>	<b>141.785.350,00</b>

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp1.250.567.098,00 atau 15,07% dari target.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- a) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
- b) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;
- c) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- d) Tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- e) Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2022 adalah sebesar Rp413.995.900,00 atau 136,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp303.844.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-28 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	303.844.000,00	413.995.900,00	136,25	274.969.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>303.844.000,00</b>	<b>413.995.900,00</b>	<b>136,25</b>	<b>274.969.500,00</b>

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan tahun 2022 melebihi dari target sebesar Rp110.151.900,00 atau 136,25% dari target.

3) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- a) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta;
- b) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan penginapan/ pesanggrahan/villa;
- c) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat pesanggrahan Sumber Wringin yang dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah, yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

- d) Tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;
1. Kelas Arabica satu malam Rp250.000,00
  2. Kelas Robusta satu malam Rp150.000,00
  3. Kelas Mocca satu malam Rp125.000,00
  4. Aula Pesanggrahan satu hari Rp500.000,00
- e) Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun 2022 adalah sebesar nihil atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp21.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-29 Rincian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tahun 2022 sebesar nihil atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp21.700.000,00 dikarenakan kurangnya kunjungan wisatawan.

- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan
- a) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
  - b) Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah;
  - c) Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
  - d) Tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;
    1. Pemakaian Rumah Potong Hewan Rp10.000,00/ekor
    2. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp15.000,00/ekor
  - e) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2022 adalah sebesar Rp129.715.000,00 atau 105,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp122.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-30 Rincian Retribusi Rumah Potong Hewan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	122.400.000,00	129.715.000,00	105,98	168.580.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>122.400.000,00</b>	<b>129.715.000,00</b>	<b>105,98</b>	<b>168.580.000,00</b>

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2022 melebihi dari target sebesar Rp7.315.000,00 atau 105,98% dari target karena meningkatnya kesadaran masyarakat pasca pandemi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan.

- 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- a) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau di kelola oleh pemerintah daerah;
  - b) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah setiap orang atau pribadi atau badan yang masuk dan atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olahraga yang berada dilingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - c) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga :
    1. Taman pemandian alam Tasnan Kecamatan Grujungan;
    2. Wana Wisata Tasnan;
    3. Wisata Kota;
    4. Objek Wisata Sempol;
    5. Arum Jeram Bosamba;

6. Gedung Gelora Pelita;
7. Stadion; dan
8. Tempat olah raga lainnya

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang sediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta;

- d) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Khusus objek wisata pemandian tasnan, arung jeram Bosamba, kawah wurung dan bangunan untuk pengelolaan cafe dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta dan Perum Perhutani; dan
- e) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2022 adalah sebesar Rp270.261.580,00 atau 47,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp570.142.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-31 Rincian Retribusi Rekreasi dan Olahraga**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	570.142.000,00	270.261.580,00	47,40	133.947.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>570.142.000,00</b>	<b>270.261.580,00</b>	<b>47,40</b>	<b>133.947.750,00</b>

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2022 kurang dari target sebesar Rp299.880.420,00 atau 47,40%.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	648.883.050,00	1.007.645.432,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 sebesar Rp648.883.050,00 dengan obyek Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

**Tabel 5-32 Obyek Retribusi Perizinan Tertentu**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	648.883.050,00	0,00	1.007.645.432,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.645.432,00</b>

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
  - b) Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
  - c) Objek Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan meliputi :
    1. Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
    2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
    3. Pelestarian/pemugaran;
    4. Pembuatan duplikat/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
    5. Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan;
    6. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    7. Tidak termasuk didalamnya bangunan fungsi keagamaan (masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng dll), bangunan fungsi sosial dan budaya (bangunan kantor milik negara), kecuali milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha dan bangunan fungsi khusus.
  - d) Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - e) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2022 adalah sebesar Rp648.883.050,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - f)

**Tabel 5-33 Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	648.883.050,00	0,00	1.007.645.432,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.645.432,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.544.375.370,00	4.544.375.373,27	4.260.079.389,45

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 adalah sebesar Rp4.544.375.373,27 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.544.375.370,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp4.260.079.389,45, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp4.544.375.373,27 mengalami kenaikan sebesar Rp284.295.983,82 atau sebesar 6,67% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-34 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.544.375.370,00	4.544.375.373,27	100,00	4.260.079.389,45
<b>Jumlah</b>		<b>4.544.375.370,00</b>	<b>4.544.375.373,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4.260.079.389,45</b>

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun 2022 adalah sebesar Rp4.544.375.373,27 atau 100% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.544.375.370,00 dengan rincian obyek sebagai berikut :

**Tabel 5-35 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.544.375.370,00	4.544.375.373,27	100,00	4.260.079.389,45
<b>Jumlah</b>		<b>4.544.375.370,00</b>	<b>4.544.375.373,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4.260.079.389,45</b>

Penyetoran bagian laba tersebut, diperhitungkan dengan menggunakan metode biaya. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai diakui sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan tersebut merupakan pembagian dividen PT Bank Jatim yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, sesuai Salinan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 51 tanggal 17 Maret 2022 oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn.

Bagian dividen Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp4.544.375.373,27 disetorkan ke Rekening 0311000011 Kas Umum Daerah melalui Nota Kredit Nomor 782 tanggal 14 April 2022.

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	117.457.976.784,00	126.681.516.038,79	169.394.688.328,14

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2022 adalah sebesar Rp126.681.516.038,79 atau 107,85% dari anggarannya sebesar Rp117.457.976.784,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp169.394.688.328,14 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp126.681.516.038,79 mengalami penurunan sebesar Rp42.713.172.289,35 atau 25,22% dengan Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 5-36 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	260.660.000,00	488.536.336,00	187,42	564.967.356,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.300.000,00	1.422.350.000,00	33.077,91	470.147.000,00
3	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.417.971.685,28	141,80	1.330.608.414,92
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	38.133.113,00	12.887.500,00	33,80	4.412.600,00
5	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.441.719.547,94	108,83	2.923.116.438,15
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.009.868.041,00	56.184.972,00	5,56	4.283.187.274,37

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.507.900,00	362.808.446,49	2.197,79	168.330.468,54
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.978.505,00	12.878.434,00	129,06	12.475.242,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	84.165.500,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	17.991.636,00	15.846.536,00	88,08	40.675.330,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	66.967.589,00	1.435.583.169,96	2.143,70	114.553.878,00
13	Pendapatan BLUD	110.025.620.000,00	115.930.583.911,12	105,37	159.482.214.326,16
<b>Jumlah</b>		<b>117.457.976.784,00</b>	<b>126.681.516.038,79</b>	<b>107,85</b>	<b>169.394.688.328,14</b>

- 1) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 adalah sebesar Rp488.536.336,00 atau 187,42.% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp260.660.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	227.778.421,00	0,00	322.260.989,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	260.660.000,00	260.757.915,00	100,04	242.706.367,00
<b>Jumlah</b>		<b>260.660.000,00</b>	<b>488.536.336,00</b>	<b>187,42</b>	<b>564.967.356,00</b>

- a) Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5-38 Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	227.778.421,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	0,00	20.572.839,00
3	Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00	0,00	301.688.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>227.778.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.260.989,00</b>

- b) Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5-39 Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Hewan	47.745.000,00	47.751.000,00	100,01	20.000.000,00
2	Hasil Penjualan Tanaman	212.915.000,00	213.006.915,00	100,04	222.706.367,00
<b>Jumlah</b>		<b>260.660.000,00</b>	<b>260.757.915,00</b>	<b>100,04</b>	<b>242.706.367,00</b>

- 2) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.422.350.000,00 atau 33,077,91% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.300.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-40 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	4.300.000,00	1.422.350.000,00	33.077,91	470.147.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>1.422.350.000,00</b>	<b>33.077,91</b>	<b>470.147.000,00</b>

- 3) Realisasi Jasa Giro tahun 2022 adalah sebesar Rp1.417.971.685,28 atau 141,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-41 Rincian Jasa Giro**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.417.971.685,28	141,80	1.330.608.414,92
<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.417.971.685,28</b>	<b>141,80</b>	<b>1.330.608.414,92</b>

- 4) Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2022 adalah sebesar Rp12.887.500,00 atau 33,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp38.133.113,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-42 Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	38.133.113,00	12.887.500,00	33,80	4.412.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.133.113,00</b>	<b>12.887.500,00</b>	<b>33,80</b>	<b>4.412.600,00</b>

- 5) Realisasi Pendapatan Bunga tahun 2022 adalah sebesar Rp5.441.719.547,94 atau 108,83% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-43 Rincian Pendapatan Bunga**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.441.719.547,94	108,83	2.923.116.438,15
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.441.719.547,94</b>	<b>108,83</b>	<b>2.923.116.438,15</b>

- 6) Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp56.184.972,00 atau 5,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.009.868.041,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5- 44 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.009.868.041,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	56.184.972,00	0,00	4.283.187.274,37
<b>Jumlah</b>		<b>1.009.868.041,00</b>	<b>56.184.972,00</b>	<b>5,56</b>	<b>4.283.187.274,37</b>

- 7) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2022 adalah sebesar Rp362.808.446,49 atau 2.197,79% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.507.900,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-45 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.507.900,00	362.808.446,49	2.197,79	168.330.468,54
<b>Jumlah</b>		<b>16.507.900,00</b>	<b>362.808.446,49</b>	<b>2.197,79</b>	<b>168.330.468,54</b>

- 8) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp12.878.434,00 atau 129,06% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.978.505,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-46 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.978.505,00	12.878.434,00	129,06	12.475.242,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.978.505,00</b>	<b>12.878.434,00</b>	<b>129,06</b>	<b>12.475.242,00</b>

- 9) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2022 adalah nihil atau 0,00 % dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.950.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-47 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 10) Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun 2022 adalah sebesar Rp84.165.500,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-48 Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	84.165.500,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>84.165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11) Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp15.846.536,00 atau 88,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp17.991.636,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-49 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	17.991.636,00	15.846.536,00	88,08	40.675.330,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.991.636,00</b>	<b>15.846.536,00</b>	<b>88,08</b>	<b>40.675.330,00</b>

12) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 adalah sebesar Rp1.435.583.169,96 atau 2.143,70% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp66.967.589,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-50 Rincian Pendapatan dari Pengembalian**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	66.557.589,00	39.471.562,00	59,30	113.183.878,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	410.000,00	820.000,00	200,00	1.370.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	7.611,00	0,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	22.834,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	5.820.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	454.410.475,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	2.469.988,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	14.134.764,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	381.600.000,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	13.640.593,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	51.900.320,66	0,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	9.653.500,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	18.160.000,00	0,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	3.308.182,00	0,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00	1.997.647,00	0,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00	51.610.504,49	0,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	386.555.188,81	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.967.589,00</b>	<b>1.435.583.169,96</b>	<b>2.143,70</b>	<b>114.553.878,00</b>

13) Realisasi Pendapatan BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp115.930.583.911,12 atau 105,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp110.025.620.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-51 Rincian Pendapatan BLUD**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	110.025.620.000,00	115.930.583.911,12	105,37	159.482.214.326,16
	<b>Jumlah</b>	<b>110.025.620.000,00</b>	<b>115.930.583.911,12</b>	<b>105,37</b>	<b>159.482.214.326,16</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>1.675.547.665.000,00</b>	<b>1.678.782.423.998,00</b>	<b>1.729.631.641.136,14</b>

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang secara penganggaran dan realisasi hanya terdapat pada BPKAD selaku PPKD. Proses transfer dari Pemerintah Pusat juga langsung ke Rekening Kas Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp1.678.782.423.998,00 dan anggarannya sebesar Rp1.675.547.665.000,00 atau 100,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.729.631.641.136,14 realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp1.678.782.423.998,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.849.217.138,14 atau sebesar 2,94%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening Pendapatan Transfer tahun 2022 :

**Tabel 5-52 Rincian Pendapatan Transfer**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.312.786.233.620,00	1.297.910.080.036,00	98,87	1.323.758.092.095,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	239.393.195.000,00	239.393.195.000,00	100,00	273.759.249.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.368.236.380,00	141.479.148.962,00	114,68	132.114.300.041,14
	<b>Jumlah</b>	<b>1.675.547.665.000,00</b>	<b>1.678.782.423.998,00</b>	<b>100,19</b>	<b>1.729.631.641.136,14</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.312.786.233.620,00</b>	<b>1.297.910.080.036,00</b>	<b>1.323.758.092.095,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.297.910.080.036,00 dengan anggaran sebesar Rp1.312.786.233.620,00 atau 98,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2021 sebesar Rp1.323.758.092.095,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar Rp1.297.910.080.036,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.848.012.059,00 atau sebesar 1,95%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-53 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	124.623.041.000,00	163.050.876.593,00	130,84	142.767.234.998,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	829.617.676.619,00	829.591.176.619,00	100,00	843.159.769.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	113.136.763.000,00	95.866.127.142,00	84,73	136.481.721.719,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	245.408.753.001,00	209.401.899.682,00	85,33	201.349.366.378,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.312.786.233.620,00</b>	<b>1.297.910.080.036,00</b>	<b>98,87</b>	<b>1.323.758.092.095,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>124.623.041.000,00</b>	<b>163.050.876.593,00</b>	<b>142.767.234.998,00</b>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 adalah sebesar Rp163.050.876.593,00 atau 130,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp124.623.041.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-54 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.995.111.000,00	11.959.221.377,00	132,95	14.737.518.008,00
2	DBH PPh Pasal 21	12.301.150.000,00	13.241.816.304,00	107,65	15.331.599.041,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.694.512.000,00	3.213.932.805,00	189,67	2.260.731.422,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	48.444.112.000,00	51.881.521.749,00	107,10	46.096.899.953,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	45.227.568.000,00	72.522.081.005,00	160,35	57.368.872.546,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.873.483.000,00	4.175.690.966,00	145,32	1.087.707.787,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	262.068.000,00	383.745.307,00	146,43	370.937.851,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.321.200.000,00	3.049.142.985,00	131,36	3.405.465.855,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	545.526.000,00	665.413.095,00	121,98	749.883.385,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>124.623.041.000,00</b>	<b>163.050.876.593,00</b>	<b>130,84</b>	<b>142.767.234.998,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.2	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>829.617.676.619,00</b>	<b>829.591.176.619,00</b>	<b>843.159.769.000,00</b>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 adalah sebesar Rp829.591.176.619,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp829.617.676.619,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-55 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAU	829.617.676.619,00	829.591.176.619,00	100,00	843.159.769.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>829.617.676.619,00</b>	<b>829.591.176.619,00</b>	<b>100,00</b>	<b>843.159.769.000,00</b>

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.3	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>113.136.763.000,00</b>	<b>95.866.127.142,00</b>	<b>136.481.721.719,00</b>

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2022 adalah sebesar Rp95.866.127.142,00 atau 84,73% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp113.136.763.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-56 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.711.200.000,00	2.583.120.620,00	95,28	1.476.295.430,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.479.398.000,00	16.626.186.147,00	95,12	20.371.416.284,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.573.198.000,00	8.195.534.772,00	85,61	8.460.997.456,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	436.587.625,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	0,00	0,00	0,00	556.762.551,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
6	Reguler- Perpustakaan Daerah DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	1.139.800.000,00	0,00	5.251.433.145,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.957.075.000,00	4.882.885.853,00	98,50	2.521.930.176,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	28.803.504.744,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	200.250.000,00	2.179.621.770,00	1.088,45	227.600.500,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	299.145.300,00
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9.216.128.000,00	7.587.281.115,00	82,33	786.373.036,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.512.478.000,00	4.140.871.761,00	91,76	3.480.270.150,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.438.634.327,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	8.341.896.000,00	5.428.805.830,00	65,08	3.698.703.004,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.227.214.000,00	5.011.666.000,00	80,48	9.472.663.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.526.126.000,00	11.832.644.000,00	87,48	8.927.233.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.471.206.000,00	2.571.982.000,00	74,09	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.483.313.000,00	7.483.313.000,00	100,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.850.227.021,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.028.882.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.726.115.000,00	5.189.881.000,00	67,17	9.888.047.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	859.000.000,00	851.390.750,00	99,11	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	8.561.971.000,00	5.785.508.149,00	67,57	1.154.542.370,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.661.677.000,00	3.193.684.375,00	87,22	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.262.233.000,00	1.181.950.000,00	93,64	0,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	3.366.285.000,00	0,00	0,00	0,00
27	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.906.757.600,00
28	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.443.716.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>113.136.763.000,00</b>	<b>95.866.127.142,00</b>	<b>84,73</b>	<b>136.481.721.719,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	245.408.753.001,00	209.401.899.682,00	201.349.366.378,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2022 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2022 adalah sebesar Rp209.401.899.682,00 atau 85,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp245.408.753.001,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-57 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	71.499.680.000,00	58.688.650.397,00	82,08	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	126.669.360.000,00	105.749.456.785,00	83,48	136.216.200.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.784.000.000,00	3.669.499.500,00	63,44	1.512.000.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	208.928.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	20.188.200.000,00	20.026.780.000,00	99,20	21.927.133.800,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.913.700.000,00	2.913.700.000,00	100,00	19.557.400.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.647.406.000,00	10.720.314.642,00	404,94	13.587.329.255,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.483.320.643,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	589.588.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.101.357.645,00	4.101.357.645,00	100,00	4.112.128.371,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	401.665.000,00	401.665.000,00	100,00	377.709.800,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	2.133.458.152,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.152.890.100,00	1.152.890.100,00	100,00	945.557.000,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	344.000.113,00	344.000.113,00	100,00	372.462.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	187.310.000,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	299.098.500,00	299.098.500,00	100,00	211.750.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.334.487.000,00	1.334.487.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>245.408.753.001,00</b>	<b>209.401.899.682,00</b>	<b>85,33</b>	<b>201.349.366.378,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>239.393.195.000,00</b>	<b>239.393.195.000,00</b>	<b>273.759.249.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp239.393.195.000,00 dengan anggaran sebesar Rp239.393.195.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2021 sebesar Rp273.759.249.000,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2022 sebesar Rp239.393.195.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.366.054.000,00 atau sebesar 12,55%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-58 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	7.725.363.000,00	7.725.363.000,00	100,00	37.542.241.000,00
2	Dana Desa	231.667.832.000,00	231.667.832.000,00	100,00	236.217.008.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>239.393.195.000,00</b>	<b>239.393.195.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>273.759.249.000,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>7.725.363.000,00</b>	<b>7.725.363.000,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 adalah sebesar Rp7.725.363.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.725.363.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-59 Rincian Dana Insentif Daerah (DID)**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DID	7.725.363.000,00	7.725.363.000,00	100,00	37.542.241.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.725.363.000,00</b>	<b>7.725.363.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>

		<b>Anggaran 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>(Rp)</b>
5.1.1.2.2.2	Dana Desa	<u>231.667.832.000,00</u>	<u>231.667.832.000,00</u>	<u>236.217.008.000,00</u>

Realisasi Dana Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp231.667.832.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp231.667.832.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-60 Rincian Dana Desa**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Desa	231.667.832.000,00	231.667.832.000,00	100,00	236.217.008.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>231.667.832.000,00</b>	<b>231.667.832.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>236.217.008.000,00</b>

		<b>Anggaran 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>(Rp)</b>
5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>123.368.236.380,00</u>	<u>141.479.148.962,00</u>	<u>132.114.300.041,14</u>

Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp141.479.148.962,00 dengan anggaran sebesar Rp123.368.236.380,00 atau 114,68%. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 sebesar Rp132.114.300.041,14, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 sebesar Rp141.479.148.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.364.848.920,86 atau sebesar 7,09%. Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-61 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	102.564.713.380,00	120.622.425.962,00	117,61	121.070.561.684,00
2	Bantuan Keuangan	20.803.523.000,00	20.856.723.000,00	100,26	11.043.738.357,14
	<b>Jumlah</b>	<b>123.368.236.380,00</b>	<b>141.479.148.962,00</b>	<b>114,68</b>	<b>132.114.300.041,14</b>

		<b>Anggaran 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>(Rp)</b>
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	<u>102.564.713.380,00</u>	<u>120.622.425.962,00</u>	<u>121.070.561.684,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2022 adalah sebesar Rp120.622.425.962,00 atau 117,61% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp102.564.713.380,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-62 Rincian Pendapatan Bagi Hasil**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.077.894.000,00	31.777.340.120,00	121,86	36.399.942.373,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.500.526.000,00	13.566.007.720,00	142,79	14.232.193.517,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.852.122.000,00	24.319.400.920,00	116,63	24.371.334.335,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	306.618.000,00	431.748.240,00	140,81	309.214.240,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	45.827.553.380,00	50.527.928.962,00	110,26	45.757.877.219,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.564.713.380,00</b>	<b>120.622.425.962,00</b>	<b>117,61</b>	<b>121.070.561.684,00</b>

		<b>Anggaran 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>(Rp)</b>
5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	<u>20.803.523.000,00</u>	<u>20.856.723.000,00</u>	<u>11.043.738.357,14</u>

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp20.856.723.000,00 atau 100,26.% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp20.803.523.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-63 Rincian Bantuan Keuangan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.803.523.000,00	20.856.723.000,00	100,26	11.043.738.357,14
	<b>Jumlah</b>	<b>20.803.523.000,00</b>	<b>20.856.723.000,00</b>	<b>100,26</b>	<b>11.043.738.357,14</b>

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur berupa bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan infrastruktur di Jawa Timur.

Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 412.2/207/112.3/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/747.4/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 045.2/226/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
4. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 900/2478/201.2/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
5. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 140/14445/112.2/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
6. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/6849.4/101.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2022 adalah sebesar Rp20.856.723.000,00 atau 100,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp20.803.523.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-64 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan	5.611.200.000,00	5.611.200.000,00	100,00	5.611.200.000,00
2	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS selama 4 bulan	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	408.000.000,00
3	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 4 bulan Jenjang Pendidikan TK sebanyak 21 orang	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	261.000.000,00
4	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 4 bulan Jenjang Pendidikan SMP sebanyak 3 orang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5	Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
6	Pemenuhan Honor 157 orang Perawat Ponkesdes selama 12 bulan	2.920.200.000,00	2.920.200.000,00	100,00	2.920.200.000,00
7	Pemenuhan Honor 5 orang Dokter Puskesmas sesuai Standar selama 12 bulan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	225.000.000,00
8	Bantuan Transport Kunjungan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	314.000.000,00	314.000.000,00	100,00	351.680.000,00
9	Pendamping Kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	10.161.000,00	10.161.000,00	100,00	0,00
10	Pendampingan Ponkestren	72.733.000,00	72.733.000,00	100,00	121.029.000,00
11	Pendampingan Pencegahan Stunting	238.954.000,00	238.954.000,00	100,00	254.000.000,00
12	Bantuan keuangan tambahan penghasilan aparaturnya perangkat desa	1.079.275.000,00	828.475.000,00	76,76	0,00
13	Jatim PUSPA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	90.000.000,00
14	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru TK/ PAUD Non PNS untuk 1 bulan sebanyak 170 orang	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
15	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS (jenjang TK SD dan SMP) selama 3 bulan	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
16	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru TK/ PAUD Non PNS untuk 3 bulan sebanyak 170 orang	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00
17	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS (jenjang TK SD dan SMP) selama 5 bulan	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
18	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,00	0,00	0,00	173.486.500,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Propinsi)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
20	Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)	0,00	0,00	0,00	357.142.857,14
21	( TMMMD ) Tentara Manunggal Masuk Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
22	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke 76 Prop Jatim Th.2021	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.803.523.000,00</b>	<b>20.856.723.000,00</b>	<b>100,26</b>	<b>11.043.738.357,14</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>42.812.696.109,00</b>	<b>40.191.479.944,00</b>	<b>101.582.419.780,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 adalah sebesar Rp40.191.479.944,00 atau 93,88% dari anggarannya sebesar Rp42.812.696.109,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp101.582.419.780,00, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rp40.191.479.944,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.390.939.836,00 atau 60,43%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022 tersebut merupakan pendapatan dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-65 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	11.601.665.000,00	11.601.665.000,00	100,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31.211.031.109,00	28.589.814.944,00	91,60	101.582.419.780,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.812.696.109,00</b>	<b>40.191.479.944,00</b>	<b>93,88</b>	<b>101.582.419.780,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>11.601.665.000,00</b>	<b>11.601.665.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Hibah digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan. Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp11.601.665.000,00 atau 100,00.% dari anggarannya sebesar Rp11.601.665.000,00 dengan rincian adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-66 Rincian Pendapatan Hibah**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.601.665.000,00	11.601.665.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.601.665.000,00</b>	<b>11.601.665.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.3.2</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>31.211.031.109,00</b>	<b>28.589.814.944,00</b>	<b>101.582.419.780,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 adalah sebesar Rp28.589.814.944,00 atau 91,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp31.211.031.109,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-67 Rincian Pendapatan Lainnya**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	63.562.244.031,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	31.211.031.109,00	28.589.814.944,00	91,60	38.020.175.749,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.211.031.109,00</b>	<b>28.589.814.944,00</b>	<b>91,60</b>	<b>101.582.419.780,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.3.2.1 Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	63.562.244.031,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-68 Rincian Lain-lain Pendapatan**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	63.562.136.781,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	107.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.562.244.031,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.3.2.2 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	31.211.031.109,00	28.589.814.944,00	38.020.175.749,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tahun 2022 adalah sebesar Rp28.589.814.944,00 atau 91,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp31.211.031.109,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-69 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	31.211.031.109,00	28.589.814.944,00	91,60	38.020.175.749,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.211.031.109,00</b>	<b>28.589.814.944,00</b>	<b>91,60</b>	<b>38.020.175.749,00</b>

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp28.589.814.944,00 atau 91,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp31.211.031.109,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-70 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN FKTP Curahdami	1.396.573.970,00	1.287.478.630,00	92,19	1.686.682.200,00
2	Dana Kapitasi JKN FKTP Binakal	815.610.910,00	727.370.910,00	89,18	986.915.100,00
3	Dana Kapitasi JKN FKTP Grujugan	1.946.838.210,00	1.800.078.890,00	92,46	2.171.191.200,00
4	Dana Kapitasi JKN FKTP Maesan	1.970.783.713,00	1.803.734.613,00	91,52	2.482.766.400,00
5	Dana Kapitasi JKN FKTP Tamanan	1.789.113.122,00	1.643.830.342,00	91,88	2.269.747.200,00
6	Dana Kapitasi JKN FKTP Jambesari	1.462.592.358,00	1.353.122.978,00	92,52	1.763.802.300,00
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Pujer	1.535.589.621,00	1.449.346.856,00	94,38	2.080.857.361,00
8	Dana Kapitasi JKN FKTP Tlogosari	1.652.945.441,00	1.342.261.661,00	81,20	2.440.747.150,00
9	Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosari	1.781.024.910,00	1.460.312.030,00	81,99	2.061.447.600,00
10	Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen	1.107.686.449,00	965.658.169,00	87,18	1.566.099.300,00
11	Dana Kapitasi JKN FKTP Nangkaan	1.131.345.565,00	1.108.627.985,00	97,99	1.388.880.150,00
12	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukosari	724.972.961,00	617.163.201,00	85,13	759.695.450,00
13	Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin	1.344.107.183,00	1.284.914.943,00	95,60	1.567.384.050,00
14	Dana Kapitasi JKN FKTP Klabang	641.443.651,00	596.613.331,00	93,01	1.184.782.500,00
15	Dana Kapitasi JKN FKTP Sempol	915.911.375,00	910.960.575,00	99,46	1.062.055.200,00
16	Dana Kapitasi JKN FKTP Prajekan	1.019.630.565,00	954.576.885,00	93,62	698.030.100,00
17	Dana Kapitasi JKN FKTP Botolinggo	1.032.434.738,00	942.792.058,00	91,32	1.306.850.400,00
18	Dana Kapitasi JKN FKTP Cermee	1.960.162.542,00	1.848.648.842,00	94,31	2.434.614.600,00
19	Dana Kapitasi JKN FKTP Kotakulon	579.063.408,00	533.058.968,00	92,06	641.779.688,00
20	Dana Kapitasi JKN FKTP Kademangan	593.284.057,00	555.167.757,00	93,58	685.257.600,00
21	Dana Kapitasi JKN FKTP Tenggarang	1.798.362.706,00	1.680.406.966,00	93,44	1.880.242.500,00
22	Dana Kapitasi JKN FKTP Tegalampel	958.093.576,00	901.420.576,00	94,08	1.052.769.900,00
23	Dana Kapitasi JKN FKTP Taman Krocok	587.465.801,00	538.565.401,00	91,68	704.786.650,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
24	Dana Kapitasi JKN FKTP Wringin	1.555.817.012,00	1.413.555.472,00	90,86	1.838.744.400,00
25	Dana Kapitasi JKN FKTP Pakem	910.177.265,00	870.146.905,00	95,60	1.304.046.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.211.031.109,00</b>	<b>28.589.814.944,00</b>	<b>91,60</b>	<b>38.020.175.749,00</b>

**Tabel 5-71 Rincian Belanja Daerah dan Belanja Transfer**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Daerah	1.785.729.436.341,00	1.569.343.979.797,66	87,88	1.607.910.188.438,37
2	Belanja Transfer	331.619.279.787,00	331.565.452.287,00	99,98	355.891.616.869,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.117.348.716.128,00</b>	<b>1.900.909.432.084,66</b>	<b>89,78</b>	<b>1.963.801.805.307,37</b>

Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp1.900.909.432.084,66 atau 89,78% dari anggarannya sebesar Rp2.117.348.716.128,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.963.801.805.307,37, realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp1.900.909.432.084,66 mengalami penurunan sebesar Rp62.892.373.222,71 atau 3,20% dengan jenis belanja sebagai berikut :

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	<u>1.785.729.436.341,00</u>	<u>1.569.343.979.797,66</u>	<u>1.607.910.188.438,37</u>

Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp1.569.343.979.797,66 atau 87,88% dari anggarannya sebesar Rp1.785.729.436.341,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp1.607.910.188.438,37, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp1.569.343.979.797,66 mengalami penurunan sebesar Rp38.566.208.640,71 atau 2,40% dengan jenis belanja daerah sebagai berikut :

**Tabel 5-72 Rincian Belanja Daerah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.564.265.715.283,00	1.377.797.615.369,66	88,08	1.410.349.479.042,56
2	Belanja Modal	218.487.359.953,00	190.396.577.000,00	87,14	196.554.645.695,81
3	Belanja Tidak Terduga	2.976.361.105,00	1.149.787.428,00	38,63	1.006.063.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.785.729.436.341,00</b>	<b>1.569.343.979.797,66</b>	<b>87,88</b>	<b>1.607.910.188.438,37</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	<u>1.564.265.715.283,00</u>	<u>1.377.797.615.369,66</u>	<u>1.410.349.479.042,56</u>

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp1.377.797.615.369,66 atau 88,08% dari anggarannya sebesar Rp1.564.265.715.283,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp1.410.349.479.042,56, realisasi Belanja Operasi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp32.551.863.672,90 atau 2,31% dengan obyek belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-73 Rincian Belanja Operasi**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	896.049.525.332,00	787.984.360.335,00	87,94	799.417.410.997,00
2	Belanja Barang dan Jasa	544.585.852.641,00	475.353.826.339,66	87,29	444.016.600.988,70
3	Belanja Subsidi	2.183.163.800,00	2.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00
4	Belanja Hibah	96.551.774.010,00	93.264.683.855,00	96,60	130.514.844.220,06
5	Belanja Bantuan Sosial	24.895.399.500,00	19.011.581.040,00	76,37	35.217.459.036,80
<b>Jumlah</b>		<b>1.564.265.715.283,00</b>	<b>1.377.797.615.369,66</b>	<b>88,08</b>	<b>1.410.349.479.042,56</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	<u>896.049.525.332,00</u>	<u>787.984.360.335,00</u>	<u>799.417.410.997,00</u>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp787.984.360.335,00 atau 87,94% dari anggaran sebesar Rp896.049.525.332,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp799.417.410.997,00, realisasi penurunan sebesar Rp11.433.050.662,00 atau 1,43% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-74 Rincian Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	613.989.068.520,00	541.820.446.629,00	88,25	533.890.828.149,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	77.941.674.815,00	73.252.696.823,00	93,98	70.973.126.222,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.238.286.803,00	140.729.088.678,00	82,67	162.677.059.160,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.485.153.150,00	18.824.978.362,00	96,61	18.757.496.275,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	441.562.044,00	345.738.286,00	78,30	327.115.189,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	917.000.000,00	876.650.000,00	95,60	677.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	13.036.780.000,00	12.134.761.557,00	93,08	12.114.786.002,00
<b>Jumlah</b>		<b>896.049.525.332,00</b>	<b>787.984.360.335,00</b>	<b>87,94</b>	<b>799.417.410.997,00</b>

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Pegawai tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp896.049.525.332,00 dan realisasi sebesar Rp787.984.360.335,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp541.820.446.629,00 atau 88,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp613.989.068.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-75 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	449.187.754.233,00	405.506.419.329,00	90,28	406.088.568.053,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.433.715.218,00	37.923.979.452,00	89,37	38.119.256.192,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.922.468.000,00	5.444.899.750,00	91,94	6.282.043.550,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.386.108.510,00	24.765.824.780,00	90,43	24.816.800.318,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.136.138.750,00	8.716.041.750,00	71,82	7.927.866.680,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.410.040.784,00	23.279.674.097,00	88,15	22.966.338.010,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.176.464.196,00	2.171.151.545,00	51,99	1.988.909.477,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.054.840,00	5.719.552,00	56,88	5.713.588,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.833.021.284,00	30.658.272.435,00	73,29	22.379.426.182,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.125.565.023,00	837.117.679,00	74,37	828.874.616,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.367.737.682,00	2.511.346.260,00	74,57	2.487.031.483,00
<b>Jumlah</b>		<b>613.989.068.520,00</b>	<b>541.820.446.629,00</b>	<b>88,25</b>	<b>533.890.828.149,00</b>

- a) Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp405.506.419.329,00 atau 90,28% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp449.187.754.233,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-76 Rincian Belanja Gaji Pokok ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	407.133.601.933,00	375.641.019.229,00	92,26	395.214.323.653,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.054.152.300,00	29.865.400.100,00	71,02	10.874.244.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>449.187.754.233,00</b>	<b>405.506.419.329,00</b>	<b>90,28</b>	<b>406.088.568.053,00</b>

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp37.923.979.452,00 atau 89,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp42.433.715.218,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-77 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.989.808.338,00	35.123.656.608,00	92,46	37.153.153.548,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.443.906.880,00	2.800.322.844,00	63,01	966.102.644,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.433.715.218,00</b>	<b>37.923.979.452,00</b>	<b>89,37</b>	<b>38.119.256.192,00</b>

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp5.444.899.750,00 atau 91,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.922.468.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-78 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.922.468.000,00	5.444.899.750,00	91,94	6.282.043.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.922.468.000,00</b>	<b>5.444.899.750,00</b>	<b>91,94</b>	<b>6.282.043.550,00</b>

- d) Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp24.765.824.780,00 atau 90,43% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp27.386.108.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-79 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.386.108.510,00	24.765.824.780,00	90,43	24.816.800.318,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.386.108.510,00</b>	<b>24.765.824.780,00</b>	<b>90,43</b>	<b>24.816.800.318,00</b>

- e) Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp8.716.041.750,00 atau 71,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp12.136.138.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-80 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.284.396.050,00	6.843.426.750,00	73,71	7.240.366.680,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.851.742.700,00	1.872.615.000,00	65,67	687.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.136.138.750,00</b>	<b>8.716.041.750,00</b>	<b>71,82</b>	<b>7.927.866.680,00</b>

- f) Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp23.279.674.097,00 atau 88,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp26.410.040.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-81 Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	23.859.434.224,00	21.176.959.397,00	88,76	22.216.863.430,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.550.606.560,00	2.102.714.700,00	82,44	749.474.580,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.410.040.784,00</b>	<b>23.279.674.097,00</b>	<b>88,15</b>	<b>22.966.338.010,00</b>

- g) Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.171.151.545,00 atau 51,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.176.464.196,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-82 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.176.464.196,00	2.171.151.545,00	51,99	1.988.909.477,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.176.464.196,00</b>	<b>2.171.151.545,00</b>	<b>51,99</b>	<b>1.988.909.477,00</b>

- h) Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp5.719.552,00 atau 56,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp10.054.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-83 Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.165.424,00	5.231.278,00	57,08	5.538.191,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	889.416,00	488.274,00	54,90	175.397,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.054.840,00</b>	<b>5.719.552,00</b>	<b>56,88</b>	<b>5.713.588,00</b>

- i) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp30.658.272.435,00 atau 73,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp41.833.021.284,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-84 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	40.170.205.985,00	29.504.578.911,00	73,45	22.045.655.950,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.662.815.299,00	1.153.693.524,00	69,38	333.770.232,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.833.021.284,00</b>	<b>30.658.272.435,00</b>	<b>73,29</b>	<b>22.379.426.182,00</b>

- j) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp837.117.679,00 atau 74,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.125.565.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-85 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.032.444.103,00	769.735.329,00	74,55	807.134.576,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.120.920,00	67.382.350,00	72,36	21.740.040,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.125.565.023,00</b>	<b>837.117.679,00</b>	<b>74,37</b>	<b>828.874.616,00</b>

- k) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.511.346.260,00 atau 74,57% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.367.737.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-86 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.078.379.223,00	2.331.763.278,00	75,75	2.421.813.985,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	289.358.459,00	179.582.982,00	62,06	65.217.498,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.367.737.682,00</b>	<b>2.511.346.260,00</b>	<b>74,57</b>	<b>2.487.031.483,00</b>

- 2) Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp73.252.696.823,00 atau 93,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp77.941.674.815,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-87 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	76.381.674.815,00	71.706.896.823,00	93,88	69.418.126.222,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.560.000.000,00	1.545.800.000,00	99,09	1.555.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>77.941.674.815,00</b>	<b>73.252.696.823,00</b>	<b>93,98</b>	<b>70.973.126.222,00</b>

- a) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp71.706.896.823,00 atau 93,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp76.381.674.815,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-88 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	76.381.674.815,00	71.706.896.823,00	93,88	69.418.126.222,00
<b>Jumlah</b>		<b>76.381.674.815,00</b>	<b>71.706.896.823,00</b>	<b>93,88</b>	<b>69.418.126.222,00</b>

- b) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp1.545.800.000,00 atau 99,09% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.560.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-89 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.560.000.000,00	1.545.800.000,00	99,09	1.555.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.560.000.000,00</b>	<b>1.545.800.000,00</b>	<b>99,09</b>	<b>1.555.000.000,00</b>

- 3) Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp140.729.088.678,00 atau 82,67% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp170.238.286.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-90 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	138.051.347.115,00	116.109.500.220,00	84,11	132.796.055.460,00
2	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.497.700,00	0,00	0,00	246.623.200,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.246.750.500,00	1.265.250.000,00	20,25	1.446.250.000,00
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	25.837.021.488,00	23.264.585.847,00	90,04	26.327.544.852,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja Honorarium	93.670.000,00	89.752.611,00	95,82	730.330.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.122.411.168,00
7	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	7.844.480,00
<b>Jumlah</b>		<b>170.238.286.803,00</b>	<b>140.729.088.678,00</b>	<b>82,67</b>	<b>162.677.059.160,00</b>

- a) Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tahun 2022 adalah sebesar Rp116.109.500.220,00 atau 84,11% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp138.051.347.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-91 Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja TPG PNSD	138.051.347.115,00	116.109.500.220,00	84,11	132.796.055.460,00
<b>Jumlah</b>		<b>138.051.347.115,00</b>	<b>116.109.500.220,00</b>	<b>84,11</b>	<b>132.796.055.460,00</b>

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tahun 2022 adalah sebesar nihil dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.497.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-92 Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja TKG PNSD	9.497.700,00	0,00	0,00	246.623.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.497.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.623.200,00</b>

- c) Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.265.250.000,00 atau 20,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.246.750.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-93 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	6.246.750.500,00	1.265.250.000,00	20,25	1.446.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.246.750.500,00</b>	<b>1.265.250.000,00</b>	<b>20,25</b>	<b>1.446.250.000,00</b>

- d) Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp23.264.585.847,00 atau 90,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp25.837.021.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-94 Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	25.837.021.488,00	23.264.585.847,00	90,04	26.327.544.852,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.837.021.488,00</b>	<b>23.264.585.847,00</b>	<b>90,04</b>	<b>26.327.544.852,00</b>

- e) Realisasi Belanja Honorarium tahun 2022 adalah sebesar Rp89.752.611,00 atau 95,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp93.670.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-95 Rincian Belanja Honorarium**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.500.000,00	13.882.611,00	95,74	33.840.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.350.000,00	39.870.000,00	98,81	656.290.000,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	38.820.000,00	36.000.000,00	92,74	40.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.670.000,00</b>	<b>89.752.611,00</b>	<b>95,82</b>	<b>730.330.000,00</b>

- f) Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-96 Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas	0,00	0,00	0,00	23.353.132,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Pemungutan Pajak Hotel				
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	59.343.134,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	568.656,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	44.733.407,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	429.000.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.191.235,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	8.196.804,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	269.024.800,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	286.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.411.168,00</b>

- g) Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-97 Rincian Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	7.844.480,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844.480,00</b>

- 4) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp18.824.978.362,00 atau 96,61% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp19.485.153.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-98 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.000.860.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.521.300,00	121.522.800,00	92,40	120.775.200,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.427.200,00	122.896.740,00	94,23	135.497.820,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.743.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.455.814.500,00	99,93	1.451.247.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.822.900,00	136.416.000,00	85,35	135.654.750,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.966.000,00	39.021.675,00	29,35	1.568.175,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	5.649.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.375.500.000,00	97,04	1.396.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	646.063,00	45,50	393.758,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.190.300.000,00	4.139.092.584,00	98,78	4.123.681.572,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.674.000.000,00	4.674.000.000,00	100,00	4.655.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.485.153.150,00</b>	<b>18.824.978.362,00</b>	<b>96,61</b>	<b>18.757.496.275,00</b>

- a) Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.004.010.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.004.010.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-99 Rincian Belanja Uang Representasi DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.000.860.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.004.010.000,00</b>	<b>1.004.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.860.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp121.522.800,00 atau 92,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp131.521.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-100 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.521.300,00	121.522.800,00	92,40	120.775.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.521.300,00</b>	<b>121.522.800,00</b>	<b>92,40</b>	<b>120.775.200,00</b>

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp122.896.740,00 atau 94,23% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp130.427.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-101 Rincian Belanja Tunjangan Beras DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.427.200,00	122.896.740,00	94,23	135.497.820,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.427.200,00</b>	<b>122.896.740,00</b>	<b>94,23</b>	<b>135.497.820,00</b>

- d) Realisasi Belanja Uang Paket DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp86.058.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp86.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-102 Rincian Belanja Uang Paket DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.743.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>86.058.000,00</b>	<b>86.058.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85.743.000,00</b>

- e) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.455.814.500,00 atau 99,93% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.456.827.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-103 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.455.814.500,00	99,93	1.451.247.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.456.827.750,00</b>	<b>1.455.814.500,00</b>	<b>99,93</b>	<b>1.451.247.000,00</b>

- f) Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp136.416.000,00 atau 85,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp159.822.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-104 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.822.900,00	136.416.000,00	85,35	135.654.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>159.822.900,00</b>	<b>136.416.000,00</b>	<b>85,35</b>	<b>135.654.750,00</b>

- g) Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp39.021.675,00 atau 29,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp132.966.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-105 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.966.000,00	39.021.675,00	29,35	1.568.175,00
	<b>Jumlah</b>	<b>132.966.000,00</b>	<b>39.021.675,00</b>	<b>29,35</b>	<b>1.568.175,00</b>

- h) Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp5.670.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.670.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-106 Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	5.649.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.670.000.000,00</b>	<b>5.670.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.649.000.000,00</b>

- i) Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.375.500.000,00 atau 97,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.417.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-107 Rincian Belanja Tunjangan Reses DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.375.500.000,00	97,04	1.396.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.417.500.000,00</b>	<b>1.375.500.000,00</b>	<b>97,04</b>	<b>1.396.500.000,00</b>

- j) Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp646.063,00 atau 45,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-108 Rincian Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	646.063,00	45,50	393.758,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>646.063,00</b>	<b>45,50</b>	<b>393.758,00</b>

- k) Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp4.139.092.584,00 atau 98,78% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.190.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-109 Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	94.750.000,00	80.831.016,00	85,31	80.450.244,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000,00	2.065.392,00	10,33	2.057.832,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	24.550.000,00	6.196.176,00	25,24	6.173.496,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.051.000.000,00	4.050.000.000,00	99,98	4.035.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.190.300.000,00</b>	<b>4.139.092.584,00</b>	<b>98,78</b>	<b>4.123.681.572,00</b>

- l) Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp4.674.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.674.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-110 Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.674.000.000,00	4.674.000.000,00	100,00	4.655.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.674.000.000,00</b>	<b>4.674.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.655.000.000,00</b>

- m) Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tahun 2022 adalah nihil dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp430.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-111 Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>430.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>

- 5) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp345.738.286,00 atau 78,30% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp441.562.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-112 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.282.500,00	54.600.000,00	98,77	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.548.850,00	6.288.000,00	96,02	6.852.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.507.000,00	98.280.000,00	98,77	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.290.281,00	4.852.140,00	91,72	6.735.060,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.409.614,00	1.401.404,00	99,42	1.271.300,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.171,00	1.120,00	51,59	600,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.543.034,00	5.456.160,00	98,43	5.475.360,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.958,00	112.320,00	98,56	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	341.874,00	336.960,00	98,56	336.960,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	252.659.588,00	174.410.182,00	69,03	153.056.069,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	14.863.174,00	0,00	0,00	395.520,00
<b>Jumlah</b>		<b>441.562.044,00</b>	<b>345.738.286,00</b>	<b>78,30</b>	<b>327.115.189,00</b>

- a) Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp54.600.000,00 atau 98,77% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp55.282.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-113 Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.282.500,00	54.600.000,00	98,77	54.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.282.500,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>54.600.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp6.288.000,00 atau 96,02% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.548.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-114 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.548.850,00	6.288.000,00	96,02	6.852.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.548.850,00</b>	<b>6.288.000,00</b>	<b>96,02</b>	<b>6.852.000,00</b>

- c) Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp98.280.000,00 atau 98,77% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp99.507.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-115 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.507.000,00	98.280.000,00	98,77	98.280.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.507.000,00</b>	<b>98.280.000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>98.280.000,00</b>

- d) Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp4.852.140,00 atau 91,72% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.290.281,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-116 Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.290.281,00	4.852.140,00	91,72	6.735.060,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.290.281,00</b>	<b>4.852.140,00</b>	<b>91,72</b>	<b>6.735.060,00</b>

- e) Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp1.401.404,00 atau 99,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.409.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-117 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.409.614,00	1.401.404,00	99,42	1.271.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.409.614,00</b>	<b>1.401.404,00</b>	<b>99,42</b>	<b>1.271.300,00</b>

- f) Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp1.120,00 atau 51,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.171,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-118 Rincian Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.171,00	1.120,00	51,59	600,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.171,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>51,59</b>	<b>600,00</b>

- g) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp5.456.160,00 atau 98,43% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.543.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-119 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.543.034,00	5.456.160,00	98,43	5.475.360,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.543.034,00</b>	<b>5.456.160,00</b>	<b>98,43</b>	<b>5.475.360,00</b>

- h) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp112.320,00 atau 98,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp113.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-120 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.958,00	112.320,00	98,56	112.320,00
<b>Jumlah</b>		<b>113.958,00</b>	<b>112.320,00</b>	<b>98,56</b>	<b>112.320,00</b>

- i) Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp336.960,00 atau 98,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp341.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-121 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	341.874,00	336.960,00	98,56	336.960,00
<b>Jumlah</b>		<b>341.874,00</b>	<b>336.960,00</b>	<b>98,56</b>	<b>336.960,00</b>

- j) Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp174.410.182,00 atau 69,03% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp252.659.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-122 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	9.093.780,00	3.637.511,00	40,00	3.184.518,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	19.805.501,00	15.272.196,00	77,11	8.092.246,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	606.775,00	242.709,00	40,00	77.544,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.146.747,00	4.575.013,00	74,43	6.100.010,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	84.000.000,00	63.000.000,00	75,00	58.500.000,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	747.024,00	360.000,00	48,19	298.805,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.117.753,00	1.117.753,00	100,00	1.117.746,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	102.008,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.540.000,00	72.405.000,00	75,00	36.685.200,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	34.500.000,00	13.800.000,00	40,00	39.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>252.659.588,00</b>	<b>174.410.182,00</b>	<b>69,03</b>	<b>153.056.069,00</b>

- k) Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar nihil dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.863.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-123 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	714.648,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	6.674.169,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.578.785,00	0,00	0,00	395.520,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	2.133.705,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.823.064,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	734.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	1.204.403,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.863.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.520,00</b>

- 6) Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp876.650.000,00 atau 95,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp917.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-124 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	665.000.000,00	624.650.000,00	93,93	425.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>917.000.000,00</b>	<b>876.650.000,00</b>	<b>95,60</b>	<b>677.000.000,00</b>

- a) Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp252.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp252.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-125 Rincian Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>252.000.000,00</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>252.000.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp624.650.000,00 atau 93,93% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp665.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-126 Rincian Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**

No	Jenis Belanja		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja KDH/WKDH	Dana Operasional	665.000.000,00	624.650.000,00	93,93	425.000.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>665.000.000,00</b>	<b>624.650.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>425.000.000,00</b>

7) Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp12.134.761.557,00 atau 93,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp13.036.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-127 Rincian Belanja Pegawai BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	13.036.780.000,00	12.134.761.557,00	93,08	12.114.786.002,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.036.780.000,00</b>	<b>12.134.761.557,00</b>	<b>93,08</b>	<b>12.114.786.002,00</b>

a) Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp12.134.761.557,00 atau 93,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp13.036.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-128 Rincian Belanja Pegawai BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	13.036.780.000,00	12.134.761.557,00	93,08	12.114.786.002,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.036.780.000,00</b>	<b>12.134.761.557,00</b>	<b>93,08</b>	<b>12.114.786.002,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>544.585.852.641,00</b>	<b>475.352.226.339,66</b>	<b>444.016.600.988,70</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp475.352.226.339,66 atau 87,29% dari anggarannya sebesar Rp544.585.852.641,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang termasuk kelompok Belanja Operasi. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp444.016.600.988,70 realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp475.352.226.339,66 mengalami kenaikan sebesar Rp31.335.625.350,96 atau 7,06% dengan obyek belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-129 Rincian Belanja Barang dan Jasa Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	130.214.926.490,00	106.769.339.192,00	81,99	88.965.725.052,40
2	Belanja Jasa	179.025.081.005,00	157.837.013.034,96	88,16	148.504.981.504,13
3	Belanja Pemeliharaan	5.168.770.180,00	4.780.461.309,00	92,49	6.234.966.189,00
4	Belana Perjalanan Dinas	48.069.688.488,00	36.622.421.685,00	76,19	25.647.472.523,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.402.278.800,00	19.166.914.928,00	93,94	26.342.475.416,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.461.682.552,00	42.788.897.743,00	80,04	46.246.768.790,32
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.243.425.126,00	107.387.178.447,70	99,21	102.074.211.513,85
8	Belanja Lain-lain (Extracomp)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>544.585.852.641,00</b>	<b>475.352.226.339,66</b>	<b>87,29</b>	<b>444.016.600.988,70</b>

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp475.352.226.339,66 didalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dicatat tidak rinci yaitu realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp42.788.897.743,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp107.387.178.447,70. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas belanja barang dan jasa yang dicatat tidak rinci tersebut. Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-130 Mapping Belanja Barang dan Jasa BOS**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
I.	Belanja Barang	14.572.131.152,00	13.092.257.285,00	89,84	13.796.412.595,00
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.592.000,00	10.592.000,00	100,00	16.530.750,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	94.491.980,00	93.733.951,00	99,20	130.750.650,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	40.000,00	20.000,00	50,00	480.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	271.143.446,00	250.303.247,00	92,31	410.131.500,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.563.408.822,00	5.783.983.755,00	88,12	6.343.466.302,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.783.586.869,00	1.561.555.349,00	87,55	1.569.740.400,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	134.834.770,00	123.580.000,00	91,65	134.841.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.140.408.951,00	984.913.383,00	86,36	909.928.450,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.869.339.884,00	1.709.155.092,00	91,43	1.855.338.450,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	335.047.932,00	306.768.804,00	91,56	554.434.720,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	78.454.166,00	74.958.502,00	95,54	10.695.500,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.670.300,00	9.457.600,00	88,63	11.494.800,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13.215.510,00	10.915.510,00	82,60	2.116.000,00
15	Belanja Obat-Obat-Obatan	648.737.562,00	606.670.832,00	93,52	698.209.473,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	611.195.200,00	582.914.500,00	95,37	0,00
17	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	974.193.680,00	951.964.680,00	97,72	1.127.778.100,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	17.577.080,00	15.577.080,00	88,62	16.030.000,00
19	Belanja Pakaian Paskibraka	15.193.000,00	15.193.000,00	100,00	0,00
II. Belanja Jasa		27.840.235.215,00	21.032.727.271,00	75,55	24.141.559.406,93
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.430.000,00	18.730.000,00	83,50	51.140.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	107.848.500,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	11.985.000,00	11.985.000,00	100,00	118.754.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	14.350.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	112.101.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	245.475.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	12.709.460.700,00	8.540.273.700,00	67,20	10.382.157.530,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	60.280.950,00	52.681.950,00	87,39	2.657.393.351,34
11	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	34.716.500,00
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.620.968.077,00	4.164.462.680,00	90,12	3.639.201.300,00
13	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	173.699.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.055.118.507,00	1.808.990.500,00	88,02	894.665.450,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.812.761.800,00	1.652.461.800,00	91,16	1.386.321.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	945.352.600,00	819.212.600,00	86,66	796.080.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.618.723,00	6.137.000,00	92,72	0,00
18	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	68.255.000,00	66.955.000,00	98,10	1.100.000,00
19	Belanja Jasa Tata Rias	56.970.000,00	56.770.000,00	99,65	13.800.500,00
20	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	540.163.597,00	77.464.750,00	14,34	108.001.500,00
21	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah	4.097.690,00	2.797.400,00	68,27	4.762.500,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Tangga				
22	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	25.700.000,00	25.600.000,00	99,61	0,00
23	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.450.000,00	24.650.000,00	93,19	35.125.000,00
24	Belanja Tagihan Telepon	27.096.849,00	23.967.824,00	88,45	40.530.410,00
25	Belanja Tagihan Air	414.507.985,00	191.648.550,00	46,24	153.181.830,01
26	Belanja Tagihan Listrik	1.322.698.135,00	853.291.624,00	64,51	706.914.770,58
27	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	128.851.000,00	118.001.000,00	91,58	105.107.000,00
28	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.136.185.230,00	1.695.443.243,00	79,37	1.955.848.865,00
29	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00
30	Belanja Penambahan Daya	54.019.300,00	52.085.650,00	96,42	67.378.900,00
31	Belanja Pembayaran Bea, dan Perizinan	907.072,00	435.000,00	47,96	200.000,00
32	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
34	Belanja Sewa Electric Generating Set	98.611.000,00	87.691.000,00	88,93	41.422.000,00
35	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	512.260.000,00	505.075.000,00	98,60	231.830.000,00
36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.600.000,00	20.850.000,00	92,26	4.240.000,00
37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua			0,00	9.440.000,00
38	Belanja Sewa Mebel	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00	0,00
39	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	34.250.000,00	34.250.000,00	100,00	5.500.000,00
40	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	19.050.000,00	18.550.000,00	97,38	2.140.000,00
41	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	81.366.000,00	81.366.000,00	100,00	8.235.000,00
43	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.670.000,00	9.350.000,00	96,69	21.395.500,00
	<b>III. Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.842.702.390,00</b>	<b>8.519.481.837,00</b>	<b>78,57</b>	<b>8.123.212.438,39</b>
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	41.366.200,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	51.131.900,00	9.059.000,00	17,72	15.054.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	80.088.100,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.269.351,00	60.224.950,00	65,99	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	325.370.882,00	203.385.900,00	62,51	258.053.850,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.943.200,00	14.692.400,00	81,88	18.836.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.340.186,00	10.961.000,00	32,88	57.979.825,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga	3.703.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga	20.257.000,00	20.257.000,00	100,00	1.749.000,00
12	Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga	1.329.000,00	1.329.000,00	100,00	5.323.000,00
13	Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga	20.307.500,00	20.078.100,00	98,87	4.867.500,00
14	Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan Belanja Pemeliharaan	38.423.000,00	25.535.000,00	66,46	7.538.000,00
15	Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Belanja Pemeliharaan	456.391.512,00	300.690.914,00	65,88	178.086.600,00
16	Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	875.000,00
17	Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
18	Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan	174.148.596,00	66.045.086,00	37,92	65.194.300,00
19	Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan Belanja Pemeliharaan	31.164.006,00	16.580.000,00	53,20	28.423.500,00
20	Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
21	Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
22	Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	795.000,00
23	Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24	Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya Belanja Pemeliharaan	41.086.314,00	32.971.314,00	80,25	0,00
25	Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan Belanja Pemeliharaan	15.325.170,00	0,00	0,00	0,00
26	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan	562.053.261,00	507.905.767,00	90,37	0,00
27	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang Belanja Pemeliharaan	87.320.000,00	75.243.000,00	86,17	0,00
28	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium Belanja Pemeliharaan	148.059.550,00	143.340.553,00	96,81	0,00
29	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Belanja Pemeliharaan	67.250.350,00	56.840.000,00	84,52	0,00
30	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Belanja Pemeliharaan	378.584.480,00	369.176.130,00	97,51	0,00
31	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Pemeliharaan	51.606.100,00	51.606.100,00	100,00	0,00
32	Bangunan Gedung-Bangunan Belanja Pemeliharaan	1.985.780.621,00	1.866.046.404,00	93,97	7.103.363.830,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
33	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	34.749.000,00	29.749.000,00	85,61	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	43.430.710,00	34.927.000,00	80,42	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	216.067.200,00	204.285.000,00	94,55	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.822.026.330,00	2.702.850.226,00	95,78	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	442.430.431,00	401.806.350,00	90,82	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.045.391.837,00	998.522.000,00	95,52	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	333.378.559,00	140.862.050,00	42,25	142.994.810,00
40	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	202.113.794,00	138.797.593,00	68,67	96.818.923,39
41	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.081.933.350,00	4.695.000,00	0,43	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	466.200,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	6.520.000,00	6.020.000,00	92,33	1.980.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	12.350.000,00	5.000.000,00	40,49	2.500.000,00
IV.	Belanja Perjalanan Dinas	206.613.795,00	144.431.350,00	69,90	185.584.350,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.029.700,00	4.660.000,00	25,85	7.290.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	188.584.095,00	139.771.350,00	74,12	177.264.350,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.461.682.552,00</b>	<b>42.788.897.743,00</b>	<b>80,04</b>	<b>46.246.768.790,32</b>

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5-131 Mapping Belanja Barang dan Jasa BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
I.	Belanja Barang	40.839.677.294,00	40.051.234.309,70	98,07	40.171.732.978,85
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	113.905.148,00	113.905.148,00	100,00	126.179.900,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.404.886.213,00	10.023.901.132,89	96,34	7.615.301.848,96
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	469.726.300,00	469.726.300,00	100,00	364.555.500,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	141.084.394,00	141.084.394,00	100,00	18.900.000,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	89.006.000,00	89.006.000,00	100,00	55.335.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.489.036.517,00	7.303.840.197,99	97,53	9.213.578.386,78
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	49.395.000,00	49.395.000,00	100,00	1.210.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.716.564.864,00	1.716.564.864,00	100,00	905.049.048,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	329.511.250,00	329.511.250,00	100,00	193.880.275,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.440.608,00	21.440.608,00	100,00	17.900.200,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	461.078.200,00	461.078.200,00	100,00	326.096.900,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.169.320.222,00	1.169.320.222,00	100,00	1.104.622.550,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	609.498.237,00	521.927.981,00	85,63	229.633.700,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	376.157.355,00	376.157.355,00	100,00	413.709.560,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	27.932.000,00	27.932.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.432.792,00	55.431.163,00	100,00	1.645.600,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.411.870.000,00	11.422.732.644,82	100,10	15.388.072.615,11
18	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.738.800.000,00	1.593.720.000,00	91,66	0,00
19	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	197.644.380,00	197.644.380,00	100,00	1.037.025.000,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	199.617.000,00	199.617.000,00	100,00	34.085.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.583.000,00	50.583.000,00	100,00	36.209.000,00
22	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.680.799.221,00	1.680.799.221,00	100,00	1.512.350.595,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.451.328.388,00	1.451.328.388,00	100,00	1.520.829.800,00
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	585.060.205,00	584.587.860,00	99,92	55.562.500,00
II. Belanja Jasa		55.002.365.189,00	54.934.571.495,00	99,88	54.142.499.464,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	323.921.694,00	323.921.040,00	100,00	86.179.040,00
2	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	76.598.440,00	76.597.960,00	100,00	34.576.960,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	47.314.304.299,00	47.246.511.739,00	99,86	46.666.804.157,00
4	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	99.359.000,00	99.359.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	149.740.000,00	149.740.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli	154.626.500,00	154.626.500,00	100,00	80.000.000,00
8	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	63.064.650,00	63.064.650,00	100,00	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.107.668,00	2.107.668,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	15.433.200,00	15.433.200,00	100,00	600.000,00
11	Belanja Jasa Kalibrasi	292.810.000,00	292.810.000,00	100,00	334.583.000,00
12	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	672.588.815,00	672.588.815,00	100,00	0,00
13	Belanja Tagihan Telepon	28.436.905,00	28.436.905,00	100,00	65.864.976,00
14	Belanja Tagihan Air	54.021.000,00	54.021.000,00	100,00	29.317.620,00
15	Belanja Tagihan Listrik	1.721.581.648,00	1.721.581.648,00	100,00	1.495.573.554,00
16	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	16.200.000,00
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	451.782.891,00	451.782.891,00	100,00	259.948.992,00
18	Belanja Registrasi/Keanggotaan	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	6.300.000,00
19	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	54.589.289,00	54.589.289,00	100,00	55.395.872,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
20	Belanja Lembur	12.323.000,00	12.323.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Medical Check Up	60.697.088,00	60.697.088,00	100,00	266.556.794,00
22	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS	433.531.030,00	433.531.030,00	100,00	0,00
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	38.877.129,00	38.877.129,00	100,00	0,00
24	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.390.000,00	3.390.000,00	100,00	3.500.000,00
25	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.466.650.712,00	1.466.650.712,00	100,00	489.550.500,00
26	Belanja Sosialisasi	26.404.650,00	26.404.650,00	100,00	179.828.000,00
27	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.443.325.581,00	1.443.325.581,00	100,00	581.688.639,00
28	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	56.830.000,00
29	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	541.349.780,00
30	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.710.995.370,00
31	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
32	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	891.555.610,00
33	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Keluangan	0,00	0,00	0,00	60.000.600,00
34	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
III.	Belanja Pemeliharaan	11.630.563.631,00	11.630.553.631,00	100,00	7.057.120.881,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	129.659.400,00	129.659.400,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	263.969.700,00	263.969.700,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	62.500.750,00	62.500.750,00	100,00	19.336.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	358.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	74.332.050,00	74.332.050,00	100,00	50.255.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	139.202.450,00	139.202.450,00	100,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	772.826.400,00	772.816.400,00	100,00	712.697.700,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.496.697.671,00	1.496.697.671,00	100,00	1.560.801.381,00
10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	41.450.000,00	41.450.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	118.251.650,00	118.251.650,00	100,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	610.000,00	610.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	7.659.266.000,00	7.659.266.000,00	100,00	3.861.493.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	98.450.910,00	98.450.910,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat	636.800.000,00	636.800.000,00	100,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Tinggal Lainnya				
16	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	136.546.650,00	136.546.650,00	100,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	149.556.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	27.830.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	186.676.200,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.721.700,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	29.858.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	209.070.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	91.332.900,00
25	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.760.000,00
IV.	Belanja Perjalanan Dinas	770.819.012,00	770.819.012,00	100,00	456.144.840,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	770.819.012,00	770.819.012,00	100,00	456.144.840,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Belanja Lain-lain (Extracomp)	0,00	0,00	0,00	246.713.350,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	1.026.900,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	31.640.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	212.220.450,00
	<b>Jumlah</b>	<b>108.243.425.126,00</b>	<b>107.387.178.447,70</b>	<b>99,21</b>	<b>102.074.211.513,85</b>

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing mapping Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp544.585.852.641,00 dan realisasi sebesar Rp475.352.226.339,66 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Barang tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp106.769.339.192,00 atau 81,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp130.214.926.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-132 Rincian Belanja Barang Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	130.198.616.090,00	106.754.735.192,00	81,99	88.961.225.052,40
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.310.400,00	14.604.000,00	89,54	4.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.214.926.490,00</b>	<b>106.769.339.192,00</b>	<b>81,99</b>	<b>88.965.725.052,40</b>

- a) Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp106.754.735.192,00 atau 81,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp130.198.616.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-133 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.812.163.059,00	2.577.504.377,00	91,66	807.552.250,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.487.353.512,00	5.577.964.734,00	85,98	1.956.066.941,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.959.389.091,00	6.434.690.040,00	80,84	5.418.016.148,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	391.872.000,00	365.966.327,00	93,39	9.450.113.820,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	172.266.000,00	157.582.425,00	91,48	86.285.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.028.000,00	15.698.057,00	68,17	744.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.895.000,00	53.836.000,00	72,85	40.193.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.204.000,00	36.650.000,00	98,51	45.650.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.420.057.212,00	6.850.350.175,00	92,32	2.885.856.153,40
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.213.772.730,00	2.106.101.645,00	95,14	1.531.802.177,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	292.600.000,00	292.413.050,00	99,94	65.976.600,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.040.000,00	5.680.000,00	94,04	22.255.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.000.148.750,00	975.869.111,00	97,57	1.290.977.289,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.733.487.548,00	7.597.540.301,00	86,99	8.445.415.640,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.075.207.769,00	1.696.047.981,00	81,73	296.714.629,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.275.832.842,00	3.066.814.395,00	93,62	7.409.608.023,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	205.900.500,00	174.000.170,00	84,51	170.913.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.711.500,00	10.997.800,00	70,00	1.671.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.792.326.890,00	2.539.446.255,00	90,94	553.284.720,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	915.953.038,00	767.661.658,00	83,81	1.382.112.319,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	955.186.065,00	885.896.200,00	92,75	1.823.453.635,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	151.575.300,00	148.733.350,00	98,13	87.192.700,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	232.025.000,00	216.509.800,00	93,31	948.160.386,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	345.171.200,00	286.495.132,00	83,00	1.971.223.485,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.749.702.544,00	4.626.500.405,00	97,41	4.316.065.404,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	15.570.000,00	15.570.000,00	100,00	117.589.412,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.910.174.900,00	32.546.285.398,00	88,18	0,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.127.318.700,00	698.473.803,00	7,65	0,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	118.500.000,00	112.335.000,00	94,80	0,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	9.560.000,00	9.342.000,00	97,72	222.750,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.015.653.240,00	20.301.824.819,00	84,54	21.087.879.179,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	807.961.700,00	559.096.118,00	69,20	263.350.212,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	23.520.000,00	20.160.000,00	85,71	67.100.000,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.416.266.000,00	2.734.698.920,00	80,05	1.555.481.100,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.200.000,00	6.100.000,00	84,72	6.210.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	869.952.000,00	790.807.000,00	90,90	307.720.500,00
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	43.200.000,00	41.958.000,00	97,13	48.000.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	30.730.000,00	26.506.250,00	86,26	25.195.500,00
40	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	126.250.000,00	123.321.000,00	97,68	128.145.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	19.250.000,00	18.315.000,00	95,14	26.250.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.000.000,00	69.624.750,00	99,46	74.685.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	115.300.000,00	105.051.350,00	91,11	302.243.300,00
44	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	56.250.000,00	56.193.750,00	99,90	55.935.000,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	8.658.000,00	96,20	9.000.000,00
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	57.600.000,00	56.380.896,00	97,88	0,00
47	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	5.661.000,00	94,35	6.000.000,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	73.750.000,00	65.555.000,00	88,89	55.649.000,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	188.550.000,00	183.954.500,00	97,56	335.202.850,00
50	Belanja Pakaian Olahraga	743.190.000,00	731.913.250,00	98,48	476.847.500,00
51	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.028.440,00
52	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00
53	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	13.380.000,00
55	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	26.107.200,00
56	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	11.503.957.050,00
57	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	1.364.732.740,00
58	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.055.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>130.198.616.090,00</b>	<b>106.754.735.192,00</b>	<b>81,99</b>	<b>88.961.225.052,40</b>

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp159.898.226.786,70 atau 86,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp185.610.424.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-134 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.926.068.207,00	2.691.409.525,00	91,98	933.732.150,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.892.239.725,00	15.601.865.866,89	92,36	9.575.814.789,96
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.439.707.391,00	6.915.008.340,00	81,93	5.799.102.398,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	391.872.000,00	365.966.327,00	93,39	9.450.113.820,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	266.757.980,00	251.316.376,00	94,21	217.035.650,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	164.112.394,00	156.782.451,00	95,53	19.644.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	162.941.000,00	142.862.000,00	87,68	96.008.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.204.000,00	36.650.000,00	98,51	45.650.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.180.237.175,00	14.404.493.619,99	94,89	12.509.566.040,18
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.213.772.730,00	2.106.101.645,00	95,14	1.531.802.177,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	292.600.000,00	292.413.050,00	99,94	65.976.600,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.040.000,00	5.680.000,00	94,04	22.255.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.049.543.750,00	1.025.264.111,00	97,69	1.292.187.289,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.013.461.234,00	15.098.088.920,00	88,74	15.693.930.990,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.188.305.888,00	3.587.114.580,00	85,65	2.060.335.304,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.275.832.842,00	3.066.814.395,00	93,62	7.409.608.023,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	362.175.878,00	319.020.778,00	88,08	323.654.700,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.711.500,00	10.997.800,00	70,00	1.671.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.393.814.041,00	3.985.437.838,00	90,71	1.789.310.070,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.954.613.144,00	3.646.136.972,00	92,20	4.342.073.319,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.899.732.234,00	1.714.592.985,00	90,25	2.607.522.055,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	606.186.821,00	599.849.207,00	98,95	511.597.760,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.670.300,00	9.457.600,00	88,63	11.494.800,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	273.172.510,00	255.357.310,00	93,48	950.276.386,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.603.992,00	341.926.295,00	85,35	1.972.869.085,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	16.810.310.106,00	16.655.903.881,82	99,08	20.402.347.492,11
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.754.370.000,00	1.609.290.000,00	91,73	117.589.412,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.107.819.280,00	32.743.929.778,00	88,24	1.037.025.000,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.127.318.700,00	698.473.803,00	7,65	0,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	118.500.000,00	112.335.000,00	94,80	0,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	9.560.000,00	9.342.000,00	97,72	222.750,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.826.465.440,00	21.084.356.319,00	84,93	21.121.964.179,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	858.544.700,00	609.679.118,00	71,01	299.559.212,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	997.713.680,00	972.124.680,00	97,44	1.194.878.100,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.097.065.221,00	4.415.498.141,00	86,63	3.067.831.695,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.200.000,00	6.100.000,00	84,72	6.210.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.321.280.388,00	2.242.135.388,00	96,59	1.828.550.300,00
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	43.200.000,00	41.958.000,00	97,13	48.000.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	30.730.000,00	26.506.250,00	86,26	25.195.500,00
40	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	126.250.000,00	123.321.000,00	97,68	128.145.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	19.250.000,00	18.315.000,00	95,14	26.250.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.000.000,00	69.624.750,00	99,46	74.685.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	700.360.205,00	689.639.210,00	98,47	357.805.800,00
44	Belanja Pakaian Sipil Resmi	56.250.000,00	56.193.750,00	99,90	55.935.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	(PSR)				
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	8.658.000,00	96,20	9.000.000,00
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	57.600.000,00	56.380.896,00	97,88	0,00
47	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	5.661.000,00	94,35	6.000.000,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	73.750.000,00	65.555.000,00	88,89	55.649.000,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	188.550.000,00	183.954.500,00	97,56	335.202.850,00
50	Belanja Pakaian Olahraga	760.767.080,00	747.490.330,00	98,25	492.877.500,00
51	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.028.440,00
52	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00
53	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	13.380.000,00
55	Belanja Pakaian Paskibraka	15.193.000,00	15.193.000,00	100,00	26.107.200,00
56	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	11.503.957.050,00
57	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	1.364.732.740,00
58	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.055.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>185.610.424.536,00</b>	<b>159.898.226.786,70</b>	<b>86,15</b>	<b>142.929.370.626,25</b>

- b) Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis tahun 2022 adalah sebesar Rp14.604.000,00 atau 89,54% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.310.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-135 Rincian Belanja Barang Tak Pakai Habis**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.110.400,00	4.424.000,00	72,40	0,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	10.200.000,00	10.180.000,00	99,80	0,00
3	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.310.400,00</b>	<b>14.604.000,00</b>	<b>89,54</b>	<b>4.500.000,00</b>

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp159.912.830.786,70 atau 86,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp185.626.734.936,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-136 Rincian Belanja Barang Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	185.610.424.536,00	159.898.226.786,70	86,15	142.929.370.626,25
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.310.400,00	14.604.000,00	89,54	4.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>185.626.734.936,00</b>	<b>159.912.830.786,70</b>	<b>86,15</b>	<b>142.933.870.626,25</b>

- 2) Realisasi Belanja Jasa tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp157.837.013.034,96 atau 88,16% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp179.025.081.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-137 Rincian Belanja Jasa Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	131.217.123.482,00	113.920.526.227,00	86,82	113.766.228.618,63
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.254.930.523,00	33.781.596.019,96	95,82	19.694.086.322,00
3	Belanja Sewa Tanah	94.800.000,00	18.845.000,00	19,88	64.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.839.350.800,00	2.215.429.309,00	57,70	1.828.171.841,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.442.248.000,00	1.381.481.000,00	95,79	857.567.600,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	469.512.200,00	427.841.333,00	91,12	4.036.459.710,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.812.406.000,00	1.638.129.009,00	90,38	5.396.827.812,50
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.382.510.000,00	1.259.009.647,00	91,07	1.215.576.150,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	136.500.000,00	136.500.000,00	100,00	348.060.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.375.700.000,00	3.057.655.490,00	90,58	1.269.516.450,00
11	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.487.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>179.025.081.005,00</b>	<b>157.837.013.034,96</b>	<b>88,16</b>	<b>148.504.981.504,13</b>

- a) Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp113.920.526.227,00 atau 86,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp131.217.123.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-138 Rincian Belanja Jasa Kantor Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.406.080.000,00	5.909.875.000,00	79,80	6.659.145.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.595.100.000,00	3.072.020.000,00	85,45	5.116.387.500,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	175.200.000,00	168.000.000,00	95,89	14.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.454.456.000,00	3.399.700.000,00	98,41	3.648.400.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	87.300.000,00	48.300.000,00	55,33	29.100.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	121.800.000,00	104.800.000,00	86,04	103.170.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	116.000.000,00	115.600.000,00	99,66	75.750.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	818.400.000,00	714.785.816,00	87,34	1.016.650.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	633.600.000,00	596.000.000,00	94,07	520.500.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.299.100.000,00	12.287.080.000,00	99,90	12.738.600.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.202.828.200,00	7.743.636.366,00	84,14	7.917.316.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	196.916.000,00	133.354.000,00	67,72	90.097.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.904.057.500,00	7.523.825.745,00	84,50	7.140.527.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	324.600.000,00	317.700.000,00	97,87	1.704.830.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	449.400.000,00	443.700.000,00	98,73	90.380.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	479.495.000,00	403.310.000,00	84,11	497.340.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	19.900.000,00	16.963.000,00	85,24	250.595.500,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	140.080.000,00	139.360.000,00	99,49	191.470.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	61.200.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.141.000.000,00	1.059.810.000,00	92,88	717.000.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.528.085.000,00	13.140.560.400,00	97,14	13.999.971.320,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	585.000.000,00	585.000.000,00	100,00	442.800.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	549.600.000,00	522.400.000,00	95,05	85.400.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.434.327.500,00	1.326.463.500,00	92,48	2.778.855.400,00
25	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.366.255.000,00	2.302.675.000,00	97,31	2.590.230.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.560.800.000,00	1.326.450.000,00	84,99	1.486.700.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	541.456.000,00	492.565.250,00	90,97	353.509.500,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.151.455.500,00	986.376.439,00	85,66	1.027.042.818,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.800.000,00	83.100.000,00	90,52	47.575.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.691.262.268,00	1.635.570.720,00	96,71	1.955.076.839,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	27.900.000,00	27.120.000,00	97,20	4.200.000,00
35	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	170.400.000,00	170.400.000,00	100,00	157.200.000,00
36	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	398.630.000,00	396.123.650,00	99,37	122.227.600,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.727.086.535,00	4.514.046.460,00	95,49	1.510.993.500,00
38	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	59.800.000,00	19.605.600,00	32,79	43.537.000,00
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	16.100.000,00	16.095.000,00	99,97	218.150.000,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	938.625.450,00	518.036.561,00	55,19	832.076.570,00
42	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	75.000.000,00	11.982.800,00	15,98	25.080.100,00
43	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.780.600.000,00	1.475.960.812,00	82,89	2.495.422.800,00
44	Belanja Tagihan Telepon	1.030.530.000,00	797.212.743,00	77,36	774.645.506,00
45	Belanja Tagihan Air	514.969.540,00	296.946.152,00	57,66	282.066.320,00
46	Belanja Tagihan Listrik	3.708.067.968,00	3.250.527.384,00	87,66	2.768.057.182,00
47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	145.000.000,00	129.565.000,00	89,36	296.084.000,00
48	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.139.444.650,00	11.113.359.739,00	91,55	1.316.351.521,63
49	Belanja Paket/Pengiriman	249.717.000,00	198.051.712,00	79,31	501.973.580,00
50	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Registrasi/Keanggotaan	125.100.000,00	100.617.923,00	80,43	0,00
52	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	990.303.380,00	698.648.800,00	70,55	704.478.850,00
53	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.609.814.100,00	16.276.378.655,00	97,99	15.147.180.321,00
55	Belanja Lembur	2.131.445.000,00	2.039.551.000,00	95,69	2.863.747.000,00
56	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	3.049.570.000,00	2.630.450.000,00	86,26	2.371.400.000,00
57	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	9.182.065.891,00	2.559.265.000,00	27,87	7.521.845.891,00
58	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00	428.400.000,00
59	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
60	Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	3.092.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.217.123.482,00</b>	<b>113.920.526.227,00</b>	<b>86,82</b>	<b>113.766.228.618,63</b>

Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp185.708.963.891,00 atau 88,49.% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp209.860.187.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-139 Rincian Belanja Jasa Kantor Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.752.431.694,00	6.252.526.040,00	80,65	6.796.464.040,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.595.100.000,00	3.072.020.000,00	85,45	6.935.231.370,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	175.200.000,00	168.000.000,00	95,89	14.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.466.441.000,00	3.411.685.000,00	98,42	3.767.154.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Honorarium Rohaniwan	87.300.000,00	48.300.000,00	55,33	32.900.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	121.800.000,00	104.800.000,00	86,04	117.520.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	116.000.000,00	115.600.000,00	99,66	187.851.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	894.998.440,00	791.383.776,00	88,42	1.296.701.960,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	633.600.000,00	596.000.000,00	94,07	520.500.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.008.560.700,00	20.827.353.700,00	83,28	23.120.757.530,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.517.132.499,00	54.990.148.105,00	97,30	54.584.120.157,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	298.275.000,00	234.713.000,00	78,69	90.097.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.114.078.450,00	7.726.247.695,00	84,77	9.797.920.351,34
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	324.600.000,00	317.700.000,00	97,87	1.704.830.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	449.400.000,00	443.700.000,00	98,73	90.380.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	479.495.000,00	403.310.000,00	84,11	497.340.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	19.900.000,00	16.963.000,00	85,24	250.595.500,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	140.080.000,00	139.360.000,00	99,49	191.470.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	61.200.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.143.700.000,00	1.062.510.000,00	92,90	751.716.500,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.149.053.077,00	17.305.023.080,00	95,35	17.639.172.620,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	585.000.000,00	585.000.000,00	100,00	616.499.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	549.600.000,00	522.400.000,00	95,05	85.400.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.644.072.507,00	3.290.080.500,00	90,29	3.753.520.850,00
25	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	63.064.650,00	63.064.650,00	100,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.179.016.800,00	3.955.136.800,00	94,64	3.977.851.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.506.152.600,00	2.145.662.600,00	85,62	2.282.780.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	541.456.000,00	492.565.250,00	90,97	353.509.500,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.158.074.223,00	992.513.439,00	85,70	1.027.042.818,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	160.055.000,00	150.055.000,00	93,75	48.675.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	56.970.000,00	56.770.000,00	99,65	13.800.500,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.693.369.936,00	1.637.678.388,00	96,71	1.955.076.839,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	583.496.797,00	120.017.950,00	20,57	112.801.500,00
35	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	170.400.000,00	170.400.000,00	100,00	157.200.000,00
36	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	398.630.000,00	396.123.650,00	99,37	122.227.600,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.727.086.535,00	4.514.046.460,00	95,49	1.510.993.500,00
38	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.897.690,00	22.403.000,00	35,06	48.299.500,00
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.450.000,00	24.650.000,00	93,19	35.125.000,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	308.910.000,00	308.905.000,00	100,00	552.733.000,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.636.914.265,00	1.216.225.376,00	74,30	832.076.570,00
42	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	75.000.000,00	11.982.800,00	15,98	25.080.100,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
43	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.780.600.000,00	1.475.960.812,00	82,89	2.495.422.800,00
44	Belanja Tagihan Telepon	1.086.063.754,00	849.617.472,00	78,23	881.040.892,00
45	Belanja Tagihan Air	983.498.525,00	542.615.702,00	55,17	464.565.770,01
46	Belanja Tagihan Listrik	6.752.347.751,00	5.825.400.656,00	86,27	4.970.545.506,58
47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	306.251.000,00	279.966.000,00	91,42	417.391.000,00
48	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.727.412.771,00	13.260.585.873,00	90,04	3.532.149.378,63
49	Belanja Paket/Pengiriman	249.717.000,00	198.051.712,00	79,31	505.526.580,00
50	Belanja Penambahan Daya	54.019.300,00	52.085.650,00	96,42	67.378.900,00
51	Belanja Registrasi/Keanggotaan	132.200.000,00	107.717.923,00	81,48	6.300.000,00
52	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.045.799.741,00	753.673.089,00	72,07	760.074.722,00
53	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	891.555.610,00
54	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.609.814.100,00	16.276.378.655,00	97,99	15.147.180.321,00
55	Belanja Lembur	2.143.768.000,00	2.051.874.000,00	95,71	2.864.297.000,00
56	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	3.049.570.000,00	2.630.450.000,00	86,26	2.371.400.000,00
57	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	9.182.065.891,00	2.559.265.000,00	27,87	7.521.845.891,00
58	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00	428.400.000,00
59	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
60	Belanja Medical Check Up	60.697.088,00	60.697.088,00	100,00	269.648.794,00
	<b>Jumlah</b>	<b>209.860.187.784,00</b>	<b>185.708.963.891,00</b>	<b>88,49</b>	<b>189.581.737.470,56</b>

- b) Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp33.781.596.019,96 atau 95,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp35.254.930.523,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-140 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.132.969.600,00	2.695.445.200,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.658.374.400,00	26.249.227.800,00	0,00	17.959.689.600,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	432.339.600,00	426.543.600,00	0,00	359.324.000,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.485.901.416,00	1.221.367.948,00	0,00	1.306.671.991,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	127.167.409,00	103.170.921,96	0,00	68.400.731,00
6	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.418.178.098,00	3.085.840.550,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.254.930.523,00</b>	<b>33.781.596.019,96</b>	<b>95,82</b>	<b>19.694.086.322,00</b>

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN diperuntukan bagi tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dibiayai oleh APBD dan pembayaran iurannya dibayarkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp34.254.004.178,96 atau 95,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp35.727.338.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-141 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.132.969.600,00	2.695.445.200,00	86,03	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.658.374.400,00	26.249.227.800,00	98,47	17.959.689.600,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	432.339.600,00	426.543.600,00	98,66	359.324.000,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.919.432.446,00	1.654.898.978,00	86,22	1.306.671.991,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	166.044.538,00	142.048.050,96	85,55	68.400.731,00
6	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.418.178.098,00	3.085.840.550,00	90,28	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.727.338.682,00</b>	<b>34.254.004.178,96</b>	<b>95,88</b>	<b>19.694.086.322,00</b>

- c) Realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp18.845.000,00 atau 19,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp94.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-142 Rincian Belanja Sewa Tanah Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000,00	14.045.000,00	93,63	58.000.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	3.600.000,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.800.000,00</b>	<b>18.845.000,00</b>	<b>19,88</b>	<b>64.000.000,00</b>

Realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp18.845.000,00 atau 19,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp94.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-143 Rincian Belanja Sewa Tanah Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000,00	14.045.000,00	93,63	58.000.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	3.600.000,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.800.000,00</b>	<b>18.845.000,00</b>	<b>19,88</b>	<b>66.700.000,00</b>

- d) Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp2.215.429.309,00 atau 57,70% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.839.350.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-144 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	65.797.800,00	15.797.800,00	24,01	4.000.000,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.436.650.000,00	920.443.188,00	64,07	303.382.090,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	600.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	315.000.000,00	28.200.000,00	8,95	75.650.000,00
8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.812.510.000,00	1.076.446.820,00	59,39	1.309.074.001,00
9	Belanja Sewa Mebel	33.173.000,00	10.500.000,00	31,65	0,00
10	Belanja Sewa Alat Pembersih	70.000.000,00	57.970.501,00	82,82	49.978.500,00
11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.920.000,00	10.902.000,00	99,84	4.000.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.500.000,00	11.379.000,00	98,95	750.000,00
13	Belanja Sewa Peralatan Studio Video	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	dan Film				
14	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	16.000.000,00
15	Belanja Sewa Peralatan Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	14.000.000,00	13.990.000,00	99,93	4.000.000,00
17	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	9.098.000,00
18	Belanja Sewa Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	7.619.400,00
19	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
20	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.462.850,00
22	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	3.757.000,00
23	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.839.350.800,00</b>	<b>2.215.429.309,00</b>	<b>57,70</b>	<b>1.828.171.841,00</b>

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp2.976.151.309,00 atau 64,41% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.620.427.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-145 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	65.797.800,00	15.797.800,00	24,01	4.000.000,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	98.611.000,00	87.691.000,00	88,93	41.422.000,00
3	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.948.910.000,00	1.425.518.188,00	73,14	535.212.090,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.600.000,00	32.850.000,00	94,94	4.840.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	9.440.000,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	315.000.000,00	28.200.000,00	8,95	75.650.000,00
8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.812.510.000,00	1.076.446.820,00	59,39	1.309.074.001,00
9	Belanja Sewa Mebel	42.723.000,00	20.050.000,00	46,93	0,00
10	Belanja Sewa Alat Pembersih	70.000.000,00	57.970.501,00	82,82	49.978.500,00
11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.310.000,00	14.292.000,00	99,87	7.500.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	45.750.000,00	45.629.000,00	99,74	6.250.000,00
13	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	19.050.000,00	18.550.000,00	97,38	2.140.000,00
14	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	16.000.000,00
15	Belanja Sewa Peralatan Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	14.000.000,00	13.990.000,00	99,93	4.000.000,00
17	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	9.098.000,00
18	Belanja Sewa Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	7.619.400,00
19	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
20	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.462.850,00
22	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	3.757.000,00
23	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	81.366.000,00	81.366.000,00	100,00	8.235.000,00
25	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.620.427.800,00</b>	<b>2.976.151.309,00</b>	<b>64,41</b>	<b>2.135.378.841,00</b>

e) Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.381.481.000,00 atau 95,79% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.442.248.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-146 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	118.160.000,00	117.600.000,00	99,53	267.862.500,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	78.750.000,00	78.750.000,00	100,00	38.250.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	149.188.000,00	148.000.000,00	99,20	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	810.500.000,00	775.859.500,00	95,73	458.107.100,00
5	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	50.000.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.000.000,00	41.500.000,00	84,69	20.000.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Sewa Hotel	111.250.000,00	94.371.500,00	84,83	23.348.000,00
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.442.248.000,00</b>	<b>1.381.481.000,00</b>	<b>95,79</b>	<b>857.567.600,00</b>

- f) Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 adalah sebesar Rp427.841.333,00 atau 91,12% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp469.512.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-147 Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	12.200,00	12.200,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	469.500.000,00	427.829.133,00	91,12	4.036.459.710,00
	<b>Jumlah</b>	<b>469.512.200,00</b>	<b>427.841.333,00</b>	<b>91,12</b>	<b>4.036.459.710,00</b>

- g) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2022 adalah sebesar Rp1.638.129.009,00 atau 90,38% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.812.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-148 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	5.176.800,00	5.065.840,00	97,86	138.183.813,50
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	37.985.000,00	37.539.090,00	98,83	16.760.682,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	150.000.000,00	147.135.500,00	98,09	359.332.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	670.500.000,00	665.172.500,00	99,21	1.180.786.900,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	99.572.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.883.200,00	3.693.000,00	95,10	273.438.280,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.861.000,00	5.201.776,00	52,75	76.952.743,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	60.000.000,00	58.335.059,00	97,23	237.862.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	355.000.000,00	349.429.000,00	98,43	410.658.500,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	320.000.000,00	266.757.244,00	83,36	206.485.200,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	183.614.794,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	14.359.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	1.040.150.000,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	167.414.500,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
16	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	745.334.000,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	98.472.000,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	147.451.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.812.406.000,00</b>	<b>1.638.129.009,00</b>	<b>90,38</b>	<b>5.396.827.812,50</b>

- h) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp1.259.009.647,00 atau 91,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.382.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-149 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	50.000.000,00	48.784.500,00	97,57	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	394.637.900,00	78,93	199.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	160.000.000,00	159.056.340,00	99,41	50.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	32.510.000,00	32.263.000,00	99,24	50.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	78.734.200,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	120.000.000,00	118.624.257,00	98,85	49.439.500,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	350.000.000,00	338.748.450,00	96,79	439.900.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	90.000.000,00	86.895.200,00	96,55	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	48.982.450,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	299.520.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.382.510.000,00</b>	<b>1.259.009.647,00</b>	<b>91,07</b>	<b>1.215.576.150,00</b>

Realisasi Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp1.259.009.647,00 atau 91,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.382.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-150 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	50.000.000,00	48.784.500,00	97,57	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	394.637.900,00	78,93	199.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	160.000.000,00	159.056.340,00	99,41	110.000.600,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	32.510.000,00	32.263.000,00	99,24	50.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	78.734.200,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	120.000.000,00	118.624.257,00	98,85	49.439.500,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	350.000.000,00	338.748.450,00	96,79	439.900.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	90.000.000,00	86.895.200,00	96,55	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	48.982.450,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	299.520.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.382.510.000,00</b>	<b>1.259.009.647,00</b>	<b>91,07</b>	<b>1.275.576.750,00</b>

- i) Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) tahun 2022 adalah sebesar Rp136.500.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp136.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-151 Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	115.500.000,00	115.500.000,00	100,00	156.000.000,00
2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	192.060.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>136.500.000,00</b>	<b>136.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>348.060.000,00</b>

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) merupakan belanja jasa atas ketersediaan layanan jasa publikasi informasi pariwisata melalui media TV, media cetak dan media online, pemasangan banner dan bando promosi pariwisata serta pembuatan dan pemasangan baliho informasi nasional dan informasi daerah.

- j) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp3.057.655.490,00 atau 90,58% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.375.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-152 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.164.700.000,00	1.082.078.190,00	92,91	261.965.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	2.107.000.000,00	1.871.577.300,00	88,83	863.315.450,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	144.236.000,00
4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.375.700.000,00</b>	<b>3.057.655.490,00</b>	<b>90,58</b>	<b>1.269.516.450,00</b>

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp6.003.386.433,00 atau 94,96% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.321.750.943,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-153 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.641.020.712,00	2.558.078.902,00	96,86	772.911.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	2.107.000.000,00	1.871.577.300,00	88,83	920.145.450,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	144.236.000,00
4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
5	Belanja Sosialisasi	26.404.650,00	26.404.650,00	100,00	179.828.000,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	541.349.780,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.443.325.581,00	1.443.325.581,00	100,00	581.688.639,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.321.750.943,00</b>	<b>6.003.386.433,00</b>	<b>94,96</b>	<b>3.368.158.869,00</b>

- k) Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2022 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-154 Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
2	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.237.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.487.000,00</b>

Realisasi Belanja Jasa tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp233.804.311.800,96 atau 89,28% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp261.867.681.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-155 Rincian Belanja Jasa Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	209.860.187.784,00	185.708.963.891,00	88,49	189.581.737.470,56
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.727.338.682,00	34.254.004.178,96	95,88	19.694.086.322,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Sewa Tanah	94.800.000,00	18.845.000,00	19,88	66.700.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.620.427.800,00	2.976.151.309,00	64,41	2.135.378.841,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.442.248.000,00	1.381.481.000,00	95,79	857.567.600,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	469.512.200,00	427.841.333,00	91,12	4.036.459.710,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.812.406.000,00	1.638.129.009,00	90,38	5.396.827.812,50
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.382.510.000,00	1.259.009.647,00	91,07	1.275.576.750,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	136.500.000,00	136.500.000,00	100,00	348.060.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.321.750.943,00	6.003.386.433,00	94,96	3.368.158.869,00
11	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.487.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>261.867.681.409,00</b>	<b>233.804.311.800,96</b>	<b>89,28</b>	<b>226.789.040.375,06</b>

- 3) Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp4.780.461.309,00 atau 92,49% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.168.770.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-156 Rincian Belanja Pemeliharaan Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	24.988.000,00	99,95	24.998.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.291.855.580,00	2.016.924.967,00	88,00	1.891.437.667,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.925.154.600,00	1.854.007.043,00	96,30	3.309.789.372,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	510.050.000,00	497.141.299,00	97,47	1.008.741.150,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	416.710.000,00	387.400.000,00	92,97	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.168.770.180,00</b>	<b>4.780.461.309,00</b>	<b>92,49</b>	<b>6.234.966.189,00</b>

- a) Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah tahun 2022 adalah sebesar Rp24.988.000,00 atau 99,95% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-157 Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	25.000.000,00	24.988.000,00	99,95	24.998.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>24.988.000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>24.998.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp2.016.924.967,00 atau 88,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.291.855.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-158 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.500.000,00	59.984.400,00	99,15	70.360.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.477.000,00	125.443.850,00	99,97	124.235.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	48.000.000,00	35.480.000,00	73,92	25.715.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.000.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	40.609.197,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	105.600.000,00	72.547.250,00	68,70	26.905.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	358.920.000,00	325.530.673,00	90,70	309.876.850,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	44.998.500,00	100,00	32.000.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.200.000,00	20.187.000,00	71,59	34.945.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	400.950.000,00	364.081.644,00	90,80	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	4.620.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	11.000.000,00	8.073.700,00	73,40	2.875.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	285.800,00	285.800,00	100,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	150.000.000,00	148.895.000,00	99,26	128.315.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.754.600,00	18.087.500,00	96,44	86.820.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	8.400.000,00	8.350.000,00	99,40	305.100,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	1.326.300,00	895.800,00	67,54	8.876.770,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.817.200,00	10.050.000,00	20,59	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	60.780.800,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	185.000,00	185.000,00	100,00	10.210.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.937.700,00	6.040.000,00	76,09	15.435.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.988.400,00	11.823.400,00	91,03	44.126.900,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.132.800,00	18.811.700,00	84,99	42.625.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.651.680,00	1.488.000,00	90,09	878.900,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	16.863.000,00	16.863.000,00	100,00	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000,00	14.130.000,00	94,20	11.400.000,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	250.375.000,00	194.999.250,00	77,88	194.777.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.786.900,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	238.600,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	7.291.100,00	7.057.100,00	96,79	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	4.000.000,00	2.886.000,00	72,15	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	159.558.500,00
49	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	41.000.000,00	38.890.000,00	94,85	16.305.000,00
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	24.000.000,00	14.440.000,00	60,17	20.800.000,00
51	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	105.166.300,00	102.234.800,00	97,21	202.328.140,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Peralatan Mainframe					
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	1.700.000,00	17,00	15.928.200,00
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	102.000.000,00	100.621.500,00	98,65	146.569.040,00
55	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	44.390.600,00	39.285.600,00	88,50	24.373.510,00
56	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
58	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	168.819.600,00	163.780.500,00	97,02	0,00
59	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	135.000,00
60	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.001.060,00
61	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
62	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	14.472.700,00
63	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.291.855.580,00</b>	<b>2.016.924.967,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1.891.437.667,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp5.898.224.702,00 atau 87,87% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.712.546.268,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-159 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.500.000,00	59.984.400,00	99,15	70.360.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	129.659.400,00	129.659.400,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	263.969.700,00	263.969.700,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.477.000,00	125.443.850,00	99,97	124.235.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	48.000.000,00	35.480.000,00	73,92	25.715.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.000.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	190.165.197,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	168.100.750,00	135.048.000,00	80,34	46.241.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Dinas Bermotor Perorangan				
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	358.920.000,00	325.530.673,00	90,70	311.476.850,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	44.998.500,00	100,00	32.000.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.200.000,00	20.187.000,00	71,59	34.945.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	358.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	475.282.050,00	438.413.694,00	92,24	50.255.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	4.620.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	27.830.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	11.000.000,00	8.073.700,00	73,40	2.875.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	285.800,00	285.800,00	100,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	150.000.000,00	148.895.000,00	99,26	128.315.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	139.202.450,00	139.202.450,00	100,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.754.600,00	18.087.500,00	96,44	86.820.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	8.400.000,00	8.350.000,00	99,40	305.100,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	1.326.300,00	895.800,00	67,54	8.876.770,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.817.200,00	10.050.000,00	20,59	41.366.200,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	51.131.900,00	9.059.000,00	17,72	15.054.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	80.088.100,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	325.370.882,00	203.385.900,00	62,51	318.834.650,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.454.351,00	60.409.950,00	66,05	10.210.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.937.700,00	6.040.000,00	76,09	18.795.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	803.758.000,00	799.332.200,00	99,45	775.660.600,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.472.986,00	29.772.700,00	53,67	100.604.825,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.651.680,00	1.488.000,00	90,09	878.900,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	16.863.000,00	16.863.000,00	100,00	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000,00	14.130.000,00	94,20	11.400.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	250.375.000,00	194.999.250,00	77,88	194.777.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.786.900,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	238.600,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.496.697.671,00	1.496.697.671,00	100,00	1.560.801.381,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	186.676.200,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	3.703.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	20.257.000,00	20.257.000,00	100,00	1.749.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.329.000,00	1.329.000,00	100,00	5.323.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	20.307.500,00	20.078.100,00	98,87	4.867.500,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	7.291.100,00	7.057.100,00	96,79	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	4.000.000,00	2.886.000,00	72,15	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	109.873.000,00	96.985.000,00	88,27	167.096.500,00
49	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	615.643.162,00	457.832.564,00	74,37	194.391.600,00
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	24.000.000,00	14.440.000,00	60,17	130.521.700,00
51	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	105.166.300,00	102.234.800,00	97,21	203.203.140,00
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	184.148.596,00	67.745.086,00	36,79	81.122.500,00
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	133.164.006,00	117.201.500,00	88,01	204.850.540,00
55	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	85.476.914,00	72.256.914,00	84,53	24.373.510,00
56	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	610.000,00	610.000,00	100,00	0,00
57	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR- Alat Pendukung Pencarian	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
58	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	168.819.600,00	163.780.500,00	97,02	0,00
59	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	135.000,00
60	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.001.060,00
61	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
62	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	14.472.700,00
63	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
64	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
65	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	15.325.170,00	0,00	0,00	795.000,00
66	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.712.546.268,00</b>	<b>5.898.224.702,00</b>	<b>87,87</b>	<b>5.514.082.523,00</b>

- c) Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp1.854.007.043,00 atau 96,30% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.925.154.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-160 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.529.905.760,00	1.474.961.868,00	96,41	1.506.867.874,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	49.775.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	30.989.000,00	19.904.175,00	64,23	49.212.300,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	127.600.000,00	127.228.200,00	99,71	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	3.159.900,00	0,00	0,00	462.503.500,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	128.271.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	142.099.940,00	141.352.900,00	99,47	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	75.400.000,00	74.809.900,00	99,22	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	114.100.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	124.372.200,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	155.885.000,00
22	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	718.802.498,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.925.154.600,00</b>	<b>1.854.007.043,00</b>	<b>96,30</b>	<b>3.309.789.372,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp17.690.821.483,00 atau 97,18% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp18.204.421.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-161 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.091.959.021,00	1.982.867.635,00	94,79	1.506.867.874,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	87.320.000,00	75.243.000,00	86,17	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	49.775.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	30.989.000,00	19.904.175,00	64,23	49.212.300,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	127.600.000,00	127.228.200,00	99,71	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	3.159.900,00	0,00	0,00	462.503.500,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.985.780.621,00	1.866.046.404,00	93,97	7.103.363.830,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	7.726.516.350,00	7.716.106.000,00	99,87	3.861.493.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.143.842.747,00	1.096.972.910,00	95,90	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	51.606.100,00	51.606.100,00	100,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	43.430.710,00	34.927.000,00	80,42	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	216.067.200,00	204.285.000,00	94,55	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	442.430.431,00	401.806.350,00	90,82	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.458.826.330,00	3.339.650.226,00	96,55	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	337.341.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	142.099.940,00	141.352.900,00	99,47	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	75.400.000,00	74.809.900,00	99,22	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	378.584.480,00	369.176.130,00	97,51	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	114.100.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	148.059.550,00	143.340.553,00	96,81	124.372.200,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	34.749.000,00	29.749.000,00	85,61	155.885.000,00
22	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	718.802.498,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.204.421.380,00</b>	<b>17.690.821.483,00</b>	<b>97,18</b>	<b>14.483.716.202,00</b>

- d) Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp497.141.299,00 atau 97,47% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp510.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-162 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	110.550.000,00	97.841.299,00	88,50	98.413.050,00
2	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	399.500.000,00	399.300.000,00	99,95	800.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.328.100,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>510.050.000,00</b>	<b>497.141.299,00</b>	<b>97,47</b>	<b>1.008.741.150,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp913.347.592,00 atau 77,27% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.182.089.003,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-163 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	110.550.000,00	97.841.299,00	88,50	98.413.050,00
2	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	399.500.000,00	399.300.000,00	99,95	800.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.328.100,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	333.378.559,00	140.862.050,00	42,25	142.994.810,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	202.113.794,00	138.797.593,00	68,67	96.818.923,39
6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	136.546.650,00	136.546.650,00	100,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	91.332.900,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.760.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.182.089.003,00</b>	<b>913.347.592,00</b>	<b>77,27</b>	<b>1.388.022.783,39</b>

e) Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp387.400.000,00 atau 92,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp416.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-164 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	416.710.000,00	387.400.000,00	92,97	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>416.710.000,00</b>	<b>387.400.000,00</b>	<b>92,97</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp403.115.000,00 atau 26,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.517.979.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-165 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.081.933.350,00	4.695.000,00	0,43	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	416.710.000,00	387.400.000,00	92,97	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	6.520.000,00	6.020.000,00	92,33	1.980.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	466.200,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	12.350.000,00	5.000.000,00	40,49	2.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.517.979.550,00</b>	<b>403.115.000,00</b>	<b>26,56</b>	<b>4.480.000,00</b>

- 4) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp36.622.421.685,00 atau 76,19% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp48.069.688.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-166 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.027.688.488,00	36.622.421.685,00	76,25	25.647.472.523,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>48.069.688.488,00</b>	<b>36.622.421.685,00</b>	<b>76,19</b>	<b>25.647.472.523,00</b>

- a) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp36.622.421.685,00 atau 76,25% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp48.069.688.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-167 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.200.000,00	83.300.000,00	94,44	30.720.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.113.244.000,00	14.543.808.500,00	72,31	10.368.034.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.043.921.000,00	808.778.550,00	77,48	684.115.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.782.323.488,00	21.186.534.635,00	79,11	14.564.603.523,00
<b>Jumlah</b>		<b>48.027.688.488,00</b>	<b>36.622.421.685,00</b>	<b>76,25</b>	<b>25.647.472.523,00</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar Rp37.537.672.047,00 atau 76,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp49.005.121.295,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-168 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	877.048.712,00	858.779.012,00	97,92	494.154.840,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.301.828.095,00	14.683.579.850,00	72,33	10.545.298.350,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.043.921.000,00	808.778.550,00	77,48	684.745.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.782.323.488,00	21.186.534.635,00	79,11	14.565.003.523,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.005.121.295,00</b>	<b>37.537.672.047,00</b>	<b>76,60</b>	<b>26.289.201.713,00</b>

- b) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tanah tahun 2022 adalah sebesar nihil dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp42.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-169 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 5) Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp19.166.914.928,00 atau 93,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp20.402.278.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-170 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.708.066.800,00	17.780.681.000,00	95,04	22.158.554.500,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.694.212.000,00	1.386.233.928,00	81,82	4.183.920.916,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.402.278.800,00</b>	<b>19.166.914.928,00</b>	<b>93,94</b>	<b>26.342.475.416,00</b>

- a) Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp17.780.681.000,00 atau 95,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp18.708.066.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-171 Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	192.166.800,00	149.131.000,00	77,60	53.500.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.063.400.000,00	641.350.000,00	60,31	1.109.554.500,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.017.500.000,00	1.995.000.000,00	98,88	4.915.000.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	15.435.000.000,00	14.995.200.000,00	97,15	16.080.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.708.066.800,00</b>	<b>17.780.681.000,00</b>	<b>95,04</b>	<b>22.158.554.500,00</b>

- b) Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp1.386.233.928,00 atau 81,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.694.212.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-172 Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.418.012.000,00	1.232.625.350,00	86,93	1.039.197.200,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	276.200.000,00	153.608.578,00	55,61	3.144.723.716,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.694.212.000,00</b>	<b>1.386.233.928,00</b>	<b>81,82</b>	<b>4.183.920.916,00</b>

- 6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp42.788.897.743,00 atau 80,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp53.461.682.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-173 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.461.682.552,00	42.788.897.743,00	80,04	46.246.768.790,32
<b>Jumlah</b>		<b>53.461.682.552,00</b>	<b>42.788.897.743,00</b>	<b>80,04</b>	<b>46.246.768.790,32</b>

Realisasi Barang dan Jasa BOS tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-174 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 7) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 sebelum mapping adalah sebesar Rp107.387.178.447,70 atau 99,21% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp108.243.425.126,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-175 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.243.425.126,00	107.387.178.447,70	99,21	102.074.211.513,85
<b>Jumlah</b>		<b>108.243.425.126,00</b>	<b>107.387.178.447,70</b>	<b>99,21</b>	<b>102.074.211.513,85</b>

Realisasi Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-176 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8) Realisasi Belanja Lain-lain (Extracomp) Setelah Mapping tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-177 Rincian Belanja Lain-lain (Extracomp) Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	1.026.900,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	31.640.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	212.220.450,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.713.350,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 setelah mapping sebesar Rp475.353.826.339,66 atau 87,29% dari anggarannya sebesar Rp544.585.852.641,00 dengan obyek sebagai berikut :

**Tabel 5-178 Rincian Belanja Barang dan Jasa Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	185.626.734.936,00	159.912.830.786,70	86,15	142.933.870.626,25
2	Belanja Jasa	261.867.681.409,00	233.804.311.800,96	89,28	226.789.040.375,06
3	Belanja Pemeliharaan	27.642.036.201,00	24.930.496.777,00	90,19	21.415.299.508,39
4	Belana Perjalanan Dinas	49.047.121.295,00	37.539.272.047,00	76,54	26.289.201.713,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.402.278.800,00	19.166.914.928,00	93,94	26.342.475.416,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Lain-lain (Extracomp)	0,00	0,00	0,00	246.713.350,00
<b>Jumlah</b>		<b>544.585.852.641,00</b>	<b>475.353.826.339,66</b>	<b>87,29</b>	<b>444.016.600.988,70</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	2.183.163.800,00	2.183.163.800,00	1.183.163.800,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 adalah sebesar Rp2.183.163.800,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.183.163.800,00. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/323/430.4.2/2022 tanggal 24 Maret 2022 +tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.183.163.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-179 Rincian Belanja Subsidi**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.183.163.800,00	2.183.163.800,00	100,00	1.183.163.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.183.163.800,00</b>	<b>2.183.163.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.183.163.800,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	96.551.774.010,00	93.266.283.855,00	130.514.844.220,06

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pelaksanaan Belanja Hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp93.266.283.855,00 atau 96,60% dari anggarannya sebesar Rp96.551.774.010,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp130.514.844.220,06, realisasi belanja Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp93.266.283.855,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.248.560.365,06 atau sebesar 28,54% dengan obyek belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-180 Rincian Belanja Hibah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	94.776.322.010,00	91.490.831.855,00	96,53	112.988.458.700,06
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	1.775.452.000,00
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	496.892.520,00
4	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.254.041.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>96.551.774.010,00</b>	<b>93.266.283.855,00</b>	<b>96,60</b>	<b>130.514.844.220,06</b>

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Hibah tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp96.551.774.010,00 dan realisasi sebesar Rp93.266.283.855,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 adalah sebesar Rp91.490.831.855,00 atau 96,53% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp94.776.322.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-181 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.440.148.052,00	34.256.931.933,00	96,66	28.410.784.315,67
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.773.091.103,00	21.421.184.900,00	98,38	29.377.492.888,37
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	37.563.082.855,00	35.812.715.022,00	95,34	55.200.181.496,02
<b>Jumlah</b>		<b>94.776.322.010,00</b>	<b>91.490.831.855,00</b>	<b>96,53</b>	<b>112.988.458.700,06</b>

- a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 adalah sebesar Rp34.256.931.933,00 atau 96,66% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp35.440.148.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-182 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.351.452.052,00	31.410.282.000,00	97,09	24.554.600.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.088.696.000,00	2.846.649.933,00	92,16	3.856.184.315,67
<b>Jumlah</b>		<b>35.440.148.052,00</b>	<b>34.256.931.933,00</b>	<b>96,66</b>	<b>28.410.784.315,67</b>

- b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2022 adalah sebesar Rp21.421.184.900,00 atau 98,38% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp21.773.091.103,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-183 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.774.099.903,00	20.456.780.000,00	98,47	25.292.800.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	998.991.200,00	964.404.900,00	96,54	4.084.692.888,37
<b>Jumlah</b>		<b>21.773.091.103,00</b>	<b>21.421.184.900,00</b>	<b>98,38</b>	<b>29.377.492.888,37</b>

- c) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2022 adalah sebesar Rp35.812.715.022,00 atau 95,34% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp37.563.082.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-184 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.777.250.520,00	11.773.156.600,00	99,97	17.209.317.383,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.785.832.335,00	24.039.558.422,00	93,23	37.990.864.113,02
<b>Jumlah</b>		<b>37.563.082.855,00</b>	<b>35.812.715.022,00</b>	<b>95,34</b>	<b>55.200.181.496,02</b>

- 2) Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2022 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.775.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-185 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	1.775.452.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.775.452.000,00</b>	<b>1.775.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.775.452.000,00</b>

- 3) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-186 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	496.892.520,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.892.520,00</b>

- 4) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-187 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.254.041.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254.041.000,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	24.895.399.500,00	19.011.581.040,00	35.217.459.036,80

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp19.011.581.040,00 atau 76,37% dari anggarannya sebesar Rp24.895.399.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp35.217.459.036,80 realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 sebesar Rp19.011.581.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.205.877.996,80 atau sebesar 46,02% dengan obyek belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-188 Rincian Belanja Bantuan Sosial**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.533.799.500,00	4.833.823.540,00	50,70	13.087.574.036,80
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	317.500.000,00	306.897.500,00	96,66	562.725.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	15.044.100.000,00	13.870.860.000,00	92,20	21.567.160.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.895.399.500,00</b>	<b>19.011.581.040,00</b>	<b>76,37</b>	<b>35.217.459.036,80</b>

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp24.895.399.500,00 dan realisasi sebesar Rp19.011.581.040,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2022 adalah sebesar Rp4.833.823.540,00 atau 50,70% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.533.799.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-189 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.121.250.000,00	3.437.200.000,00	42,32	2.438.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.412.549.500,00	1.396.623.540,00	98,87	10.649.174.036,80
<b>Jumlah</b>		<b>9.533.799.500,00</b>	<b>4.833.823.540,00</b>	<b>50,70</b>	<b>13.087.574.036,80</b>

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu tahun 2022 adalah sebesar Rp3.437.200.000,00 atau 42,32% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.121.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-190 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.121.250.000,00	3.437.200.000,00	42,32	2.438.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.121.250.000,00</b>	<b>3.437.200.000,00</b>	<b>42,32</b>	<b>2.438.400.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu tahun 2022 adalah sebesar Rp1.396.623.540,00 atau 98,87% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.412.549.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-191 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.412.549.500,00	1.396.623.540,00	98,87	10.649.174.036,80
<b>Jumlah</b>		<b>1.412.549.500,00</b>	<b>1.396.623.540,00</b>	<b>98,87</b>	<b>10.649.174.036,80</b>

- 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp306.897.500,00 atau 96,66% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp317.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-192 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	270.000.000,00	260.000.000,00	96,30	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	47.500.000,00	46.897.500,00	98,73	562.725.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>317.500.000,00</b>	<b>306.897.500,00</b>	<b>96,66</b>	<b>562.725.000,00</b>

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp 260.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-193 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	270.000.000,00	260.000.000,00	96,30	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>270.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp46.897.500,00 atau 98,73% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp47.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-194 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	47.500.000,00	46.897.500,00	98,73	562.725.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.500.000,00</b>	<b>46.897.500,00</b>	<b>98,73</b>	<b>562.725.000,00</b>

- 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2022 adalah sebesar Rp13.870.860.000,00 atau 92,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp15.044.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-195 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.844.100.000,00	13.671.100.000,00	92,10	21.320.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	199.760.000,00	99,88	246.960.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.044.100.000,00</b>	<b>13.870.860.000,00</b>	<b>92,20</b>	<b>21.567.160.000,00</b>

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2022 adalah sebesar Rp13.671.100.000,00 atau 92,10% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.844.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-196 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.844.100.000,00	13.671.100.000,00	92,10	21.320.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.844.100.000,00</b>	<b>13.671.100.000,00</b>	<b>92,10</b>	<b>21.320.200.000,00</b>

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2022 adalah sebesar Rp199.760.000,00 atau 99,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-197 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	199.760.000,00	99,88	246.960.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>199.760.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>246.960.000,00</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>218.487.359.953,00</b>	<b>190.396.577.000,00</b>	<b>196.554.645.695,81</b>

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 adalah sebesar Rp190.396.577.000,00 atau 87,14% dari anggarannya sebesar Rp218.487.359.953,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp196.554.645.695,81, realisasi Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp190.396.577.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.158.068.695,81 atau sebesar 3,13% dengan jenis belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-198 Jenis Belanja Modal**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.925.081.919,00	86.205.466.900,00	90,81	95.221.279.024,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.780.390.024,00	48.977.092.155,00	80,58	42.446.436.867,21
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.591.526.965,00	48.386.382.840,00	88,63	51.677.563.443,60
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.190.361.045,00	6.802.635.105,00	94,61	7.025.222.811,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	184.143.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>218.487.359.953,00</b>	<b>190.396.577.000,00</b>	<b>87,14</b>	<b>196.554.645.695,81</b>

		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2.1	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>94.925.081.919,00</b>	<b>86.205.466.900,00</b>	<b>95.221.279.024,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp86.205.466.900,00 atau 90,81% dari anggaran sebesar Rp94.925.081.919,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp95.221.279.024,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp86.205.466.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.015.812.124,00 atau 9,47% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-199 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Alat Besar	2.726.681.900,00	2.711.435.300,00	99,44	128.065.000,00
1	Belanja Modal Tractor	25.000.000,00	22.444.300,00	89,78	0,00
2	Belanja Modal Excavator	1.983.400.700,00	1.982.460.000,00	99,95	0,00
3	Belanja Modal Hauler	511.479.400,00	505.561.000,00	98,84	0,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	134.000.000,00	132.329.000,00	98,75	49.885.000,00
5	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	48.701.800,00	48.022.500,00	98,61	39.400.000,00
6	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pompa	24.100.000,00	20.618.500,00	85,55	36.780.000,00
8	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Belanja Modal Feeder	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	8.371.891.500,00	6.505.974.200,00	77,71	1.710.180.600,00
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.465.000.000,00	3.452.900.000,00	99,65	608.274.200,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	567.226.400,00	560.000.000,00	98,73	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	225.000.000,00	222.240.350,00	98,77	175.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	564.882.200,00	533.743.000,00	94,49	40.587.600,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	159.000.000,00	154.358.250,00	97,08	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.407.496.900,00	604.690.000,00	25,12	0,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	600.000.000,00	596.756.000,00	99,46	750.168.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	383.286.000,00	381.286.600,00	99,48	125.830.800,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.615.900,00	34.071.460,00	93,05	214.598.000,00
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.248.900,00	2.248.860,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	113.630.000,00
5	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	3.967.000,00	1.998.000,00	50,37	0,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	20.000.000,00	19.824.600,00	99,12	649.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	400.000,00	0,00	0,00	981.400,00
9	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	6.935.500,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	1.494.900,00
14	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	44.528.000,00
15	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	0,00	0,00	0,00	16.918.400,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.460.800,00
18	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	70.350.000,00	68.630.000,00	97,56	72.892.800,00
1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	32.000.000,00	30.890.000,00	96,53	4.395.000,00
2	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	38.350.000,00	37.740.000,00	98,41	0,00
3	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	67.040.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.457.800,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.100.186.955,00	8.712.910.286,00	95,74	10.864.115.326,00
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	724.000,00	724.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	740.185.295,00	723.517.680,00	97,75	1.119.807.920,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.325.274.362,00	3.147.719.451,00	94,66	3.237.410.780,00
5	Belanja Modal Mebel	2.694.962.800,00	2.628.043.275,00	97,52	2.687.780.231,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	1.665.000,00	1.100.000,00	66,07	60.500.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	342.211.669,00	324.391.440,00	94,79	1.357.399.430,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	340.268.845,00	332.772.780,00	97,80	131.420.000,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.502.215.584,00	1.408.979.890,00	93,79	1.501.889.175,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	70.656.200,00	66.533.770,00	94,17	287.692.830,00
11	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
12	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	56.410.200,00	54.645.000,00	96,87	44.665.000,00
13	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11.366.000,00	11.183.000,00	98,39	63.385.960,00
14	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	14.247.000,00	13.300.000,00	93,35	28.215.000,00
15	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	109.665.000,00
16	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	55.050.000,00
17	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	177.244.000,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.768.506.814,00	1.545.323.950,00	87,38	2.963.366.269,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	66.204.914,00	62.718.000,00	94,73	404.817.310,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	811.056.900,00	613.218.570,00	75,61	573.287.950,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.703.000,00	6.702.180,00	99,99	125.569.700,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	219.329.909,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	4.050.000,00	3.964.200,00	97,88	0,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	79.492.000,00	77.341.000,00	97,29	34.447.400,00
8	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	47.550.000,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	165.798.000,00
10	Belanja Modal Sumber Tenaga	791.000.000,00	771.390.000,00	97,52	1.338.040.000,00
11	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.951.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.744.197.263,00	12.020.899.528,00	87,46	33.027.641.609,00
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.569.457.599,00	3.952.599.012,00	86,50	1.168.814.753,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	62.089.921,00	44.342.271,00	71,42	202.400.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.640.060.000,00	1.620.899.800,00	98,83	2.688.349.124,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.658.805.220,00	3.322.761.900,00	90,82	3.696.866.858,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	119.260.000,00	12.143.248,00	10,18	1.650.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.535.932.900,00	1.158.753.965,00	75,44	544.141.154,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	109.573.078,00	94.434.980,00	86,18	187.979.940,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	981.322.000,00	837.042.893,00	85,30	2.813.075.070,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.066.265,00	0,00	0,00	26.980.000,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	65.800.000,00	33.874.000,00	51,48	195.606.000,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	284.100.000,00	277.493.432,00	97,67	0,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	22.770.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	445.000.000,00	445.000.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	151.620.000,00	150.082.000,00	98,99	10.120.000,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	20.070.578.240,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
24	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	95.590.280,00	70.722.027,00	73,98	871.080.470,00
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.095.203.681,00	4.875.253.347,00	95,68	4.076.704.506,00
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.387.288.281,00	2.334.491.134,00	97,79	990.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	702.100.000,00	691.795.400,00	98,53	127.736.999,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	146.430.000,00	127.696.633,00	87,21	241.498.370,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	39.063.000,00	31.530.000,00	80,72	0,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	800.000.000,00	799.476.000,00	99,93	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	9.213.000,00	6.704.400,00	72,77	1.891.096.132,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	908.400,00	907.980,00	99,95	37.005.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Analytical Instrument	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	790.000.000,00	679.853.600,00	86,06	3.980.000,00
11	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
12	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	380.692.500,00
13	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	175.000.000,00	157.626.000,00	90,07	48.595.000,00
14	Alat Kesehatan Kerja	750.000,00	750.000,00	100,00	600.000,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	87.094.000,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	44.451.000,00	44.422.200,00	99,94	156.200.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	19.225.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	1.002.330.006,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	57.461.499,00
I	Belanja Modal Komputer	17.163.022.330,00	16.695.349.229,00	97,28	7.313.939.537,00
1	Belanja Modal Personal Computer	15.279.007.060,00	15.004.126.348,00	98,20	1.895.489.200,00
2	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	377.724.800,00	365.772.130,00	96,84	3.355.091.876,00
3	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	488.700,00	240.000,00	49,11	79.002.400,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	91.133.000,00	68.577.450,00	75,25	59.149.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	606.266.360,00	552.636.701,00	91,15	1.209.855.260,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	609.093.200,00	524.306.000,00	86,08	429.892.600,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	199.309.210,00	179.690.600,00	90,16	265.459.201,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	1.975.000,00
1	Belanja Modal Elektronik/Electric	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	1.975.000,00
K	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	174.443.000,00	141.099.700,00	80,89	62.404.500,00
1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	17.700.000,00	17.460.300,00	98,65	0,00
3	Belanja Modal Masker	3.441.000,00	3.374.400,00	98,06	0,00
4	Belanja Modal Topi Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33	35.454.500,00
6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	57.602.000,00	33.744.000,00	58,58	19.250.000,00
7	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	3.000.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
9	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	84.400.000,00	82.321.000,00	97,54	0,00
L	Belanja Modal Alat Peraga	161.000.000,00	152.389.500,00	94,65	400.340.300,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	45.000.000,00	38.337.000,00	85,19	99.275.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	116.000.000,00	114.052.500,00	98,32	301.065.300,00
3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
M	Belanja Modal Rambu-Rambu	102.053.800,00	100.403.000,00	98,38	684.986.600,00
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	39.504.800,00	38.184.000,00	96,66	163.911.000,00
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	62.549.000,00	62.219.000,00	99,47	521.075.600,00
N	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
1	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	28.103.000,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.103.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.775.380.546,00	9.548.074.116,00	81,09	12.325.345.533,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.775.380.546,00	9.548.074.116,00	81,09	12.325.345.533,00
Q	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.625.548.230,00	23.083.774.284,00	93,74	21.341.670.444,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.625.548.230,00	23.083.774.284,00	93,74	21.341.670.444,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.925.081.919,00</b>	<b>86.205.466.900,00</b>	<b>90,81</b>	<b>95.221.279.024,00</b>

Pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp86.205.466.900,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat tidak rinci yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp9.548.074.116,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp23.083.774.284,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat tidak rinci tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-200 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Electric Generating Set	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pompa	17.122.900,00	17.122.900,00	100,00	46.603.800,00
3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	4.049.960,00	4.047.350,00	99,94	0,00
4	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	22.652.500,00	21.392.500,00	94,44	13.420.200,00
5	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	15.952.210,00	15.747.500,00	98,72	136.218.800,00
7	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.175.000,00	5.425.000,00	87,85	37.247.800,00
8	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.257.000,00	5.147.000,00	97,91	14.066.200,00
9	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
10	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.560.550.420,00	1.069.456.550,00	68,53	1.837.621.675,00
11	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.525.092.893,00	1.243.413.772,00	81,53	1.056.273.052,00
12	Belanja Modal Mebel	2.892.189.029,00	2.080.338.227,00	71,93	2.999.886.550,00
13	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	57.421.948,00	54.929.546,00	95,66	52.122.500,00
14	Belanja Modal Alat Pembersih	25.695.800,00	25.668.110,00	99,89	39.449.500,00
15	Belanja Modal Alat Pendingin	316.113.641,00	288.617.390,00	91,30	458.870.402,00
16	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.706.600,00
17	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	669.467.117,00	642.425.560,00	95,96	1.034.038.800,00
18	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.250.000,00	4.700.000,00	89,52	1.485.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	198.722.066,00	185.849.816,00	93,52	57.278.500,00
20	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	189.570.800,00	175.691.800,00	92,68	126.491.000,00
21	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	3.442.000,00
22	Belanja Modal Sumber Tenaga	160.879.000,00	136.814.000,00	85,04	161.316.200,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.836.500,00	3.833.280,00	99,92	2.052.500,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	6.007.000,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	8.669.500,00	7.559.500,00	87,20	550.000,00
26	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang	30.333.000,00	18.408.000,00	60,69	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Studi:Agama				
27	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.370.600,00	2.370.600,00	100,00	711.000,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	196.361.000,00	187.818.000,00	95,65	73.556.000,00
29	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.332.500,00	2.332.500,00	100,00	3.980.500,00
30	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	10.962.920,00	10.793.000,00	98,45	20.151.700,00
31	Belanja Modal Personal Computer	2.315.846.424,00	1.945.913.090,00	84,03	2.581.611.450,00
32	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	871.628.661,00	795.423.794,00	91,26	1.081.268.850,00
33	Belanja Modal Peralatan Jaringan	188.124.319,00	166.954.327,00	88,75	128.143.254,00
34	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	13.452.500,00
35	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	6.523.000,00
36	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.722.900,00	18.861.900,00	86,83	116.701.800,00
37	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	57.564.150,00	51.581.250,00	89,61	36.340.000,00
38	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.883.800,00	2.883.800,00	100,00	1.980.000,00
39	Belanja Modal Peralatan Permainan	353.266.988,00	336.639.054,00	95,29	160.337.400,00
40	Belanja Modal Peralatan Senam	21.160.000,00	19.810.000,00	93,62	3.440.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.775.380.546,00</b>	<b>9.548.074.116,00</b>	<b>81,09</b>	<b>12.325.345.533,00</b>

Sedangkan penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp23.083.774.284,00 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-201 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Feeder	0,00	0,00	0,00	972.000.000,00
2	Belanja Modal Compressor	671.930.000,00	671.550.000,00	99,94	698.425.000,00
3	Belanja Modal Pompa	56.875.000,00	54.317.500,00	95,50	0,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	530.734.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	55.000.000,00	52.920.000,00	96,22	138.942.914,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	15.619.000,00	999.000,00	6,40	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	135.000.000,00	132.645.000,00	98,26	0,00
8	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	32.500.000,00	17.880.000,00	55,02	0,00
9	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	15.070.000,00
10	Belanja Modal Analytical Instrument	73.126.800,00	73.126.800,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	8.858.430,00
13	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	161.350.000,00	35.726.460,00	22,14	19.030.000,00
14	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00
15	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	137.000.000,00	132.143.100,00	96,45	125.091.600,00
16	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	512.100.000,00	499.725.000,00	97,58	411.200.000,00
17	Belanja Modal Mebel	1.297.488.650,00	1.290.489.500,00	99,46	761.985.480,00
18	Belanja Modal Alat Pembersih	792.462.858,00	764.647.000,00	96,49	384.890.800,00
19	Belanja Modal Alat Pendingin	3.379.300.000,00	3.154.874.250,00	93,36	2.906.963.800,00
20	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	7.659.000,00	7.659.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Dapur	45.771.000,00	19.657.000,00	42,95	7.150.000,00
22	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.093.315.020,00	455.523.472,00	41,66	313.450.000,00
23	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	43.237.000,00	10.496.493,00	24,28	0,00
24	Belanja Modal Personal Computer	638.483.010,00	593.875.000,00	93,01	318.906.000,00
25	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	442.500.000,00	254.160.000,00	57,44	451.744.500,00
26	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	40.000.000,00	12.000.000,00	30,00	0,00
27	Belanja Modal Peralatan Jaringan	550.000.000,00	513.892.750,00	93,44	604.360.500,00
28	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	82.000.000,00	74.331.250,00	90,65	1.192.900.000,00
29	Belanja Modal Peralatan Studio Video	0,00	0,00	0,00	25.520.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
	dan Film				
30	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	196.701.000,00	196.700.880,00	100,00	154.000.000,00
31	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	832.741.500,00	832.703.530,00	100,00	1.100.435.746,00
32	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	5.000.000,00	0,00	0,00	7.115.900,00
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	11.647.142,00	10.847.142,00	93,13	15.290.000,00
34	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	472.713.760,00	472.706.960,00	100,00	6.122.316.865,00
35	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	312.080.800,00	311.873.176,00	99,93	0,00
36	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	327.500.000,00	326.171.440,00	99,59	97.679.000,00
37	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.008.800.000,00	3.008.800.000,00	100,00	579.044.646,00
38	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00	74.750.100,00
39	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.797.403.800,00	2.796.704.040,00	99,97	413.582.960,00
40	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	828.880.000,00	828.880.000,00	100,00	666.699.000,00
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	65.893.200,00
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.282.670.200,00	3.277.650.000,00	99,85	1.568.500.000,00
43	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	68.069.061,00
44	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
45	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	0,00	0,00	241.497.900,00
46	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	4.893.042,00
47	Belanja Modal Alat Laboratorium Microbiologi	34.218.000,00	34.218.000,00	100,00	0,00
48	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	391.000.000,00	380.841.880,00	97,40	0,00
49	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	825.840.000,00	825.840.000,00	100,00	0,00
50	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	855.371.690,00	776.935.661,00	90,83	0,00
51	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
52	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	40.263.000,00	40.263.000,00	100,00	62.230.000,00
53	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.625.548.230,00</b>	<b>23.083.774.284,00</b>	<b>93,74</b>	<b>21.341.670.444,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah mapping Tahun 2022 sebesar Rp86.205.466.900,00 atau 90,81% dari anggaran sebesar Rp94.925.081.919,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 setelah mapping sebesar Rp95.221.279.024,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun setelah mapping 2022 sebesar Rp86.205.466.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.015.812.124,00 atau 9,47% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-202 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Alat Besar	3.488.659.800,00	3.454.425.700,00	99,02	1.845.093.800,00
1	Belanja Modal Tractor	25.000.000,00	22.444.300,00	89,78	0,00
2	Belanja Modal Excavator	1.983.400.700,00	1.982.460.000,00	99,95	0,00
3	Belanja Modal Hauler	511.479.400,00	505.561.000,00	98,84	0,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	134.000.000,00	132.329.000,00	98,75	49.885.000,00
5	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	48.701.800,00	48.022.500,00	98,61	39.400.000,00
6	Belanja Modal Electric Generating Set	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pompa	98.097.900,00	92.058.900,00	93,84	83.383.800,00
8	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Belanja Modal Feeder	0,00	0,00	0,00	972.000.000,00
10	Belanja Modal Compressor	671.930.000,00	671.550.000,00	99,94	698.425.000,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	8.449.544.000,00	6.580.286.700,00	77,88	2.393.277.714,00
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.465.000.000,00	3.452.900.000,00	99,65	608.274.200,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	567.226.400,00	560.000.000,00	98,73	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	225.000.000,00	222.240.350,00	98,77	175.000.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	564.882.200,00	533.743.000,00	94,49	571.321.600,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	159.000.000,00	154.358.250,00	97,08	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.407.496.900,00	604.690.000,00	25,12	0,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	600.000.000,00	596.756.000,00	99,46	750.168.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	460.938.500,00	455.599.100,00	98,84	278.193.914,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	397.142.110,00	237.174.420,00	59,72	393.775.230,00
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.248.900,00	2.248.860,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	15.619.000,00	999.000,00	6,40	0,00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	113.630.000,00
5	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	138.967.000,00	134.643.000,00	96,89	0,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	20.000.000,00	19.824.600,00	99,12	649.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	400.000,00	0,00	0,00	981.400,00
9	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	32.500.000,00	17.880.000,00	55,02	6.935.500,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	161.350.000,00	35.726.460,00	22,14	20.524.900,00
14	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	44.528.000,00
15	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	0,00	0,00	0,00	16.918.400,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	15.952.210,00	15.747.500,00	98,72	145.077.230,00
17	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.460.800,00
18	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	15.070.000,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	76.525.000,00	74.055.000,00	96,77	229.140.600,00
1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	38.175.000,00	36.315.000,00	95,13	160.642.800,00
2	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	38.350.000,00	37.740.000,00	98,41	0,00
3	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	67.040.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.457.800,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.465.558.331,00	20.462.821.256,00	87,20	23.281.367.285,00
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.981.000,00	5.871.000,00	98,16	14.066.200,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.437.735.715,00	1.925.117.330,00	78,97	3.082.521.195,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.362.467.255,00	4.890.858.223,00	91,21	4.704.883.832,00
5	Belanja Modal Mebel	6.884.640.479,00	5.998.871.002,00	87,13	6.449.652.261,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	819.823.658,00	791.415.110,00	96,53	484.840.300,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	4.037.625.310,00	3.767.883.080,00	93,32	4.723.233.632,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	386.039.845,00	352.429.780,00	91,29	143.276.600,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.264.997.721,00	2.506.928.922,00	76,78	2.849.377.975,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	119.143.200,00	81.730.263,00	68,60	289.177.830,00
11	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	65.080.948,00	62.588.546,00	96,17	54.112.500,00
12	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	56.410.200,00	54.645.000,00	96,87	44.665.000,00
13	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	11.366.000,00	11.183.000,00	98,39	63.385.960,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
14	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	14.247.000,00	13.300.000,00	93,35	28.215.000,00
15	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	109.665.000,00
16	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	55.050.000,00
17	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	177.244.000,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.596.379.680,00	2.314.711.696,00	89,15	4.684.313.969,00
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	346.926.980,00	322.899.066,00	93,07	1.654.995.810,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.000.627.700,00	788.910.370,00	78,84	725.298.950,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.703.000,00	6.702.180,00	99,99	125.569.700,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	219.329.909,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	4.050.000,00	3.964.200,00	97,88	0,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	276.193.000,00	274.041.880,00	99,22	191.889.400,00
8	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	47.550.000,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	165.798.000,00
10	Belanja Modal Sumber Tenaga	951.879.000,00	908.204.000,00	95,41	1.499.356.200,00
11	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.951.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.767.470.965,00	24.031.069.096,00	93,26	44.123.461.529,00
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.406.035.599,00	4.789.135.822,00	88,59	2.271.302.999,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	67.089.921,00	44.342.271,00	66,09	209.515.900,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.112.773.760,00	2.093.606.760,00	99,09	8.810.665.989,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.986.305.220,00	3.648.933.340,00	91,54	3.794.545.858,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	119.260.000,00	12.143.248,00	10,18	1.650.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.547.580.042,00	1.169.601.107,00	75,58	559.431.154,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.118.373.078,00	3.103.234.980,00	99,51	767.024.586,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.778.725.800,00	3.633.746.933,00	96,16	3.226.658.030,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.066.265,00	0,00	0,00	94.980.000,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	65.800.000,00	33.874.000,00	51,48	261.499.200,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik	3.282.670.200,00	3.277.650.000,00	99,85	1.568.500.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00	74.750.100,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	828.880.000,00	828.880.000,00	100,00	666.699.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	68.069.061,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	0,00	0,00	241.497.900,00
17	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	4.893.042,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	596.180.800,00	589.366.608,00	98,86	0,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	22.770.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	445.000.000,00	445.000.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	151.620.000,00	150.082.000,00	98,99	10.120.000,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	20.070.578.240,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
24	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	95.590.280,00	70.722.027,00	73,98	871.080.470,00
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.274.760.171,00	6.966.215.688,00	95,76	4.076.704.506,00
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.242.659.971,00	3.216.525.295,00	99,19	990.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	736.318.000,00	726.013.400,00	98,60	127.736.999,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	146.430.000,00	127.696.633,00	87,21	241.498.370,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	430.063.000,00	412.371.880,00	95,89	0,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	800.000.000,00	799.476.000,00	99,93	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	9.213.000,00	6.704.400,00	72,77	1.891.096.132,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	908.400,00	907.980,00	99,95	37.005.000,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	825.840.000,00	825.840.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Analytical Instrument	73.126.800,00	73.126.800,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	790.000.000,00	574.755.100,00	72,75	3.980.000,00
11	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
12	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	380.692.500,00
13	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	175.000.000,00	157.626.000,00	90,07	48.595.000,00
14	Alat Kesehatan Kerja	750.000,00	750.000,00	100,00	600.000,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	87.094.000,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	44.451.000,00	44.422.200,00	99,94	156.200.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	19.225.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	1.002.330.006,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	57.461.499,00
I	Belanja Modal Komputer	22.231.327.644,00	20.996.430.090,00	94,45	12.616.651.391,00
1	Belanja Modal Personal Computer	18.233.336.494,00	17.543.914.438,00	96,22	4.796.006.650,00
2	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	377.724.800,00	365.772.130,00	96,84	3.355.091.876,00
3	Belanja Modal Komputer Jaringan	188.124.319,00	166.954.327,00	88,75	20.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	488.700,00	240.000,00	49,11	92.454.900,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	91.133.000,00	68.577.450,00	75,25	65.672.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.920.395.021,00	1.602.220.495,00	83,43	2.742.868.610,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.159.093.200,00	1.038.198.750,00	89,57	1.162.396.354,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	261.032.110,00	210.552.500,00	80,66	382.161.001,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	1.975.000,00
1	Belanja Modal Elektronik/Electric	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	1.975.000,00
K	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	276.320.110,00	236.991.300,00	85,77	175.974.500,00
1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	17.700.000,00	17.460.300,00	98,65	15.000.000,00
3	Belanja Modal Masker	3.441.000,00	3.374.400,00	98,06	0,00
4	Belanja Modal Topi Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33	35.454.500,00
6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	97.865.000,00	74.007.000,00	75,62	81.480.000,00
7	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	4.049.960,00	4.047.350,00	99,94	0,00
8	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	60.564.150,00	51.581.250,00	85,17	44.040.000,00
9	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	84.400.000,00	82.321.000,00	97,54	0,00
L	Belanja Modal Alat Peraga	412.029.520,00	381.671.100,00	92,63	505.296.500,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	45.000.000,00	38.337.000,00	85,19	99.275.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	116.000.000,00	114.052.500,00	98,32	301.065.300,00
3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	30.333.000,00	18.408.000,00	60,69	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	6.007.000,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	8.669.500,00	7.559.500,00	87,20	550.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.370.600,00	2.370.600,00	100,00	711.000,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	196.361.000,00	187.818.000,00	95,65	73.556.000,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.332.500,00	2.332.500,00	100,00	3.980.500,00
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	10.962.920,00	10.793.000,00	98,45	20.151.700,00
M	Belanja Modal Rambu-Rambu	104.937.600,00	103.286.800,00	98,43	686.966.600,00
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	39.504.800,00	38.184.000,00	96,66	163.911.000,00
2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	65.432.800,00	65.102.800,00	99,50	523.055.600,00
N	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
1	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	374.426.988,00	356.449.054,00	95,20	202.330.400,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.103.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	353.266.988,00	336.639.054,00	95,29	170.787.400,00
3	Belanja Modal Peralatan Senam	21.160.000,00	19.810.000,00	93,62	3.440.000,00
P	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.925.081.919,00</b>	<b>86.205.466.900,00</b>	<b>90,81</b>	<b>95.221.279.024,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>60.780.390.024,00</b>	<b>48.977.092.155,00</b>	<b>42.446.436.867,21</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp48.977.092.155,00 atau 80,58% dari anggaran sebesar Rp60.780.390.024,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp42.446.436.867,21, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp48.977.092.155,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.530.655.287,79 atau 15,39% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-203 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.988.847.669,00	42.277.478.498,00	78,31	37.917.613.958,05
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	37.450.688.906,00	33.596.816.546,00	89,71	31.734.009.485,86
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.326.561.363,00	1.222.510.370,00	92,16	191.234.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	392.000.000,00	389.810.731,00	99,44	197.844.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.800.000,00	9.635.000,00	98,32	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.467.218.000,00	2.058.206.044,00	83,42	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.080.032.000,00	999.807.589,00	48,07	303.754.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Terbuka	160.731.000,00	159.772.153,00	99,40	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Industri	4.500.000.000,00	98.791.000,00	2,20	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.424.643.900,00	2.573.493.884,00	58,16	3.105.239.850,00
11	Belanja Modal Bangunan Parkir	543.750.000,00	540.853.619,00	99,47	1.106.461.633,40
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	219.000.000,00	216.632.000,00	98,92	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	69.678.000,00
15	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	45.409.125,00
16	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	394.822.500,00	391.879.562,00	99,25	0,00
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	19.600.000,00	19.270.000,00	98,32	0,00
18	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	198.596.000,00
19	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	959.137.863,79
20	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Monumen	209.440.000,00	207.182.538,00	98,92	291.714.053,16
1	Belanja Modal Tugu	209.440.000,00	207.182.538,00	98,92	291.714.053,16
C	Belanja Modal Bangunan Menara	576.900.000,00	574.632.381,00	99,61	0,00
1	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	576.900.000,00	574.632.381,00	99,61	0,00
D	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	611.363.400,00	604.551.583,00	98,89	631.635.109,00
1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	160.500.000,00	157.851.960,00	98,35	0,00
2	Belanja Modal Pagar	450.863.400,00	446.699.623,00	99,08	631.635.109,00
E	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.393.838.955,00	5.313.247.155,00	98,51	3.605.473.747,00
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.393.838.955,00	5.313.247.155,00	98,51	3.605.473.747,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.780.390.024,00</b>	<b>48.977.092.155,00</b>	<b>80,58</b>	<b>42.446.436.867,21</b>

Pada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp48.977.092.155,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dicatat tidak rinci yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp5.313.247.155,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD yang dicatat tidak rinci tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-204 Rincian Mapping Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	363.700.000,00	363.700.000,00	100,00	734.055.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	444.750.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.946.798.955,00	3.866.207.155,00	97,96	1.802.120.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.051.940.000,00	1.051.940.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	138.458.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.200.000,00
7	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	286.690.747,00
8	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	105.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.393.838.955,00</b>	<b>5.313.247.155,00</b>	<b>98,51</b>	<b>3.605.473.747,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah mapping Tahun 2022 sebesar Rp48.977.092.155,00 atau 80,58% dari anggaran sebesar Rp60.780.390.024,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 setelah mapping sebesar Rp42.446.436.867,21 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 setelah mapping sebesar Rp48.977.092.155,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.530.655.287,79 atau 15,39% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-205 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	59.382.686.624,00	47.590.725.653,00	80,14	41.417.887.705,05
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	37.814.388.906,00	33.960.516.546,00	89,81	32.468.064.485,86
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	444.750.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.273.360.318,00	5.088.717.525,00	96,50	1.993.354.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	392.000.000,00	389.810.731,00	99,44	197.844.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.800.000,00	9.635.000,00	98,32	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.467.218.000,00	2.058.206.044,00	83,42	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.080.032.000,00	999.807.589,00	48,07	303.754.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Terbuka	160.731.000,00	159.772.153,00	99,40	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Industri	4.500.000.000,00	98.791.000,00	2,20	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.476.583.900,00	3.625.433.884,00	66,20	3.105.239.850,00
11	Belanja Modal Bangunan Parkir	543.750.000,00	540.853.619,00	99,47	1.244.919.633,40
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	219.000.000,00	216.632.000,00	98,92	94.200.000,00
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	69.678.000,00
15	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	45.409.125,00
16	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	394.822.500,00	391.879.562,00	99,25	0,00
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	19.600.000,00	19.270.000,00	98,32	0,00
18	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	198.596.000,00
19	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	959.137.863,79
20	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	286.690.747,00
B	Belanja Modal Monumen	209.440.000,00	207.182.538,00	98,92	291.714.053,16
1	Belanja Modal Tugu	209.440.000,00	207.182.538,00	98,92	291.714.053,16
C	Belanja Modal Bangunan Menara	576.900.000,00	574.632.381,00	99,61	0,00
1	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	576.900.000,00	574.632.381,00	99,61	0,00
D	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	611.363.400,00	604.551.583,00	98,89	736.835.109,00
1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	160.500.000,00	157.851.960,00	98,35	0,00
2	Belanja Modal Pagar	450.863.400,00	446.699.623,00	99,08	736.835.109,00
E	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.780.390.024,00</b>	<b>48.977.092.155,00</b>	<b>80,58</b>	<b>42.446.436.867,21</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>54.591.526.965,00</b>	<b>48.386.382.840,00</b>	<b>51.677.563.443,60</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp48.386.382.840,00 atau 88,63% dari anggaran sebesar Rp54.591.526.965,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp51.677.563.443,60, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp48.386.382.840,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.291.180.603,60 atau 6,37% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-206 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.030.989.000,00	39.527.121.350,00	91,86	37.698.602.838,60
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.568.989.000,00	39.067.199.570,00	91,77	36.760.755.738,60
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	462.000.000,00	459.921.780,00	99,55	937.847.100,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	10.466.429.265,00	7.908.422.860,00	75,56	12.527.534.845,00
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	688.791.000,00	559.403.900,00	81,22	1.070.270.300,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.762.524.000,00	7.334.153.960,00	75,13	10.556.697.800,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	398.439.520,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15.114.265,00	14.865.000,00	98,35	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	105.703.475,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	396.423.750,00
C	Belanja Modal Jaringan	304.108.700,00	218.838.630,00	71,96	608.976.500,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	304.108.700,00	218.838.630,00	71,96	608.976.500,00
D	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	111.259.260,00
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	54.809.260,00
3	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	49.550.000,00
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	790.000.000,00	732.000.000,00	92,66	731.190.000,00
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	790.000.000,00	732.000.000,00	92,66	731.190.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.591.526.965,00</b>	<b>48.386.382.840,00</b>	<b>88,63</b>	<b>51.677.563.443,60</b>

Pada realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp732.000.000,00 dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD menjadi Belanja Modal Jaringan Distribusi sebesar Rp732.000.000,00 sebagai berikut :

**Tabel 5-207 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.030.989.000,00	39.527.121.350,00	91,86	37.698.602.838,60
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.568.989.000,00	39.067.199.570,00	91,77	36.760.755.738,60
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	462.000.000,00	459.921.780,00	99,55	937.847.100,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	10.466.429.265,00	7.908.422.860,00	75,56	12.527.534.845,00
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	688.791.000,00	559.403.900,00	81,22	1.070.270.300,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.762.524.000,00	7.334.153.960,00	75,13	10.556.697.800,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	398.439.520,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15.114.265,00	14.865.000,00	98,35	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	105.703.475,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	396.423.750,00
C	Belanja Modal Jaringan	1.094.108.700,00	950.838.630,00	86,91	1.340.166.500,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	790.000.000,00	732.000.000,00	92,66	731.190.000,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	304.108.700,00	218.838.630,00	71,96	608.976.500,00
D	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	111.259.260,00
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	54.809.260,00
3	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	49.550.000,00
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.591.526.965,00</b>	<b>48.386.382.840,00</b>	<b>88,63</b>	<b>51.677.563.443,60</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.190.361.045,00	6.802.635.105,00	7.025.222.811,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp6.802.635.105,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp7.190.361.045,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp7.025.222.811,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp6.802.635.105,00 mengalami penurunan sebesar Rp222.587.706,00 atau 3,17% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-208 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	171.745.000,00	171.644.910,00	99,94	307.789.500,00
1	Belanja Modal Buku Umum	133.345.000,00	133.345.000,00	100,00	46.220.100,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	800.000,00	800.000,00	100,00	15.030.200,00
3	Belanja Modal Buku Agama	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	20.714.000,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00	54.781.000,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	16.424.600,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	69.184.700,00
7	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	16.341.200,00
8	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	36.799.100,00
9	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	32.294.600,00
10	Belanja Modal Audio Visual	7.200.000,00	7.099.910,00	98,61	0,00
B	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	477.570.000,00	469.707.405,00	98,35	199.903.000,00
1	Belanja Modal Software	477.570.000,00	469.707.405,00	98,35	199.903.000,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.555.000,00
1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	5.555.000,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.521.046.045,00	6.152.156.300,00	94,34	6.503.632.705,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.521.046.045,00	6.152.156.300,00	94,34	6.503.632.705,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	9.126.490,00	45,63	8.342.606,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	9.126.490,00	45,63	8.342.606,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.190.361.045,00</b>	<b>6.802.635.105,00</b>	<b>94,61</b>	<b>7.025.222.811,00</b>

Pada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp6.802.635.105,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dicatat tidak rinci yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp6.152.156.300,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp9.126.490,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dicatat tidak rinci tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-209 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	2.710.883.402,00	2.448.417.407,00	90,32	4.774.536.510,00
2	Belanja Modal Buku Agama	1.678.345.841,00	1.644.845.841,00	98,00	698.191.395,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	121.645.291,00	117.920.891,00	96,94	0,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.104.674.754,00	1.064.516.604,00	96,36	94.345.075,00
5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	576.649.279,00	556.586.679,00	96,52	587.552.300,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	42.658.525,00	42.658.225,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	283.857.953,00	277.210.653,00	97,66	338.376.075,00
8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	10.631.350,00
9	Belanja Modal Software	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.521.046.045,00</b>	<b>6.152.156.300,00</b>	<b>94,34</b>	<b>6.503.632.705,00</b>

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-210 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	951.000,00	951.000,00	100,00	8.342.606,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.049.000,00	8.175.490,00	42,92	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>9.126.490,00</b>	<b>45,63</b>	<b>8.342.606,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping tahun 2022 sebesar Rp6.802.635.105,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp7.190.361.045,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-211 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.710.460.045,00	6.332.927.700,00	94,37	6.819.764.811,00
1	Belanja Modal Buku Umum	2.845.179.402,00	2.582.713.407,00	90,78	4.829.099.216,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	800.000,00	800.000,00	100,00	15.030.200,00
3	Belanja Modal Buku Agama	1.683.145.841,00	1.649.645.841,00	98,01	718.905.395,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	126.695.291,00	122.970.891,00	97,06	54.781.000,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.117.274.754,00	1.077.116.604,00	96,41	110.769.675,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	63.897.525,00	53.023.715,00	82,98	69.184.700,00
7	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	26.972.550,00
8	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	576.649.279,00	556.586.679,00	96,52	624.351.400,00
9	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	283.857.953,00	277.210.653,00	97,66	370.670.675,00
10	Belanja Modal Audio Visual	7.200.000,00	7.099.910,00	98,61	0,00
B	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	479.901.000,00	469.707.405,00	97,88	384.046.550,00
1	Belanja Modal Software	479.901.000,00	469.707.405,00	97,88	384.046.550,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.555.000,00
1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	5.555.000,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.190.361.045,00</b>	<b>6.802.635.105,00</b>	<b>94,61</b>	<b>7.209.366.361,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	25.000.000,00	184.143.550,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp25.000.000,00 atau 2,50% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp184.143.550,00, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2021 sebelum mapping sebesar Rp25.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp159.143.550,00 atau 86,42% dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-212 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Sebelum Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	184.143.550,00
1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	184.143.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>184.143.550,00</b>

Pada realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD tahun 2022 sebesar Rp25.000.000,00 tercatat tidak rinci, selanjutnya dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD menjadi Belanja Modal Software sebesar Rp25.000.000,00.

**Tabel 5-213 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Mapping**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	0,00
1	Belanja Modal Software	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	2.976.361.105,00	1.149.787.428,00	1.006.063.700,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 adalah sebesar Rp1.149.787.428,00 atau 38,63% dari anggarannya sebesar Rp2.976.361.105,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2021 sebesar Rp1.006.063.700,00 realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 sebesar Rp1.149.787.428,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.723.728,00 atau 14,29% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-214 Rincian Belanja Tidak Terduga**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	2.976.361.105,00	1.149.787.428,00	38,63	1.006.063.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.976.361.105,00</b>	<b>1.149.787.428,00</b>	<b>38,63</b>	<b>1.006.063.700,00</b>

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar Rp1.149.787.428,00 terdiri dari :

- 1) Pengembalian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.07/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp568.847.500,00.
- 2) Pembayaran Pengembalian SILPA Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp580.939.928,00.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3 Belanja Transfer	331.619.279.787,00	331.565.452.287,00	355.891.616.869,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp331.565.452.287,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp331.619.279.787,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp355.891.616.869,00, realisasi Belanja Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp331.565.452.287,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.326.164.582,00 atau 6,84% dengan jenis belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-215 Rincian Belanja Transfer**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	100,00	6.165.749.553,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	327.091.903.762,00	327.038.076.262,00	99,98	349.725.867.316,00
	<b>Jumlah</b>	<b>331.619.279.787,00</b>	<b>331.565.452.287,00</b>	<b>99,98</b>	<b>355.891.616.869,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	6.165.749.553,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2022 adalah sebesar Rp4.527.376.025,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.527.376.025,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp6.165.749.553,00, realisasi Belanja Bagi Hasil pada tahun 2022 sebesar Rp4.527.376.025,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.638.373.528,00 atau 26,57% dengan jenis belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-216 Rincian Belanja Bagi Hasil**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
----	---------------	-----------------------	------------------------	-------------------	------------------------

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	100,00	4.154.754.200,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	2.010.995.353,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.527.376.025,00</b>	<b>4.527.376.025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.165.749.553,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	4.154.754.200,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun 2022 sebesar Rp4.527.376.025,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.527.376.025,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-217 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.527.376.025,00	4.527.376.025,00	100,00	4.154.754.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.527.376.025,00</b>	<b>4.527.376.025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.154.754.200,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	2.010.995.353,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2022 sebesar nihil dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-218 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	2.010.995.353,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.995.353,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan	327.091.903.762,00	327.038.076.262,00	349.725.867.316,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp327.038.076.262,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp327.091.903.762,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp349.725.867.316,00, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp327.038.076.262,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.687.791.054,00 atau 6,49% dengan jenis belanja sebagai berikut :

**Tabel 5-219 Rincian Belanja Bantuan Keuangan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	327.091.903.762,00	327.038.076.262,00	99,98	349.725.867.316,00
<b>Jumlah</b>		<b>327.091.903.762,00</b>	<b>327.038.076.262,00</b>	<b>99,98</b>	<b>349.725.867.316,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2022 sebesar Rp327.038.076.262,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp327.091.903.762,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

**Tabel 5-220 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	327.091.903.762,00	327.038.076.262,00	99,98	349.725.867.316,00
<b>Jumlah</b>		<b>327.091.903.762,00</b>	<b>327.038.076.262,00</b>	<b>99,98</b>	<b>349.725.867.316,00</b>

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
-----------------------	------------------------	------------------------

## 5.1.4 Surplus/ (Defisit)

(212.595.111.217,00)

7.568.962.324,40

90.548.823.217,36

Realisasi Surplus/(Defisit) tahun 2022 adalah sebesar surplus Rp7.568.962.324,40 atau 3,56% dari anggarannya sebesar defisit Rp212.595.111.217,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) tahun 2021 sebesar surplus Rp90.548.823.217,36 realisasi Surplus/(Defisit) pada tahun 2022 sebesar surplus Rp7.568.962.324,40 mengalami penurunan sebesar Rp82.979.860.892,96 atau sebesar 91,64%. Surplus/(Defisit) tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-221 Rincian Surplus/(Defisit)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.904.753.604.911,00	1.908.478.394.409,06	100,20	2.054.350.628.524,73
2	Belanja Daerah	1.785.729.436.341,00	1.569.343.979.797,66	87,88	1.607.910.188.438,37
3	Belanja Transfer	331.619.279.787,00	331.565.452.287,00	99,98	355.891.616.869,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(212.595.111.217,00)</b>	<b>7.568.962.324,40</b>	<b>(3,56)</b>	<b>90.548.823.217,36</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	227.595.111.217,00	227.726.349.216,93	137.046.287.999,57

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp227.726.349.216,93 atau 100,06% dari anggarannya sebesar Rp227.595.111.217,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp137.046.287.999,57 realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp227.726.349.216,93 mengalami kenaikan sebesar Rp90.680.061.217,36 atau sebesar 66,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-222 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	227.595.111.217,00	227.595.111.216,93	100,00	136.906.969.499,57
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	131.238.000,00	0,00	139.318.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>227.595.111.217,00</b>	<b>227.726.349.216,93</b>	<b>100,06</b>	<b>137.046.287.999,57</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	227.595.111.217,00	227.595.111.216,93	136.906.969.499,57

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2022 sebesar Rp227.595.111.216,93 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp227.595.111.217,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp136.906.969.499,57 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp227.595.111.216,93 mengalami kenaikan sebesar Rp90.688.141.717,36 atau 66,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-223 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(13.595.856.680,00)	(13.595.856.680,02)	100,00	(1.919.469.783,85)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	53.419.867.476,00	53.419.867.476,14	100,00	(3.581.517.439,00)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(1.733.984.001,00)	(1.712.939.222,55)	98,79	0,00
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	139.318.500,00	139.318.500,00	100,00	33.125.000,00
5	Penghematan Belanja	146.002.319.688,00	146.002.319.687,80	100,00	126.718.549.929,85
6	Sisa Belanja Lainnya	43.363.446.234,00	43.342.401.455,56	99,95	15.656.282.247,57
7	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00	(455,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>227.595.111.217,00</b>	<b>227.595.111.216,93</b>	<b>100,00</b>	<b>136.906.969.499,57</b>

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp227.595.111.217,00 dan realisasi sebesar Rp227.595.111.216,93 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD tahun 2022 adalah sebesar minus Rp13.595.856.680,02 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar minus Rp13.595.856.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-224 Rincian Pelampauan Penerimaan PAD**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	(6.432.778.161,00)	(6.432.778.161,00)	100,00	1.423.388.050,96
2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	(5.742.917.476,00)	(5.742.917.476,00)	100,00	(4.914.725.105,00)
3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	2,40
4	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	(1.420.161.043,00)	(1.420.161.043,02)	100,00	1.571.867.267,79
<b>Jumlah</b>		<b>(13.595.856.680,00)</b>	<b>(13.595.856.680,02)</b>	<b>100,00</b>	<b>(1.919.469.783,85)</b>

- 2) Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp53.419.867.476,14 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp53.419.867.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-225 Rincian Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	8.677.631.682,00	8.677.631.682,00	100,00	(29.899.607.976,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	44.742.235.794,00	44.742.235.794,14	100,00	26.318.090.537,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.419.867.476,00</b>	<b>53.419.867.476,14</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.581.517.439,00)</b>

- 3) Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan tahun 2022 adalah sebesar minus Rp1.712.939.222,55 atau 98,79% dibandingkan dengan anggarannya sebesar minus Rp1.733.984.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-226 Rincian Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	(1.733.984.001,00)	(1.712.939.222,55)	98,79	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(1.733.984.001,00)</b>	<b>(1.712.939.222,55)</b>	<b>98,79</b>	<b>0,00</b>

- 4) Realisasi Pelampauan Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp139.318.500,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp139.318.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-227 Rincian Pelampauan Penerimaan Pembiayaan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	71.160.000,00	71.160.000,00	100,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	68.158.500,00	68.158.500,00	100,00	33.125.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>139.318.500,00</b>	<b>139.318.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.125.000,00</b>

- 5) Realisasi Penghematan Belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp146.002.319.687,80 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp146.002.319.688,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-228 Rincian Penghematan Belanja**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	117.017.207.187,00	117.017.207.186,61	100,00	100.714.115.758,33
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	27.113.793.122,00	27.113.793.122,19	100,00	24.891.022.122,01
3	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.871.319.379,00	1.871.319.379,00	100,00	1.113.412.049,51
<b>Jumlah</b>		<b>146.002.319.688,00</b>	<b>146.002.319.687,80</b>	<b>100,00</b>	<b>126.718.549.929,85</b>

- 6) Realisasi Sisa Belanja Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp43.342.401.455,56 atau 99,95% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp43.363.446.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-229 Rincian Sisa Belanja Lainnya**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	43.083.972.311,00	43.083.972.311,47	100,00	15.656.282.247,57
2	Sisa Dana BOS	279.473.923,00	258.429.144,09	92,47	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.363.446.234,00</b>	<b>43.342.401.455,56</b>	<b>99,95</b>	<b>15.656.282.247,57</b>

- 7) Realisasi Koreksi SiLPA tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-230 Rincian Koreksi SiLPA**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	(455,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(455,00)</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	131.238.000,00	139.318.500,00

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00, realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.080.500,00 atau 5,80% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-231 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	131.238.000,00	0,00	68.158.500,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	71.160.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>131.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.318.500,00</b>

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp131.238.000,00 merupakan penerimaan kembali piutang (*intracomptable*) yang tidak pernah dihapusbukan. Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2022 dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp131.238.000,00 adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi tahun 2022 adalah sebesar Rp131.238.000,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-232 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	131.238.000,00	0,00	68.158.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>131.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.158.500,00</b>

- 2) Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-233 Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	71.160.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.160.000,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-234 Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan pembentukan dana cadangan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4 <b>Pembiayaan Netto</b>	<b>212.595.111.217,00</b>	<b>212.726.349.216,93</b>	<b>137.046.287.999,57</b>

Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp212.726.349.216,93 atau 100,06% dari anggaran sebesar Rp212.595.111.217,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto tahun 2021 sebesar Rp137.046.287.999,57 realisasi Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp212.726.349.216,93 mengalami kenaikan sebesar Rp75.680.061.217,36 atau 55,22% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-235 Rincian Pembiayaan Netto**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	227.595.111.217,00	227.726.349.216,93	100,06	137.046.287.999,57
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>212.595.111.217,00</b>	<b>212.726.349.216,93</b>	<b>100,06</b>	<b>137.046.287.999,57</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.5 <b>Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.295.311.541,33</b>	<b>227.595.111.216,93</b>

Realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp220.295.311.541,33 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp227.595.111.216,93, realisasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) pada tahun 2022 sebesar Rp220.295.311.541,33 mengalami penurunan sebesar Rp7.299.799.675,60 atau 3,21% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-236 Rincian Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)**

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Surplus/ (Defisit)	(212.595.111.217,00)	7.568.962.324,40	(3,56)	90.548.823.217,36
2	Pembiayaan Netto	212.595.111.217,00	212.726.349.216,93	100,06	137.046.287.999,57
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>220.295.311.541,33</b>	<b>0,00</b>	<b>227.595.111.216,93</b>

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 <b>Saldo Anggaran Lebih-Awal</b>	<b>227.595.111.216,93</b>	<b>136.906.969.499,57</b>

Nilai SAL-Awal tahun 2022 sebesar Rp227.595.111.216,93 merupakan SAL – Akhir Tahun 2021. Saldo tersebut menjadi Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2022.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
--------------------	--------------------

<b>5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>227.595.111.216,93</b>	<b>136.906.969.499,57</b>
--	---------------------------	---------------------------

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2022 yang digunakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun 2022, yaitu sebesar Rp227.595.111.216,93.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)</b>	<b>220.295.311.541,33</b>	<b>227.595.111.216,93</b>

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp220.295.311.541,33.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar nihil.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.5 Saldo Anggaran Lebih-Akhir</b>	<b>220.295.311.541,33</b>	<b>227.595.111.216,93</b>

SAL-Akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran lalu dan Tahun Anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL-Akhir sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp220.295.311.541,33.

### 5.3 NERACA

#### 5.3.1 Aset

	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Aset lancar</b>	<b>283.906.656.918,43</b>	<b>292.740.504.238,17</b>

Aset Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp283.906.656.918,43 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp292.740.504.238,17 realisasi Aset Lancar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.833.847.319,74 atau sebesar 3,02% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-237 Rincian Aset Lancar**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Kas dan Bank	220.378.213.551,33	227.796.515.381,93
2	Piutang	57.542.768.237,52	51.965.512.705,77
3	Penyisihan Piutang	(32.523.447.778,30)	(28.862.198.413,61)
4	Beban Dibayar Dimuka	54.000.000,00	4.000.000,00
5	Persediaan	38.455.122.907,88	41.836.674.564,08
	<b>Jumlah</b>	<b>283.906.656.918,43</b>	<b>292.740.504.238,17</b>

	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Kas dan Bank</b>	<b>220.378.213.551,33</b>	<b>227.796.515.381,93</b>

Kas dan Bank tahun 2022 adalah sebesar Rp220.378.213.551,33 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93, saldo Kas dan Bank pada tahun 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33 mengalami penurunan sebesar Rp7.418.301.830,60 atau sebesar 3,26% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-238 Kas dan Bank**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas di Kas Daerah	207.708.972.841,60	179.556.601.565,89	15,68
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.001.111,23	18.433.000,00	(94,57)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	10.329.468.288,89	43.083.972.311,47	(76,02)
5	Kas Lainnya	2.308.771.309,61	5.137.508.504,57	(55,06)
	<b>Jumlah</b>	<b>220.378.213.551,33</b>	<b>227.796.515.381,93</b>	<b>(3,26)</b>

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>207.708.972.841,60</b>	<b>179.556.601.565,89</b>

Kas di Kas Daerah adalah kas yang ada pada rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk giro. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp207.708.972.841,60, jika dibandingkan dengan saldo kas tahun 2021 sebesar Rp179.556.601.565,89, saldo kas di Kas Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp207.708.972.841,60 mengalami kenaikan sebesar Rp28.152.371.275,71 atau sebesar 15,68% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-239 Kas Daerah**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Giro Kas Umum Daerah	207.708.972.841,60	179.556.601.565,89	15,68
	<b>Jumlah</b>	<b>207.708.972.841,60</b>	<b>179.556.601.565,89</b>	<b>15,68</b>

Giro Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp207.708.972.841,60 merupakan saldo kas daerah yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk giro pada Bank Jatim Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 311000011.

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>1.001.111,23</b>	<b>18.433.000,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.001.111,23 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-240 Kas Bendahara Penerimaan**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	4.000,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	997.111,23	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	0,00	18.433.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.001.111,23</b>	<b>18.433.000,00</b>	<b>(94,57)</b>

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar Rp4.000,00 merupakan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan tahun 2022 pada akhir tahun anggaran setelah jam pelayanan bank berakhir.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022 sebesar Rp997.111,23 merupakan bunga jasa giro rekening bendahara penerimaan yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada kas yang ada di bendahara pengeluaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-241 Kas Bendahara Pengeluaran**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Pengeluaran	30.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4 Kas di BLUD</b>	<b>10.329.468.288,89</b>	<b>43.083.972.311,47</b>

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan saldo kas untuk keperluan operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso. Kas di BLUD tahun 2022 adalah

sebesar Rp10.329.468.288,89 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp43.083.972.311,47, saldo Kas di BLUD pada tahun 2022 sebesar Rp10.329.468.288,89 mengalami penurunan sebesar Rp 32.754.504.022,58 atau sebesar 76,02% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-242 Kas di BLUD RSUD**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Giro Kas BLUD RSUD	10.317.291.823,89	38.070.271.751,47	(72,90)
2	Deposito BLUD RSUD	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
3	Kas pada Bendahara Penerimaan RSUD	12.176.465,00	13.700.560,00	(11,12)
<b>Jumlah</b>		<b>10.329.468.288,89</b>	<b>43.083.972.311,47</b>	<b>(76,02)</b>

- Giro Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.317.291.823,89 merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Kas BLUD pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 0311003733.
- Deposito per 31 Desember 2022 sebesar nihil merupakan deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-243 Deposito BLUD RSUD**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	No. Seri DB. 491747	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
2	No. Seri DB. 491748	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

- Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.176.465,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-244 Kas pada Bendahara Penerimaan BLUD**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Penerimaan	12.176.465,00	13.700.560,00	(11,12)
<b>Jumlah</b>		<b>12.176.465,00</b>	<b>13.700.560,00</b>	<b>(11,12)</b>

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp12.176.465,00 merupakan pendapatan BLUD tahun 2022 pada Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi yang belum disetor pada rekening Giro Kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>2.308.771.309,61</b>	<b>5.137.508.504,57</b>

#### 5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan saldo kas pada bendahara diluar bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.308.771.309,61. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp5.137.508.504,57 saldo Kas Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp2.308.771.309,61 mengalami penurunan sebesar Rp2.828.737.194,96 atau sebesar 55,06% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-245 Kas Lainnya**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas di Bendahara FKTP	1.767.917.917,52	4.677.675.195,48	(62,21)
2	Kas di Bendahara BOS	540.853.392,09	459.833.309,09	17,62
<b>Jumlah</b>		<b>2.308.771.309,61</b>	<b>5.137.508.504,57</b>	<b>(55,06)</b>

- Kas pada Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.917.917,52 merupakan sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2022 pada FKTP se-Kabupaten Bondowoso. Dana Kapitasi tersebut dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan langsung ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP. Berdasarkan saldo kas sesuai Buku Kas Umum Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-246 Kas pada Giro FKTP**

No	Nama FKTP	Rek. Bank Jatim	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren %
1	Nangkaan	rek. 0311017934	108.248.126,04	250.724.535,04	(56,83)
2	Kotakulon	rek. 0311017845	13.434.215,70	72.589.685,70	(81,49)

No	Nama FKTP	Rek. Bank Jatim	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren %
3	Kademangan	rek. 0311017853	43.737.123,00	74.948.018,00	(41,64)
4	Tenggarang	rek. 1581000053	92.688.293,00	73.098.459,00	26,80
5	Tegalampel	rek. 0311017802	59.452.742,27	54.900.734,27	8,29
6	Tamankrocok	rek. 1581000061	1.420.986,00	70.575.204,00	(97,99)
7	Wringin	rek. 0311017870	28.105.188,00	285.180.028,00	(90,14)
8	Pakem	rek. 0311017837	83.433.255,04	177.439.008,00	(52,98)
9	Curahdami	rek. 0311017896	87.649.652,00	234.968.840,00	(62,70)
10	Binakal	rek. 0311017861	29.672.453,00	124.327.671,00	(76,13)
11	Grujugan	rek. 0311017764	86.517.606,00	133.552.900,00	(35,22)
12	Maesan	rek. 1571000039	187.116.319,00	282.065.585,00	(33,66)
13	Tamanan	rek. 1571000063	148.117.908,00	334.286.818,00	(55,69)
14	Jambesari	rek. 1571000098	55.741.806,00	178.490.940,00	(68,77)
15	Pujer	rek. 0311017772	100.756.434,48	412.797.193,48	(75,59)
16	Tlogosari	rek. 1581000088	38.175.785,00	470.726.959,00	(91,89)
17	Wonosari	rek. 1581000045	83.336.129,00	203.553.361,00	(59,06)
18	Tapen	rek. 1581000029	179.234.301,00	371.215.440,00	(51,72)
19	Sukosari	rek. 1581000037	79.080.972,00	88.041.657,00	(10,18)
20	Sumber Wringin	rek. 0311017781	71.197.734,00	329.185.428,00	(78,37)
21	Klabang	rek. 1151000092	14.368.494,00	42.374.849,00	(66,09)
22	Sempol	rek. 1581000070	49.997.997,04	21.034.227,04	137,70
23	Prajean	rek. 1151000084	22.387.392,60	25.552.851,60	(12,39)
24	Botolinggo	rek. 0311017811	9.731.647,00	123.559.342,00	(92,12)
25	Cermee	rek. 1151000777	94.315.358,35	242.485.461,35	(61,10)
<b>Total Giro</b>			<b>1.767.917.917,52</b>	<b>4.677.675.195,48</b>	<b>(62,21)</b>

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Saldo Kas sesuai BKU FKTP sebesar Rp1.767.917.917,52 bila dibandingkan dengan Saldo Kas pada rekening giro bank sebesar Rp1.761.620.376,52 didapat perbedaan kas sebesar Rp6.297.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-247 Rincian Selisih Kas di FKTP**

No	Nama FKTP	BKU FKTP	Saldo Rekening Koran	Selisih	Keterangan
1	Curahdami	87.649.652,00	87.650.152,00	(500,00)	kekurangan pendebitan rekening oleh FKTP
2	Tamanan	148.117.908,00	148.057.908,00	60.000,00	kelebihan pendebitan rekening oleh bank
3	Tapen	179.234.301,00	180.314.301,00	(1.080.000,00)	kelebihan pengkreditan oleh bank
4	Tegalampel	59.452.742,27	52.134.696,27	7.318.046,00	kelebihan pendebitan rekening ( <i>double transfer</i> ) oleh bank
5	Pakem	83.433.255,04	83.433.260,04	(5,00)	kekurangan pendebitan rekening oleh FKTP
<b>Jumlah</b>		<b>557.887.858,31</b>	<b>551.590.317,31</b>	<b>6.297.541,00</b>	

Selisih sebesar Rp6.297.541,00, tidak berpengaruh pada perhitungan besarnya saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan telah dilakukan penyelesaian oleh bendahara dan pihak bank pada tahun 2023.

2. Kas pada Bendahara BOS merupakan sisa kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah oleh Pemerintah Pusat yang saldonya per 31 Desember 2022 sebesar Rp540.853.392,09 terdiri dari :

**Tabel 5-248 Kas pada Bendahara BOS**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara BOS	457.951.382,09	258.429.144,09	77,21
2	Pungutan Pajak Yang Belum Disetor (Utang PFK BOS)	82.902.010,00	201.404.165,00	(58,84)
<b>Jumlah</b>		<b>540.853.392,09</b>	<b>459.833.309,09</b>	<b>17,62</b>

**Tabel 5-249 Rincian Kas Bendahara BOS**

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	SD Negeri	441	85.317.247,80	139.000.366,80	(38,62)
2	SMP Negeri	48	372.634.134,29	119.428.777,29	212,01
<b>Jumlah</b>		<b>489</b>	<b>457.951.382,09</b>	<b>258.429.144,09</b>	<b>77,21</b>

**Tabel 5-250 Rincian Utang PFK BOS**

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Tren %
1	SD Negeri	441	79.076.686,00	88.111.056,00	(10,25)
2	SMP Negeri	48	3.825.324,00	113.293.109,00	(96,62)
<b>Jumlah</b>		<b>489</b>	<b>82.902.010,00</b>	<b>201.404.165,00</b>	<b>(58,84)</b>

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6. Piutang Pendapatan</b>	<b>39.285.468.248,66</b>	<b>34.869.237.347,91</b>

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Jumlah piutang tersebut merupakan jumlah piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5-251 Rincian Piutang Pendapatan**

No	Jenis Piutang	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
1	Piutang Pajak	25.037.501.849,20	20.721.060.194,20
2	Piutang Retribusi	3.981.024.804,34	2.888.873.095,10
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	10.266.941.595,12	11.259.304.058,61
	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>39.285.468.248,66</b>	<b>34.869.237.347,91</b>

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.1 Piutang Pajak</b>	<b>25.037.501.849,20</b>	<b>20.721.060.194,20</b>

Piutang Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang belum diterima kasnya oleh Badan Pendapatan Daerah.

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp25.037.501.849,20 merupakan jumlah tagihan pajak daerah berdasarkan Ketentuan Pajak yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-252 Rincian Piutang Pajak**

No	Jenis Pajak	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Penambahan</b> <b>(Rp)</b>	<b>Pengurangan</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>
1	Pajak Reklame	405.729.032,00	1.404.381.252,00	1.242.045.833,00	568.064.451,00
2	Pajak Penerangan Jalan	2.154.833.951,20	15.205.135.033,00	14.896.328.061,00	2.463.640.923,20
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.321.393,00	2.193.500,00	2.193.500,00	6.321.393,00
4	Pajak Hotel	0,00	1.074.779.497,00	1.074.779.497,00	0,00
5	Pajak Restoran	135.681.473,00	4.466.861.304,00	4.577.815.764,00	24.727.013,00
6	Pajak Air Tanah	374.842,00	226.445.801,00	226.185.251,00	635.392,00
7	Pajak Hiburan	1.939.000,00	78.929.700,00	75.014.160,00	5.854.540,00
8	Pajak Parkir	0,00	133.130.330,00	133.130.330,00	0,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	17.999.943.654,00	17.323.367.268,00	13.371.289.634,00	21.952.021.288,00
10	BPHTB	16.236.849,00	5.798.788.263,00	5.798.788.263,00	16.236.849,00
	<b>Total</b>	<b>20.721.060.194,20</b>	<b>45.714.011.948,00</b>	<b>41.397.570.293,00</b>	<b>25.037.501.849,20</b>

Total piutang yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.037.501.849,20 di atas terdiri dari :

1. Piutang Pajak Reklame adalah piutang pajak atas penyelenggaraan reklame yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp568.064.451,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-253 Rincian Piutang Pajak Reklame**

No	Tahun SKP	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>
1	2012	138.523.340,00	0,00	0,00	138.523.340,00
2	2013	34.567.603,00	0,00	0,00	34.567.603,00
3	2014	41.065.605,00	0,00	0,00	41.065.605,00
4	2015	8.310.115,00	0,00	0,00	8.310.115,00
5	2017	34.267.525,00	0,00	0,00	34.267.525,00
6	2018	3.293.750,00	0,00	0,00	3.293.750,00
7	2019	7.453.125,00	0,00	0,00	7.453.125,00
8	2020	82.116.850,00	0,00	0,00	82.116.850,00
9	2021	56.131.119,00	0,00	8.038.000,00	48.093.119,00
10	2022	0,00	1.404.381.252,00	1.234.007.833,00	170.373.419,00
	<b>Jumlah</b>	<b>405.729.032,00</b>	<b>1.404.381.252,00</b>	<b>1.242.045.833,00</b>	<b>568.064.451,00</b>

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah piutang pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.463.640.923,20 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-254 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	1998 s.d April 2010	1.101.408.541,20	0,00	0,00	1.101.408.541,20
2	2021	1.053.425.410,00	0,00	1.053.425.410,00	0,00
3	2022	0,00	15.205.135.033,00	13.842.902.651,00	1.362.232.382,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.154.833.951,20</b>	<b>15.205.135.033,00</b>	<b>14.896.328.061,00</b>	<b>2.463.640.923,20</b>

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 untuk tahun SKP 2022 sebesar Rp1.362.232.382,00 merupakan piutang Pajak Penerangan Jalan bagian bulan Desember 2022 kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo yang telah diterima kasnya pada bulan Januari 2023.

**Tabel 5-255 Rincian Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Desember 2021	1.053.425.410,00	0,00	1.053.425.410,00	0,00
2	Januari 2022	0,00	1.129.321.809,00	1.129.321.809,00	0,00
3	Februari 2022	0,00	1.132.491.223,00	1.132.491.223,00	0,00
4	Maret 2022	0,00	1.183.430.857,00	1.183.430.857,00	0,00
5	April 2022	0,00	1.292.150.271,00	1.292.150.271,00	0,00
6	Mei 2022	0,00	1.260.364.091,00	1.260.364.091,00	0,00
7	Juni 2022	0,00	1.281.497.014,00	1.281.497.014,00	0,00
8	Juli 2022	0,00	1.270.053.190,00	1.270.053.190,00	0,00
9	Agustus 2022	0,00	1.302.151.486,00	1.302.151.486,00	0,00
10	September 2022	0,00	1.323.073.626,00	1.323.073.626,00	0,00
11	Oktober 2022	0,00	1.326.213.240,00	1.326.213.240,00	0,00
12	November 2022	0,00	1.341.034.264,00	1.341.034.264,00	0,00
13	Desember 2022	0,00	1.362.232.382,00	0,00	1.362.232.382,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.053.425.410,00</b>	<b>15.204.013.453,00</b>	<b>14.895.206.481,00</b>	<b>1.362.232.382,00</b>

Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2021 untuk tahun SKP 1998 s.d April 2010 sebesar Rp1.101.408.541,20 merupakan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi sejak tahun 1998 sampai dengan bulan April 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-256 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo**

No	Uraian	Pokok	Denda	Jumlah
1	Tahun 1998 s/d 2001	249.163.335,00	24.916.333,50	274.079.668,50
2	Tahun 2002	104.946.900,00	10.494.690,00	115.441.590,00
3	Tahun 2003	68.484.515,00	6.848.451,50	75.332.966,50
4	Tahun 2004	82.930.905,00	8.293.090,50	91.223.995,50
5	Tahun 2005	87.982.355,00	8.798.235,50	96.780.590,50
6	Tahun 2006	111.799.190,00	11.179.919,00	122.979.109,00
7	Tahun 2007	102.369.706,00	10.236.970,60	112.606.676,60
8	Tahun 2008	88.507.438,00	8.850.743,80	97.358.181,80
9	Tahun 2009	74.160.403,00	7.416.040,30	81.576.443,30
10	Januari s/d April 2010	30.935.745,00	3.093.574,50	34.029.319,50
	<b>Jumlah</b>	<b>1.001.280.492,00</b>	<b>100.128.049,20</b>	<b>1.101.408.541,20</b>

PT Bonindo Abadi adalah perusahaan yang berkedudukan di Jalan Raya Jember Km 9 Desa Pekauman, Kecamatan Grugujan, Kabupaten Bondowoso. Perusahaan berdiri tahun 1994 berdasarkan Akta Notaris Mahdalina S. Gandawi Djaja, SH dengan akta Nomor 52, tanggal 25 Agustus 1994. PT Bonindo Abadi bergerak di bidang produksi kertas budaya, *chopstik* dan industri batu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dengan laporan Nomor : 62/R/XVIII/SBY/04/2008 tanggal 15 April Tahun 2008 terdapat tunggakan piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp888.444.596,00 oleh PT Bonindo Abadi. Terhadap tunggakan piutang tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera menindaklanjuti dan menagih kepada PT Bonindo. Bupati telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melayangkan surat teguran Nomor : 700/079430.99/2008 kepada PT Bonindo. Namun demikian PT Bonindo tidak pernah membayar tunggakan tersebut, bahkan jumlah tersebut semakin berkembang karena sampai dengan April 2010 PT Bonindo tidak pernah membayar PPJ sehingga jumlah tunggakan piutang PPJ bersama dendanya menjadi Rp1.101.408.541,20. Piutang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selalu menjadi catatan dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penagihan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya-upaya penagihan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi yaitu:

- Memberi peringatan/penagihan tertulis kepada PT. Bonindo Abadi untuk melunasi piutangnya dengan nomor dan tanggal surat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-257 Tabel Surat Tagihan PPJ PT Bonindo**

NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
No.700/078/430.99/2008	Tgl.13/06/2008	Teguran

NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
No.503/346/430.42/2008	Tgl.15/12/2008	Permintaan Mematuhi Putusan MA
No.973/382/430.814/2010	Tgl.17/05/2010	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/25/430.42/2011	Tgl.05/01/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1009/430.42/2011	Tgl.05/04/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.700/134/430.99/2011	Tgl.19/07/2011	Peringatan
No.973/1365/430.6.1/2013	Tgl.20/12/2013	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/615/430.6.1/2014	Tgl.20/05/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/382/430.6.1/2014	Tgl.26/11/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1612/430.10.13/2015	Tgl.26/08/2015	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/629/430.10.13/2016	Tgl.30/08/2016	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/610/430.10.2/2017	Tgl.24/08/2017	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1615/430.10.2/2021	Tgl.06/10/2021	Koordinasi Rekomendasi BPK-RI

- b. Melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya koordinasi dengan Kepala PLN Distribusi Jawa Timur UPJ. Bondowoso pada tanggal 23 Maret 2010 mengenai piutang Pajak Penerangan Jalan PT.Bonindo Abadi Bondowoso. Sebagai hasil dari upaya koordinasi tersebut maka Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo Abadi terhitung mulai bulan Mei tahun 2010 sampai saat ini telah dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah meminta asistensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan tim asistensi ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan bimbingan, saran, dan rekomendasi terhadap permasalahan tunggakan PPJ PT Bonindo dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Asistensi Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor : LBA-101/PW13/3/2015 Tanggal 3 Maret 2015. BPKP menyarankan kepada Bupati Bondowoso sebagai berikut :
- Sepanjang bukti dasar atau dokumen sumber yaitu tagihan listrik dari PLN yang memuat adanya tagihan PPJ atas PT Bonindo Abadi belum diperoleh maka Piutang PPJ atas PT. Bonindo sebesar Rp1.101.408.541,20 dapat dikoreksi dari pembukuan, namun tetap dijelaskan (*disclosure*) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - Melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Timur untuk meminta PT. PLN Distribusi Situbondo menerbitkan rekening listrik yang memuat tagihan PPJ PT. Bonindo Abadi pada tahun terjadinya tunggakan PPJ, yang juga berfungsi sebagai SKPD.
  - Melakukan koordinasi kepada Kejaksaan setempat sebagai Pengacara Negara untuk mendapatkan pertimbangan hukum mengenai status tunggakan PPJ PT. Bonindo Abadi.
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah piutang pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.321.393,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-258 Rincian Piutang Pajak Mineral**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2014	300.060,00	0,00	0,00	300.060,00
2	2015	2.300.940,00	0,00	0,00	2.300.940,00
3	2016	100.080,00	0,00	0,00	100.080,00
4	2017	450.113,00	0,00	0,00	450.113,00
5	2019	2.510.200,00	0,00	0,00	2.510.200,00
6	2020	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
7	2022	0,00	2.193.500,00	2.193.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.321.393,00</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>6.321.393,00</b>

4. Piutang Pajak Hotel adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-259 Rincian Piutang Pajak Hotel**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	1.074.779.497,00	1.074.779.497,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>1.074.779.497,00</b>	<b>1.074.779.497,00</b>	<b>0,00</b>

5. Piutang Pajak Restoran adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.727.013,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-260 Rincian Piutang Pajak Restoran**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2013	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2	2014	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	2015	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4	2016	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
5	2017	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
6	2018	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
7	2019	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
8	2020	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
9	2021	130.081.473,00	0,00	126.259.200,00	3.822.273,00
10	2022	0,00	4.466.861.304,00	4.451.556.564,00	15.304.740,00
<b>Jumlah</b>		<b>135.681.473,00</b>	<b>4.466.861.304,00</b>	<b>4.577.815.764,00</b>	<b>24.727.013,00</b>

6. Piutang Pajak Air Tanah adalah piutang pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp635.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-261 Rincian Piutang Pajak Air Tanah**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2019	114.480,00	0,00	0,00	114.480,00
2	2021	260.362,00	0,00	0,00	260.362,00
3	2022	0,00	226.445.801,00	226.185.251,00	260.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>374.842,00</b>	<b>226.445.801,00</b>	<b>226.185.251,00</b>	<b>635.392,00</b>

7. Piutang Pajak Hiburan adalah piutang pajak atas penyelenggaraan hiburan yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.854.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-262 Rincian Piutang Pajak Hiburan**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2012	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2	2013	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	2020	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
7	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
8	2022	0,00	78.929.700,00	75.014.160,00	3.915.540,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.939.000,00</b>	<b>78.929.700,00</b>	<b>75.014.160,00</b>	<b>5.854.540,00</b>

8. Piutang Pajak Parkir adalah piutang pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-263 Rincian Piutang Pajak Parkir**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	0,00	133.130.330,00	133.130.330,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>133.130.330,00</b>	<b>133.130.330,00</b>	<b>0,00</b>

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah piutang pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.952.021.288,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-264 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2012	513.783.117,00	0,00	1.799.534,00	511.983.583,00
2	2013	904.361.321,00	0,00	11.960.905,00	892.400.416,00
3	2014	110.748.602,00	0,00	966.424,00	109.782.178,00
4	2015	80.712.291,00	0,00	752.245,00	79.960.046,00
5	2016	5.765.114,00	0,00	0,00	5.765.114,00
6	2017	20.585.659,00	0,00	91.179,00	20.494.480,00
7	2018	4.207.549.902,00	0,00	59.894.983,00	4.147.654.919,00
8	2019	4.592.442.935,00	0,00	63.716.083,00	4.528.726.852,00
9	2020	1.896.888.263,00	0,00	29.208.519,00	1.867.679.744,00

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
10	2021	5.667.106.450,00	0,00	187.409.543,00	5.479.696.907,00
11	2022	0,00	17.323.367.268,00	13.015.490.219,00	4.307.877.049,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.999.943.654,00</b>	<b>17.323.367.268,00</b>	<b>13.371.289.634,00</b>	<b>21.952.021.288,00</b>

10. Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah piutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum diterima kasnya. Saldo piutang Pajak BPHTB sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.236.849,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-265 Rincian Piutang Pajak BPHTB**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2014	16.236.849,00	0,00	0,00	16.236.849,00
2	2022	0,00	5.798.788.263,00	5.798.788.263,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.236.849,00</b>	<b>5.798.788.263,00</b>	<b>5.798.788.263,00</b>	<b>16.236.849,00</b>

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>3.981.024.804,34</b>	<b>2.888.873.095,10</b>

### 5.3.1.1.6.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum diterima kasnya. Jumlah Piutang Retribusi merupakan jumlah tunggakan retribusi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.981.024.804,34 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.888.873.095,10.

**Tabel 5-266 Jenis Piutang Retribusi**

No	Jenis Piutang Retribusi	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	1.795.596.198,10	6.776.914.954,24	5.693.050.345,00	2.879.460.807,34
2	Retribusi Jasa Usaha	425.554.553,00	430.043.000,00	421.755.900,00	433.841.653,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	667.722.344,00	648.883.050,00	648.883.050,00	667.722.344,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.888.873.095,10</b>	<b>7.855.841.004,24</b>	<b>6.763.689.295,00</b>	<b>3.981.024.804,34</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.981.024.804,34 terdiri dari :

1. Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.879.460.807,34 terdiri dari :

**Tabel 5-267 Tabel Piutang Retribusi Jasa Umum**

No	Jenis Piutang Retribusi Umum	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	Sewa Kios Pasar	792.818.988,00	621.945.120,00	422.152.765,00	992.611.343,00
b	Sewa Los Pasar	142.529.990,00	168.922.542,00	139.429.880,00	172.022.652,00
c	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	252.199.720,10	227.497.292,24	124.197.700,00	355.499.312,34
d	Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS	608.047.500,00	5.758.550.000,00	5.007.270.000,00	1.359.327.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.795.596.198,10</b>	<b>6.776.914.954,24</b>	<b>5.693.050.345,00</b>	<b>2.879.460.807,34</b>

- a. Sewa Kios Pasar

Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah kios yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.436 kios yang tersebar pada 12 pasar. Nilai Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp992.611.343,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-268 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2008	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2	2009	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
3	2010	1.953.900,00	0,00	0,00	1.953.900,00
4	2011	6.753.075,00	0,00	0,00	6.753.075,00
5	2012	8.071.350,00	0,00	0,00	8.071.350,00
6	2013	6.497.200,00	0,00	0,00	6.497.200,00
8	2014	5.787.845,00	0,00	0,00	5.787.845,00
9	2015	6.155.875,00	0,00	0,00	6.155.875,00
10	2016	6.314.875,00	0,00	725.000,00	5.589.875,00
11	2017	27.357.700,00	0,00	4.115.825,00	23.241.875,00
12	2018	85.733.725,00	0,00	9.514.250,00	76.219.475,00

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
13	2019	103.583.729,00	0,00	10.320.375,00	93.263.354,00
14	2020	253.955.866,00	0,00	36.038.905,00	217.916.961,00
15	2021	280.473.848,00	0,00	66.322.660,00	214.151.188,00
16	2022	0,00	621.945.120,00	295.115.750,00	326.829.370,00
<b>Jumlah</b>		<b>792.818.988,00</b>	<b>621.945.120,00</b>	<b>422.152.765,00</b>	<b>992.611.343,00</b>

b. Sewa Los Pasar

Piutang Sewa Los Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa los milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah los yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.546 los yang tersebar pada 11 pasar. Nilai Piutang Retribusi Sewa Los Pasar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp172.022.652,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-269 Rincian Piutang Retribusi Sewa Los Pasar**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2017	5.708.335,00	0,00	121.000,00	5.587.335,00
2	2018	13.894.500,00	0,00	576.750,00	13.317.750,00
3	2019	20.836.025,00	0,00	107.500,00	20.728.525,00
4	2020	50.615.365,00	0,00	1.044.000,00	49.571.365,00
5	2021	51.475.765,00	0,00	3.546.000,00	47.929.765,00
6	2022	0,00	168.922.542,00	134.034.630,00	34.887.912,00
<b>Jumlah</b>		<b>142.529.990,00</b>	<b>168.922.542,00</b>	<b>139.429.880,00</b>	<b>172.022.652,00</b>

c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan piutang retribusi atas penerbitan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp355.499.312,34 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-270 Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2015	117.313.107,00	0,00	0,00	117.313.107,00
2	2018	21.121.501,00	0,00	0,00	21.121.501,00
3	2019	11.603.688,48	0,00	0,00	11.603.688,48
4	2020	28.864.622,34	0,00	0,00	28.864.622,34
5	2021	73.296.801,28	0,00	0,00	73.296.801,28
6	2022	0,00	227.497.292,24	124.197.700,00	103.299.592,24
<b>Jumlah</b>		<b>252.199.720,10</b>	<b>227.497.292,24</b>	<b>124.197.700,00</b>	<b>355.499.312,34</b>

d. Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS

Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS yang dikelola oleh Dinas Kesehatan merupakan piutang retribusi atas jasa klaim non kapitasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Klaim Non Kapitasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.359.327.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-271 Rincian Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2017	8.404.500,00	0,00	0,00	8.404.500,00
2	2018	141.536.000,00	0,00	0,00	141.536.000,00
3	2019	132.917.000,00	0,00	0,00	132.917.000,00
4	2021	325.190.000,00	0,00	325.190.000,00	0,00
5	2022	0,00	5.758.550.000,00	4.682.080.000,00	1.076.470.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>608.047.500,00</b>	<b>5.758.550.000,00</b>	<b>5.007.270.000,00</b>	<b>1.359.327.500,00</b>

Nilai pengurang piutang sebesar Rp5.007.270.000,00 merupakan nilai transfer bruto dari BPJS sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dan berita acara hasil audit klaim RITP dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer BPJS bruto :	Rp	5.007.270.000,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	113.100,00
- BA. Hasil Audit Klaim RITP	Rp	2.440.000,00
Nilai transfer BPJS netto	Rp	5.004.716.900,00

Selanjutnya nilai tranfer BPJS netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas sebesar Rp5.004.716.900,00.

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp433.841.653,00 terdiri dari :

**Tabel 5-272 Tabel Piutang Retribusi Jasa Usaha**

No	Jenis Piutang Retribusi Jasa Usaha	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	Sewa Tanah Trotoar	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
b	Sewa Kios Terminal	5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00
c	Sewa Toko Pasar	375.583.953,00	410.043.000,00	413.755.900,00	371.871.053,00
d	Piutang Kemitraan	43.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	55.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>425.554.553,00</b>	<b>430.043.000,00</b>	<b>421.755.900,00</b>	<b>433.841.653,00</b>

- a. Sewa Tanah Trotoar

Piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan piutang retribusi yang sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak dipungut lagi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.688.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-273 Rincian Piutang Sewa Tanah Trotoar**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2011	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.688.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.400,00</b>

- b. Sewa Kios Terminal

Piutang retribusi Sewa Kios Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Terminal Bus yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Kios Terminal sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.282.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-274 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2000	2.646.000,00	0,00	0,00	2.646.000,00
2	2006	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00
3	2011	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
4	2016	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.282.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.200,00</b>

Mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak ada mutasi tambah/kurang piutang dikarenakan terminal Kabupaten Bondowoso telah berubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk kawasan pertokoan yang berada di dalamnya.

- c. Sewa Toko Pasar

Piutang retribusi Sewa Toko Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa toko milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah toko pasar yang dimiliki oleh Pemkab Bondowoso berjumlah 169 toko pasar yang tersebar pada 6 pasar. Nilai piutang retribusi Sewa Toko Pasar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp371.871.053,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-275 Rincian Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2011	398.200,00	0,00	0,00	398.200,00
2	2012	1.124.275,00	0,00	0,00	1.124.275,00
3	2013	4.027.250,00	0,00	0,00	4.027.250,00
4	2014	3.197.050,00	0,00	0,00	3.197.050,00
5	2015	23.018.400,00	0,00	10.411.800,00	12.606.600,00
6	2016	28.981.200,00	0,00	3.827.600,00	25.153.600,00
7	2017	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
8	2018	8.226.000,00	0,00	0,00	8.226.000,00
9	2019	40.169.829,00	0,00	20.762.000,00	19.407.829,00
10	2020	101.491.999,00	0,00	23.475.000,00	78.016.999,00
11	2021	164.815.750,00	0,00	85.427.500,00	79.388.250,00
12	2022	0,00	410.043.000,00	269.852.000,00	140.191.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>375.583.953,00</b>	<b>410.043.000,00</b>	<b>413.755.900,00</b>	<b>371.871.053,00</b>

d. Piutang Kemitraan

Piutang Kemitraan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan piutang retribusi atas kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-276 Rincian Piutang Kemitraan**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2019	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	2021	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	2022	0,00	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>

3. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp667.722.344,00 terdiri dari :

**Tabel 5-277 Tabel Piutang Retribusi Perizinan Tertentu**

No	Jenis Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	667.722.344,00	648.883.050,00	648.883.050,00	667.722.344,00
<b>Jumlah</b>		<b>667.722.344,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>667.722.344,00</b>

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Piutang retribusi IMB yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan piutang retribusi atas penerbitan IMB yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi IMB sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp667.722.344,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-278 Rincian Piutang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

No	Tahun SKP	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2010	667.722.344,00	0,00	0,00	667.722.344,00
2	2021	0,00	648.883.050,00	648.883.050,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>667.722.344,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>667.722.344,00</b>

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>10.266.941.595,12</b>	<b>11.259.304.058,61</b>

**5.3.1.1.6.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak dan retribusi sebagaimana tersebut di atas. Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 terdiri dari:

**Tabel 5-279 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Piutang Bunga Jasa Giro BUD	205.784.072,46	175.985.733,31	205.784.072,46	175.985.733,31
2	Piutang Bunga Jasa Giro BLUD	0,00	12.900.443,07	0,00	12.900.443,07
3	Klaim BPJS	8.988.089.380,00	81.790.009.826,00	82.415.360.004,00	8.362.739.202,00
4	Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya	1.271.296.079,00	21.448.278.466,00	21.397.195.741,00	1.322.378.804,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Parpol	94.640.604,00	0,00	0,00	94.640.604,00
6	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	262.138.180,00	188.765.536,00	227.778.421,00	223.125.295,00
7	Piutang Denda Keterlambatan Proyek	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
8	Piutang Remunerasi TDF	0,00	3.537.973,74	0,00	3.537.973,74
9	Piutang Lain-Lain	403.365.703,15	37.643.500,00	403.365.703,15	37.643.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.259.304.058,61</b>	<b>103.657.121.478,12</b>	<b>104.649.483.941,61</b>	<b>10.266.941.595,12</b>

1. Piutang Bunga Jasa Giro BUD merupakan Piutang Bunga Jasa Giro BUD yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Bunga Jasa Giro BUD

**Tabel 5-280 Rincian Piutang Bunga Jasa Giro BUD**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	205.358.763,15	0,00	205.358.763,15	0,00
2	2022	0,00	175.541.212,81	0,00	175.541.212,81
<b>Jumlah</b>		<b>205.358.763,15</b>	<b>175.541.212,81</b>	<b>205.358.763,15</b>	<b>175.541.212,81</b>

b. Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS

**Tabel 5-281 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	425.309,31	0,00	425.309,31	0,00
2	2022	0,00	277.521,50	0,00	277.521,50
<b>Jumlah</b>		<b>425.309,31</b>	<b>277.521,50</b>	<b>425.309,31</b>	<b>277.521,50</b>

c. Piutang Jasa Giro SKPD (Dishub)

**Tabel 5-282 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana SKPD (Dishub)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	166.999,00	0,00	166.999,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>166.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.999,00</b>

2. Piutang Bunga Jasa Giro BLUD merupakan Piutang Bunga Jasa Giro BLUD RSUD dr H Koesnadi yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-283 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BLUD**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	12.900.443,07	0,00	12.900.443,07
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>12.900.443,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.443,07</b>

3. Piutang klaim BPJS merupakan klaim non kapitasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan meliputi : Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Obat, Pelayanan Alat Kesehatan, Pelayanan Ambulan, Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso yang nilainya telah diverifikasi yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-284 Rincian Piutang Klaim BPJS**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2020	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
2	2021	8.988.014.880,00	770.000,00	8.988.784.880,00	0,00
3	2022	0,00	81.789.239.826,00	73.426.500.624,00	8.362.739.202,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.988.089.380,00</b>	<b>81.790.009.826,00</b>	<b>82.415.360.004,00</b>	<b>8.362.739.202,00</b>

Nilai pengurang piutang sebesar Rp82.415.360.004,00 merupakan nilai transfer bruto dari BPJS sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank, berita acara hasil verifikasi paska klaim dan klarifikasi piutang dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer BPJS bruto :	Rp	82.415.360.004,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	525.400,00
- BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim	Rp	630.440.775,00
- Klarifikasi piutang	Rp	351.000,00
Nilai transfer BPJS netto	Rp	81.784.042.829,00

Selanjutnya nilai tranfer BPJS netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp81.784.042.829,00.

4. Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya merupakan klaim atas layanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada pasien dari pihak bertanggung yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-285 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya**

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	167.000,00	1.449.260,00	1.449.260,00	167.000,00

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
b	PT Jasa Raharja	432.862.526,00	1.652.933.960,00	1.340.977.053,00	744.819.433,00
c	BPJS Tenaga Kerja	99.923.072,00	416.184.419,00	93.836.280,00	422.271.211,00
d	Perhutani	0,00	489.800,00	489.800,00	0,00
e	Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)	0,00	5.966.888,00	5.966.888,00	0,00
f	Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	24.075.881,00	63.098.794,00	73.000.406,00	14.174.269,00
g	RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	14.375.000,00	71.275.000,00	70.350.000,00	15.300.000,00
h	Lab RS Bhayangkara Bondowoso	0,00	204.098.500,00	98.080.000,00	106.018.500,00
i	Dinkes Situbondo	10.000.000,00	127.765.765,00	118.137.374,00	19.628.391,00
j	Kemenkes	689.892.600,00	18.905.016.080,00	19.594.908.680,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.271.296.079,00</b>	<b>21.448.278.466,00</b>	<b>21.397.195.741,00</b>	<b>1.322.378.804,00</b>

a. PT Kereta Api Indonesia (KAI)

**Tabel 5-286 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT KAI)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2017	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
2	2022	0,00	1.449.260,00	1.449.260,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>167.000,00</b>	<b>1.449.260,00</b>	<b>1.449.260,00</b>	<b>167.000,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT KAI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT KAI meliputi : Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Satu Hari, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Obat, Pelayanan Penunjang Diagnostik, Pelayanan Tindakan Medis, Pelayanan Kesehatan Gigi, Pelayanan Kedokteran Forensik, Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah, serta Pelayanan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : KL.705/IV/DO.9/2019-134.4/395/430.10.7/2021.

Nilai pengurang piutang sebesar Rp1.449.260,00 merupakan nilai transfer bruto dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT KAI sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer (JPK) PT KAI bruto :	Rp	1.449.260,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	2.900,00
Nilai transfer (JPK) PT KAI netto	Rp	1.446.360,00

Selanjutnya nilai tranfer BPJS netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp1.446.360,00.

b. PT Jasa Raharja

**Tabel 5-287 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT Jasa Raharja)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2017	39.419.436,00	0,00	0,00	39.419.436,00
2	2018	28.251.831,00	0,00	0,00	28.251.831,00
3	2019	7.345.411,00	0,00	0,00	7.345.411,00
4	2020	28.487.034,00	0,00	0,00	28.487.034,00
5	2021	329.358.814,00	0,00	269.984.887,00	59.373.927,00
6	2022	0,00	1.652.933.960,00	1.070.992.166,00	581.941.794,00
<b>Jumlah</b>		<b>432.862.526,00</b>	<b>1.652.933.960,00</b>	<b>1.340.977.053,00</b>	<b>744.819.433,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT Jasa Raharja merupakan piutang atas pelayanan penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum meliputi Pelayanan Gawat Darurat di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : P/8/SP/2022-134.4/940.1/430.10.7/2022.

c. BPJS Tenaga Kerja

**Tabel 5-288 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (BPJS Tenaga Kerja)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2018	348.700,00	0,00	0,00	348.700,00
2	2019	44.718.776,00	0,00	0,00	44.718.776,00
3	2020	54.855.596,00	0,00	0,00	54.855.596,00
4	2022	0,00	416.184.419,00	93.836.280,00	322.348.139,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.923.072,00</b>	<b>416.184.419,00</b>	<b>93.836.280,00</b>	<b>422.271.211,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Tenaga Kerja merupakan piutang atas pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi : Pelayanan Gawat Darurat, Pemeriksaan Dasar dan Penunjang, Perawatan lanjutan, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Perawatan Intensif, Pengobatan, Pelayanan Khusus, Alat Kesehatan dan Implan, Jasa Dokter/Medis, Operasi, Pelayanan Darah, dan Rehabilitasi Medik di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : PER/43/112018-134.4/1330.1/430.10.7/2021.

d. Perhutani

**Tabel 5-289 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya (Perhutani)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	0,00	489.800,00	489.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Perhutani merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga Perum Perhutani KPH Bondowoso meliputi : Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kecelakaan Kerja di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 01/PKS/SDM/BDW/DIVRE-JATIM/2020 -134.4/1353.1/430.10.7/2020.

e. Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)

**Tabel 5-290 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PPBRI)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	5.966.888,00	5.966.888,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>5.966.888,00</b>	<b>5.966.888,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PPBRI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi anggota/pensiunan BRI Cabang Bondowoso beserta keluarganya meliputi; Pelayanan Rawat Jalan, Perawatan Melahirkan, Perawatan Rawat Inap di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 134.4/284.1/430.10.7/2022- B.014/CB/III/2022.

f. Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM

**Tabel 5-291 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2017	2.477.150,00	0,00	0,00	2.477.150,00
2	2018	1.592.630,00	0,00	0,00	1.592.630,00
3	2020	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
4	2021	20.000.301,00	0,00	19.920.301,00	80.000,00
5	2022	0,00	63.098.794,00	53.074.305,00	10.024.489,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.075.881,00</b>	<b>63.098.794,00</b>	<b>73.000.406,00</b>	<b>14.174.269,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom merupakan piutang atas pelayanan kesehatan dan perawatan bagi peserta Yayasan Kesehatan Telkom di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 152/HK.620/YAKES-053/2021-134.4/1864.1/430.10.7/2021.

Nilai pengurang piutang sebesar Rp73.000.406,00 merupakan nilai transfer bruto dari Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dan Resume Hasil Verifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom bruto :	Rp	73.000.406,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank		
- Resume Hasil Verifikasi	Rp	34.800,00
	Rp	7.444.300,00
Nilai transfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom netto	Rp	65.521.306,00

Selanjutnya nilai tranfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp65.521.306,00.

## g. RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo

**Tabel 5-292 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	14.375.000,00	0,00	14.375.000,00	0,00
2	2022	0,00	71.275.000,00	55.975.000,00	15.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.375.000,00</b>	<b>71.275.000,00</b>	<b>70.350.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo merupakan pelayanan rujukan pasien UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo meliputi : Pelayanan Rujukan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Tindakan Pembedahan, Perawatan Penunjang, Pelayanan Multi Drug Resistance (MDR), Pelayanan HIV/AIDS, Pelayanan Ponak, Pelayanan TB-Dots, Pelayanan Rujukan Parsial untuk pemeriksaan diagnostik, Pelayanan Onkologi/Kemoterapi, Pelayanan Specimen di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 455/685/431.518/ 2019-134.4/1753/430.10.7/2019.

## h. Lab RS Bhayangkara Bondowoso

**Tabel 5-293 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Lab RS Bhayangkara Bondowoso)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	204.098.500,00	98.080.000,00	106.018.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>204.098.500,00</b>	<b>98.080.000,00</b>	<b>106.018.500,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Lab RS Bhayangkara merupakan piutang atas pelayanan Laboratorium Klinik dan Radiologi RS Bhayangkara Bondowoso meliputi : Layanan Rujukan Bahan Pemeriksaan Laboratorium atau Radiologi di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : MOU/35/V/HUK.8.1/2019/Rumkit-134.4/ 619.1/430.10.7/2019.

## i. Dinas Kesehatan Situbondo

**Tabel 5-294 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Dinas Kesehatan Situbondo)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2	2022	0,00	127.765.765,00	108.137.374,00	19.628.391,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>127.765.765,00</b>	<b>118.137.374,00</b>	<b>19.628.391,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Dinkes Situbondo merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jampersal, Pelayanan Penduduk Masyarakat Miskin dengan Identitas Surat Pernyataan Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Situbondo di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 440/7399.1/431.202.5.2/2020-134.4/177/430.10.7/2020.

## j. Kemenkes

**Tabel 5-295 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Kemenkes)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	689.892.600,00	0,00	689.892.600,00	0,00
2	2022	0,00	18.905.016.080,00	18.905.016.080,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>689.892.600,00</b>	<b>18.905.016.080,00</b>	<b>19.594.908.680,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes merupakan piutang atas pelayanan pasien rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2020.

5. Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan piutang atas kelebihan pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2014 yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-296 Rincian Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	HANURA	9.240.634,00	0,00	0,00	9.240.634,00
2	P K P B	3.353.501,00	0,00	0,00	3.353.501,00
3	P P R N	3.477.701,00	0,00	0,00	3.477.701,00

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
4	P-BARNAS	4.077.134,00	0,00	0,00	4.077.134,00
5	P K N U	74.491.634,00	0,00	0,00	74.491.634,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.640.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640.604,00</b>

6. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan piutang hasil penjualan kendaraan darat bermotor yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-297 Rincian Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2013	35.350.000,00	0,00	0,00	35.350.000,00
2	2016	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00
3	2020	1.804.630,00	0,00	999.630,00	805.000,00
4	2021	216.773.550,00	0,00	159.435.150,00	57.338.400,00
5	2022	0,00	188.765.536,00	67.343.641,00	121.421.895,00
	<b>Jumlah</b>	<b>262.138.180,00</b>	<b>188.765.536,00</b>	<b>227.778.421,00</b>	<b>223.125.295,00</b>

Penambahan sebesar Rp188.765.536,00 berdasarkan :

- Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/261/430.4.2/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/24/430.4.2/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/563/430.4.2/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/25/430.4.2/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/565/430.4.2/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/26/430.4.2/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/707/430.4.2/2022 Tanggal 8 November 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/42/430.4.2/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh DBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- Penjualan Kendaraan dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/706/430.4.2/2022 Tanggal 8 November 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/41/430.4.2/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dan Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/802/430.4.2/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/44/430.4.2/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penghapusan

Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

- g. Penjualan Kendaraan dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/803/430.4.2/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Bina Marga,Sumber Daya air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/45/430.4.2/2022 Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bina Marga,Sumber Daya air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
- h. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dan Roda Dua Tahun 2022 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/801/430.4.2/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/43/430.4.2/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

Pengurangan dari realisasi pendapatan sebesar Rp227.778.421,00 merupakan pendapatan penjualan kendaraan dinas bermotor roda empat dan roda dua tahun 2022.

7. Piutang Denda Keterlambatan Proyek yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan piutang denda keterlambatan penyelesaian kegiatan/proyek yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-298 Rincian Piutang Denda Keterlambatan Proyek**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2011	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.990.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990.040,00</b>

8. Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan piutang atas bagian prosentase remunerasi penyimpanan TDF pada Bank Indonesia yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-299 Rincian Piutang Denda Keterlambatan Proyek**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	3.537.973,74	0,00	3.537.973,74
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>3.537.973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.973,74</b>

9. Piutang Lain-Lain merupakan piutang kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa, aset tetap serta kekurangan volume pekerjaan kepada pihak ketiga yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-300 Rincian Piutang Lain-Lain**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	403.365.703,15	0,00	403.365.703,15	0,00
2	2022	0,00	37.643.500,00	0,00	37.643.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>403.365.703,15</b>	<b>37.643.500,00</b>	<b>403.365.703,15</b>	<b>37.643.500,00</b>

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah belum termasuk piutang klaim Jamkesda BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 504.422.472,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Rp	34.150.000,00
- Klaim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Rp	0,00
- Klaim Penjamin-Dinkes	Rp	470.272.472,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>504.422.472,00</b>

<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
-----------------------------------	-----------------------------------

**5.3.1.1.7. Piutang Transfer**

<b>9.433.155.600,00</b>	<b>8.128.005.469,00</b>
-------------------------	-------------------------

Piutang transfer merupakan piutang dana bagi hasil atas saldo piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum diterima kasnya oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat

**Tabel 5-301 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

No	Piutang Transfer	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a.	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	2.619.688.975,00	2.619.688.975,00	0,00
b.	Bagi Hasil PPh Pasal 21	0,00	1.628.071.782,00	1.628.071.782,00	0,00
c.	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.519.420.805,00	1.519.420.805,00	0,00
d.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	3.437.409.749,00	3.437.409.749,00	0,00
e.	Bagi Hasil SDA Kehutanan	0,00	119.887.095,00	119.887.095,00	0,00
f.	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	0,00	27.619.312.093,00	27.619.312.093,00	0,00
g.	Bagi Hasil SDA Gas Bumi	0,00	1.302.207.966,00	1.302.207.966,00	0,00
h.	Bagi Hasil SDA Panas Bumi	0,00	121.677.307,00	121.677.307,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>38.367.675.772,00</b>	<b>38.367.675.772,00</b>	<b>0,00</b>

Penambahan pengurangan sebesar Rp38.367.675.772,00 merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

Pengurangan sebesar Rp38.367.675.772,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/KM.7/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/KM.7/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada Tahun 2022.

Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

**Tabel 5-302 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Bumi dan Bangunan**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	2.619.688.975,00	2.619.688.975,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.688.975,00</b>	<b>2.619.688.975,00</b>	<b>0,00</b>

b. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil PPh Pasal 21

**Tabel 5-303 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil PPh Pasal 21**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	1.628.071.782,00	1.628.071.782,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.071.782,00</b>	<b>1.628.071.782,00</b>	<b>0,00</b>

c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

**Tabel 5-304 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	1.519.420.805,00	1.519.420.805,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.420.805,00</b>	<b>1.519.420.805,00</b>	<b>0,00</b>

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

**Tabel 5-305 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	3.437.409.749,00	3.437.409.749,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.409.749,00</b>	<b>3.437.409.749,00</b>	<b>0,00</b>

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Kehutanan

**Tabel 5-306 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Kehutanan**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	119.887.095,00	119.887.095,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>119.887.095,00</b>	<b>119.887.095,00</b>	<b>0,00</b>

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Minyak Bumi

**Tabel 5-307 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Minyak Bumi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	27.619.312.093,00	27.619.312.093,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>27.619.312.093,00</b>	<b>27.619.312.093,00</b>	<b>0,00</b>

g. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Gas Bumi

**Tabel 5-308 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Gas Bumi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	1.302.207.966,00	1.302.207.966,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.207.966,00</b>	<b>1.302.207.966,00</b>	<b>0,00</b>

h. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil SDA Panas Bumi

**Tabel 5-309 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Panas Bumi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	121.677.307,00	121.677.307,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>121.677.307,00</b>	<b>121.677.307,00</b>	<b>0,00</b>

2. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Provinsi

**Tabel 5-310 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi**

No	Piutang Transfer	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	31.777.340.120,00	31.777.340.120,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	13.566.007.720,00	13.566.007.720,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	24.319.400.920,00	24.319.400.920,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan (P-AP)	0,00	431.748.240,00	431.748.240,00	0,00
5	Pajak Rokok	8.128.005.469,00	51.833.079.093,00	50.527.928.962,00	9.433.155.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.128.005.469,00</b>	<b>121.927.576.093,00</b>	<b>120.622.425.962,00</b>	<b>9.433.155.600,00</b>

Penambahan sebesar Rp121.927.576.093,00 merupakan bagian Pemkab Bondowoso atas dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/748/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Kurang Salur Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/299/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/749/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/325/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/554/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/794/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2022;

- j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022; dan
- k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/987/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Pengurangan sebesar Rp120.622.425.962,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2020	Rp	2.005.900,00
- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2021	Rp	25.863.154.400,00
- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2022	Rp	94.757.265.662,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>120.622.425.962,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>8.824.144.388,86</b>	<b>8.968.269.888,86</b>

#### 5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah dan transfer. Piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan merupakan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-311 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan**

No	Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	Kredit Sapi Kereman	881.576.257,00	0,00	0,00	881.576.257,00
b	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	2.365.214.118,92	0,00	0,00	2.365.214.118,92
c	Kredit Pembelian Gabah Petani	1.317.731.736,94	0,00	0,00	1.317.731.736,94
d	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.385.638.526,00	0,00	144.125.500,00	4.241.513.026,00
e	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.968.269.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144.125.500,00</b>	<b>8.824.144.388,86</b>

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp8.824.144.388,86 seluruhnya merupakan piutang yang lebih dari 3 tahun terhitung dari tanggal jatuh temponya tidak dilakukan pelunasan (kualitas kredit macet). Untuk menindaklanjuti permasalahan besarnya kredit macet selain melakukan upaya penagihan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 telah melakukan inventarisasi piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan untuk mengklasifikasikan permasalahan piutang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyelesaian piutang.

Kegiatan Inventarisasi piutang dilaksanakan oleh masing-masing OPD yang membidangi (*leading sector*) dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Inventarisasi Intern

Berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi berdasarkan dokumen pendukung piutang berupa dokumen perjanjian, dokumen agunan, catatan pembukuan dan bukti-bukti lainnya yang sah serta wawancara kepada pegawai/ petugas yang membidangi.

2) Inventarisasi Ekstern

Melakukan klarifikasi nilai piutang kepada debitur dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi piutang kemudian OPD melakukan pengelompokan/ klasifikasi piutang ke dalam 3 kategori dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-312 Pengelompokan/Klasifikasi Piutang Dari Perjanjian/Perikatan**

No	Kategori	Kriteria
1	Sesuai	Apabila debitur mengakui besarnya nilai piutang sesuai dengan yang tercatat pada neraca, atau OPD mempunyai keyakinan yang sangat memadai berupa dokumen perjanjian kredit, dokumen agunan, catatan pembukuan, keterangan petugas, atau bukti-bukti lainnya yang sah bahwa debitur memiliki piutang yang besarnya sesuai dengan yang tercatat pada neraca.
2	Tidak Sesuai	Apabila debitur mengakui memiliki hutang yang sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca namun menyatakan telah lunas, atau Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan telah lunas, atau Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan belum lunas, atau Debitur menyatakan tidak memiliki hutang kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

No	Kategori	Kriteria
3	Tidak terkonfirmasi	Apabila tidak ada konfirmasi/informasi dari debitur, atau OPD belum dapat melengkapi dokumen perjanjian kredit/catatan pembukuan/dokumen agunan/bukti-bukti lainnya yang sah sebagai pendukung nilai piutang yang tercatat pada neraca.

Hasil inventarisasi terhadap piutang per 31 Desember 2022 diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut :

**Tabel 5-313 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan**

No	Jenis	Sesuai (Rp)	Tidak Sesuai (Rp)	Tidak Terkonfirmasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kredit Sapi Kereman	32.117.530,00	355.459.975,00	493.998.752,00	881.576.257,00
2	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	0,00	0,00	2.365.214.118,92	2.365.214.118,92
3	Kredit Pembelian Gabah Petani	0,00	502.894.715,00	814.837.021,94	1.317.731.736,94
4	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.806.954.893,00	156.863.933,00	277.694.200,00	4.241.513.026,00
5	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	16.456.250,00	0,00	1.653.000,00	18.109.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.855.528.673,00</b>	<b>1.015.218.623,00</b>	<b>3.953.397.092,86</b>	<b>8.824.144.388,86</b>

- Saldo Kredit Sapi Kereman per 31 Desember 2022 merupakan piutang atas kredit sapi kereman kepada Petani Peternak yang disalurkan dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan saat ini dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-314 Rincian Piutang Kredit Sapi Kereman**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2000	47.573.746,00	0,00	0,00	47.573.746,00
2	2001 (APBD)	139.415.011,00	0,00	0,00	139.415.011,00
3	2002 (APBD)	258.728.300,00	0,00	0,00	258.728.300,00
4	2002 (PAK)	344.308.200,00	0,00	0,00	344.308.200,00
5	2003	91.551.000,00	0,00	0,00	91.551.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>881.576.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.576.257,00</b>

- Saldo Kredit Usaha Kecil dan Menengah (*feeder point*) per 31 Desember 2022 merupakan piutang kredit kepada pengusaha kecil dan menengah /UKM yang disalurkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 yang saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-315 Rincian Piutang Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Feeder Point)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	APBD 2001	9.751.110,00	0,00	0,00	9.751.110,00
2	PAK 2001	50.197.718,00	0,00	0,00	50.197.718,00
3	APBD 2002	285.730.850,00	0,00	0,00	285.730.850,00
4	PAK 2002	321.633.150,00	0,00	0,00	321.633.150,00
5	MEKANISASI 2002	166.996.990,00	0,00	0,00	166.996.990,00
6	SENTRA PAK 2002	19.931.200,00	0,00	0,00	19.931.200,00
7	APBD 2003	797.956.700,00	0,00	0,00	797.956.700,00
8	APBD 2004	306.171.800,00	0,00	0,00	306.171.800,00
9	APBD 2005	285.137.500,92	0,00	0,00	285.137.500,92
10	APBD 2006	88.548.100,00	0,00	0,00	88.548.100,00
11	APBD 2007	14.599.000,00	0,00	0,00	14.599.000,00
12	APBD 2008	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.365.214.118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.214.118,92</b>

- Saldo Kredit Pembelian Gabah Petani per 31 Desember 2022 merupakan piutang kredit untuk penyangga stock pangan dan kelompok lumbung pangan yang disalurkan dari tahun 2002 sampai dengan 2007 dan saat ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-316 Rincian Piutang Kredit Pembelian Gabah Petani**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	GABAH 2002	649.138.872,64	0,00	0,00	649.138.872,64
2	GABAH 2003	295.425,00	0,00	0,00	295.425,00
3	GABAH 2004	29.159.750,00	0,00	0,00	29.159.750,00
4	GABAH 2006	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
5	GABAH 2007	350.086.000,00	0,00	0,00	350.086.000,00
6	LUMBUNG 2002	99.362.289,30	0,00	0,00	99.362.289,30
7	LUMBUNG PAK 2002	26.598.000,00	0,00	0,00	26.598.000,00
8	LUMBUNG 2003	103.591.400,00	0,00	0,00	103.591.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.317.731.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.731.736,94</b>

4. Saldo Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022 merupakan piutang kredit kepada Koperasi dan UKM yang disalurkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dan saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-317 Rincian Piutang Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	KSP/USP (APBD 2002)	28.135.000,00	0,00	14.985.000,00	13.150.000,00
2	KSP/USP (PAK 2002)	201.884.160,00	0,00	0,00	201.884.160,00
3	PKM (PAK 2002)	31.495.000,00	0,00	0,00	31.495.000,00
4	KSP/USP (APBD 2003)	732.660.700,00	0,00	0,00	732.660.700,00
5	PKM (APBD 2003)	283.420.500,00	0,00	0,00	283.420.500,00
6	KSP/USP (APBD 2004)	74.563.000,00	0,00	0,00	74.563.000,00
7	PKM (APBD 2004)	398.936.000,00	0,00	0,00	398.936.000,00
8	KSP/USP (PAK 2004)	46.027.800,00	0,00	0,00	46.027.800,00
9	PKM (PAK 2004)	246.169.100,00	0,00	0,00	246.169.100,00
10	KSP/USP (APBD 2005)	280.481.933,00	0,00	0,00	280.481.933,00
11	PKM (APBD 2005)	211.290.500,00	0,00	0,00	211.290.500,00
12	KSP/USP (PAK 2005)	512.105.000,00	0,00	51.500.000,00	460.605.000,00
13	PKM (PAK 2005)	535.335.000,00	0,00	0,00	535.335.000,00
14	KSP/USP (APBD 2006)	27.049.000,00	0,00	0,00	27.049.000,00
15	PKM (APBD 2006)	512.018.833,00	0,00	74.803.000,00	437.215.833,00
16	PKM (APBD 2007)	175.154.000,00	0,00	2.837.500,00	172.316.500,00
17	PKM (APBD 2008)	88.913.000,00	0,00	0,00	88.913.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.385.638.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.125.500,00</b>	<b>4.241.513.026,00</b>

Pengurangan piutang sebesar Rp144.125.500,00 terdiri dari :

- Pokok piutang yang dicatat pada Penerimaan Pembiayaan	Rp	131.238.000,00
- Bunga piutang yang dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah-hasil pengelolaan Dana Bergulir	Rp	12.887.500,00

**Jumlah** **Rp 144.125.500,00**

5. Saldo Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan per 31 Desember 2022 merupakan piutang kepada petani ikan penerima bantuan *feeder point* yang disalurkan pada tahun 2005 yang saat ini dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-318 Rincian Piutang Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2005	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.109.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.109.250,00</b>

Terhadap hasil inventarisasi piutang, sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini tidak diketahui upaya apa yang telah dilakukan oleh OPD terkait.

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>32.523.447.778,30</b>	<b>28.862.198.413,61</b>

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Piutang yang disajikan sudah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan/*Net Realizable Value* (NRV) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin teknis Nomor 6 Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa nilai piutang disajikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

**Tabel 5-319 Jenis Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	23.699.303.389,44	19.893.928.524,75
2	Penyisihan Piutang Lainnya	8.824.144.388,86	8.968.269.888,86
<b>Jumlah</b>		<b>32.523.447.778,30</b>	<b>28.862.198.413,61</b>

Berdasarkan daftar umur piutang, berikut tabel penyisihan piutang tak tertagih :

**Tabel 5-320 Rincian Penyisihan Piutang**

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang Per 31 Des 2022 (Rp)	% Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2021
1	Lancar (Belum Jatuh Tempo)	11.025.455.632,12	0%	0,00	0,00

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang Per 31 Des 2022 (Rp)	% Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Des 2021
2	Kurang Lancar (s.d 1 tahun)	14.638.225.475,24	30%	4.391.467.642,57	4.851.604.387,28
3	Diragukan (Lebih dari 1 s.d 3 tahun)	12.490.356.648,10	70%	8.743.249.653,67	4.648.754.601,27
4	Macet (Lebih dari 3 tahun)	19.388.730.482,06	100%	19.388.730.482,06	19.361.839.425,06
	<b>Jumlah</b>	<b>57.542.768.237,52</b>		<b>32.523.447.778,30</b>	<b>28.862.198.413,61</b>

Rincian Penyisihan Piutang dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran 2.

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

Beban dibayar di muka merupakan pengeluaran OPD yang telah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun fasilitas/barang/jasa dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh OPD. Beban dibayar di muka inilah yang menyebabkan pengakuan belanja dengan pengakuan beban selain terjadinya utang belanja/utang jangka pendek lainnya.

Saldo beban dibayar di muka Tahun 2022 sebesar Rp54.000.000,00 sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-321 Rincian Beban Dibayar Dimuka**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Sewa Rumah Singgah Tenaga Kerja	4.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	4.000.000,00
2	Sewa Rumah Singgah Pasien	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>

Nilai beban dibayar dimuka sebesar Rp54.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sewa rumah singgah tenaga kerja oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan tempat singgah/tinggal sementara bagi tenaga kerja asal Kabupaten Bondowoso yang bekerja di Kota Batam. Masa sewa dihitung mulai 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp48.000.000,00. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp4.000.000,00 merupakan nilai sewa untuk bagian bulan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-322 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja**

No	Masa Sewa (Bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Sudah Jatuh Tempo (11/12 x Nilai Sewa) (Rp)	Belum Jatuh Tempo (1/12 x Nilai Sewa) (Rp)
1	12	48.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

- b. Sewa rumah singgah pasien oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan tempat singgah/tinggal sementara bagi pasien asal Kabupaten Bondowoso yang berobat di Kota Surabaya. Masa sewa dihitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp100.000.000,00. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp50.000.000,00 merupakan nilai sewa untuk bagian bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-323 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja**

No	Masa Sewa (Bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Sudah Jatuh Tempo (12/24 x Nilai Sewa) (Rp)	Belum Jatuh Tempo (12/24 x Nilai Sewa) (Rp)
1	24	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.11. Persediaan</b>	<b>38.455.122.907,88</b>	<b>41.836.674.564,08</b>

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp38.455.122.907,88 terdiri dari :

Tabel 5-324 Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo
		Per 31 Des 2021 (Rp)			Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	41.836.674.564,08	184.542.098.675,34	187.924.154.331,54	38.454.618.907,88
2	Barang Tak Habis Pakai	0,00	14.604.000,00	14.100.000,00	504.000,00
3	Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.836.674.564,08</b>	<b>184.556.702.675,34</b>	<b>187.938.254.331,54</b>	<b>38.455.122.907,88</b>

Persediaan per 31 Desember 2022 dinilai berdasarkan inventarisasi fisik (sesuai SAP Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan) dan laporan mutasi persediaan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	41.836.674.564,08
Penambahan Tahun 2022	Rp	184.556.702.675,34
Pengurangan Tahun 2022	Rp	187.938.254.331,54
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>38.455.122.907,88</b>

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan persediaan sebesar Rp184.556.702.675,34 terdiri dari :
  - a. Belanja barang persediaan Rp 158.873.279.315,97
  - b. Penerimaan dari hibah Rp 23.385.648.274,43
  - c. Belanja non barang persediaan Rp 148.030.980,00
  - d. Mutasi masuk Rp 1.217.983.105,38
  - e. Persediaan diterima dimuka Rp 926.840.774,56
  - f. Koreksi nilai saldo awal persediaan Rp 4.920.225,00

**Jumlah Rp 184.556.702.675,34**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Persediaan sebesar Rp158.873.279.315,97;  
Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada APBD. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2022 tidak seluruhnya menambah persediaan karena didalamnya terdapat barang yang bukan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-325 Belanja Barang Dan Jasa Yang Menjadi Persediaan

No	Uraian	Realisasi Belanja	Pengurangan (Rp)	Belanja Barang
		Barang dan Jasa (Rp)		Persediaan (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	159.898.226.786,70	1.039.551.470,73	158.858.675.315,97
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.604.000,00	0,00	14.604.000,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>159.912.830.786,70</b>	<b>1.039.551.470,73</b>	<b>158.873.279.315,97</b>

Selisih antara realisasi belanja barang persediaan LRA dengan persediaan yang diakui dari belanja barang dan jasa disebabkan adanya belanja barang non persediaan, pembayaran utang dan kelebihan pembayaran (piutang) yang bersumber dana dari realisasi belanja barang dan jasa 2022 sebesar Rp1.039.551.470,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-326 Rincian Belanja Barang Persediaan Yang Tidak Diakui sebagai Persediaan

No	Uraian	Belanja Barang Non Persediaan (Rp)	Pengurangan		Jumlah (Rp)
			Utang (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	373.858.978,00	628.048.992,73	37.643.500,00	1.039.551.470,73
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>373.858.978,00</b>	<b>628.048.992,73</b>	<b>37.643.500,00</b>	<b>1.039.551.470,73</b>

Pencatatan penambahan persediaan dari belanja barang persediaan sebesar Rp158.873.279.315,97 pada Laporan Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi persediaan riilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-327 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Belanja Barang Persediaan (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Barang Persediaan Setelah Reklasifikasi (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	158.858.675.315,97	9.689.875.983,00	9.689.875.983,00	158.858.675.315,97
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.604.000,00	0,00	0,00	14.604.000,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>158.873.279.315,97</b>	<b>9.689.875.983,00</b>	<b>9.689.875.983,00</b>	<b>158.873.279.315,97</b>

- b. Penerimaan dari Hibah sebesar Rp23.385.648.274,43;  
Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan karena adanya hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	1.524.775.307,24
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	429.382.355,00
- Obat-Obatan	Rp	18.894.265.995,19
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	2.537.224.617,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>23.385.648.274,43</b>

- c. Belanja Non Barang Persediaan sebesar Rp148.030.980,00;  
Jumlah tersebut merupakan perolehan persediaan yang direalisasikan sebagai belanja non barang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	94.016.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	19.848.980,00
- Persediaan Dalam Proses	Rp	34.166.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>148.030.980,00</b>

- d. Mutasi masuk sebesar Rp1.217.983.105,38;  
Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi masuk) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	37.494.780,00
- Obat-Obatan	Rp	1.180.488.325,38
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.217.983.105,38</b>

- e. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp926.840.774,56;  
Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena pengakuan utang persediaan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	507.752.482,16
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	7.755.250,00
- Obat-Obatan	Rp	252.001.042,40
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	Rp	11.830.000,00
- Natura dan Pakan	Rp	147.502.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>926.840.774,56</b>

- f. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp4.920.225,00

Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena adanya koreksi nilai persediaan tahun 2022 berupa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

2. Pengurangan persediaan sebesar Rp187.938.254.331,54 terdiri dari :

a. Pemakaian barang persediaan	Rp	186.129.604.278,04
b. Mutasi keluar	Rp	1.217.983.105,38
c. Kedaluwarsa tahun berjalan	Rp	489.791.948,12
d. Koreksi nilai saldo awal persediaan	Rp	100.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>187.938.254.331,54</b>

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan persediaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian barang persediaan sebesar Rp186.129.604.278,04;

Jumlah tersebut merupakan pemakaian barang persediaan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-328 Rincian Pemakaian Persediaan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	43.184.252.590,11
2	Suku Cadang	3.452.620.433,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	34.546.525.802,78
4	Obat-Obatan	38.700.403.654,09
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	36.066.624.348,00
6	Natura dan Pakan	30.165.077.450,06
7	Pipa	14.100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>186.129.604.278,04</b>

- b. Mutasi keluar sebesar Rp1.217.983.105,38;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi keluar) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	37.494.780,00
- Obat-Obatan	Rp	1.180.488.325,38
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.217.983.105,38</b>

- c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp489.791.948,12;

Jumlah tersebut merupakan persediaan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-329 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/*Expired* Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	240.803.053,56
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	137.135.390,45
3	Obat-Obatan	99.500.504,11
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	12.353.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>489.791.948,12</b>

- d. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp 100.875.000,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurang persediaan karena adanya koreksi nilai persediaan tahun 2022 berupa Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan.

Selain persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.455.122.907,88, terdapat persediaan induk dan benih ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan serta persediaan vaksin pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Koesnadi yang belum dicatat sebagai persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-330 Rincian Persediaan Ikan Tahun 2022 Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Persediaan	Satuan	Ukuran	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022	Lokasi
1	Induk Nila	Ekor		720	0	91	629	Kolam Tenggarang
2	Benih Nila	Ekor	3-5 cm	7.950	100.090	99.781	8.259	Kolam Tenggarang
3	Benih Nila	Ekor	7-9 cm	680	2.700	3.280	100	Kolam Tenggarang
4	Induk Tombro	Ekor		6	0	6	0	Kolam Tenggarang
5	Calon Induk Ikan	Ekor	1 kg 4-12 ekor	1.800	0	790	1.010	Kolam Sumberwringin
6	Calon Induk Tombro	Ekor		56	0	30	26	Kolam Sumberwringin
<b>Jumlah</b>				<b>11.212</b>	<b>102.790</b>	<b>103.978</b>	<b>10.024</b>	

Tabel 5-331 Rincian Persediaan Vaksin Tahun 2022 Pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Vaksin	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022	Lokasi
1	Sinovac	37.260	26.834	64.094	0	25 Puskesmas, IFK, RSUD dr. Koesnadi, RS Bhayangkara
2	Astrazeneca	424	7.050	7.474	0	25 Puskesmas, IFK, RSUD dr. Koesnadi, RS Bhayangkara, Sidokkes, Urdokkes
3	Moderna	100	793	893	0	25 Puskesmas, IFK, RSUD dr. Koesnadi, RS Bhayangkara, Sidokkes
4	Pfizer	21.584	22.126	43.170	540	25 Puskesmas, IFK, RSUD dr. Koesnadi, RS Bhayangkara, Urdokkes, Polkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

5	Sinopharm	0	25	25	0	Puskesmas Puskesmas Tenggara	Nangkaan,
<b>Jumlah</b>		<b>59.368</b>	<b>56.828</b>	<b>115.656</b>	<b>540</b>		

**Tabel 5-332 Rincian Persediaan Vaksin Tahun 2022 Pada RSUD dr. H. Koesnadi**

No	Jenis Vaksin	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022
1	Sinovac	420	0	420	0
2	Astrazeneca	3	0	3	0
3	Moderna	4	0	4	0
4	Pfizer	37	32	69	0
<b>Jumlah</b>		<b>464</b>	<b>32</b>	<b>496</b>	<b>0</b>

#### 5.3.1.1.11.1 Barang Pakai Habis

Mutasi atas saldo Barang Pakai Habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.454.618.907,88 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5-333 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bahan	18.521.615.651,70	41.676.923.239,04	43.462.550.423,67	16.735.988.467,07
2	Suku Cadang	32.774.627,00	3.424.845.806,00	3.452.620.433,00	5.000.000,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.852.951.608,05	34.776.263.648,00	34.683.661.193,23	6.945.554.062,82
4	Obat-Obatan	14.129.556.157,87	38.907.436.713,30	40.081.267.483,58	12.955.725.387,59
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.548.101.634,00	35.658.995.234,00	36.078.977.348,00	1.128.119.520,00
6	Natura dan Pakan	751.674.885,46	29.781.200.771,00	30.165.077.450,06	367.798.206,40
7	Persediaan Dalam Proses	0,00	316.433.264,00	0,00	316.433.264,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.836.674.564,08</b>	<b>184.542.098.675,34</b>	<b>187.924.154.331,54</b>	<b>38.454.618.907,88</b>

Mutasi penambahan barang pakai habis selama Tahun 2022 sebesar Rp184.542.098.675,34 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan bahan tahun berjalan sebesar Rp41.676.923.239,04 berasal dari :
  - a. Realisasi belanja barang pakai habis-bahan sebesar Rp39.512.884.669,64;
  - b. Penerimaan hibah bahan sebesar Rp1.524.775.307,24 dengan rincian sebagaimana Lampiran 2;
  - c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp94.016.000,00 merupakan perolehan bahan yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
  - d. Mutasi masuk bahan sebesar Rp37.494.780,00 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
  - e. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp507.752.482,16 merupakan penambah bahan karena pengakuan utang persediaan tahun 2022.
2. Penambahan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp3.424.845.806,00 berasal dari realisasi belanja barang pakai habis-suku cadang.
3. Penambahan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp34.776.263.648,00 berasal dari:
  - a. Realisasi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp34.314.356.838,00;
  - b. Penerimaan hibah alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp429.382.355,00 sebagaimana Lampiran 3;
  - c. Belanja non barang persediaan sebesar 19.848.980,00 merupakan perolehan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
  - d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp 7.755.250,00 merupakan penambah alat/bahan untuk kegiatan kantor karena pengakuan utang persediaan tahun 2022; dan
  - e. Koreksi penambahan saldo awal alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp4.920.225.
4. Penambahan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp38.907.436.713,30 berasal dari:
  - a. Realisasi belanja barang pakai habis – obat-obatan sebesar Rp18.580.681.350,33;
  - b. Penerimaan hibah obat-obatan sebesar Rp18.894.265.995,19 dengan rincian sebagaimana Lampiran 4;
  - c. Mutasi masuk obat-obatan sebesar Rp1.180.488.325,38 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
  - d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp252.001.042,40 merupakan penambah obat-obatan karena pengakuan utang persediaan tahun 2022.
5. Penambahan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp35.658.995.234,00 terdiri dari :
  - a. Realisasi belanja barang pakai habis – persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp 33.109.940.617,00;
  - b. Penerimaan hibah persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp2.537.224.617,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran 5; dan

- c. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp 11.830.000,00 merupakan penambah persediaan untuk dijual/diserahkan karena pengakuan utang persediaan tahun 2022.
6. Penambahan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp29.781.200.771,00 terdiri dari:
  - a. Realisasi belanja barang pakai habis – natura dan pakan sebesar Rp 29.633.698.771,00; dan
  - b. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp147.502.000,00 merupakan penambah Natura dan Pakan karena pengakuan utang persediaan tahun 2022.
7. Penambahan persediaan dalam proses tahun berjalan sebesar Rp316.433.264,00 merupakan realisasi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses.

Sedangkan mutasi pengurangan barang pakai habis selama tahun 2022 sebesar Rp187.924.154.331,54 terdiri dari:

1. Pengurangan bahan tahun berjalan sebesar Rp43.462.550.423,67 terdiri dari:
  - a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp43.184.252.590,11;
  - b. Mutasi keluar bahan sebesar Rp37.494.780,00 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
  - c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp240.803.053,56 merupakan bahan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2021.
2. Pengurangan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp3.452.620.433,00 merupakan pemakaian suku cadang tahun 2022.
3. Pengurangan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp34.683.661.193,23 terdiri dari:
  - a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp34.546.525.802,78; dan
  - b. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp137.135.390,45 merupakan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2022.
4. Pengurangan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp40.081.267.483,58 terdiri dari:
  - a. Pemakaian persediaan obat-obatan sebesar Rp38.700.403.654,09;
  - b. Mutasi keluar obat-obatan sebesar Rp1.180.488.325,38 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah;
  - c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp99.500.504,11 merupakan obat-obatan yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2022; dan
  - d. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp 100.875.000,00.
5. Pengurangan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp36.078.977.348,00 terdiri dari:
  - a. Penyerahan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun 2022 sebesar Rp36.066.624.348,00; dan
  - b. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp12.353.000,00 merupakan persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang kedaluwarsa/*expired* tahun 2022.
8. Pengurangan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp30.165.077.450,06 merupakan pemakaian natura dan pakan tahun 2022.

Selain barang pakai habis di atas, terdapat barang pakai habis yang sudah *expired* dan telah dikeluarkan dari penyajian neraca per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-334 Barang Pakai Habis Yang Sudah Kedaluwarsa/Expired**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bahan	37.754.225,81	240.803.053,56	37.754.225,81	240.803.053,56
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	78.121.862,10	137.135.390,45	76.703.882,10	138.553.370,45
3	Obat-Obatan	209.785.591,01	99.500.504,11	209.785.591,01	99.500.504,11
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	12.353.000,00	0,00	12.353.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>325.661.678,92</b>	<b>489.791.948,12</b>	<b>324.243.698,92</b>	<b>491.209.928,12</b>

**Tabel 5-335 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/Expired Per SKPD**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	407.054.471,65
2	RSUD dr. H. Koesnadi	15.775.064,67
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.353.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	10.064.400,00
5	Dinas Perhubungan	32.523.521,80
6	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	9.671.585,00
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	57.200,00
8	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.710.685,00
	<b>Jumlah</b>	<b>491.209.928,12</b>

### 5.3.1.1.1.2 Barang Tak Habis Pakai

Mutasi atas saldo Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2022 sebesar Rp 504.000,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5-336 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pipa	0,00	14.604.000,00	14.100.000,00	504.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>14.604.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>504.000,00</b>

Mutasi penambahan barang tak pakai habis selama Tahun 2022 sebesar Rp14.604.000,00 merupakan realisasi belanja barang tak habis pakai – pipa tahun 2022. Sedangkan mutasi pengurangan barang tak pakai habis selama tahun 2022 sebesar Rp.14.100.000,00 merupakan pemakaian barang tak pakai habis – pipa selama tahun 2022.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>40.039.713.370,76</b>	<b>37.467.057.468,76</b>

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

#### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil.

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>40.039.713.370,76</b>	<b>37.467.057.468,76</b>

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :

##### 5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>40.039.713.370,76</b>	<b>37.467.057.468,76</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.039.713.370,76. Nilai tersebut berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

**Tabel 5-337 Rincian Penyertaan Modal Pemda**

No	SKPD	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	0,00	0,00	21.801.839.250,00
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	13.787.764.458,00	2.779.931.799,00	0,00	16.567.696.257,00
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	1.877.453.760,76	0,00	207.275.897,00	1.670.177.863,76
	<b>Jumlah</b>	<b>37.467.057.468,76</b>	<b>2.779.931.799,00</b>	<b>207.275.897,00</b>	<b>40.039.713.370,76</b>

Dasar hukum penyertaan Modal Pemda pada Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, penyertaan pada PDAM dan PT Bondowoso Gemilang Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-338 Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemda**

No	Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Dasar Hukum	Metode Penilaian
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	Perda No 10 Th 2011	Biaya
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	16.567.696.257,00	Perda No 3 Th 2015	Ekuitas
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	1.670.177.863,76	Perda No 1 Th 2017	Ekuitas
<b>Jumlah</b>		<b>40.039.713.370,76</b>		

Penjelasan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada masing-masing perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut :

1. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengalami perubahan dengan jumlah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.801.839.250,00 dalam bentuk surat kolektif saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. seri A Nomor 30 Tanggal 10 Juli 2012 yang mewakili 87.207.357 lembar saham biasa atas nama Pemda Tingkat II Kabupaten Bondowoso dari nomor 10894959490 s/d 10982166846.
2. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.567.696.257,00 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp2.779.931.799,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp13.787.764.458,00. Perhitungan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada laporan keuangan PDAM tahun 2022 yang sudah diaudit (*Audited*), yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 5-339 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Penyertaan Modal	19.937.782.363,00	19.455.312.026,00
2	Bagian Laba Pemda	1.698.293.100,00	482.470.337,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.636.075.463,00</b>	<b>19.937.782.363,00</b>
3	Akumulasi Kerugian	(5.068.379.206,00)	(6.150.017.905,00)
<b>Saldo</b>		<b>16.567.696.257,00</b>	<b>13.787.764.458,00</b>

Adapun perhitungan bagian laba Pemda adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-340 Perhitungan Bagian Laba Pemda Pada PDAM**

No	Uraian	Lab a Tahun 2022	%	Pembagian Laba 2022	Pembagian Laba 2021
1	Bagian Laba PDAM	3.087.805.637,00	5	1.698.293.100,00	482.470.337,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.087.805.637,00</b>	<b>5</b>	<b>1.698.293.100,00</b>	<b>482.470.337,00</b>

Penjelasan atas jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-341 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PDAM**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022	Saldo Per 31 Des 2021
<b>1.</b>	<b>Penyertaan Pemerintah Daerah</b>	<b>21.636.075.463,00</b>	<b>19.937.782.363,00</b>
a.	Penyediaan tanah seluas 6.720 m2	51.941.500,00	51.941.500,00
b.	Aset Eks P2AB yang dihibahkan ke Pemda Tk II Bondowoso sesuai Berita Acara Nomor : 5/BA/W/97 tanggal 5 Juni 1997	5.580.874.605,00	5.580.874.605,00
c.	BAST No. 50/1858/430.513/2002 tanggal 14 Januari 2002 :		
1)	Pembuatan broncaptering dan pipa PVC Wringin, Maesan dan BNA	261.500.000,00	261.500.000,00
2)	Pembuatan intake, rumah pompa, daya PLN dan pompa serta pemasangan pipa	361.380.000,00	361.380.000,00
3)	Pembuatan sumur bor, pemasangan pompa dan daya PLN dan pompa serta pemasangan Well Head dan pemasangan pipa	357.211.000,00	357.211.000,00
d.	Bantuan dana pengadaan 7 (tujuh) unit Chlorinasi sesuai SPMU BVR Nomor 36 tanggal 5 September 2002	369.600.000,00	369.600.000,00
e.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2006 sesuai surat Bupati Bondowoso No : 539/1277/430.22/2007 tanggal 30 November 2007	470.582.090,00	470.582.090,00
f.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2007 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 616/988/430.51/2008 tanggal 18 November 2008	144.434.317,00	144.434.317,00
g.	Pemasangan perpipaan eks APBD I di Desa Taal Tegalampel sesuai BAST Nomor : 602.1/6238/112/ABLP/2009 tanggal 29 Oktober 2009	194.652.700,00	194.652.700,00
h.	Bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM tahun 2008 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 900/1328/430.814/2011 tanggal 11 Mei 2011	58.083.608,00	58.083.608,00
i.	Pemasangan perpipaan 7 HU eks APBD II di Desa Sumber Malang Wringin tahun 2009 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	339.907.883,00	339.907.883,00
j.	Pengadaan sumur bor, pompa, perpipaan dan HU Desa Karangsegon tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	634.600.000,00	634.600.000,00

No	Uraian	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
k.	Pemasangan Pipa, Daya PLN, dan ruang panel di Desa Koncek Kidul Kecamatan Tlogosari, APBD II tahun 2006 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	166.319.000,00	166.319.000,00
l.	Pekerjaan perpipaan di Desa Locare Kecamatan Curahdami, APBD II tahun 2006 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	85.935.000,00	85.935.000,00
m.	Pekerjaan perpipaan, reservoir, rumah panel, pompa dan HU di Desa Pakem Kecamatan Pakem, APBD II tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	838.000.000,00	838.000.000,00
o.	Perpipaan dan HU di Desa Petung Kecamatan Curahdami, APBD II tahun 2007 sesuai BAST Nomor : 050/173.4/430.6.2/2011 tanggal 20 Juli 2011	254.254.000,00	254.254.000,00
p.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2010 Audit BPKP Nomor : LAI-9763/PW13/4/2011 tanggal 20 Juni 2011	13.727.400,00	13.727.400,00
r.	Penyertaan Modal (APBD tahun 2012, Perda No. 13 tahun 2011 tentang APBD tahun 2012)	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
s.	Penyertaan Modal (PAK APBD tahun 2014)	500.000.000,00	500.000.000,00
t.	Penyertaan Modal (PAK APBD tahun 2015)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
u.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2014	11.770.009,00	11.770.009,00
v.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2015	20.658.594,00	20.658.594,00
w.	Penyertaan Modal (APBD tahun 2016)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
x.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2016	9.165.486,00	9.165.486,00
y.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2017 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	42.423.891,00	42.423.891,00
z.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2018 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	122.254.495,00	122.254.495,00
aa.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2019 sesuai surat Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/95/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021	681.522.064,00	681.522.064,00
ab.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2020	539.514.384,00	539.514.384,00
ac.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2021	482.470.337,00	482.470.337,00
ad.	Bagian Laba Pemda atas laba bersih PDAM thn 2022	1.698.293.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Akumulasi Kerugian</b>	<b>(5.068.379.206,00)</b>	<b>(6.150.017.905,00)</b>
a.	Akumulasi Kerugian s.d Tahun 2019	(6.757.182.317,00)	(6.757.182.317,00)
b.	Laba 2020	980.935.243,00	980.935.243,00
c.	Mutasi Pengurangan 2021	(1.250.989.626,00)	(1.250.989.626,00)
d.	Laba 2021	877.218.795,00	877.218.795,00
e.	Mutasi Pengurangan 2022	(877.218.795,00)	0,00
f.	Akumulasi Kerugian 2022	(1.128.948.143,00)	0,00
g.	Laba 2022	3.087.805.637,00	0,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal Pemda</b>		<b>16.567.696.257,00</b>	<b>13.787.764.458,00</b>

3. Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang merupakan penyertaan modal/investasi kepada BUMD PT Bondowoso Gemilang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/625/430.4.2/2018 tentang Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Perseroda) Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merealisasikan penyertaan modal kepada PT Bondowoso Gemilang melalui SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp2.961.849.000,00.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.670.177.863,76 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp207.275.897,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.877.453.760,76.

Perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.670.177.863,76 berpedoman pada laporan keuangan PT Bondowoso Gemilang tahun 2022 yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Unaudited) dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 5-342 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PT Bondowoso Gemilang**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Penyertaan Modal	2.964.665.659,17	2.964.665.658,41
2	Bagian Laba/(Rugi)	(207.275.897,00)	(622.266.485,00)
3	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,76
<b>Jumlah</b>		<b>2.757.389.762,17</b>	<b>2.342.399.174,17</b>
4	Akumulasi Kerugian	(1.087.211.898,41)	(464.945.413,41)
<b>Saldo</b>		<b>1.670.177.863,76</b>	<b>1.877.453.760,76</b>

Perhitungan bagian rugi sebesar Rp 207.275.897,00 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-343 Perhitungan Bagian Laba/(Rugi) Pada PT Bondowoso Gemilang**

No	Uraian	Labar/(Rugi) Tahun 2022	Persentase Kepemilikan	Bagian Laba/(Rugi) 2022	Bagian Laba/(Rugi) 2021
1	Bagian Laba/(Rugi)	(207.275.897,00)	100%	(207.275.897,00)	(622.266.485,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(207.275.897,00)</b>		<b>(207.275.897,00)</b>	<b>(622.266.485,00)</b>

Penjelasan atas jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang 31 Desember 2022 sebesar Rp1.670.177.863,76 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-344 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bondowoso Gemilang**

No	Uraian	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah	<b>2.964.665.659,17</b>	<b>2.964.665.659,17</b>
a.	SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018	2.961.849.000,00	2.961.849.000,00
b.	Koreksi atas laba thn 2018	2.816.659,17	2.816.659,17
c.	Koreksi saldo awal 2020	(0,76)	(0,76)
d.	Koreksi saldo awal 2021	0,76	0,76
2.	Akumulasi Kerugian	<b>(1.294.487.795,41)</b>	<b>(1.087.211.898,41)</b>
a.	Rugi thn 2019	(277.933.093,41)	(277.933.093,41)
b.	Rugi thn 2020	(187.012.320,00)	(187.012.320,00)
c.	Rugi thn 2021	(622.266.485,00)	(622.266.485,00)
d.	Rugi thn 2022	(207.275.897,00)	0,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal Pemda</b>		<b>1.670.177.863,76</b>	<b>1.877.453.760,76</b>

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b>4.649.074.510.672,56</b>	<b>4.462.652.283.426,15</b>

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.649.074.510.672,56 bila dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.462.652.283.426,15 mengalami kenaikan sebesar Rp186.422.227.246,41. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	4.462.652.283.426,15
Penambahan tahun 2022	Rp	194.592.641.816,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.657.244.925.242,15</b>
Pengurangan tahun 2022	Rp	8.170.414.569,59
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>4.649.074.510.672,56</b>

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2022 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-345 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Tanah	356.992.452.776,00	0,00	0,00	356.992.452.776,00
2	Peralatan dan Mesin	804.359.574.244,63	85.804.083.909,00	7.401.482.661,59	882.762.175.492,04
3	Gedung dan Bangunan	1.012.156.331.292,77	53.652.496.277,00	759.931.908,00	1.065.048.895.661,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.209.170.212.756,54	48.810.233.840,00	0,00	2.257.980.446.596,54
5	Aset Tetap Lainnya	79.419.369.156,21	6.325.827.790,00	0,00	85.745.196.946,21
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	554.343.200,00	0,00	9.000.000,00	545.343.200,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>4.462.652.283.426,15</b>	<b>194.592.641.816,00</b>	<b>8.170.414.569,59</b>	<b>4.649.074.510.672,56</b>

Penjelasan mutasi penambahan aset tetap tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap sebesar Rp194.592.641.816,00 terdiri dari :
  - Belanja modal *netto* Rp 186.110.826.702,00
  - Penerimaan dari hibah Rp 6.191.829.565,00
  - Belanja barang dan jasa Rp 1.283.572.106,00
  - Belanja hibah Rp 99.206.535,00
  - Koreksi aset tetap Rp 138.275.000,00
  - Reklasifikasi Rp 9.000.000,00
  - Mutasi masuk Rp 759.931.908,00

**Jumlah Rp 194.592.641.816,00**

- Belanja Modal *netto* sebesar Rp186.110.826.702,00;  
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal yang mengakibatkan adanya penambahan aset tetap. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2022 (*bruto*) tidak seluruhnya menambah aset tetap karena didalamnya terdapat barang-barang yang tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap misalnya barang tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi dan tergolong sebagai barang dan jasa. Perbedaan antara realisasi belanja modal *bruto* dan belanja modal *netto* dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-346 Perbedaan Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto***

No	Uraian	Realisasi Belanja Modal <i>Bruto</i> (Rp)	Realisasi Belanja Modal <i>Netto</i> (Rp)	Selisih (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Belanja Modal <i>Bruto</i> (Rp)	Realisasi Belanja Modal <i>Netto</i> (Rp)	Selisih (Rp)
2	Peralatan dan Mesin	86.205.466.900,00	84.834.345.859,00	1.371.121.041,00
3	Gedung dan Bangunan	48.977.092.155,00	46.559.887.303,00	2.417.204.852,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.386.382.840,00	48.383.665.840,00	2.717.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.802.635.105,00	6.332.927.700,00	469.707.405,00
<b>Jumlah</b>		<b>190.371.577.000,00</b>	<b>186.110.826.702,00</b>	<b>4.260.750.298,00</b>

Selisih antara realisasi belanja modal *bruto* dan *netto* sebesar Rp4.260.750.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-347 Rincian Selisih Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto***

No	Uraian	Rincian Selisih				Jumlah
		<i>Extracomptable</i>	Belanja Hibah	Belanja Barjas	Lainnya	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.061.541.161,00	199.750.000,00	109.829.880,00	0,00	1.371.121.041,00
3	Gedung dan Bangunan	17.900.000,00	0,00	2.399.304.852,00	0,00	2.417.204.852,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	469.707.405,00	469.707.405,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.079.441.161,00</b>	<b>199.750.000,00</b>	<b>2.511.851.732,00</b>	<b>469.707.405,00</b>	<b>4.260.750.298,00</b>

Pencatatan penambahan aset tetap dari belanja modal sebesar Rp186.110.826.702,00 pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi aset riilnya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-348 Tabel Reklasifikasi Belanja Modal**

No	Uraian	Belanja Modal Aset Tetap (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Aset Tetap Setelah Reklasifikasi
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	84.834.345.859,00	1.489.626.010,00	1.518.126.600,00	84.805.845.269,00
3	Gedung dan Bangunan	46.559.887.303,00	687.479.534,00	955.156.034,00	46.292.210.803,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.383.665.840,00	304.577.000,00	1.300.000,00	48.686.942.840,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.332.927.700,00	0,00	7.099.910,00	6.325.827.790,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>186.110.826.702,00</b>	<b>2.481.682.544,00</b>	<b>2.481.682.544,00</b>	<b>186.110.826.702,00</b>

- b. Penerimaan aset tetap bersumber dari hibah sebesar Rp6.191.829.565,00. Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan lembaga swasta dengan rincian sebagai berikut:
- |               |                               |           |                         |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1.            | Alat Besar                    | Rp        | 27.000.000,00           |
| 2.            | Alat Angkutan                 | Rp        | 228.991.000,00          |
| 3.            | Alat Pertanian                | Rp        | 9.040.000,00            |
| 4.            | Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp        | 243.750.000,00          |
| 5.            | Komputer                      | Rp        | 16.978.500,00           |
| 6.            | Alat Keselamatan Kerja        | Rp        | 220.594.000,00          |
| 7.            | Gedung dan Bangunan           | Rp        | 5.445.476.065,00        |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>Rp</b> | <b>6.191.829.565,00</b> |
- c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.283.572.106,00. Jumlah tersebut merupakan perolehan aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang direalisasikan sebagai belanja barang dan jasa.
- d. Belanja hibah sebesar Rp99.206.535,00. Jumlah tersebut merupakan perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang direalisasikan sebagai belanja hibah.
- e. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp138.275.000,00. Jumlah tersebut merupakan alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp100.875.000,00 dan komputer sebesar Rp37.400.000,00.
- f. Reklasifikasi sebesar Rp9.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi bangunan gedung.
- g. Mutasi Masuk sebesar Rp759.931.908,00. Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi masuk) berupa bangunan gedung.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.776.489.992,00 dan *Block Grand* senilai Rp7.488.612.672,00 pada tahun 2018. Seluruh barang tersebut belum dicatat sebagai barang milik daerah karena belum ada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

**Tabel 5-349 Hibah/Bantuan Yang Belum Mendapatkan BAST**

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Persediaan	1.356.983.000,00	0,00	1.356.983.000,00
2	Aset Tetap	3.781.346.992,00	3.605.748.672,00	7.387.095.664,00
3	Ekstracomptable	90.796.500,00	183.660.000,00	274.456.500,00
4	Bukan Aset	547.363.500,00	3.699.204.000,00	4.246.567.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.776.489.992,00</b>	<b>7.488.612.672,00</b>	<b>13.265.102.664,00</b>

Selain itu terdapat aset tetap yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum dicatat sebagai barang milik daerah pada Neraca per 31 Desember 2022. Aset yang berasal dari Fasilitas Umum (Fasum) Fasilitas Sosial (Fasos) diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasum-fasos dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerima penyerahan fasum-fasos dari beberapa Pengembang Perumahan (PT) diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 5-350 Hibah/Bantuan Yang Belum Mendapatkan BAST**

No	Nama Pengembang	Nama/Alamat Perumahan	Rincian Aset	Nomor BAST	Tanggal BAST
1	PT Podo Joyo Masyhur	Taman Mutiara	Jalan, Saluran, Fasum	640/163/430.9.12/2018	9 Mei 2018
2	PT Dewi Rinjani Persada	Permata Rinjani Regency	Jalan, Musholla	050/662/430.9.12/2021	23 Des 2021
3	PT Carani Bhanu Balakosa	Green City	Jalan, Musholla	050/660/430.9.12/2021	23 Des 2021
4	PT Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	Jalan, Musholla, lapangan, Taman	050/663/430.9.12/2021	23 Des 2021
5	PT Kharisma Istana Persada	Istana Bondowoso	Jalan, Taman	050/661/430.9.12/2021	23 Des 2021
6	PT Adhi Prima Multiguna	Graha Pelita Regency	Jalan, Taman	050/659/430.9.12/2021	23 Des 2021
7	PT Lintang Jaya Properti	Tata Residence	Jalan	050/494/430.9.12/2022	01 Des 2022
8	PT Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	Jalan, Taman	050/495/430.9.12/2022	01 Des 2022
9	PT Joyo Moro Land	Dewata Land	Jalan	050/496/430.9.12/2022	01 Des 2022
10	PT Gemilang Citra Persada	New Taman Safira	Jalan, Taman	050/497/430.9.12/2022	01 Des 2022
11	PT Kharisma Penanggungungan Raya	Kharisma Regency	Jalan, Taman, Musholla	050/498/430.9.12/2022	01 Des 2022

Akan tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan antara pihak ketiga (pengembang) dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kurang informatif, dimana belum dicantumkan secara jelas :

- 1) Jenis dan luasan secara terinci,
- 2) Nilai perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman tersebut masih berdasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang belum dituangkan secara terinci, sehingga aset yang berasal dari fasum-fasos tersebut belum dapat diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan 2022.

Selanjutnya aset tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan setelah adanya dokumen terinci sesuai peraturan perundang-undangan tentang mekanisme penyerahan fasum-fasos selesai disusun khususnya terkait nilai perolehan. Sebagaimana tertuang dalam BAST antara pihak ketiga (pengembang) dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut nilai taksiran hanya berdasarkan pada nilai NJOP total sehingga belum didapatkan nilai perolehan per rincian obyek PSU yang diserahkan terimakan baik berupa :

- 1) Prasarana (jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), dll;
- 2) Sarana (sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, sarana pertamanan dan RTH, dll;
- 3) Utilitas (penerangan jalan umum, dll).

Disamping itu untuk mendapatkan nilai perolehan yang wajar maka perlu dilakukan appraisal oleh penilai independen pada tiap rincian PSU yang diserahkan terimakan sehingga dapat diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan.

2. Pengurangan aset tetap sebesar Rp8.170.414.569,59 terdiri dari :

a. Reklasifikasi	Rp	9.000.000,00
b. Dimusnahkan	Rp	6.071.518.843,59
c. Dijual	Rp	1.329.963.818,00

d. Mutasi keluar	Rp	759.931.908,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.170.414.569,59</b>

Penjelasan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp8.170.414.569,59 adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi sebesar Rp9.000.000,00;  
Jumlah tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap milik daerah berupa bangunan gedung.
- Dimusnahkan sebesar Rp6.071.518.843,59;  
Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Angkutan	Rp	14.500.000,00
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	147.955.000,00
3. Alat Pertanian	Rp	385.693.000,00
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	1.151.317.039,95
5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	280.790.400,00
6. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	2.549.552.345,64
7. Alat Laboratorium	Rp	96.622.697,00
8. Komputer	Rp	1.427.438.361,00
9. Alat Keselamatan Kerja	Rp	17.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.071.518.843,59</b>
- Dijual sebesar Rp1.329.963.818,00;  
Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan sebesar Rp1.329.963.818,00.
- Mutasi Keluar sebesar Rp759.931.908,00;  
Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) berupa bangunan gedung.

	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>356.992.452.776,00</b>	<b>356.992.452.776,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan tanah tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	356.992.452.776,00
Penambahan tahun 2022	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>356.992.452.776,00</b>
Pengurangan tahun 2022	Rp	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>356.992.452.776,00</b>

- Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar nihil.
- Pengurangan Aset Tetap sebesar nihil.

Pada nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2022, dari hasil kegiatan verifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat dan Kelurahan masih terdapat tanah kas desa yang menjadi kelurahan belum seluruhnya dicatat dan/atau masih dalam penelusuran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-351 Rincian Tanah Kas Desa Dalam Penelusuran**

No	Nama Kelurahan	Total Luas Tanah Kas Desa (m <sup>2</sup> )	Total Luas Tanah Kas Desa Yang Tercatat (m <sup>2</sup> )	Total Luas Tanah Kas Desa Yang Belum Tercatat dan/atau Masih Dalam Penelusuran (m <sup>2</sup> )
1	Dabasah	47.430	1.361	46.069
2	Tamansari	49.965	220	49.745
3	Kotakulon	78.390	2.930	75.460
4	Blindungan	8.400	1.150	7.250
5	Badean	2.193	280	1.913
6	Kademangan	52.760	340	52.420
7	Nangkaan	30.000	0	30.000
8	Sekarputih	85.660	3.521	82.139
9	Tenggarang	46.780	2.595	44.185
10	Curahdami	81.600	2.170	79.430

	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin</b>	<b>882.762.175.492,04</b>	<b>804.359.574.244,63</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	804.359.574.244,63
Penambahan Tahun 2022	Rp	85.804.083.909,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>890.163.658.153,63</b>
Pengurangan Tahun 2022	Rp	7.401.482.661,59
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>882.762.175.492,04</b>

1. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp85.804.083.909,00,00 terdiri dari :

a. Belanja modal <i>netto</i>	Rp	84.805.845.269,00
b. Penerimaan dari hibah	Rp	746.353.500,00
c. Belanja barang dan jasa	Rp	113.610.140,00
d. Koreksi Aset Tetap	Rp	138.275.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>85.804.083.909,00</b>

Penjelasan untuk masing-masing penambahan peralatan dan mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp84.805.845.269,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Besar	Rp	4.036.225.550,00
2. Alat Angkutan	Rp	5.984.279.950,00
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	270.180.620,00
4. Alat Pertanian	Rp	69.765.000,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	19.570.009.740,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	2.643.994.836,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	24.007.008.654,00
8. Alat Laboratorium	Rp	7.043.546.438,00
9. Komputer	Rp	20.672.607.253,00
10. Alat Keselamatan Kerja	Rp	102.931.050,00
11. Alat Peraga	Rp	38.337.000,00
12. Rambu-Rambu	Rp	102.861.800,00
13. Peralatan Olah Raga	Rp	264.097.378,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>84.805.845.269,00</b>

b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp746.353.500,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-352 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Nomor BAST	SKPD
1	Alat Besar	11.000.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	360/5660.1/REG/208.3/ 2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Alat Besar	16.000.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	602/7497/208.3/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Alat Angkutan	200.930.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BA.177/BNPB/OJLP/LP .01.03/ 06/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Alat Angkutan	28.061.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BA.112/BNPB/09/2016	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Alat Pertanian	2.260.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	360/7637.1/PMK.II/208. 3/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Alat Pertanian	6.780.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	360/7812.1/PMK.II/ 208.3/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	243.750.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	602/7497/208.3/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Alat Komputer	16.978.500,00	Kementerian Investasi	237/XI/PH- KOMPUTERDAERAH/ DPPM/KEMENINVES- BKM/2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9	Alat Keselamatan Kerja	220.594.000,00	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BA.112/BNPB/09/2017	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Jumlah</b>	<b>746.353.500,00</b>			

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp113.610.140,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Besar	Rp	731.500,00
2. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	50.513.100,00
3. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	8.270.000,00
4. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	27.528.000,00
5. Komputer	Rp	26.567.540,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>113.610.140,00</b>

d. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp138.275.000,00

Jumlah tersebut terdiri :

- Reklasifikasi saldo awal persediaan berupa tabung gas oksigen pada Dinas Kesehatan menjadi alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp100.875.000,00
- Pengadaan server yang semula tercatat sebagai belanja pemeliharaan komputer tahun 2021 sebesar Rp37.400.000,00.

2. Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.401.482.661,59 terdiri dari :

a. Dimusnahkan	Rp	6.071.518.843,59
b. Dijual	Rp	1.329.963.818,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.401.482.661,59</b>

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan peralatan dan mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dimusnahkan sebesar Rp6.071.518.843,59;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Angkutan	Rp	14.500.000,00
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	147.955.000,00
3. Alat Pertanian	Rp	385.693.000,00
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	1.151.317.039,95
5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	280.790.400,00
6. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	2.549.552.345,64
7. Alat Laboratorium	Rp	96.622.697,00
8. Komputer	Rp	1.427.438.361,00
9. Alat Keselamatan Kerja	Rp	17.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.071.518.843,59</b>

b. Dijual sebesar Rp1.329.963.818,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat kendaraan yang dipinjamkaikan sejumlah 14 unit kendaraan roda 4 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-353 Kendaraan Yang Dipinjamkaikan**

No	Jenis aset	Dimanfaatkan oleh	Jangka waktu	Jenis pemanfaatan
1	Kendaraan Roda 4	Kepolisian Resort Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
2	Kendaraan Roda 4	Kejaksaaan Negeri Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
3	Kendaraan Roda 4	Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
4	Kendaraan Roda 4	Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
5	Kendaraan Roda 4	DPC Persatuan Guru Ngaji Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
6	Kendaraan Roda 4	Forum Komunitas Umat Beragama Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
7	Kendaraan Roda 4	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
8	Kendaraan Roda 4	Forum Komunikasi Diniah Taklimiyah Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
9	Kendaraan Roda 4	Majelis Salawat El Wahda Nahdliyyah Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
10	Kendaraan Roda 4	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
11	Kendaraan Roda 2	Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bondowoso	3 Tahun	Pinjam Pakai

No	Jenis aset	Dimanfaatkan oleh	Jangka waktu	Jenis pemanfaatan
12	Kendaraan Roda 2	Kepolisian Resort Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
13	Kendaraan Roda 2	Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
14	Kendaraan Roda 2	Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis peralatan dan mesin selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-354 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Alat Besar	15.099.824.255,00	4.063.957.050,00	0,00	19.163.781.305,00
2	Alat Angkutan	115.688.759.759,00	6.213.270.950,00	1.344.463.818,00	120.557.566.891,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.048.188.727,00	270.180.620,00	147.955.000,00	7.170.414.347,00
4	Alat Pertanian	5.909.781.866,00	78.805.000,00	385.693.000,00	5.602.893.866,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	159.250.773.722,96	19.620.522.840,00	1.151.317.039,95	177.719.979.523,01
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30.879.826.175,00	2.652.264.836,00	280.790.400,00	33.251.300.611,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	258.074.268.788,93	24.379.161.654,00	2.549.552.345,64	279.903.878.097,29
8	Alat Laboratorium	71.825.388.363,26	7.043.546.438,00	96.622.697,00	78.772.312.104,26
9	Alat Persenjataan	154.931.000,00	0,00	0,00	154.931.000,00
10	Komputer	125.649.933.137,48	20.753.553.293,00	1.427.438.361,00	144.976.048.069,48
11	Alat Eksplorasi	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	2.293.920.128,00	323.525.050,00	17.650.000,00	2.599.795.178,00
16	Alat Peraga	299.145.300,00	38.337.000,00	0,00	337.482.300,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu-Rambu	10.788.061.182,00	102.861.800,00	0,00	10.890.922.982,00
19	Peralatan Olah Raga	1.394.796.840,00	264.097.378,00	0,00	1.658.894.218,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>804.359.574.244,63</b>	<b>85.804.083.909,00</b>	<b>7.401.482.661,59</b>	<b>882.762.175.492,04</b>

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.065.048.895.661,77</b>	<b>1.012.156.331.292,77</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 1.012.156.331.292,77
Penambahan Tahun 2022	Rp 53.652.496.277,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.065.808.827.569,77</b>
Pengurangan Tahun 2022	Rp 759.931.908,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1.065.048.895.661,77</b>

1. Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp53.652.496.277,00 terdiri dari :

a. Belanja modal <i>netto</i>	Rp 46.292.210.803,00
b. Penerimaan dari Hibah	Rp 5.445.476.065,00
c. Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.046.670.966,00
d. Belanja Hibah	Rp 99.206.535,00
e. Reklasifikasi	Rp 9.000.000,00
f. Mutasi Masuk	Rp 759.931.908,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 53.652.496.277,00</b>

Penjelasan untuk masing-masing penambahan gedung dan bangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp46.292.210.803,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan gedung	Rp 45.054.115.367,00
2. Monumen	Rp 397.389.244,00
3. Bangunan Menara	Rp 574.632.381,00
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 266.073.811,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 46.292.210.803,00</b>

- b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp5.445.476.065,00;  
Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-355 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Nomor BAST	SKPD
1	Bangunan Gedung	2.625.809.000,00	Kementerian Perdagangan	118/M-DAG/NH/03/2022	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
2	Bangunan Gedung	2.819.667.065,00	Kementerian Perdagangan	120/M-DAG/NH/03/2022	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
<b>Jumlah</b>		<b>5.445.476.065,00</b>			

- c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.046.670.966,00;  
Jumlah tersebut merupakan penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai gedung dan bangunan berupa bangunan gedung;
- d. Belanja hibah sebesar Rp99.206.535,00  
Jumlah tersebut merupakan perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang direalisasikan sebagai belanja hibah.
- e. Reklasifikasi sebesar Rp9.000.000,00;  
Jumlah tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap milik daerah berupa bangunan gedung; dan
- f. Mutasi Masuk Sebesar Rp759.931.908,00;  
Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah berupa bangunan gedung.
2. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp759.931.908,00 merupakan pengurangan gedung dan bangunan karena adanya perpindahan gedung dan bangunan (mutasi keluar) antar perangkat daerah.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis gedung dan bangunan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-356 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.006.580.917.311,12	52.414.400.841,00	759.931.908,00	1.058.235.386.244,12
2	Monumen	4.552.929.372,65	397.389.244,00	0,00	4.950.318.616,65
3	Bangunan Menara	0,00	574.632.381,00	0,00	574.632.381,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1.022.484.609,00	266.073.811,00	0,00	1.288.558.420,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.012.156.331.292,77</b>	<b>53.652.496.277,00</b>	<b>759.931.908,00</b>	<b>1.065.048.895.661,77</b>

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2.257.980.446.596,54</b>	<b>2.209.170.212.756,54</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.209.170.212.756,54
Penambahan Tahun 2022	Rp	48.810.233.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.257.980.446.596,54</b>
Pengurangan Tahun 2022	Rp	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>2.257.980.446.596,54</b>

1. Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp48.810.233.840,00 terdiri dari :

a. Belanja modal <i>netto</i>	Rp	48.686.942.840,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	123.291.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>48.810.233.840,00</b>

Penjelasan untuk masing-masing penambahan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp48.686.942.840,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan	Rp	39.527.121.350,00
2. Bangunan Air	Rp	8.212.999.860,00
3. Jaringan	Rp	946.821.630,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>48.686.942.840,00</b>

b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp123.291.000,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai jalan, irigasi dan jaringan berupa instalasi sebesar Rp20.091.000,00 dan jaringan sebesar Rp103.200.000,00;

2. Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-357 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.054.990.750.658,61	39.527.121.350,00	0,00	1.094.517.872.008,61
2	Bangunan Air (Irigasi)	1.084.913.394.323,93	8.212.999.860,00	0,00	1.093.126.394.183,93
3	Instalasi	14.093.658.383,00	20.091.000,00	0,00	14.113.749.383,00
4	Jaringan	55.172.409.391,00	1.050.021.630,00	0,00	56.222.431.021,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.209.170.212.756,54</b>	<b>48.810.233.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.980.446.596,54</b>

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>85.745.196.946,21</b>	<b>79.419.369.156,21</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	79.419.369.156,21
Penambahan tahun 2022	Rp	6.325.827.790,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>85.745.196.946,21</b>
Pengurangan tahun 2022	Rp	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>85.745.196.946,21</b>

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp6.325.827.790,00 merupakan penambahan aset tetap lainnya dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD berupa bahan perpustakaan.

2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis aset tetap lainnya selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-358 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	77.457.909.011,21	6.325.827.790,00	0,00	83.783.736.801,21
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.097.224.314,00	0,00	0,00	1.097.224.314,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	100.790.000,00	0,00	0,00	100.790.000,00
5	Tanaman	763.445.831,00	0,00	0,00	763.445.831,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>79.419.369.156,21</b>	<b>6.325.827.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.745.196.946,21</b>

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>545.343.200,00</b>	<b>554.343.200,00</b>

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang dalam masa pembangunan atau pengerjaannya melewati satu periode anggaran. Jumlah tersebut merupakan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang masih dalam pengerjaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-359 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	554.343.200,00	0,00	9.000.000,00	545.343.200,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>554.343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>545.343.200,00</b>

Pengurangan KDP sebesar Rp9.000.000,00 merupakan KDP tahun 2022 yang telah dinyatakan selesai dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang direklasifikasi menjadi aset tetap pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-360 Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Jenis KDP	Jumlah (Rp)	Tahun Pengakuan	OPD
1	KDP Bangunan Gedung	9.000.000,00	2022	RSUD dr. H. Koesnadi
	<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000,00</b>		

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2022 sebesar Rp545.343.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-361 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Jenis KDP	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Biaya Yg Sudah Dikeluarkan	Jumlah Biaya Yg Masih Harus Dibayar
1	Perencanaan – Tugu Pembangunan	24.05/02/PPK-DED Alun-alun/XI/2019, 26/11/2019	388.000.800,00	388.000.800,00	0,00
	Administrasi Proyek (AP) – Tugu Pembangunan		0,00	1.500.000,00	0,00
2	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/72.A/PPK/1.02.01./2019, 30/10/2019	97.810.000,00	83.138.500,00	0,00
3	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/71.A/PPK/1.02.01./2019, 30/10/2019	85.534.000,00	72.703.900,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>571.344.800,00</b>	<b>545.343.200,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>2.201.242.997.669,22</b>	<b>1.964.664.492.387,03</b>

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai Aset Tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan perhitungan penyusutan Aset Tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 18 dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.201.242.997.669,22.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-362 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Peralatan Mesin	604.117.808.660,36	93.435.013.233,00	7.399.819.816,59	690.153.002.076,77
2	Gedung dan Bangunan	432.349.180.072,33	23.062.699.736,78	0,00	455.411.879.809,11
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	928.197.503.654,34	127.480.612.129,00	0,00	1.055.678.115.783,34
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>1.964.664.492.387,03</b>	<b>243.978.325.098,78</b>	<b>7.399.819.816,59</b>	<b>2.201.242.997.669,22</b>

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp243.978.325.098,78 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5-363 Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset**

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	93.435.013.233,00	0,00	93.435.013.233,00
2	Gedung dan Bangunan	23.062.699.736,78	0,00	23.062.699.736,78
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.480.612.129,00	0,00	127.480.612.129,00
	<b>Jumlah</b>	<b>243.978.325.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>243.978.325.098,78</b>

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp7.399.819.816,59 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 5-364 Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset**

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Penghapusan (Rp)	Koreksi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	7.399.819.816,59	0,00	0,00	7.399.819.816,59
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.399.819.816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.819.816,59</b>

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.4 Dana Cadangan</b>	<b>15.040.311.124,69</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Dana Cadangan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sehingga disisihkan setiap Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/648/430.4.2/2022 tentang Penunjukan Bank Tempat Penyimpanan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dana Cadangan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Bondowoso.

Realisasi pembentukan dana cadangan melalui pencairan SP2D Nomor : 05.05/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 tanggal 24 November 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-365 Dana Cadangan**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Dana Cadangan	0,00	15.040.311.124,69	0,00	15.040.311.124,69
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>15.040.311.124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.040.311.124,69</b>

Penambahan sebesar Rp15.040.311.124,69 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi pembentukan dana cadangan melalui pencairan SP2D Nomor : 05.05/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar	15.000.000.000,00
b. Pengakuan bunga deposito dana cadangan bagian bulan November 2022	32.671.232,87
c. Pengakuan bunga deposito dana cadangan bagian bulan Desember 2022 (7/31 x 33.833.806,62) sebesar	7.639.891,82
<b>Jumlah</b>	<b>15.040.311.124,69</b>

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.5 Aset Lainnya</b>	<b>60.391.079.007,66</b>	<b>62.432.621.049,58</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5-366 Rincian Aset Lainnya**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	2.549.278.509,00	2.549.278.509,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	151.408.140,00	151.408.140,00
3	Aset Tak Berwujud	9.223.187.675,00	8.969.674.320,00
4	Akumulasi Amortisasi	(7.870.655.413,34)	(7.113.980.691,34)
5	Aset Lain-lain	59.367.581.199,00	61.609.438.122,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.029.721.102,00)	(3.733.197.350,08)
<b>Jumlah</b>		<b>60.391.079.007,66</b>	<b>62.432.621.049,58</b>

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>2.549.278.509,00</b>	<b>2.549.278.509,00</b>

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

1. Tagihan Penjualan Angsuran;

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah;

Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2022 merupakan TGR pada kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dengan SK Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Putusan Pengadilan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-367 Rekapitulasi TGR atas hasil Pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR**

No	Uraian	Tahun	Jumlah
<b>a</b>	<b>SK Pembebanan Sementara</b>		<b>2.507.350.309,00</b>
1	Temuan Audit BPK atas LKD tahun 2004 pada pos DPRD	2004	2.034.463.909,00
2	Belanja Bantuan Parpol pada Bakesbang Linmas	2006	74.900.000,00
3	Penerimaan pembayaran piutang kredit sapi kereman (PTSK)	2013	397.986.400,00
<b>b</b>	<b>SK Pembebanan Sementara</b>		<b>41.928.200,00</b>
1	TGR barang milik daerah	2004	41.928.200,00
	<b>Jumlah</b>		<b>2.549.278.509,00</b>

Mutasi Tagihan TGR adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-368 Rincian TGR atas hasil pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR**

No.	Uraian Kerugian	Nilai Kerugian (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)	Ket.
<b>a</b>	<b>SK Pembebanan Sementara</b>	<b>2.507.350.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.350.309,00</b>	
1	Temuan Audit BPK atas LKD tahun 2004 pada pos DPRD	2.034.463.909,00	0,00	2.034.463.909,00	
2	Belanja Bantuan Parpol pada Bakesbang Linmas	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	
3	Penerimaan pembayaran piutang kredit sapi kereman (PTSK)	397.986.400,00	0,00	397.986.400,00	
<b>b</b>	<b>SK Pembebanan Sementara</b>	<b>41.928.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.928.200,00</b>	
1	TGR barang milik daerah	41.928.200,00	0,00	41.928.200,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.549.278.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.278.509,00</b>	

	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>151.408.140,00</b>	<b>151.408.140,00</b>

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp151.408.140,00 merupakan kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sebagai berikut :

1. Bentuk kerjasama : Kerjasama Pemanfaatan

2. Nomor Perjanjian : 188/13/430.6.2/2014

3. Pembagian Keuntungan : Kontribusi keuntungan dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2044 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Untuk 5 tahun pertama sebesar Rp18.000.000,00/ tahun.
- Untuk 5 tahun kedua sebesar Rp20.000.000,00/ tahun.
- Untuk 5 tahun ketiga sebesar Rp22.000.000,00/ tahun.
- Untuk 5 tahun keempat sebesar Rp24.000.000,00 /tahun.
- Untuk 5 tahun kelima sebesar Rp26.000.000,00 /tahun.
- Untuk 5 tahun keenam sebesar Rp28.000.000,00/ tahun, dengan total jangka waktu pemangaatan selama 30 tahun dengan grace period 1 tahun, sehingga pembayaran kontribusi oleh PT. Dian Graha Utama dimulai tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 30. Kontribusi tersebut sudah termasuk diperhitungkan didalamnya, kontribusi sewa bangunan Pedagang Kaki Lima dan keuntungan pengelolaan.

4. Jangka Waktu Perjanjian : 30 tahun

	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud</b>	<b>9.223.187.675,00</b>	<b>8.969.674.320,00</b>

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp9.223.187.675,00 berasal dari saldo Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.969.674.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-369 Aset Tidak Berwujud**

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	665.294.500,00	0,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	101.672.500,00	0,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	419.685.500,00	0,00	50.064.000,00	369.621.500,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Aplikasi Persediaan Barang	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Software Antrian Pasien	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Sistem Aplikasi Absensi Terintegrasi	42.064.000,00	0,00	42.064.000,00	0,00
	Software Antrian Pasien	34.820.500,00	0,00	0,00	34.820.500,00
	Software SIKDA	49.428.500,00	0,00	0,00	49.428.500,00
	Software PSC 119	185.872.500,00	0,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	211.777.475,00	25.000.000,00	0,00	236.777.475,00
	Software Absensi	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
	Software MMPI	12.783.925,00	0,00	0,00	12.783.925,00
	Software SIPERKASA	148.860.800,00	0,00	0,00	148.860.800,00
	Software Mobile Presensi	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Software MMPI 2	15.282.750,00	0,00	0,00	15.282.750,00
	Software Aplikasi Surat Menyurat	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	275.841.500,00	0,00	0,00	275.841.500,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	79.667.500,00	0,00	0,00	79.667.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.191.000,00	0,00	0,00	30.191.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	6.775.000,00	0,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	142.169.500,00	0,00	0,00	142.169.500,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	29.744.000,00	0,00	0,00	29.744.000,00
	Aplikasi LAKIP	29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	29.584.500,00	0,00	0,00	29.584.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.916.000,00	9.795.000,00	0,00	13.711.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sistem Informasi Tanggap Bencana	0,00	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	115.553.000,00	0,00	0,00	115.553.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	10.682.000,00	0,00	0,00	10.682.000,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	22.055.000,00	0,00	0,00	22.055.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	24.450.000,00	0,00	0,00	24.450.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	24.450.000,00	0,00	0,00	24.450.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Perhubungan	149.873.900,00	0,00	0,00	149.873.900,00
	Software Aplikasi Web GIS	49.891.600,00	0,00	0,00	49.891.600,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo	
		Per 31 Des 2021 (Rp)			Per 31 Des 2022 (Rp)	
13	Software Aplikasi Web GIS	99.982.300,00	0,00	0,00	99.982.300,00	
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.537.958.200,00	0,00	0,00	1.537.958.200,00	
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	59.840.000,00	0,00	0,00	59.840.000,00	
	Aplikasi Dashboard	109.725.000,00	0,00	0,00	109.725.000,00	
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00	
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00	
	Website Desa	479.000.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00	
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
	Website Sistem Informasi Pemerintah	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00	
	Website Desa	377.000.000,00	0,00	0,00	377.000.000,00	
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00	
	(www.geopark.bondowosokab.go.id)					
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00	
(www.humas.bondowosokab.go.id)						
Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00		
(www.wonosari.bondowosokab.go.id)						
Software StreamX	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00		
Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	45.276.000,00	0,00	0,00	45.276.000,00		
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	706.222.000,00	0,00	0,00	706.222.000,00	
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	0,00	215.300.000,00	
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	0,00	50.229.000,00	
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	0,00	170.550.000,00	
	Software Sijeprek	74.227.000,00	0,00	0,00	74.227.000,00	
	Website	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00	
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
	Software Database Data Industri	39.850.000,00	0,00	0,00	39.850.000,00	
	Software Akuntansi Koperasi	77.550.000,00	0,00	0,00	77.550.000,00	
	Software Industri	24.750.000,00	0,00	0,00	24.750.000,00	
	15	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	712.130.000,00	0,00	0,00	712.130.000,00
		Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
		Aplikasi Program Paten	263.055.000,00	0,00	0,00	263.055.000,00
Pembelian Anti Virus		4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	
Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja		99.621.500,00	0,00	0,00	99.621.500,00	
Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal		31.228.000,00	0,00	0,00	31.228.000,00	
Software Aplikasi E Absensi		3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat		79.451.000,00	0,00	0,00	79.451.000,00	
16		Dinas Perpustakaan & Kearsipan	481.250.560,00	0,00	0,00	481.250.560,00
		Software Kearsipan (SIMAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
		Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
		Website Perpustakaan E-Beca	101.333.000,00	0,00	0,00	101.333.000,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	59.862.600,00	0,00	0,00	59.862.600,00	
	Software Kearsipan	126.789.960,00	0,00	0,00	126.789.960,00	
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	36.746.000,00	0,00	0,00	36.746.000,00	
	17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
		Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	101.466.000,00	36.630.000,00	0,00	138.096.000,00
		Software	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
		Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	0,00	48.550.000,00
Software Aplikasi E Absensi		3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
19	Software Aplikasi Si Buta Perawat Susi	0,00	36.630.000,00	0,00	36.630.000,00	
	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
20	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	
	Sekretariat Daerah	495.230.685,00	0,00	0,00	495.230.685,00	
	Paket Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi JDIIH Bondowoso	77.406.000,00	0,00	0,00	77.406.000,00	
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00	
	Aplikasi Hitung Cepat	49.643.000,00	0,00	0,00	49.643.000,00	
	Update Data LPPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00	
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botani (ELAPBONIC)	9.656.900,00	0,00	0,00	9.656.900,00	
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	49.627.000,00	0,00	0,00	49.627.000,00	
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	95.036.700,00	0,00	0,00	95.036.700,00	
	Aplikasi One Stop Service	88.027.885,00	0,00	0,00	88.027.885,00	
	Software Aplikasi E-Absensi	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00	
	21	Inspektorat	39.622.000,00	64.879.500,00	0,00	104.501.500,00
Website		39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00	

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo
		Per 31 Des 2021 (Rp)			Per 31 Des 2022 (Rp)
	Aplikasi e-Audit	0,00	64.879.500,00	0,00	64.879.500,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.690.900,00	0,00	0,00	75.690.900,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Updating Website Bappeda	44.598.400,00	0,00	0,00	44.598.400,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	195.666.000,00	66.766.500,00	0,00	262.432.500,00
	Software Windows Server	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Simd@k	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)	49.750.000,00	0,00	0,00	49.750.000,00
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	142.000.000,00	66.766.500,00	0,00	208.766.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.406.645.800,00	350.889.005,00	0,00	1.757.534.805,00
	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	193.200.000,00	107.431.040,00	0,00	300.631.040,00
	Software Aplikasi E-SPTPD	92.935.000,00	0,00	0,00	92.935.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	91.728.950,00	48.729.000,00	0,00	140.457.950,00
	E-SPTPD Berbasis Android	91.864.850,00	0,00	0,00	91.864.850,00
	Aplikasi Sigraku	0,00	97.731.615,00	0,00	97.731.615,00
	Software Esmart	0,00	96.997.350,00	0,00	96.997.350,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	995.831.800,00	43.639.650,00	294.022.300,00	745.449.150,00
	Website (bkd.bondowosokab.go.id)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software mesin Absensi	59.199.800,00	0,00	59.199.800,00	0,00
	Software Simpeg Webbase	312.002.500,00	43.639.650,00	0,00	355.642.150,00
	Software Kenaikan Pangkat	43.662.500,00	0,00	43.662.500,00	0,00
	Software SMS Gateway	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software E-Absensi Berbasis Web	110.880.000,00	0,00	110.880.000,00	0,00
	Software aplikasi E-absensi Berbasis Android	38.280.000,00	0,00	38.280.000,00	0,00
	Software Aplikasi Layanan Antar Dokumen Pensiun Berbasis Web	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	Software e-SKP	214.230.000,00	0,00	0,00	214.230.000,00
	Aplikasi Sitapelegit	89.914.000,00	0,00	0,00	89.914.000,00
	Aplikasi Siraddin	39.963.000,00	0,00	0,00	39.963.000,00
26	Kecamatan Bondowoso	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
27	Kecamatan Tamanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tenggarang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tegalampel	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Curahdami	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Wringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Pakem	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Binakal	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Maesan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Grujugan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Pujer	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
37	Kecamatan Wonosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Tlogosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Sukosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Tapen	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo
		Per 31 Des 2021 (Rp)			Per 31 Des 2022 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Sumberwringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Prajekan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Klabang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Cerme	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Taman Krocok	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Jambesari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Botolinggo	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.426.000,00	0,00	0,00	52.426.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	48.510.000,00	0,00	0,00	48.510.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.969.674.320,00</b>	<b>597.599.655,00</b>	<b>344.086.300,00</b>	<b>9.223.187.675,00</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penambahan Aset tidak berwujud sebesar Rp597.599.655,00 terdiri dari :

- Belanja Modal	Rp.	25.000.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	469.707.405,00
- Koreksi Saldo Awal	Rp.	59.252.600,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	43.639.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>597.599.655,00</b>

Pengurangan aset tidak berwujud sebesar Rp344.086.300,00 merupakan penghapusan aset tidak berwujud dengan tindak lanjut pemusnahan.

	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>7.870.655.413,34</b>	<b>7.113.980.691,34</b>

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp7.870.655.413,34 berasal dari saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.113.980.691,34 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5-370 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo
		31 Des 2021 (Rp)			31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	665.294.500,00	0,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	101.672.500,00	0,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	385.985.900,00	16.849.800,00	50.064.000,00	352.771.700,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Aplikasi Persediaan Barang	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Software Antrian Pasien	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	42.064.000,00	0,00	42.064.000,00	0,00
	Software Antrian Pasien	20.892.300,00	6.964.100,00	0,00	27.856.400,00
	Software SIKDA	29.657.100,00	9.885.700,00	0,00	39.542.800,00
	Software PSC 119	185.872.500,00	0,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	47.882.280,00	47.355.495,00	0,00	95.237.775,00
	Software Absensi	5.940.000,00	2.970.000,00	0,00	8.910.000,00
	Software MMPI	5.113.570,00	2.556.785,00	0,00	7.670.355,00
	Software SIPERKASA	29.772.160,00	29.772.160,00	0,00	59.544.320,00
	Software Mobile Presensi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	Software MMPI 2	3.056.550,00	3.056.550,00	0,00	6.113.100,00
	Software Aplikasi Surat Menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Bina Konstruksi	228.041.000,00	15.933.500,00	0,00	243.974.500,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	31.867.000,00	15.933.500,00	0,00	47.800.500,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	30.191.000,00	0,00	0,00	30.191.000,00
5	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	6.775.000,00	0,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
	(Berbasis Web)				
6	Satuan Polisi Pamong Praja	124.505.700,00	11.746.900,00	0,00	136.252.600,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	29.744.000,00	0,00	0,00	29.744.000,00
	Aplikasi LAKIP	23.320.000,00	5.830.000,00	0,00	29.150.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	17.750.700,00	5.916.900,00	0,00	23.667.600,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.916.000,00	1.959.000,00	0,00	5.875.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sistem Informasi Tanggap Bencana	0,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	46.927.200,00	22.327.400,00	0,00	69.254.600,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	18.000.000,00	6.000.000,00	0,00	24.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	6.409.200,00	2.136.400,00	0,00	8.545.600,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	8.822.000,00	4.411.000,00	0,00	13.233.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	9.780.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	9.780.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Perhubungan	69.927.880,00	29.974.780,00	0,00	99.902.660,00
	Software Aplikasi Web GIS	29.934.960,00	9.978.320,00	0,00	39.913.280,00
	Software Aplikasi Web GIS	39.992.920,00	19.996.460,00	0,00	59.989.380,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.097.116.680,00	272.895.440,00	0,00	1.370.012.120,00
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	59.840.000,00	0,00	0,00	59.840.000,00
	Aplikasi Dashboard	109.725.000,00	0,00	0,00	109.725.000,00
	Website OPD	95.920.000,00	23.980.000,00	0,00	119.900.000,00
	Website OPD	95.920.000,00	23.980.000,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	383.200.000,00	95.800.000,00	0,00	479.000.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Sistem Informasi Pemerintah	71.940.000,00	23.980.000,00	0,00	95.920.000,00
	Website Desa	226.200.000,00	75.400.000,00	0,00	301.600.000,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.geopark.bondowosokab.go.id)	9.950.160,00	4.975.080,00	0,00	14.925.240,00
	Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan (www.wonosari.bondowosokab.go.id)	9.950.160,00	4.975.080,00	0,00	14.925.240,00
	Software StreamX	11.550.000,00	5.775.000,00	0,00	17.325.000,00
	Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	9.055.200,00	9.055.200,00	0,00	18.110.400,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	637.462.000,00	38.400.000,00	0,00	675.862.000,00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	0,00	215.300.000,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	0,00	50.229.000,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	0,00	170.550.000,00
	Software Sijeptrak	74.227.000,00	0,00	0,00	74.227.000,00
	Website	39.880.000,00	9.970.000,00	0,00	49.850.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Database Data Industri	31.880.000,00	7.970.000,00	0,00	39.850.000,00
	Software Akuntansi Koperasi	46.530.000,00	15.510.000,00	0,00	62.040.000,00
	Software Industri	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	9.900.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	653.184.700,00	43.055.100,00	0,00	696.239.800,00
	Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
	Aplikasi Program Paten	263.055.000,00	0,00	0,00	263.055.000,00
	Pembelian Anti Virus	3.980.000,00	995.000,00	0,00	4.975.000,00
	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja	79.697.200,00	19.924.300,00	0,00	99.621.500,00
	Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal	24.982.400,00	6.245.600,00	0,00	31.228.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat	47.670.600,00	15.890.200,00	0,00	63.560.800,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	307.314.354,00	66.939.907,00	0,00	374.254.261,00
	Software Kearsipan (SIMAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Perpustakaan E-Beca	60.799.800,00	20.266.600,00	0,00	81.066.400,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	31.930.370,00	13.966.115,00	0,00	45.896.485,00
	Software Kearsipan	50.715.984,00	25.357.992,00	0,00	76.073.976,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	7.349.200,00	7.349.200,00	0,00	14.698.400,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	101.466.000,00	7.326.000,00	0,00	108.792.000,00
	Software	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
	Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	0,00	48.550.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Si Buta Perawat Susi	0,00	7.326.000,00	0,00	7.326.000,00
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
20	Sekretariat Daerah	334.242.114,00	63.950.897,00	0,00	398.193.011,00
	Paket Belanja Modal Pengadaan	30.962.400,00	15.481.200,00	0,00	46.443.600,00
	Software Aplikasi JDIIH Bondowoso				
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00
	Aplikasi Hitung Cepat	49.643.000,00	0,00	0,00	49.643.000,00
	Update Data LPPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botani (ELAPBONIC)	5.794.140,00	1.931.380,00	0,00	7.725.520,00
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	29.776.200,00	9.925.400,00	0,00	39.701.600,00
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	57.022.020,00	19.007.340,00	0,00	76.029.360,00
	Aplikasi One Stop Service	35.211.154,00	17.605.577,00	0,00	52.816.731,00
	Software Aplikasi E Absensi	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
21	Inspektorat	39.622.000,00	12.975.900,00	0,00	52.597.900,00
	Website	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	Aplikasi e-Audit	0,00	12.975.900,00	0,00	12.975.900,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.851.540,00	10.919.680,00	0,00	64.771.220,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADEK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	Updating Website Bappeda	26.759.040,00	8.919.680,00	0,00	35.678.720,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.516.000,00	63.955.500,00	0,00	144.471.500,00
	Software Windows Server	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Simd@k	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)	29.850.000,00	9.950.000,00	0,00	39.800.000,00
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	46.750.000,00	54.005.500,00	0,00	100.755.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.200.381.310,00	220.847.006,34	0,00	1.421.228.316,34
	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	115.920.000,00	102.230.953,34	0,00	218.150.953,34
	Software Aplikasi E-SPTPD	55.761.000,00	18.587.000,00	0,00	74.348.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	55.037.370,00	42.710.290,00	0,00	97.747.660,00
	E-SPTPD Berbasis Android	36.745.940,00	18.372.970,00	0,00	55.118.910,00
	Aplikasi Sigraku	0,00	19.546.323,00	0,00	19.546.323,00
	Software Esmart	0,00	19.399.470,00	0,00	19.399.470,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	817.898.533,34	143.646.716,66	294.022.300,00	667.522.950,00
	Website	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software mesin Absensi	59.199.800,00	0,00	59.199.800,00	0,00
	Software Simpeg Webbase	312.002.500,00	43.639.650,00	0,00	355.642.150,00
	Software Kenaikan Pangkat	43.662.500,00	0,00	43.662.500,00	0,00
	Software SMS Gateway	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software E-Absensi Berbasis Web	110.880.000,00	0,00	110.880.000,00	0,00
	Software aplikasi E-absensi Berbasis Android	38.280.000,00	0,00	38.280.000,00	0,00
	Software Aplikasi Layanan Antar Dokumen Pensiun Berbasis Web	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00
	Software e-SKP	140.898.333,34	73.331.666,66	0,00	214.230.000,00
	Aplikasi Sitapelegit	17.982.800,00	17.982.800,00	0,00	35.965.600,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
	Aplikasi Siraddin	7.992.600,00	7.992.600,00	0,00	15.985.200,00
26	Kecamatan Bondowoso	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
27	Kecamatan Tamanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tenggarang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tegalmepel	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Curahdami	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Wringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Pakem	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Binakal	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Maesan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Grugujan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Pujer	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
37	Kecamatan Wonosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Tlogosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Sukosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Tapen	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Sumberwringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Prajekan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Klabang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Cermee	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Taman Krocok	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Jambesari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Botolinggo	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.022.000,00	9.702.000,00	0,00	42.724.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	29.106.000,00	9.702.000,00	0,00	38.808.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.113.980.691,34</b>	<b>1.100.761.022,00</b>	<b>344.086.300,00</b>	<b>7.870.655.413,34</b>

Untuk Aset Tak Berwujud yang masih memiliki masa manfaat tetapi sudah tidak digunakan lagi, maka Amortisasi dibebankan seluruhnya sampai berakhirnya masa manfaat pada tahun berjalan.

Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
<b>59.367.581.199,00</b>	<b>61.609.438.122,00</b>

### 5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.367.581.199,00 merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan Kebijakan Akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-371 Rincian Aset Lainnya – Aset Lain-Lain**

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>16.178.690.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.306.553,00</b>	<b>13.557.383.879,00</b>
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00
	Alat Angkutan	1.182.062.882,00	0,00	0,00	1.182.062.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.940.035.915,00	0,00	136.702.895,00	6.803.333.020,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemanancar	415.447.404,00	0,00	90.431.500,00	325.015.904,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.997.778.779,00	0,00	1.729.946.058,00	267.832.721,00
	Alat Laboratorium	2.271.839.040,00	0,00	314.561.000,00	1.957.278.040,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	2.286.873.912,00	0,00	349.665.100,00	1.937.208.812,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>396.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.213.000,00</b>
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	396.213.000,00	0,00	0,00	396.213.000,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>44.493.194.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666.962.839,00</b>	<b>30.826.231.251,00</b>
	Jalan dan Jembatan	15.528.770.008,00	0,00	9.350.403.388,00	6.178.366.620,00
	Bangunan Air (Irigasi)	9.772.900.812,00	0,00	4.316.559.451,00	5.456.341.361,00
	Instalasi	19.191.523.270,00	0,00	0,00	19.191.523.270,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>541.340.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.340.600,00</b>	<b>0,00</b>
	Aset Tidak Berwujud	541.340.600,00	0,00	541.340.600,00	0,00
<b>7</b>	<b>Treasury Deposit Facility</b>	<b>0,00</b>	<b>14.587.753.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.587.753.069,00</b>
	Treasury Deposit Facility	0,00	14.587.753.069,00	0,00	14.587.753.069,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.609.438.122,00</b>	<b>14.587.753.069,00</b>	<b>16.829.609.992,00</b>	<b>59.367.581.199,00</b>

Penambahan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp14.587.753.069,00 berupa Treasury Deposit Facility merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pengurangan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp16.829.609.992,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-372 Rincian Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain**

No	Jenis Aset Lain-Lain	Dimusnahkan (Rp)	Dihibahkan (Rp)	Dijual (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Total (Rp)
<b>1</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.621.306.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.306.553,00</b>
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.702.895,00	0,00	0,00	0,00	136.702.895,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	90.431.500,00	0,00	0,00	0,00	90.431.500,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.729.946.058,00	0,00	0,00	0,00	1.729.946.058,00
	Alat Laboratorium	314.561.000,00	0,00	0,00	0,00	314.561.000,00
	Komputer	349.665.100,00	0,00	0,00	0,00	349.665.100,00
<b>2</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666.962.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666.962.839,00</b>
	Jalan dan Jembatan	0,00	9.350.403.388,00	0,00	0,00	9.350.403.388,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	4.316.559.451,00	0,00	0,00	4.316.559.451,00
<b>3</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>541.340.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.340.600,00</b>
	Aset Tidak Berwujud	541.340.600,00	0,00	0,00	0,00	541.340.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.162.647.153,00</b>	<b>13.666.962.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.829.609.992,00</b>

Dari beberapa upaya yang dilakukan Pemkab Bondowoso untuk menyelesaikan aset lain-lain pada tahun 2022 sudah menunjukkan progres dengan berkurangnya aset lain-lain dari tahun sebelumnya sebesar Rp16.829.609.992,00. Adapun beberapa faktor penyebab masih adanya saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 pada beberapa OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan belum sepenuhnya lengkap.
- Kegiatan/pekerjaan yang asetnya akan dimutasi adalah kegiatan yang tahun perolehannya lebih dari 5 tahun dan saat ini pejabat yang mengelola kegiatan pada saat itu sebagian besar sudah purna tugas.
- Terjadi perubahan/penggabungan Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2017 yang menyebabkan beberapa berkas kegiatan tidak dapat ditemukan karena perpindahan kantor dan ruangan.
- Pejabat penerima hibah (Kepala Desa/Kelurahan) sudah banyak yang purna/tidak menjabat sehingga kesulitan dalam melengkapi kelengkapan berkas hibah.

Adapun belum adanya perubahan atau mutasi aset lain lain berupa instalasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dikarenakan beberapa sebab berikut:

- a. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil sebanyak 54 unit senilai Rp19.191.523.270,00 merupakan aset yang berasal dari belanja modal (pengadaan tahun 2007, 2008 dan 2012) dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015). Aset yang berasal dari belanja modal tahun 2007, 2008 dan 2012 belum dihapus karena bentuk serah terima kepada PT. PLN (Persero) berupa Serah Terima Operasi (STO) sehingga aset masih menjadi milik Pemkab. Sedangkan pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015 awalnya masuk ke persediaan tetapi kemudian direklas (masuk aset lainnya) karena bentuk penyerahan berupa Serah Terima Operasi (STO).
- b. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo untuk penyerahan aset dan perubahan Berita Acara Serah Terima yang awalnya Serah Terima Operasi (STO) menjadi Serah Terima Jaringan (STJ). Upaya lainnya, telah dilakukan konsultasi dengan KPP Pratama Situbondo dalam rangka pengenaan pajak hibah akibat serah terima aset. Namun demikian, dari upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut hingga sekarang masih belum menemui titik temu sehingga akan direncanakan untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak PT. PLN (Persero).

	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)</b>
<b>5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>3.029.721.102,00</b>	<b>3.733.197.350,08</b>

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.029.721.102,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5-373 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

No	Jenis Aset Lain-Lain	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.394.602.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.557.000,00</b>	<b>2.361.045.832,00</b>
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00
	Alat Angkutan	1.171.229.882,00	0,00	0,00	1.171.229.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	120.140.450,00	0,00	18.877.000,00	101.263.450,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	18.580.000,00	0,00	14.680.000,00	3.900.000,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.338.594.518,08</b>	<b>0,00</b>	<b>669.919.248,08</b>	<b>668.675.270,00</b>
	Jalan dan Jembatan	809.185.822,40	0,00	493.004.866,40	316.180.956,00
	Bangunan Air (Irigasi)	529.408.695,68	0,00	176.914.381,68	352.494.314,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.733.197.350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>703.476.248,08</b>	<b>3.029.721.102,00</b>

		<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>16.367.551.186,24</b>	<b>8.506.829.474,91</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

		<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>16.367.551.186,24</b>	<b>8.506.829.474,91</b>

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-374 Rincian Utang Jangka Pendek**

No	Jenis	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	201.404.165,00	1.979.456.447,54	2.097.958.602,54	82.902.010,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	739.493.629,92	1.354.882.625,06	688.513.817,42	1.405.862.437,56
3	Utang Beban	4.683.650.361,73	91.141.212.241,53	84.806.300.952,70	11.018.561.650,56
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.882.281.318,26	22.977.578.492,00	21.999.634.722,14	3.860.225.088,12
	<b>Jumlah</b>	<b>8.506.829.474,91</b>	<b>117.453.129.806,13</b>	<b>109.592.408.094,80</b>	<b>16.367.551.186,24</b>

		<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.1</b>	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>82.902.010,00</b>	<b>201.404.165,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah pajak atau uang yang dipungut tetapi belum disetor ke pihak ketiga atau ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2022. Utang PFK sebesar Rp82.902.010,00 terdiri dari :

**Tabel 5-375 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

No	Jenis	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Pajak BOS	201.404.165,00	1.979.456.447,54	2.097.958.602,54	82.902.010,00
2	Utang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>201.404.165,00</b>	<b>1.979.456.447,54</b>	<b>2.097.958.602,54</b>	<b>82.902.010,00</b>

Utang Pajak BOS tahun 2022 sebesar Rp82.902.010,00. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Dana BOS yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Negara.

		<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Saldo</b> <b>Per 31 Des 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.2</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>1.405.862.437,56</b>	<b>739.493.629,92</b>

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengakui sebagai pendapatan. Pendapatan Diterima di muka merupakan perbedaan pengakuan pendapatan LRA dengan pendapatan LO selain terjadinya piutang.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 untuk masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp1.405.862.437,56 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-376 Rincian Pendapatan Diterima di Muka (OPD)**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pendapatan Sewa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso	300.000.000,00	793.511.666,67	300.000.000,00	793.511.666,67
2	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD	19.333.333,33	0,00	8.000.000,00	11.333.333,33
4	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Kesehatan	19.333.333,33	0,00	8.000.000,00	11.333.333,33

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
5	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.333.333,33	0,00	8.000.000,00	11.333.333,33
6	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Sekretariat Daerah	24.166.666,67	0,00	10.000.000,00	14.166.666,67
7	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H.Koesnadi	7.500.000,00	191.530.000,00	26.653.000,00	172.377.000,00
8	Pendapatan Sewa ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi	10.850.000,00	0,00	6.200.000,00	4.650.000,00
9	Pendapatan Sewa ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi	18.112.500,00	0,00	10.350.000,00	7.762.500,00
10	Pendapatan Pajak Reklame	304.864.463,26	369.840.958,39	303.310.817,42	371.394.604,23
	<b>Jumlah</b>	<b>739.493.629,92</b>	<b>1.354.882.625,06</b>	<b>688.513.817,42</b>	<b>1.405.862.437,56</b>

1. Pendapatan Sewa dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso sebesar Rp793.511.666,67.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Kantor Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 2 tahun dimulai pada tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-377 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	24	4	20
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	952.214.000,00	158.702.333,33	793.511.666,67

2. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan sebesar Rp8.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-378 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	48	12
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00

3. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD sebesar Rp11.333.333,33. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-379 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	43	17
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	28.666.666,67	11.333.333,33

4. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Kesehatan sebesar Rp11.333.333,33. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-380 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Kesehatan**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	43	17
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	28.666.666,67	11.333.333,33

5. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.333.333,33. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-381 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	43	17
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	28.666.666,67	11.333.333,33

6. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Sekretariat Daerah sebesar Rp14.166.666,67.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-382 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank Jatim di Sekretariat Daerah**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	43	17
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	50.000.000,00	35.833.333,33	14.166.666,67

7. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp172.377.000,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2022 dan akan berakhir pada tahun 2027. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-383 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Gedung Kantor Kas Bank Jatim di BLUD dr. H. Koesnadi**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	6	54
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	191.530.000,00	19.153.000,00	172.377.000,00

8. Pendapatan Sewa ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi sebesar Rp4.650.000,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-384 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka ATM BRI di BLUD dr. H.Koesnadi**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	51	9
2	Masa Sewa Gedung (Rupiah)	31.000.000,00	26.350.000,00	4.650.000,00

9. Pendapatan Sewa ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi sebesar Rp7.762.500,00.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 3 tahun dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-385 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka ATM BNI di BLUD dr. H.Koesnadi**

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	36	27	9
2	Masa Sewa Gedung (Rp)	31.050.000,00	23.287.500,00	7.762.500,00

10. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp371.394.604,23.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan Pajak Reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan.

**Tabel 5-386 Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Reklame**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Reklame	304.864.463,26	369.840.958,39	303.310.817,42	371.394.604,23
	<b>Jumlah</b>	<b>304.864.463,26</b>	<b>369.840.958,39</b>	<b>303.310.817,42</b>	<b>371.394.604,23</b>

<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>11.018.561.650,56</b>	<b>4.683.650.361,73</b>

### 5.3.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah Rp11.018.561.650,56, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-387 Rincian Utang Belanja**

No	Jenis Utang Beban	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Bagi Hasil atas Retribusi Parkir Berlangganan	93.318.500,00	655.263.000,00	720.573.500,00	28.008.000,00
2	Utang Klaim Non Maskin	35.643.038,00	0,00	35.643.038,00	0,00
3	Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya	616.015.092,73	25.727.526.377,53	25.642.410.195,70	701.131.274,56
4	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS	1.419.275.849,00	47.419.933.868,00	42.433.131.590,00	6.406.078.127,00
5	Utang Jasa Pelayanan Non Maskin	0,00	517.455.900,00	0,00	517.455.900,00
6	Utang jasa pelayanan Covid-19	2.208.400,00	16.238.000,00	2.208.400,00	16.238.000,00
7	Utang Jasa Pelayanan Umum	362.769.662,00	5.177.140.268,00	5.129.720.229,00	410.189.701,00
8	Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis	91.030.500,00	1.353.645,00	91.030.500,00	1.353.645,00
9	Utang Jasa Pelayanan Jampersal	9.291.200,00	6.884.800,00	9.291.200,00	6.884.800,00
10	Utang Belanja Pegawai	0,00	1.643.350.000,00	1.607.800.000,00	35.550.000,00
11	Utang Belanja Barang	16.392.900,00	951.255.900,00	485.054.300,00	482.594.500,00
12	Utang Belanja Jasa	2.009.557.220,00	7.658.076.553,00	7.254.556.070,00	2.413.077.703,00
13	Utang Belanja Pemeliharaan	28.148.000,00	1.366.733.930,00	1.394.881.930,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.683.650.361,73</b>	<b>91.141.212.241,53</b>	<b>84.806.300.952,70</b>	<b>11.018.561.650,56</b>

1. Utang Bagi Hasil Atas Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp20.228.000,00.

Jumlah tersebut merupakan utang bagi hasil atas pendapatan retribusi parkir berlangganan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bondowoso berdasarkan perjanjian kerja sama pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Bondowoso Nomor:188.45/10.15/430.6.2/2014, Nomor:974/547/120.12/2014 dan Nomor: 1057/VI/2014/Polres tanggal 5 Juni 2014 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

**Tabel 5-388 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Dispenda Prov Jatim**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	52.692.250,00	0,00	52.692.250,00	0,00
2	2022	0,00	473.245.500,00	453.017.500,00	20.228.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.692.250,00</b>	<b>473.245.500,00</b>	<b>505.709.750,00</b>	<b>20.228.000,00</b>

- Polres Bondowoso

**Tabel 5-389 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Polres Bondowoso**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	40.626.250,00	0,00	40.626.250,00	0,00
2	2022	0,00	182.017.500,00	174.237.500,00	7.780.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.626.250,00</b>	<b>182.017.500,00</b>	<b>214.863.750,00</b>	<b>7.780.000,00</b>

2. Utang klaim Non Maskin sebesar nihil.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas tagihan/klaim Non Maskin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

- a. RSUD dr. H. Soebandi Jember.

**Tabel 5-390 Rincian Utang Klaim Non Maskin RSUD dr. H. Soebandi Jember**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2019	26.990.523,00	0,00	26.990.523,00	0,00
2	2020	2.204.688,00	0,00	2.204.688,00	0,00
3	2021	1.206.591,00	0,00	1.206.591,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.401.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.401.802,00</b>	<b>0,00</b>

- b. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

**Tabel 5-391 Rincian Utang Klaim Non Maskin RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2019	2.240.700,00	0,00	2.240.700,00	0,00
2	2020	3.000.536,00	0,00	3.000.536,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.241.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.236,00</b>	<b>0,00</b>

3. Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya sebesar Rp701.131.274,56. Jumlah tersebut merupakan utang atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh pihak ketiga kepada RSUD dr H. Koesnadi Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5-392 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya**

No	Jenis Utang Beban	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
a	UTD PMI Bondowoso	145.080.000,00	1.762.200.000,00	1.738.800.000,00	168.480.000,00
b	Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)	5.085.130,00	3.622.144.607,81	3.580.663.144,35	46.566.593,46
c	Penyedia Bahan Habis Pakai Laborat (Bahan Kimia)	192.057.184,80	3.068.697.321,33	3.191.722.500,89	69.032.005,24
d	Penyedia Obat	78.318.350,49	11.332.426.265,73	11.276.016.294,82	134.728.321,40
e	Penyedia Oksigen	146.716.350,00	2.193.320.140,00	2.222.763.769,00	117.272.721,00
f	Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi	0,00	49.068.424,00	42.248.675,00	6.819.749,00
g	Penyedia Bahan Habis Pakai IBS	677.692,00	2.450.342.593,33	2.388.038.980,15	62.981.305,18
h	Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi	9.570.000,00	466.048.437,00	429.462.417,00	46.156.020,00
i	Bahan Habis Pakai Orthopedi	34.151.385,44	722.304.500,33	711.997.326,49	44.458.559,28
j	Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik	4.359.000,00	60.974.088,00	60.697.088,00	4.636.000,00
<b>Total</b>		<b>616.015.092,73</b>	<b>25.727.526.377,53</b>	<b>25.642.410.195,70</b>	<b>701.131.274,56</b>

- a. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Bondowoso.

**Tabel 5-393 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya**

**UTD PMI Bondowoso**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	145.080.000,00	0,00	145.080.000,00	0,00
2	2022	0,00	1.762.200.000,00	1.593.720.000,00	168.480.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>145.080.000,00</b>	<b>1.762.200.000,00</b>	<b>1.738.800.000,00</b>	<b>168.480.000,00</b>

- b. Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan).

**Tabel 5-394 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	5.085.130,00	0,00	5.085.130,00	0,00
2	2022	0,00	3.622.144.607,81	3.575.578.014,35	46.566.593,46
<b>Jumlah</b>		<b>5.085.130,00</b>	<b>3.622.144.607,81</b>	<b>3.580.663.144,35</b>	<b>46.566.593,46</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.566.593,46 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai umum (alat kesehatan) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-395 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Umum (Alkes)**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. MILITRUST	9.835.907,00
2	PT. AAM	12.864.000,00
3	PT. MMA	3.621.241,40
4	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA G	407.110,00
5	PT. MEDMAX G.I	5.045.619,88
6	PT. ENSEVAL	2.606.200,00
7	PT. MPI	1.488.232,00
8	PT. SAG	499.500,00
9	PT. ENDO INDONESIA	1.429.999,68
10	PT. MBS	3.218.783,50
11	PT. NEURO MEDIKA S	5.550.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.566.593,46</b>

- c. Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia).

**Tabel 5-396 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	192.057.184,80	0,00	192.057.184,80	0,00
2	2022	0,00	3.068.697.321,33	2.999.665.316,09	69.032.005,24
<b>Jumlah</b>		<b>192.057.184,80</b>	<b>3.068.697.321,33</b>	<b>3.191.722.500,89</b>	<b>69.032.005,24</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.032.005,24 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai laboratorium (bahan kimia) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-397 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Laboratorium  
(Bahan Kimia)**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA	5.494.500,00
2	PT. DEXA ARFINDO P	13.722.845,24
3	PT. MEDIAN UNITAMA	2.886.000,00
4	PT. SOLARINDO	5.600.000,00
5	PT. KPA	7.775.550,00
6	PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI	7.681.200,00
7	PT. KIMIA FARMA	18.900.000,00
8	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	6.971.910,00
<b>Jumlah</b>		<b>69.032.005,24</b>

d. Penyedia Obat.

**Tabel 5-398 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Obat**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	78.318.350,49	0,00	78.318.350,49	0,00
2	2022	0,00	11.332.426.265,73	11.197.697.944,33	134.728.321,40
<b>Jumlah</b>		<b>78.318.350,49</b>	<b>11.332.426.265,73</b>	<b>11.276.016.294,82</b>	<b>134.728.321,40</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.728.321,40 tersebut merupakan utang kepada penyedia obat dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-399 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Obat**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. AAM	36.086.558,50
2	PT. MPI	10.788.090,00
3	PT. SAPTA SARI TAMA	2.913.750,00
4	PT. APL	8.343.414,00
5	PT. IGM	10.500.000,00
6	PT. AMS	1.992.990,00
7	PT. PARIT PADANG	33.716.250,00
8	PT. MBS	582.750,00
9	PT. MERAPI	13.750.963,00
10	PT. PENTA VALENT	1.136.352,00
11	PT. KF	12.227.704,50
12	PT. DMA	1.165.500,00
13	PT. ENSEVAL	1.523.999,40
<b>Jumlah</b>		<b>134.728.321,40</b>

e. Penyedia Oksigen.

**Tabel 5-400 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Oksigen**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	146.716.350,00	0,00	146.716.350,00	0,00
2	2022	0,00	2.193.320.140,00	2.076.047.419,00	117.272.721,00
<b>Jumlah</b>		<b>146.716.350,00</b>	<b>2.193.320.140,00</b>	<b>2.222.763.769,00</b>	<b>117.272.721,00</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.716.350,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia oksigen dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-401 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Oksigen**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. SAMATOR GAS I	117.272.721,00
<b>Jumlah</b>		<b>117.272.721,00</b>

f. Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi.

**Tabel 5-402 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	49.068.424,00	42.248.675,00	6.819.749,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>49.068.424,00</b>	<b>42.248.675,00</b>	<b>6.819.749,00</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.819.749,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia oksigen dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-403 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA	1.572.000,00
2	PT. ARDIA PERDANA I	2.060.999,00
3	PT. COBRA DENTAL	3.186.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.819.749,00</b>

g. Penyedia Bahan Habis Pakai Instalasi Bedah Sentral (IBS).

**Tabel 5-404 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Bahan Habis Pakai (IBS)**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	677.692,00	0,00	677.692,00	0,00
2	2022	0,00	2.450.342.593,33	2.387.361.288,15	62.981.305,18
<b>Jumlah</b>		<b>677.692,00</b>	<b>2.450.342.593,33</b>	<b>2.388.038.980,15</b>	<b>62.981.305,18</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.981.305,18 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai (IBS) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-405 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai (IBS)**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT. APL	10.319.987,52
2	APT. SAFARI	122.000,00
3	PT. PRIMA ALKESINDO N	2.750.400,00
4	PT. CITRA DIAN P	10.429.452,96
5	PT. IDSMED	1.924.999,70
6	PT. ENSEVAL	4.306.800,00
7	PT. DIRGANTARA	6.987.750,00
8	PT. PMM	1.080.000,00
9	PT. ADHI JAYA K.S	25.059.915,00
<b>Jumlah</b>		<b>62.981.305,18</b>

h. Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi.

**Tabel 5-406 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	0,00
2	2022	0,00	466.048.437,00	419.892.417,00	46.156.020,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.570.000,00</b>	<b>466.048.437,00</b>	<b>429.462.417,00</b>	<b>46.156.020,00</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.156.020,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai radiologi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-407 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. SURYA MED SUKSES	46.156.020,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.156.020,00</b>

i. Orthopedi.

**Tabel 5-408 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya  
Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	34.151.385,44	0,00	34.151.385,44	0,00

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
2	2022	0,00	722.304.500,33	677.845.941,05	44.458.559,28
<b>Jumlah</b>		<b>34.151.385,44</b>	<b>722.304.500,33</b>	<b>711.997.326,49</b>	<b>44.458.559,28</b>

Rincian saldo utang per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.458.559,28 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai orthopedi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-409 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi**

No	Nama Penyedia	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	PT. FITRAH EKAMULIA	5.178.761,00
2	PT. PARIT PADANG	11.242.791,00
3	PT. ORTO TIMUR	23.763.990,00
4	PT. KAI	4.273.017,28
<b>Jumlah</b>		<b>44.458.559,28</b>

j. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik.

**Tabel 5-410 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	4.359.000,00	0,00	2.859.000,00	1.500.000,00
2	2022	0,00	60.974.088,00	57.838.088,00	3.136.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>60.974.088,00</b>	<b>60.697.088,00</b>	<b>4.636.000,00</b>

4. Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS sebesar Rp6.406.078.127,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien non rawat jalan BPJS sebesar persentase tertentu dari besarnya klaim BPJS yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan

**Tabel 5-411 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	163.444.000,00	0,00	163.444.000,00	0,00
2	2022	0,00	122.386.000,00	0,00	122.386.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>163.444.000,00</b>	<b>122.386.000,00</b>	<b>163.444.000,00</b>	<b>122.386.000,00</b>

b. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi.

**Tabel 5-412 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	1.255.831.849,00	0,00	1.255.831.849,00	0,00
2	2022	0,00	47.297.547.868,00	41.013.855.741,00	6.283.692.127,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.255.831.849,00</b>	<b>47.297.547.868,00</b>	<b>42.269.687.590,00</b>	<b>6.283.692.127,00</b>

5. Jasa Pelayanan Non Maskin sebesar Rp517.455.900,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan terhadap pasien non maskin dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-413 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Maskin**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	517.455.900,00	0,00	517.455.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>517.455.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.455.900,00</b>

6. Utang Jasa Pelayanan Covid-19 sebesar Rp16.238.000,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-414 Rincian Utang Jasa Pelayanan Kapitasi BPJS**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	2.208.400,00	0,00	2.208.400,00	0,00
2	2022	0,00	16.238.000,00	0,00	16.238.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.208.400,00</b>	<b>16.238.000,00</b>	<b>2.208.400,00</b>	<b>16.238.000,00</b>

7. Utang Jasa Pelayanan Umum sebesar Rp410.189.701,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

a. Jasa Pelayanan Umum – Dinkes.

**Tabel 5-415 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – Dinkes**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	157.896.080,00	0,00	157.896.080,00	0,00
2	2022	0,00	125.401.640,00	0,00	125.401.640,00
	<b>Jumlah</b>	<b>157.896.080,00</b>	<b>125.401.640,00</b>	<b>157.896.080,00</b>	<b>125.401.640,00</b>

b. Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi.

**Tabel 5-416 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	204.873.582,00	0,00	204.873.582,00	0,00
2	2022	0,00	5.051.738.628,00	4.766.950.567,00	284.788.061,00
	<b>Jumlah</b>	<b>204.873.582,00</b>	<b>5.051.738.628,00</b>	<b>4.971.824.149,00</b>	<b>284.788.061,00</b>

8. Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis sebesar Rp1.353.645,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas jasa pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah hasil buangan dari suatu aktivitas medis pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-417 Rincian Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis  
PT. Putra Restu Ibu Abadi – Mojokerto**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	91.030.500,00	0,00	91.030.500,00	0,00
2	2022	0,00	1.353.645,00	0,00	1.353.645,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.030.500,00</b>	<b>1.353.645,00</b>	<b>91.030.500,00</b>	<b>1.353.645,00</b>

9. Utang Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp6.884.800,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien Jampersal dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-418 Rincian Utang Jasa Pelayanan Jampersal**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	9.291.200,00	0,00	9.291.200,00	0,00
2	2022	0,00	6.884.800,00	0,00	6.884.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.291.200,00</b>	<b>6.884.800,00</b>	<b>9.291.200,00</b>	<b>6.884.800,00</b>

10. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp35.550.000,00.

Jumlah tersebut merupakan utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan iuran jaminan kesehatan PNS pada RSUD dr. H. Koesnadi serta insentif BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-419 Rincian Utang Belanja Pegawai**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2022	0,00	1.643.350.000,00	1.607.800.000,00	35.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.350.000,00</b>	<b>1.607.800.000,00</b>	<b>35.550.000,00</b>

11. Utang Belanja Barang sebesar Rp482.594.500,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada penyedia barang atas barang berupa persediaan yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-420 Rincian Utang Belanja Barang**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	16.392.900,00	0,00	16.392.900,00	0,00
2	2022	0,00	951.255.900,00	468.661.400,00	482.594.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.392.900,00</b>	<b>951.255.900,00</b>	<b>485.054.300,00</b>	<b>482.594.500,00</b>

12. Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.413.077.703,00.

Jumlah tersebut merupakan utang belanja jasa listrik, air, telepon, internet, dan langganan media cetak yang sampai akhir tahun 2022 belum terbayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-421 Rincian Utang Belanja Jasa

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2020	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
2	2021	2.008.986.220,00	0,00	2.008.986.220,00	0,00
3	2022	0,00	7.658.076.553,00	5.245.369.850,00	2.412.706.703,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.009.357.220,00</b>	<b>7.658.076.553,00</b>	<b>7.254.356.070,00</b>	<b>2.413.077.703,00</b>

## 13. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar nihil.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas pemeliharaan peralatan dan mesin/alat kedokteran pada RSUD dr. H. Koesnadi yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-422 Rincian Utang Belanja Pemeliharaan

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00	0,00
2	2022	0,00	1.366.733.930,00	1.366.733.930,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>28.148.000,00</b>	<b>1.366.733.930,00</b>	<b>1.394.881.930,00</b>	<b>0,00</b>

Utang belanja belum termasuk utang klaim Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso kepada BLUD RSUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp504.442.472,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Rp	34.150.000,00
- Klaim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Rp	0,00
- Klaim Penjamin	Rp	470.272.472,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>504.422.472,00</b>

## 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3.860.225.088,12</b>	<b>2.882.281.318,26</b>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebesar Rp3.860.225.088,12 pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp2.882.281.318,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-423 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Jenis Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
2	Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik	645,12	0,00	0,00	645,12
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	2.175.428.746,00	2.120.855.492,00	1.012.204.566,00	3.284.079.672,00
4	Utang Bantuan Keuangan Provinsi	580.939.927,14	20.856.723.000,00	20.987.430.156,14	450.232.771,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.882.281.318,26</b>	<b>22.977.578.492,00</b>	<b>21.999.634.722,14</b>	<b>3.860.225.088,12</b>

## 1. Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres sebesar Rp125.912.000,00.

Jumlah tersebut merupakan hasil penerimaan kembali atas pengkuliran dana bantuan sapi Banpres/hibah dari Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Petani Peternak yang belum digulirkan kembali dan dana tersebut masih ada di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-424 Rincian Utang Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2003	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.912.000,00</b>

## 2. Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebesar Rp645,12.

Jumlah tersebut merupakan utang beban berupa saldo Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik pada tahun 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-425 Rincian Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	P K B	64,13	0,00	0,00	64,13
2	P. GOLKAR	51,78	0,00	0,00	51,78
3	P P P	30,53	0,00	0,00	30,53
4	P D I P	34,44	0,00	0,00	34,44
5	P. DEMOKRAT	99,43	0,00	0,00	99,43

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
6	P K S	59,95	0,00	0,00	59,95
7	P K P B	23,95	0,00	0,00	23,95
8	P. HANURA	71,81	0,00	0,00	71,81
9	P P R N	62,69	0,00	0,00	62,69
10	P A N	29,04	0,00	0,00	29,04
11	P. BARNAS	40,86	0,00	0,00	40,86
12	P K N U	76,51	0,00	0,00	76,51
<b>Jumlah</b>		<b>645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,12</b>

3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp3.284.079.672,00.

Jumlah tersebut merupakan utang utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada pihak ketiga dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-426 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	s.d 2020	2.175.428.746,00	0,00	1.012.204.566,00	1.163.224.180,00
2	2021	0,00	2.120.855.492,00	0,00	2.120.855.492,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.175.428.746,00</b>	<b>2.120.855.492,00</b>	<b>1.012.204.566,00</b>	<b>3.284.079.672,00</b>

Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp2.120.855.492,00 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

Pengurangan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp1.012.204.566,00 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/KM.7/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/KM.7/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada Tahun 2022.

4. Utang Bantuan Keuangan Provinsi Rp450.232.771,00.

Jumlah tersebut merupakan bantuan keuangan yang tidak terealisasi dan sampai dengan akhir tahun 2022 belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5-427 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi**

No	Tahun	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2021	580.939.927,14	0,00	580.939.927,14	0,00
2	2022	0,00	20.856.723.000,00	20.406.490.229,00	450.232.771,00
<b>Jumlah</b>		<b>580.939.927,14</b>	<b>20.856.723.000,00</b>	<b>20.987.430.156,14</b>	<b>450.232.771,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.

<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2.830.841.722.238,64</b>	<b>2.882.121.144.320,72</b>

**5.3.3 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.830.841.722.238,64 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.882.121.144.320,72. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Laporan Perubahan Ekuitas.

**5.4 Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Pendapatan-LO</b>	<b>1.728.571.124.896,29</b>	<b>1.842.379.337.995,53</b>

Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual dimana pengakuan Pendapatan-LO terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan tahun 2022, sehingga nilai pendapatan-LO adalah sebesar Surat Ketetapan Pendapatan yang telah diterbitkan. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.728.571.124.896,29. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.842.379.337.995,53 mengalami penurunan sebesar Rp113.808.213.099,24 atau 6,18% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-428 Kelompok Pendapatan LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	194.782.467.348,86	219.238.663.990,30	(24.456.196.641,44)	(11,16)
2	Pendapatan Transfer	1.464.019.699.764,00	1.487.589.601.606,00	(23.569.901.842,00)	(1,58)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69.768.957.783,43	135.551.072.399,23	(65.782.114.615,80)	(48,53)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.728.571.124.896,29</b>	<b>1.842.379.337.995,53</b>	<b>(113.808.213.099,24)</b>	<b>(6,18)</b>

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>194.782.467.348,86</b>	<b>219.238.663.990,30</b>

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp194.782.467.348,86. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp219.238.663.990,30 mengalami penurunan sebesar Rp24.456.196.641,44 atau 11,16% dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-429 Jenis Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	45.647.481.807,03	41.423.011.100,16	4.224.470.706,87	10,20
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.973.593.571,24	15.657.753.497,28	2.315.840.073,96	14,79
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.242.668.473,27	4.742.549.726,45	1.500.118.746,82	31,63
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.918.723.497,32	157.415.349.666,41	(32.496.626.169,09)	(20,64)
	<b>Jumlah</b>	<b>194.782.467.348,86</b>	<b>219.238.663.990,30</b>	<b>(24.456.196.641,44)</b>	<b>(11,16)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>45.647.481.807,03</b>	<b>41.423.011.100,16</b>

Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp45.647.481.807,03. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp41.423.011.100,16 mengalami kenaikan sebesar Rp4.224.470.706,87 atau 10,20% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-430 Obyek Pendapatan Pajak Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	1.074.779.497,00	706.656.835,00	368.122.662,00	52,09
2	Pajak Restoran-LO	4.466.861.304,00	3.157.453.390,00	1.309.407.914,00	41,47
3	Pajak Hiburan-LO	78.929.700,00	25.177.900,00	53.751.800,00	213,49
4	Pajak Reklame-LO	1.337.851.111,03	1.209.506.388,16	128.344.722,87	10,61
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	15.205.135.033,00	11.655.097.193,00	3.550.037.840,00	30,46
6	Pajak Parkir-LO	133.130.330,00	75.027.250,00	58.103.080,00	77,44
7	Pajak Air Tanah-LO	226.445.801,00	191.308.135,00	35.137.666,00	18,37
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.193.500,00	1.080.000,00	1.113.500,00	103,10
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	17.323.367.268,00	17.113.617.216,00	209.750.052,00	1,23

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	5.798.788.263,00	7.288.086.793,00	(1.489.298.530,00)	(20,43)
<b>Jumlah</b>		<b>45.647.481.807,03</b>	<b>41.423.011.100,16</b>	<b>4.224.470.706,87</b>	<b>10,20</b>

Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp1.074.779.497,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp706.656.835,00 mengalami kenaikan sebesar Rp368.122.662,00 atau 52,09% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-431 Rincian Pajak Hotel-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	1.074.779.497,00	706.656.835,00	368.122.662,00	52,09
<b>Jumlah</b>		<b>1.074.779.497,00</b>	<b>706.656.835,00</b>	<b>368.122.662,00</b>	<b>52,09</b>

Pendapatan Pajak Hotel-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hotel Tahun 2022 sebanyak 230 SKP dengan pokok pajak senilai Rp 1.074.779.497,00.

Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.466.861.304,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.157.453.390,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.309.407.914,00 atau 41,47% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-432 Rincian Pajak Restoran-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	4.466.861.304,00	3.157.453.390,00	1.309.407.914,00	41,47
<b>Jumlah</b>		<b>4.466.861.304,00</b>	<b>3.157.453.390,00</b>	<b>1.309.407.914,00</b>	<b>29,69</b>

Pendapatan Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO Tahun 2022 sebanyak 9.335 SKP dengan pokok pajak senilai Rp4.466.861.304,00.

Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp78.929.700,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp25.177.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.751.800,00 atau 213,49% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-433 Rincian Pajak Hiburan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	10.883.000,00	0,00	10.883.000,00	0,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	68.046.700,00	25.177.900,00	42.868.800,00	170,26
<b>Jumlah</b>		<b>78.929.700,00</b>	<b>25.177.900,00</b>	<b>53.751.800,00</b>	<b>213,49</b>

Pendapatan Pajak Hiburan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hiburan-LO Tahun 2021 sebanyak 169 SKP dengan pokok pajak senilai Rp78.929.700,00.

Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp1.337.851.111,03. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.209.506.388,16 mengalami kenaikan sebesar Rp128.344.722,87 atau 10,61% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-434 Rincian Pajak Reklame-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.337.851.111,03	1.209.506.388,16	128.344.722,87	10,61
<b>Jumlah</b>		<b>1.337.851.111,03</b>	<b>1.209.506.388,16</b>	<b>128.344.722,87</b>	<b>10,61</b>

Pendapatan Pajak Reklame-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Reklame-LO Tahun 2022 sebanyak 3.113 SKP dengan pokok pajak senilai Rp 1.404.381.252,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.337.851.111,03 terdapat perbedaan sebesar Rp128.344.722,87 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Reklame-LO	1.337.851.111,03
SKP Pajak Reklame	1.404.381.252,00
Selisih	66.530.140,97
Penjelasan Selisih :	
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka awal tahun	304.864.463,26

- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka akhir tahun	371.394.604,23	
Selisih		66.530.140,97
Total Selisih		0,00

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp15.205.135.033,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp11.655.097.193,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.550.037.840,00 atau 30,46% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-435 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	15.205.135.033,00	11.655.097.193,00	3.550.037.840,00	30,46
	<b>Jumlah</b>	<b>15.205.135.033,00</b>	<b>11.655.097.193,00</b>	<b>3.550.037.840,00</b>	<b>30,46</b>

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2022 sebanyak 13 SKP dengan pokok pajak senilai Rp15.205.135.033,00.

Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp133.130.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp75.027.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.103.080,00 atau 77,44% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-436 Rincian Pajak Parkir-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Parkir-LO	133.130.330,00	75.027.250,00	58.103.080,00	77,44
	<b>Jumlah</b>	<b>133.130.330,00</b>	<b>75.027.250,00</b>	<b>58.103.080,00</b>	<b>77,44</b>

Pendapatan Pajak Parkir-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Parkir Tahun 2022 sebanyak 115 SKP dengan pokok pajak senilai Rp133.130.330,00.

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp226.445.801,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp191.308.135,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.137.666,00 atau 18,37% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-437 Rincian Pajak Air Tanah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Air Tanah-LO	226.445.801,00	191.308.135,00	35.137.666,00	18,37
	<b>Jumlah</b>	<b>226.445.801,00</b>	<b>191.308.135,00</b>	<b>35.137.666,00</b>	<b>18,37</b>

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebanyak 1.825 SKP dengan pokok pajak senilai Rp226.445.801,00.

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp2.193.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.080.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.113.500,00 atau 103,10% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-438 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	2.193.500,00	1.080.000,00	1.113.500,00	103,10
	<b>Jumlah</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.113.500,00</b>	<b>103,10</b>

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebanyak 2 SKP dengan pokok pajak senilai Rp2.193.500,00.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp17.323.367.268,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp17.113.617.216,00 mengalami kenaikan sebesar Rp209.750.052,00 atau 1,23% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-439 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	PBBP2-LO	17.323.367.268,00	17.113.617.216,00	209.750.052,00	1,23
	<b>Jumlah</b>	<b>17.323.367.268,00</b>	<b>17.113.617.216,00</b>	<b>209.750.052,00</b>	<b>1,23</b>

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 sebanyak 355.393 SKP dengan pokok dan bunga pajak senilai Rp17.323.367.268,00.

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp5.798.788.263,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.288.086.793,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.489.298.530,00 atau 20,43% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-440 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.798.788.263,00	7.288.086.793,00	(1.489.298.530,00)	(20,43)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.798.788.263,00</b>	<b>7.288.086.793,00</b>	<b>(1.489.298.530,00)</b>	<b>(20,43)</b>

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 sebanyak 1.020 SKP dengan pokok pajak senilai Rp5.798.788.263,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>17.973.593.571,24</b>	<b>15.657.753.497,28</b>

Pendapatan Retribusi-LO pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp17.973.593.571,24. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp15.657.753.497,28 mengalami kenaikan sebesar Rp2.315.840.073,96 atau 14,79% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-441 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	16.280.487.891,24	13.297.182.465,28	2.983.305.425,96	22,44
2	Retribusi Jasa Usaha	1.044.222.630,00	1.352.925.600,00	(308.702.970,00)	(22,82)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	648.883.050,00	1.007.645.432,00	(358.762.382,00)	(35,60)
	<b>Jumlah</b>	<b>17.973.593.571,24</b>	<b>15.657.753.497,28</b>	<b>2.315.840.073,96</b>	<b>14,79</b>

Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2022 adalah sebesar Rp16.280.487.891,24. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.297.182.465,28 mengalami penurunan sebesar Rp2.983.305.425,96 atau 22,44% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-442 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	10.488.711.337,00	7.614.605.700,00	2.874.105.637,00	37,74
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	152.546.000,00	123.295.000,00	29.251.000,00	23,72
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.770.358.000,00	3.719.919.000,00	50.439.000,00	1,36
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.394.904.662,00	1.366.505.285,00	28.399.377,00	2,08
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	223.730.600,00	242.668.000,00	(18.937.400,00)	(7,80)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(25,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang- LO	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LO	227.497.292,24	228.189.480,28	(692.188,04)	(0,30)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.280.487.891,24</b>	<b>13.297.182.465,28</b>	<b>2.983.305.425,96</b>	<b>22,44</b>

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 adalah sebesar Rp1.044.222.630,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.352.925.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp308.702.970,00 atau 22,82% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-443 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	221.963.050,00	633.785.350,00	(411.822.300,00)	(64,98)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	410.283.000,00	406.612.500,00	3.670.500,00	0,90
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	129.715.000,00	168.580.000,00	(38.865.000,00)	(23,05)
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	282.261.580,00	143.947.750,00	138.313.830,00	96,09
	<b>Jumlah</b>	<b>1.044.222.630,00</b>	<b>1.352.925.600,00</b>	<b>(308.702.970,00)</b>	<b>(22,82)</b>

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 adalah sebesar Rp648.883.050,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.007.645.432,00 mengalami penurunan sebesar Rp358.762.382,00 atau 35,60% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-444 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	648.883.050,00	1.007.645.432,00	(358.762.382,00)	(35,60)
	<b>Jumlah</b>	<b>648.883.050,00</b>	<b>1.007.645.432,00</b>	<b>(358.762.382,00)</b>	<b>(35,60)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>6.242.668.473,27</b>	<b>4.742.549.726,45</b>

Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp6.242.668.473,27. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.742.549.726,45 mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.118.746,82 atau 31,63% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-445 Obyek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	6.242.668.473,27	4.742.549.726,45	1.500.118.746,82	31,63
	<b>Jumlah</b>	<b>6.242.668.473,27</b>	<b>4.742.549.726,45</b>	<b>1.500.118.746,82</b>	<b>31,63</b>

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp6.242.668.473,27. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.742.549.726,45 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.118.746,82 atau 31,63% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-446 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.544.375.373,27	4.260.079.389,45	284.295.983,82	6,67
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	1.698.293.100,00	482.470.337,00	1.215.822.763,00	252,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.242.668.473,27</b>	<b>4.742.549.726,45</b>	<b>1.500.118.746,82</b>	<b>31,63</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>124.918.723.497,32</b>	<b>157.415.349.666,41</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp124.918.723.497,32. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp157.415.349.666,41 mengalami penurunan sebesar Rp32.496.626.169,09 atau 20,64% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-447 Obyek Lain-Lain PAD Yang Sah-LO**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	260.757.915,00	242.706.367,00	18.051.548,00	7,44
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	970.838.333,33	470.147.000,00	500.691.333,33	106,50
3	Jasa Giro-LO	1.388.173.346,13	1.401.893.224,19	(13.719.878,06)	(0,98)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Bunga-LO	5.485.568.646,37	2.923.116.438,15	2.562.452.208,22	87,66
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	56.184.972,00	4.271.280.774,37	(4.215.095.802,37)	(98,68)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	362.808.446,49	168.330.468,54	194.477.977,95	115,53
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	12.878.434,00	12.475.242,00	403.192,00	3,23

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
9	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	84.165.500,00	0,00	84.165.500,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.032.217.466,81	124.844.878,00	907.372.588,81	726,80
11	Pendapatan dari BLUD-LO	115.249.283.901,19	147.759.879.944,16	(32.510.596.042,97)	(22,00)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	15.846.536,00	40.675.330,00	(24.828.794,00)	(61,04)
<b>Jumlah</b>		<b>124.918.723.497,32</b>	<b>157.415.349.666,41</b>	<b>(32.496.626.169,09)</b>	<b>(20,64)</b>

Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO tahun 2022 adalah sebesar Rp260.757.915,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp242.706.367,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 18.051.548,00 atau 7,44% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-448 Rincian Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan- LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	260.757.915,00	242.706.367,00	18.051.548,00	7,44
<b>Jumlah</b>		<b>260.757.915,00</b>	<b>242.706.367,00</b>	<b>18.051.548,00</b>	<b>7,44</b>

Pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp970.838.333,33. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp470.147.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp500.691.333,33 atau 106,50 % dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-449 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Sewa BMD-LO	970.838.333,33	470.147.000,00	500.691.333,33	106,50
<b>Jumlah</b>		<b>970.838.333,33</b>	<b>470.147.000,00</b>	<b>500.691.333,33</b>	<b>106,50</b>

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp1.388.173.346,13. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.401.893.224,19 mengalami penurunan sebesar 13.719.878,06 atau 0,98% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-450 Rincian Jasa Giro-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.388.173.346,13	1.401.893.224,19	(13.719.878,06)	(0,98)
<b>Jumlah</b>		<b>1.388.173.346,13</b>	<b>1.401.893.224,19</b>	<b>(13.719.878,06)</b>	<b>(0,98)</b>

Pendapatan Pendapatan Bunga-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp5.485.568.646,37. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.923.116.438,15 mengalami kenaikan sebesar Rp2.562.452.208,22 atau 87,66% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-451 Rincian Pendapatan Bunga-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.485.568.646,37	2.923.116.438,15	2.562.452.208,22	87,66
<b>Jumlah</b>		<b>5.485.568.646,37</b>	<b>2.923.116.438,15</b>	<b>2.562.452.208,22</b>	<b>87,66</b>

Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp56.184.972,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.271.280.774,37 mengalami penurunan sebesar Rp4.215.095.802,37 atau 98,68% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-452 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	56.184.972,00	4.271.280.774,37	(4.215.095.802,37)	(98,68)
<b>Jumlah</b>		<b>56.184.972,00</b>	<b>4.271.280.774,37</b>	<b>(4.215.095.802,37)</b>	<b>(98,68)</b>

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp362.808.446,49. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp168.330.468,54 mengalami

kenaikan sebesar Rp194.477.977,95 atau 115,53% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-453 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	362.808.446,49	168.330.468,54	194.477.977,95	115,53
<b>Jumlah</b>		<b>362.808.446,49</b>	<b>168.330.468,54</b>	<b>194.477.977,95</b>	<b>115,53</b>

Pendapatan denda pajak daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp12.878.434,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.475.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp403.192,00 atau 3,23% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-454 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.878.434,00	12.475.242,00	403.192,00	3,23
<b>Jumlah</b>		<b>12.878.434,00</b>	<b>12.475.242,00</b>	<b>403.192,00</b>	<b>3,23</b>

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp84.165.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.165.500,00 atau 0% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-455 Rincian Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	84.165.500,00	0,00	84.165.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>84.165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165.500,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan dari pengembalian-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp1.032.217.466,81. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp124.844.878,00 mengalami kenaikan sebesar Rp907.372.588,81 atau 726,80% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-456 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	39.471.562,00	113.183.878,00	(73.712.316,00)	(65,13)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	820.000,00	1.370.000,00	(550.000,00)	(65,13)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	22.834,00	0,00	22.834,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	454.410.475,00	0,00	454.410.475,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	2.469.988,00	10.291.000,00	(7.821.012,00)	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	14.134.764,00	0,00	14.134.764,00	(76,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	381.600.000,00	0,00	381.600.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	13.640.593,00	0,00	13.640.593,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	51.900.320,66	0,00	51.900.320,66	0,00

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	9.653.500,00	0,00	9.653.500,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO	18.160.000,00	0,00	18.160.000,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	3.308.182,00	0,00	3.308.182,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-LO	1.997.647,00	0,00	1.997.647,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	34.799.990,15	0,00	34.799.990,15	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.032.217.466,81</b>	<b>124.844.878,00</b>	<b>907.372.588,81</b>	<b>726,80</b>

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp115.249.283.901,19. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp147.759.879.944,16 mengalami Penurunan sebesar Rp32.510.596.042,97 atau 22,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-457 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari BLUD-LO	115.249.283.901,19	147.759.879.944,16	(32.510.596.042,97)	(22,00)
<b>Jumlah</b>		<b>115.249.283.901,19</b>	<b>147.759.879.944,16</b>	<b>(32.510.596.042,97)</b>	<b>(22,00)</b>

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp15.846.536,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.675.330,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.828.794,00 atau 61,04% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-458 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	15.846.536,00	40.675.330,00	(24.828.794,00)	(61,04)
<b>Jumlah</b>		<b>15.846.536,00</b>	<b>40.675.330,00</b>	<b>(24.828.794,00)</b>	<b>(61,04)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>1.464.019.699.764,00</b>	<b>1.487.589.601.606,00</b>

Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.464.019.699.764,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.487.589.601.606,00 mengalami penurunan sebesar Rp 23.569.901.842,00 atau 1,58% dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-459 Rincian Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.313.510.037.671,00	1.318.841.312.444,00	(5.331.274.773,00)	(0,40)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.725.363.000,00	37.542.241.000,00	(29.816.878.000,00)	(79,42)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	142.784.299.093,00	131.206.048.162,00	11.578.250.931,00	8,82
<b>Jumlah</b>		<b>1.464.019.699.764,00</b>	<b>1.487.589.601.606,00</b>	<b>(23.569.901.842,00)</b>	<b>(1,58)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.313.510.037.671,00</b>	<b>1.318.841.312.444,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.313.510.037.671,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.318.841.312.444,00 mengalami penurunan sebesar Rp 5.331.274.773,00 atau 0,40% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-460 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Bagi Hasil	178.650.834.228,00	137.850.455.347,00	40.800.378.881,00	29,60
2	Dana Alokasi Umum	829.591.176.619,00	843.159.769.000,00	(13.568.592.381,00)	(1,61)
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	95.866.127.142,00	136.481.721.719,00	(40.615.594.577,00)	(29,76)
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	209.401.899.682,00	201.349.366.378,00	8.052.533.304,00	4,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.313.510.037.671,00</b>	<b>1.318.841.312.444,00</b>	<b>(5.331.274.773,00)</b>	<b>(0,40)</b>

	<b>TA 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>TA 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil</b>	<b>178.650.834.228,00</b>	<b>137.850.455.347,00</b>

Pendapatan dana bagi hasil pada tahun 2022 adalah sebesar Rp178.650.834.228,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp137.850.455.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.800.378.881,00 atau 29,60% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-461 Rincian Dana Bagi Hasil**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DBH PBB-LO	13.071.915.871,00	14.466.221.035,00	(1.394.305.164,00)	(9,64)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	15.450.873.034,00	14.342.360.661,00	1.108.512.373,00	7,73
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.423.543.801,00	1.988.732.022,00	1.434.811.779,00	72,15
4	DBH CHT-LO	57.874.054.455,00	43.451.926.805,00	14.422.127.650,00	33,19
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	77.737.361.098,00	56.796.182.846,00	20.941.178.252,00	36,87
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.486.402.212,00	1.077.875.887,00	3.408.526.325,00	316,23
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	412.082.859,00	342.053.301,00	70.029.558,00	20,47
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.300.135.576,00	3.381.417.705,00	(81.282.129,00)	(2,40)
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	724.401.111,00	646.065.935,00	78.335.176,00	12,12
10	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061,00	59,84
<b>Jumlah</b>		<b>178.650.834.228,00</b>	<b>137.850.455.347,00</b>	<b>40.800.378.881,00</b>	<b>29,60</b>

	<b>TA 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>TA 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.2 Dana Alokasi Umum</b>	<b>843.159.769.000,00</b>	<b>851.793.800.000,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2022 adalah sebesar 829.591.176.619,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp843.159.769.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.568.592.381,00 atau 1,61% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-462 Rincian Dana Alokasi Umum – LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Alokasi Umum-LO	829.591.176.619,00	843.159.769.000,00	(13.568.592.381,00)	(1,61)
<b>Jumlah</b>		<b>829.591.176.619,00</b>	<b>843.159.769.000,00</b>	<b>(13.568.592.381,00)</b>	<b>(1,61)</b>

	<b>TA 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>TA 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-Fisik</b>	<b>95.866.127.142,00</b>	<b>136.481.721.719,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik pada tahun 2022 adalah sebesar Rp95.866.127.142,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp136.481.721.719,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.615.594.577,00 atau 29,76% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-463 Rincian Dana Alokasi Khusus-Fisik**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	2.583.120.620,00	1.476.295.430,00	1.106.825.190,00	74,97
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	16.626.186.147,00	20.371.416.284,00	(3.745.230.137,00)	(18,38)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.195.534.772,00	8.460.997.456,00	(265.462.684,00)	(3,14)
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	436.587.625,00	(436.587.625,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	556.762.551,00	(556.762.551,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.139.800.000,00	5.251.433.145,00	(4.111.633.145,00)	(78,30)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	4.882.885.853,00	2.521.930.176,00	2.360.955.677,00	93,62
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	28.803.504.744,00	(28.803.504.744,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	2.179.621.770,00	227.600.500,00	1.952.021.270,00	857,65
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	299.145.300,00	(299.145.300,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	7.587.281.115,00	786.373.036,00	6.800.908.079,00	864,85
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.140.871.761,00	3.480.270.150,00	660.601.611,00	18,98
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	0,00	1.438.634.327,00	(1.438.634.327,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	5.428.805.830,00	3.698.703.004,00	1.730.102.826,00	46,78
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	5.011.666.000,00	9.472.663.000,00	(4.460.997.000,00)	(47,09)
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	11.832.644.000,00	8.927.233.000,00	2.905.411.000,00	32,55
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	2.571.982.000,00	0,00	2.571.982.000,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	10.850.227.021,00	(10.850.227.021,00)	(100,00)
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	12.028.882.000,00	(12.028.882.000,00)	(100,00)
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	7.483.313.000,00	0,00	7.483.313.000,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.189.881.000,00	9.888.047.000,00	(4.698.166.000,00)	(47,51)
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	5.785.508.149,00	1.154.542.370,00	4.630.965.779,00	401,11
25	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO	0,00	4.906.757.600,00	(4.906.757.600,00)	(100,00)
26	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	851.390.750,00	0,00	851.390.750,00	0,00
27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	0,00	1.443.716.000,00	(1.443.716.000,00)	(100,00)
28	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	3.193.684.375,00	0,00	3.193.684.375,00	0,00
29	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	1.181.950.000,00	0,00	1.181.950.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>95.866.127.142,00</b>	<b>136.481.721.719,00</b>	<b>(40.615.594.577,00)</b>	<b>(29,76)</b>

**TA 2022**  
**(Rp)**

**TA 2021**  
**(Rp)**

**5.1.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik**

**209.401.899.682,00**

**201.349.366.378,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik pada tahun 2022 adalah sebesar 209.401.899.682,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp201.349.366.378,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.052.533.304,00 atau 4,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-464 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	58.688.650.397,00	0,00	58.688.650.397,00	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	105.749.456.785,00	136.216.200.000,00	(30.466.743.215,00)	(22,37)
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	3.669.499.500,00	1.512.000.000,00	2.157.499.500,00	142,69
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	0,00	208.928.000,00	(208.928.000,00)	(100,00)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	20.026.780.000,00	21.927.133.800,00	(1.900.353.800,00)	(8,67)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.913.700.000,00	19.557.400.000,00	(16.643.700.000,00)	(85,10)

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	10.720.314.642,00	13.587.329.255,00	(2.867.014.613,00)	(21,10)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.101.357.645,00	4.112.128.371,00	(10.770.726,00)	(0,26)
9	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	401.665.000,00	377.709.800,00	23.955.200,00	6,34
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	2.133.458.152,00	(2.133.458.152,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.152.890.100,00	945.557.000,00	207.333.100,00	21,93
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	344.000.113,00	372.462.000,00	(28.461.887,00)	(7,64)
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	0,00	187.310.000,00	(187.310.000,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	299.098.500,00	211.750.000,00	87.348.500,00	41,25
15	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.334.487.000,00	0,00	1.334.487.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>209.401.899.682,00</b>	<b>201.349.366.378,00</b>	<b>8.052.533.304,00</b>	<b>4,00</b>

		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>7.725.363.000,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.725.363.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp37.542.241.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.816.878.000,00 atau 79,42% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-465 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	7.725.363.000,00	37.542.241.000,00	(29.816.878.000,00)	(79,42)
<b>Jumlah</b>		<b>7.725.363.000,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>	<b>(29.816.878.000,00)</b>	<b>(79,42)</b>

		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.2.2.1</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>7.725.363.000,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7.725.363.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp37.542.241.000,00 mengalami penurunan sebesar 29.816.878.000,00 atau 79,42% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-466 Rincian Dana Insentif Daerah (DID)**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DID-LO	7.725.363.000,00	37.542.241.000,00	(29.816.878.000,00)	(79,42)
<b>Jumlah</b>		<b>7.725.363.000,00</b>	<b>37.542.241.000,00</b>	<b>(29.816.878.000,00)</b>	<b>(79,42)</b>

		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>142.784.299.093,00</b>	<b>131.206.048.162,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp142.784.299.093,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp131.206.048.162,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.578.250.931,00 atau 8,82% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-467 Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	121.927.576.093,00	120.743.249.732,00	1.184.326.361,00	0,98
2	Bantuan Keuangan	20.856.723.000,00	10.462.798.430,00	10.393.924.570,00	99,34
<b>Jumlah</b>		<b>142.784.299.093,00</b>	<b>131.206.048.162,00</b>	<b>11.578.250.931,00</b>	<b>8,82</b>

		TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.2.3.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>121.927.576.093,00</b>	<b>120.743.249.732,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil-LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp121.927.576.093,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp120.743.249.732,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.184.326.361,00 atau 0,98 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-468 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	121.927.576.093,00	120.743.249.732,00	1.184.326.361,00	0,98
	<b>Jumlah</b>	<b>121.927.576.093,00</b>	<b>120.743.249.732,00</b>	<b>1.184.326.361,00</b>	<b>0,98</b>

#### 5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20.856.723.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp10.462.798.430,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.393.924.570,00 atau 99,34 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-469 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.856.723.000,00	10.462.798.430,00	10.393.924.570,00	99,34
	<b>Jumlah</b>	<b>20.856.723.000,00</b>	<b>10.462.798.430,00</b>	<b>10.393.924.570,00</b>	<b>99,34</b>

#### 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang sah pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp69.768.957.783,43. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp135.551.072.399,23 mengalami penurunan sebesar Rp65.782.114.615,80 atau 48,53% dengan obyek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5-470 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah	41.179.142.839,43	33.968.652.619,23	7.210.490.220,20	21,23
2	Pendapatan Lainnya	28.589.814.944,00	101.582.419.780,00	(72.992.604.836,00)	(71,86)
	<b>Jumlah</b>	<b>69.768.957.783,43</b>	<b>135.551.072.399,23</b>	<b>(65.782.114.615,80)</b>	<b>(48,53)</b>

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp41.179.142.839,43. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.968.652.619,23 mengalami penurunan sebesar Rp7.210.490.220,20 atau 21,23% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-471 Pendapatan Hibah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	18.161.071.920,00	9.027.367.814,90	9.133.704.105,10	101,18
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.018.070.919,43	24.321.596.709,83	(1.303.525.790,40)	(5,36)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	619.688.094,50	(619.688.094,50)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>41.179.142.839,43</b>	<b>33.968.652.619,23</b>	<b>7.210.490.220,20</b>	<b>21,23</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp18.161.071.920,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp9.027.367.814,90 mengalami kenaikan sebesar Rp9.133.704.105,10 atau 101,18 % dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-472 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	18.161.071.920,00	9.027.367.814,90	9.133.704.105,10	101,18
	<b>Jumlah</b>	<b>18.161.071.920,00</b>	<b>9.027.367.814,90</b>	<b>9.133.704.105,10</b>	<b>101,18</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp23.018.070.919,43. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp24.321.596.709,83 mengalami penurunan sebesar Rp1.303.525.790,40 atau 5,36% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-473 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.018.070.919,43	24.321.596.709,83	(1.303.525.790,40)	(5,36)
<b>Jumlah</b>		<b>23.018.070.919,43</b>	<b>24.321.596.709,83</b>	<b>(1.303.525.790,40)</b>	<b>(5,36)</b>

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp619.688.094,50 mengalami penurunan sebesar Rp619.688.094,50 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-474 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	493.226.612,50	(493.226.612,50)	(100,00)
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	126.461.482,00	(126.461.482,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>619.688.094,50</b>	<b>(619.688.094,50)</b>	<b>(100,00)</b>

#### 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>28.589.814.944,00</b>	<b>101.582.419.780,00</b>

Pendapatan Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp28.589.814.944,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp101.582.419.780,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.992.604.836,00 atau 71,86% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-475 Rincian Pendapatan Lainnya**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	63.562.244.031,00	(63.562.244.031,00)	(100,00)
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	28.589.814.944,00	38.020.175.749,00	(9.430.360.805,00)	(24,80)
<b>Jumlah</b>		<b>28.589.814.944,00</b>	<b>101.582.419.780,00</b>	<b>(72.992.604.836,00)</b>	<b>(71,86)</b>

Lain-lain Pendapatan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.562.244.031,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.562.244.031,00 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-476 Rincian Lain-lain Pendapatan-LO**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	63.562.136.781,00	(63.562.136.781,00)	(100,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	107.250,00	(107.250,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>63.562.244.031,00</b>	<b>(63.562.244.031,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tahun 2022 adalah sebesar Rp28.589.814.944,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp38.020.175.749,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.430.360.805,00 atau 24,80% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 5-477 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	28.589.814.944,00	38.020.175.749,00	(9.430.360.805,00)	(24,80)
<b>Jumlah</b>		<b>28.589.814.944,00</b>	<b>38.020.175.749,00</b>	<b>(9.430.360.805,00)</b>	<b>(24,80)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Beban</b>	<b>1.762.018.533.864,27</b>	<b>1.827.621.945.024,36</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Laporan Operasional untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.762.018.533.864,27. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.827.621.945.024,36 mengalami penurunan sebesar Rp65.603.411.160,09 atau 3,59% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-478 Jenis Beban**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	788.425.764.357,00	798.903.569.988,00	(10.477.805.631,00)	(1,31)
2	Beban Persediaan	150.062.979.930,04	152.436.423.003,68	(2.373.443.073,64)	(1,56)
3	Beban Jasa	258.282.740.559,96	245.915.390.165,06	12.367.350.394,90	5,03
4	Beban Pemeliharaan	26.093.407.537,00	20.216.659.854,39	5.876.747.682,61	29,07
5	Beban Perjalanan Dinas	37.637.082.047,00	26.289.401.713,00	11.347.680.334,00	43,16
6	Beban Subsidi	2.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.000.000.000,00	84,52
7	Beban Hibah	129.685.700.668,00	151.380.791.843,64	(21.695.091.175,64)	(14,33)
8	Beban Bantuan Sosial	19.011.581.040,00	35.217.459.036,80	(16.205.877.996,80)	(46,02)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	245.079.086.120,78	269.191.263.009,68	(24.112.176.888,90)	(8,96)
10	Beban Penyisihan Piutang	4.242.914.391,49	4.506.502.674,11	(263.588.282,62)	(5,85)
11	Beban Transfer	99.897.620.287,00	119.674.608.869,00	(19.776.988.582,00)	(16,53)
12	Beban Lain-lain	1.416.493.126,00	2.706.711.067,00	(1.290.217.941,00)	(47,67)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.762.018.533.864,27</b>	<b>1.827.621.945.024,36</b>	<b>(65.603.411.160,09)</b>	<b>(3,59)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.4 Beban Pegawai</b>	<b>788.425.764.357,00</b>	<b>798.903.569.988,00</b>

Beban Pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp788.425.764.357,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp798.903.569.988,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.477.805.631,00 atau 1,31% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-479 Obyek Beban Pegawai**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	541.821.046.629,00	533.890.828.149,00	7.930.218.480,00	1,49
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	73.267.696.823,00	70.973.126.222,00	2.294.570.601,00	3,23
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.134.942.700,00	162.163.218.151,00	(21.028.275.451,00)	(12,97)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.824.978.362,00	18.757.496.275,00	67.482.087,00	0,36
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	365.688.286,00	327.115.189,00	38.573.097,00	11,79
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	876.650.000,00	677.000.000,00	199.650.000,00	29,49
7	Beban Pegawai BLUD	12.134.761.557,00	12.114.786.002,00	19.975.555,00	0,16
	<b>Jumlah</b>	<b>788.425.764.357,00</b>	<b>798.903.569.988,00</b>	<b>(10.477.805.631,00)</b>	<b>(1,31)</b>

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp541.821.046.629,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp533.890.828.149,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.930.218.480,00 atau 1,49 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-480 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	405.506.419.329,00	406.088.568.053,00	(582.148.724,00)	(0,14)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	37.923.979.452,00	38.119.256.192,00	(195.276.740,00)	(0,51)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.444.899.750,00	6.282.043.550,00	(837.143.800,00)	(13,33)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.765.824.780,00	24.816.800.318,00	(50.975.538,00)	(0,21)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.716.041.750,00	7.927.866.680,00	788.175.070,00	9,94
6	Beban Tunjangan Beras ASN	23.279.674.097,00	22.966.555.270,00	313.118.827,00	1,36
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.171.151.545,00	1.988.692.217,00	182.459.328,00	9,17
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.719.552,00	5.713.588,00	5.964,00	0,10
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.658.872.435,00	22.379.426.182,00	8.279.446.253,00	37,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	837.117.679,00	828.874.616,00	8.243.063,00	0,99
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.511.346.260,00	2.487.031.483,00	24.314.777,00	0,98
	<b>Jumlah</b>	<b>541.821.046.629,00</b>	<b>533.890.828.149,00</b>	<b>7.930.218.480,00</b>	<b>1,49</b>

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp73.267.696.823,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp70.973.126.222,00 mengalami kenaikan sebesar 2.294.570.601,00 3,23% dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5-481 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.706.896.823,00	69.418.126.222,00	2.288.770.601,00	3,30
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.560.800.000,00	1.555.000.000,00	5.800.000,00	0,37
<b>Jumlah</b>		<b>73.267.696.823,00</b>	<b>70.973.126.222,00</b>	<b>2.294.570.601,00</b>	<b>3,23</b>

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2022 adalah sebesar 141.134.942.700,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 162.163.218.151,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.028.275.451,00 atau 12,97% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-482 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.122.411.168,00	(1.122.411.168,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	7.844.480,00	(7.844.480,00)	(100,00)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	116.109.500.220,00	132.796.055.460,00	(16.686.555.240,00)	(12,57)
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	246.623.200,00	(246.623.200,00)	(100,00)
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.265.250.000,00	1.446.250.000,00	(181.000.000,00)	(12,52)
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	23.670.439.869,00	25.813.703.843,00	(2.143.263.974,00)	(8,30)
7	Beban Honorarium	89.752.611,00	730.330.000,00	(640.577.389,00)	(87,71)
<b>Jumlah</b>		<b>141.134.942.700,00</b>	<b>162.163.218.151,00</b>	<b>(21.028.275.451,00)</b>	<b>(12,97)</b>

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp18.824.978.362,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.757.496.275,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.482.087,00 atau 0,36% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-483 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	3.150.000,00	0,31
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	121.522.800,00	120.775.200,00	747.600,00	0,62
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	122.896.740,00	135.497.820,00	(12.601.080,00)	(9,30)
4	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.743.000,00	315.000,00	0,37
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.451.247.000,00	4.567.500,00	0,31
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.416.000,00	135.654.750,00	761.250,00	0,56
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.021.675,00	1.568.175,00	37.453.500,00	2.388,35
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	21.000.000,00	0,37
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.375.500.000,00	1.396.500.000,00	(21.000.000,00)	(1,50)
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	646.063,00	393.758,00	252.305,00	64,08
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.139.092.584,00	4.123.681.572,00	15.411.012,00	0,37
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.674.000.000,00	4.655.000.000,00	19.000.000,00	0,41
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	1.575.000,00	(1.575.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>18.824.978.362,00</b>	<b>18.757.496.275,00</b>	<b>67.482.087,00</b>	<b>0,36</b>

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp365.688.286,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp327.115.189,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.573.097,00 atau 11,79% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-484 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.288.000,00	6.852.000,00	(564.000,00)	(8,23)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.852.140,00	6.735.060,00	(1.882.920,00)	(27,96)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.401.404,00	1.271.300,00	130.104,00	10,23
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	600,00	520,00	86,67
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.456.160,00	5.475.360,00	(19.200,00)	(0,35)
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	194.360.182,00	153.056.069,00	41.304.113,00	26,99
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	395.520,00	(395.520,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>365.688.286,00</b>	<b>327.115.189,00</b>	<b>38.573.097,00</b>	<b>11,79</b>

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp876.650.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp677.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp199.650.000,00 atau 29,49% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-485 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	624.650.000,00	425.000.000,00	199.650.000,00	46,98
<b>Jumlah</b>		<b>876.650.000,00</b>	<b>677.000.000,00</b>	<b>199.650.000,00</b>	<b>29,49</b>

Beban Pegawai BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp12.134.761.557,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.114.786.002,00 mengalami kenaikan sebesar 19.975.555,00 atau 0,16 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-486 Rincian Beban Beban Pegawai BLUD**

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai BLUD	12.134.761.557,00	12.114.786.002,00	19.975.555,00	0,16
<b>Jumlah</b>		<b>12.134.761.557,00</b>	<b>12.114.786.002,00</b>	<b>19.975.555,00</b>	<b>0,16</b>

#### 5.4.1.5 Beban Persediaan

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>150.062.979.930,04</b>	<b>152.436.423.003,68</b>

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual sehingga Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan (*use of goods*) selama Tahun 2022. Beban persediaan tahun 2022 adalah sebesar Rp150.062.979.930,04. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp152.436.423.003,68 mengalami penurunan sebesar Rp2.373.443.073,64 atau 1,56% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-487 Obyek Beban Persediaan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Barang	150.062.979.930,04	152.436.423.003,68	(2.373.443.073,64)	(1,56)
<b>Jumlah</b>		<b>150.062.979.930,04</b>	<b>152.436.423.003,68</b>	<b>(2.373.443.073,64)</b>	<b>(1,56)</b>

Beban Barang tahun 2022 adalah sebesar Rp150.062.979.930,04. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp152.436.423.003,68 mengalami penurunan sebesar Rp2.373.443.073,64 atau 1,56% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-488 Rincian Beban Barang

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Barang Pakai Habis	150.048.879.930,04	152.436.423.003,68	(2.387.543.073,64)	(1,57)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>150.062.979.930,04</b>	<b>152.436.423.003,68</b>	<b>(2.373.443.073,64)</b>	<b>(1,56)</b>

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.4.1.6 Beban Jasa</b>	<b>258.282.740.559,96</b>	<b>245.915.390.165,06</b>

Perbedaan pengakuan belanja jasa dengan beban jasa diantaranya pada pengakuan utang beban jasa telepon, air, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit dan utang beban jasa lainnya. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

Beban jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp258.282.740.559,96. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp245.915.390.165,06 mengalami penurunan sebesar Rp12.367.350.394,90 atau 5,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-489 Obyek Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Jasa	237.737.810.550,96	218.775.437.330,06	18.962.373.220,90	8,67
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.544.930.009,00	27.139.952.835,00	(6.595.022.826,00)	(24,30)
	<b>Jumlah</b>	<b>258.282.740.559,96</b>	<b>245.915.390.165,06</b>	<b>12.367.350.394,90</b>	<b>5,03</b>

Beban jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp237.737.810.550,96. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp218.775.437.330,06 mengalami kenaikan sebesar Rp18.962.373.220,90 atau 8,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-490 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Jasa Kantor	191.144.467.824,00	182.654.325.532,56	8.490.142.291,44	4,65
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.246.878.226,96	19.701.212.274,00	14.545.665.952,96	73,83
3	Beban Sewa Tanah	18.845.000,00	66.700.000,00	(47.855.000,00)	(71,75)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.976.151.309,00	2.135.378.841,00	840.772.468,00	39,37
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.331.481.000,00	857.567.600,00	473.913.400,00	55,26
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	427.841.333,00	4.036.459.710,00	(3.608.618.377,00)	(89,40)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	28.487.000,00	(28.487.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.636.575.359,00	5.405.449.172,50	(3.768.873.813,50)	(69,72)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.259.009.647,00	1.296.676.750,00	(37.667.103,00)	(2,90)
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	136.500.000,00	348.060.000,00	(211.560.000,00)	(60,78)
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	228.000.000,00	(228.000.000,00)	(100,00)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.560.060.852,00	2.017.120.450,00	2.542.940.402,00	126,07
	<b>Jumlah</b>	<b>237.737.810.550,96</b>	<b>218.775.437.330,06</b>	<b>18.962.373.220,90</b>	<b>8,67</b>

Beban Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp20.544.930.009,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.139.952.835,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.595.022.826,00 atau 24,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-491 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.780.681.000,00	22.106.068.500,00	(4.325.387.500,00)	(19,57)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.764.249.009,00	5.033.884.335,00	(2.269.635.326,00)	(45,09)
	<b>Jumlah</b>	<b>20.544.930.009,00</b>	<b>27.139.952.835,00</b>	<b>(6.595.022.826,00)</b>	<b>(24,30)</b>

#### 5.4.1.7 Beban Pemeliharaan

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>26.093.407.537,00</b>	<b>20.216.659.854,39</b>

Beban Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik OPD Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp26.093.407.537,00 . Jika dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp20.216.659.854,39 mengalami kenaikan sebesar Rp5.876.747.682,61 atau 29,0% dengan obyek beban pemeliharaan sebagai berikut :

**Tabel 5-492 Rincian Obyek Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan	26.093.407.537,00	20.216.659.854,39	5.876.747.682,61	29,07
	<b>Jumlah</b>	<b>26.093.407.537,00</b>	<b>20.216.659.854,39</b>	<b>5.876.747.682,61</b>	<b>29,07</b>

Beban Pemeliharaan tahun 2022 adalah sebesar Rp26.093.407.537,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp20.216.659.854,39 mengalami kenaikan sebesar Rp5.876.747.682,61 atau 29,0% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-493 Rincian Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	24.988.000,00	24.998.000,00	(10.000,00)	(0,04)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.841.367.702,00	5.090.002.541,00	751.365.161,00	14,76
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.908.380.743,00	13.774.467.913,00	5.133.912.830,00	37,27
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	915.556.092,00	1.322.711.400,39	(407.155.308,39)	(30,78)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	403.115.000,00	4.480.000,00	398.635.000,00	8.898,10
	<b>Jumlah</b>	<b>26.093.407.537,00</b>	<b>20.216.659.854,39</b>	<b>5.876.747.682,61</b>	<b>29,07</b>

#### 5.4.1.8 Beban Perjalanan Dinas

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>37.637.082.047,00</b>	<b>26.289.401.713,00</b>

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi selama tahun 2022 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan yang terealisasi sebesar Rp37.637.082.047,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp26.289.401.713,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.347.680.334,00 atau 43,16% dengan obyek beban perjalanan dinas sebagai berikut :

**Tabel 5-494 Obyek Beban Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas	37.637.082.047,00	26.289.401.713,00	11.347.680.334,00	43,16
	<b>Jumlah</b>	<b>37.637.082.047,00</b>	<b>26.289.401.713,00</b>	<b>11.347.680.334,00</b>	<b>43,16</b>

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 adalah sebesar Rp37.637.082.047,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp26.289.401.713,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.347.680.334,00 atau 43,16% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-495 Rincian Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.637.082.047,00	26.289.401.713,00	11.347.680.334,00	43,16
	<b>Jumlah</b>	<b>37.637.082.047,00</b>	<b>26.289.401.713,00</b>	<b>11.347.680.334,00</b>	<b>43,16</b>

#### 5.4.1.9 Beban Subsidi

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>2.183.163.800,00</b>	<b>1.183.163.800,00</b>

Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp2.183.163.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi tahun 2021 sebesar Rp1.183.163.800,00 mengalami kenaikan Rp1.000.000.000,00 atau 84,52% dengan obyek beban subsidi sebagai berikut:

**Tabel 5-496 Obyek Beban Subsidi**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.000.000.000,00	84,52
	<b>Jumlah</b>	<b>2.183.163.800,00</b>	<b>1.183.163.800,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>84,52</b>

Beban Subsidi kepada BUMD tahun 2022 adalah sebesar Rp2.183.163.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.183.163.800,00 mengalami kenaikan Rp1.000.000.000,00 atau 84,52% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-497 Rincian Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.183.163.800,00	1.183.163.800,00	1.000.000.000,00	84,52
	<b>Jumlah</b>	<b>2.183.163.800,00</b>	<b>1.183.163.800,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>84,52</b>

	<b>TA 2022</b> (Rp)	<b>TA 2021</b> (Rp)
<b>5.4.1.10 Beban Hibah</b>	<b>129.685.700.668,00</b>	<b>151.380.791.843,64</b>

Beban Hibah berupa barang dapat berasal dari barang yang dibeli untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau sebelumnya merupakan bagian persediaan, dan telah diserahkan kepada masyarakat pada tahun berjalan.

Beban hibah tahun 2022 sebesar Rp129.685.700.668,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2021 sebesar Rp151.380.791.843,64 mengalami penurunan sebesar Rp21.695.091.175,64 atau 14,33% dengan obyek beban hibah sebagai berikut:

**Tabel 5-498 Obyek Beban Hibah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	496.892.520,00	(496.892.520,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	15.254.041.000,00	(15.254.041.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	91.843.624.320,00	112.036.197.003,88	(20.192.572.683,88)	(18,02)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan	36.066.624.348,00	21.818.209.319,76	14.248.415.028,24	65,31
	<b>Jumlah</b>	<b>129.685.700.668,00</b>	<b>151.380.791.843,64</b>	<b>(21.695.091.175,64)</b>	<b>(14,33)</b>

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp496.892.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp496.892.520,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-499 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	496.892.520,00	(496.892.520,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>496.892.520,00</b>	<b>(496.892.520,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Hibah Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp15.254.041.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.254.041.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-500 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	15.254.041.000,00	(15.254.041.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254.041.000,00</b>	<b>(15.254.041.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 adalah sebesar Rp91.843.624.320,00 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp112.036.197.003,88 mengalami penurunan sebesar Rp20.192.572.683,88 atau 18,02% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-501 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.456.681.933,00	27.642.557.733,29	6.814.124.199,71	24,65
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.421.184.900,00	29.377.492.888,37	(7.956.307.988,37)	(27,08)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.965.757.487,00	55.016.146.382,22	(19.050.388.895,22)	(34,63)
<b>Jumlah</b>		<b>91.843.624.320,00</b>	<b>112.036.197.003,88</b>	<b>(20.192.572.683,88)</b>	<b>(18,02)</b>

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2022 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.775.452.000,00 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-502 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.775.452.000,00</b>	<b>1.775.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan tahun 2022 adalah sebesar Rp36.066.624.348,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.818.209.319,76 mengalami penurunan sebesar Rp14.248.415.028,24 atau 65,31% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-503 Rincian Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.550.781.324,00	15.096.805.131,90	20.453.976.192,10	135,49
2	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	515.843.024,00	6.721.404.187,86	(6.205.561.163,86)	(92,33)
<b>Jumlah</b>		<b>36.066.624.348,00</b>	<b>21.818.209.319,76</b>	<b>14.248.415.028,24</b>	<b>65,31</b>

**TA 2022**

**(Rp)**

**19.011.581.040,00**

**TA 2021**

**(Rp)**

**35.217.459.036,80**

#### 5.4.1.11 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 adalah sebesar Rp19.011.581.040,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp35.217.459.036,80 mengalami penurunan sebesar Rp16.205.877.996,80 atau 46,02 % dengan obyek beban sebagai berikut :

**Tabel 5-504 Obyek Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.833.823.540,00	13.087.574.036,80	(8.253.750.496,80)	(63,07)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	306.897.500,00	562.725.000,00	(255.827.500,00)	(45,46)
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.870.860.000,00	21.567.160.000,00	(7.696.300.000,00)	(35,69)
<b>Jumlah</b>		<b>19.011.581.040,00</b>	<b>35.217.459.036,80</b>	<b>(16.205.877.996,80)</b>	<b>(46,02)</b>

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu tahun 2022 adalah sebesar Rp4.833.823.540,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.087.574.036,80 mengalami penurunan sebesar Rp8.253.750.496,80 atau 63,07% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-505 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.437.200.000,00	2.438.400.000,00	998.800.000,00	40,96
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.396.623.540,00	10.649.174.036,80	(9.252.550.496,80)	(86,89)
<b>Jumlah</b>		<b>4.833.823.540,00</b>	<b>13.087.574.036,80</b>	<b>(8.253.750.496,80)</b>	<b>(63,07)</b>

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp306.897.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp562.725.000,00. mengalami penurunan sebesar Rp255.827.500,00 atau 45,46% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-506 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	46.897.500,00	562.725.000,00	(515.827.500,00)	(91,67)
<b>Jumlah</b>		<b>306.897.500,00</b>	<b>562.725.000,00</b>	<b>(255.827.500,00)</b>	<b>(45,46)</b>

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2022 adalah sebesar Rp13.870.860.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.567.160.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.696.300.000,00 atau 35,69% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-507 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	13.671.100.000,00	21.320.200.000,00	(7.649.100.000,00)	(35,88)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	199.760.000,00	246.960.000,00	(47.200.000,00)	(19,11)
<b>Jumlah</b>		<b>13.870.860.000,00</b>	<b>21.567.160.000,00</b>	<b>(7.696.300.000,00)</b>	<b>(35,69)</b>

#### 5.4.1.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	<b>245.079.086.120,78</b>	<b>269.191.263.009,68</b>

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan baru diterapkan pertama kali di Tahun 2015 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp245.079.086.120,78. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp269.191.263.009,68 mengalami penurunan sebesar Rp24.112.176.888,90 atau 8,96% dengan obyek beban sebagai berikut:

**Tabel 5-508 Obyek Beban Penyusutan dan Amortisasi**

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022 (Rp)	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan	243.978.325.098,78	267.979.699.502,67	(24.001.374.403,89)	(8,96)
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.100.761.022,00	1.211.563.507,01	(110.802.485,01)	(9,15)
<b>Jumlah</b>		<b>245.079.086.120,78</b>	<b>269.191.263.009,68</b>	<b>(24.112.176.888,90)</b>	<b>(8,96)</b>

Beban Penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp243.978.325.098,78. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp267.979.699.502,67 mengalami penurunan sebesar Rp24.001.374.403,89 atau 8,96% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-509 Rincian Beban Penyusutan**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	93.435.013.233,00	94.260.688.616,67	(825.675.383,67)	(0,88)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.062.699.736,78	53.233.649.280,00	(30.170.949.543,22)	(56,68)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	127.480.612.129,00	120.485.361.606,00	6.995.250.523,00	5,81
<b>Jumlah</b>		<b>243.978.325.098,78</b>	<b>267.979.699.502,67</b>	<b>(24.001.374.403,89)</b>	<b>(8,96)</b>

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 adalah sebesar Rp1.100.761.022,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.211.563.507,01 mengalami penurunan sebesar Rp110.802.485,01 atau 9,15% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-510 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.100.761.022,00	1.211.563.507,01	(110.802.485,01)	(9,15)
<b>Jumlah</b>		<b>1.100.761.022,00</b>	<b>1.211.563.507,01</b>	<b>(110.802.485,01)</b>	<b>(9,15)</b>

<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4.242.914.391,49</b>	<b>4.506.502.674,11</b>

#### 5.4.1.13 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penghitungan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih didasarkan pada analisis umur piutang (*aging schedule*). Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.242.914.391,49. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.506.502.674,11 mengalami penurunan sebesar Rp263.588.282,62 atau 5,85% dengan obyek beban sebagai berikut:

**Tabel 5-511 Obyek Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang 2022 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.440.174.225,00	3.888.942.172,40	(448.767.947,40)	(11,54)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	534.315.712,79	414.757.707,21	119.558.005,58	28,83
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	268.424.453,70	202.802.794,50	65.621.659,20	32,36
<b>Jumlah</b>		<b>4.242.914.391,49</b>	<b>4.506.502.674,11</b>	<b>(263.588.282,62)</b>	<b>(5,85)</b>

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp3.440.174.225,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3.888.942.172,40 mengalami penurunan sebesar Rp448.767.947,40 atau 11,54% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-512 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	39.965.941,90	(39.965.941,90)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	1.554.662,00	394.000,00	1.160.662,00	294,58
3	Beban Penyisihan Pajak Reklame	68.925.998,30	38.221.742,80	30.704.255,50	80,33
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	182.309,80	0,00	182.309,80	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	399.033,90	(399.033,90)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.369.511.254,90	3.809.961.453,80	(440.450.198,90)	(11,56)
<b>Jumlah</b>		<b>3.440.174.225,00</b>	<b>3.888.942.172,40</b>	<b>(448.767.947,40)</b>	<b>(11,54)</b>

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp534.315.712,79. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp414.757.707,21 mengalami kenaikan sebesar Rp119.558.005,58 atau 28,83 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-513 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	508.454.912,79	332.579.807,61	175.875.105,18	52,88
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	25.860.800,00	82.177.899,60	(56.317.099,60)	(68,53)
<b>Jumlah</b>		<b>534.315.712,79</b>	<b>414.757.707,21</b>	<b>119.558.005,58</b>	<b>28,83</b>

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 adalah sebesar Rp268.424.453,70. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp202.802.794,50 mengalami penurunan sebesar Rp65.621.659,20 atau 32,36% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-514 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.831.642,50	52.148.757,00	(41.317.114,50)	(79,23)
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	257.592.811,20	150.654.037,50	106.938.773,70	70,98
<b>Jumlah</b>		<b>268.424.453,70</b>	<b>202.802.794,50</b>	<b>65.621.659,20</b>	<b>32,36</b>

#### 5.4.1.14 Beban Transfer

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>99.897.620.287,00</b>	<b>119.674.608.869,00</b>

Beban transfer tahun 2022 sebesar Rp99.897.620.287,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer tahun 2021 sebesar Rp119.674.608.869,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.776.988.582,00 atau 16,53% dengan obyek beban transfer sebagai berikut :

**Tabel 5-515 Obyek Beban Transfer**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.527.376.025,00	4.154.754.200,00	372.621.825,00	8,97
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	2.010.995.353,00	(2.010.995.353,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	95.370.244.262,00	113.508.859.316,00	(18.138.615.054,00)	(15,98)
<b>Jumlah</b>		<b>99.897.620.287,00</b>	<b>119.674.608.869,00</b>	<b>(19.776.988.582,00)</b>	<b>(16,53)</b>

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp4.527.376.025,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.154.754.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp372.621.825,00 atau 8,97% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-516 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.527.376.025,00	4.154.754.200,00	372.621.825,00	8,97
<b>Jumlah</b>		<b>4.527.376.025,00</b>	<b>4.154.754.200,00</b>	<b>372.621.825,00</b>	<b>8,97</b>

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.010.995.353,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.010.995.353,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-517 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	2.010.995.353,00	(2.010.995.353,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>2.010.995.353,00</b>	<b>(2.010.995.353,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp95.370.244.262,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp113.508.859.316,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.138.615.054,00 atau 15,98% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-518 Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	95.370.244.262,00	113.508.859.316,00	(18.138.615.054,00)	(15,98)
<b>Jumlah</b>		<b>95.370.244.262,00</b>	<b>113.508.859.316,00</b>	<b>(18.138.615.054,00)</b>	<b>(15,98)</b>

#### 5.4.1.15 Beban Lain-lain

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>1.416.493.126,00</b>	<b>2.706.711.067,00</b>

Beban Lain-Lain berasal dari Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa dan Belanja Modal dengan nilai di bawah kebijakan kapitalisasi. Pengadaan yang berasal dari Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi akan dilakukan pencatatan secara *extracomptable*. Realisasi beban lain-lain tahun 2022 sebesar Rp1.416.493.126,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban lain-lain tahun 2021 sebesar Rp2.706.711.067,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.290.217.941,00 atau 47,67% dengan obyek beban lain-lain sebagai berikut :

**Tabel 5-519 Obyek Beban Lain-Lain**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	207.275.897,00	622.266.485,00	(414.990.588,00)	(66,69)
2	Beban Lain-lain	1.209.217.229,00	2.084.444.582,00	(875.227.353,00)	(41,99)
<b>Jumlah</b>		<b>1.416.493.126,00</b>	<b>2.706.711.067,00</b>	<b>(1.290.217.941,00)</b>	<b>(47,67)</b>

Beban penurunan nilai investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp207.275.897,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp414.990.588,00 mengalami penurunan sebesar Rp622.266.485,00 atau 66,69% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-520 Rincian Beban Penurunan Nilai Investasi**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	207.275.897,00	622.266.485,00	(414.990.588,00)	(66,69)
<b>Jumlah</b>		<b>207.275.897,00</b>	<b>622.266.485,00</b>	<b>(414.990.588,00)</b>	<b>(66,69)</b>

Beban lain-lain tahun 2022 adalah sebesar Rp1.209.217.229,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.084.444.582,00 mengalami penurunan sebesar Rp875.227.353,00 atau 41,99% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-521 Rincian Beban Lain-lain**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Lain-lain	1.209.217.229,00	2.084.444.582,00	(875.227.353,00)	(41,99)
<b>Jumlah</b>		<b>1.209.217.229,00</b>	<b>2.084.444.582,00</b>	<b>(875.227.353,00)</b>	<b>(41,99)</b>

Beban lain-lain tahun 2022 sebesar Rp1.209.217.229,00 merupakan Extracomptabel yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.079.441.161,00, reklasifikasi Persediaan sebesar Rp123.288.168,00 dan reklasifikasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp6.487.900,00

#### 5.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>(33.447.408.967,98)</b>	<b>14.757.392.971,17</b>

Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp33.447.408.967,98 dan Rp14.757.392.971,17. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-522 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

No	Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Surplus/Defisit Operasional	Dari Kegiatan	(33.447.408.967,98)	14.757.392.971,17	(48.204.801.939,15)	(326,65)
	<b>Jumlah</b>		<b>(33.447.408.967,98)</b>	<b>14.757.392.971,17</b>	<b>(48.204.801.939,15)</b>	<b>(326,65)</b>

	<b>TA 2022 (Rp)</b>	<b>TA 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(16.428.823.001,04)</b>	<b>143.266.875,36</b>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sejumlah minus Rp16.428.823.001,04 dan Rp143.266.875,36. Surplus/defisit dari kegiatan non Operasi merupakan selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp188.765.536,00 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp16.617.588.537,04.

#### 5.4.4 Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp49.876.231.969,02.

#### 5.4.5 Pos Luar Biasa

Saldo Pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sejumlah minus Rp1.019.080.271,86 dan minus Rp240.000.000,00. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Surplus/defisit dari pos luar biasa merupakan selisih antara Pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa sebesar minus Rp1.019.080.271,86 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-523 Rincian Pos Luar Biasa**

No	Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Tak Terduga		1.019.080.271,86	240.000.000,00	779.080.271,86	324,62
	<b>Jumlah</b>		<b>1.019.080.271,86</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>779.080.271,86</b>	<b>324,62</b>

#### 5.4.6.1 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp1.019.080.271,86 dan sebesar minus Rp240.000.000,00.

	<b>TA 2022 (Rp)</b>	<b>TA 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.6 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(50.895.312.240,88)</b>	<b>14.660.659.846,53</b>

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah minus sebesar Rp50.895.312.240,88 dan sebesar Rp14.660.659.846,53

### 5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut :

#### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp197.477.002.988,40 dan tahun 2021 sebesar Rp286.538.501.557,17 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

**Tabel 5-524 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas	1.907.989.858.073,06	2.053.785.661.168,73
2	Jumlah Arus Keluar Kas	1.710.512.855.084,66	1.767.247.159.611,56
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>197.477.002.988,40</b>	<b>286.538.501.557,17</b>

**5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sebesar Rp1.907.989.858.073,06 dan tahun 2021 sebesar Rp2.053.785.661.168,73 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-525 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	41.397.270.293,00	35.114.763.839,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	16.881.328.762,00	14.367.036.052,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.544.375.373,27	4.260.079.389,45
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.192.979.702,79	168.829.720.972,14
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	163.050.876.593,00	142.767.234.998,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	829.591.176.619,00	843.159.769.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik	95.866.127.142,00	136.481.721.719,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik	209.401.899.682,00	201.349.366.378,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.725.363.000,00	37.542.241.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	231.667.832.000,00	236.217.008.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	120.622.425.962,00	121.070.561.684,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	20.856.723.000,00	11.043.738.357,14
13	Penerimaan Pendapatan Hibah	11.601.665.000,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.589.814.944,00	101.582.419.780,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1.907.989.858.073,06</b>	<b>2.053.785.661.168,73</b>

**5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sebesar Rp1.710.512.855.084,66 dan tahun 2021 sebesar Rp1.767.247.159.611,56 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-526 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	787.984.360.335,00	799.417.410.997,00
2	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	475.352.226.339,66	444.016.600.988,70
3	Pembayaran Belanja Subsidi	2.183.163.800,00	1.183.163.800,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	93.266.283.855,00	130.514.844.220,06
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	19.011.581.040,00	35.217.459.036,80
6	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	4.527.376.025,00	4.154.754.200,00
7	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	2.010.995.353,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	327.038.076.262,00	349.725.867.316,00
9	Pembayaran Belanja Tak Terduga	1.149.787.428,00	1.006.063.700,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1.710.512.855.084,66</b>	<b>1.767.247.159.611,56</b>

**5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar minus Rp189.908.040.664,00 dan tahun 2021 sebesar minus Rp195.989.678.339,81 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

**Tabel 5-527 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	488.536.336,00	564.967.356,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	190.396.577.000,00	196.554.645.695,81
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(189.908.040.664,00)</b>	<b>(195.989.678.339,81)</b>

### 5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sebesar Rp488.536.336,00 dan tahun 2021 sebesar Rp564.967.356,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-528 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penjualan Peralatan/Mesin	227.778.421,00	322.260.989,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan	227.778.421,00	0,00
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	20.572.839,00
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	301.688.150,00
2.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	260.757.915,00	242.706.367,00
	- Hasil Penjualan Hewan	47.751.000,00	20.000.000,00
	- Hasil Penjualan Tanaman	213.006.915,00	222.706.367,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi</b>		<b>488.536.336,00</b>	<b>564.967.356,00</b>

### 5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 sebesar Rp190.396.577.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp196.554.645.695,81 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-529 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.205.466.900,00	95.221.279.024,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.977.092.155,00	42.446.436.867,21
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.386.382.840,00	51.677.563.443,60
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.802.635.105,00	7.025.222.811,00
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	184.143.550,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</b>		<b>190.396.577.000,00</b>	<b>196.554.645.695,81</b>

### 5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar minus Rp14.868.762.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim/tuntutan pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

**Tabel 5-530 Arus Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	131.238.000,00	139.318.500,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	15.000.000.000,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(14.868.762.000,00)</b>	<b>139.318.500,00</b>

### 5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-531 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	131.238.000,00	139.318.500,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>131.238.000,00</b>	<b>139.318.500,00</b>

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp139.318.500,00 merupakan penerimaan pokok atas pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-532 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	131.238.000,00	68.158.500,00
2.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	71.160.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>		<b>131.238.000,00</b>	<b>139.318.500,00</b>

### 5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5-533 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.10 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar minus Rp118.502.155,00 dan tahun 2021 sebesar Rp67.497.952,96 merupakan penerimaan dan pengeluaran kas berupa pajak, potongan ataupun penerimaan lainnya yang menjadi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dari Kas Daerah/BUD dan langsung dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-534 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	134.311.978.042,54	137.266.791.907,73
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	134.430.480.197,54	137.199.293.954,77
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(118.502.155,00)</b>	<b>67.497.952,96</b>

### 5.5.11 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 sebesar Rp134.311.978.042,54 dan tahun 2021 sebesar Rp137.266.791.907,73 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-535 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	121.032.537.495,54	116.628.064.667,73
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>121.032.537.495,54</b>	<b>116.628.064.667,73</b>

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp121.032.537.495,54 dan tahun 2021 sebesar Rp116.628.064.667,73 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5-536 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	PFK 1 % (BPJS-Akun 811113)	5.955.792.993,00	6.091.107.385,00
2.	Taperum	0,00	0,00
3.	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	30.664.564.900,00	22.055.104.518,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 21	22.420.673.979,00	25.235.619.663,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 22	1.334.103.670,00	1.384.037.374,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23	451.503.892,00	310.319.769,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.240.572.344,00	3.034.737.341,00
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.576.969.238,00	23.507.436.414,00
9.	PFK 8 % (PT TASPEN-Akun 811114)	29.059.944.853,00	29.529.260.531,00
10.	PFK-JKK	837.240.489,00	813.786.016,00
11.	PFK-JKM	2.511.714.690,00	2.441.355.532,00
12.	PFK-1 % (BPJS-Akun 811115) Gaji Bupati/Wk. Bup	0,00	1.368.840,00
13.	PFK-8 % (PT TASPEN-Akun 811116) Gaji Bupati	0,00	4.211.520,00
14.	PFK-1 % (BPJS-Akun 811153) PPPK	0,00	52.063.294,00
15.	PFK-8 % (PT TASPEN-Akun 811114) PPPK	0,00	224.207.961,00
16.	811154 Setoran PFK IW PEMDA 4 % PPPK	0,00	208.252.719,00
17.	PFK-JKK PPPK	0,00	15.200.940,00
18.	PFK-JKM PPPK	0,00	45.600.987,00
19.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2022	1.979.456.447,54	0,00
20.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2021	0,00	1.674.393.863,73
<b>Jumlah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		<b>121.032.537.495,54</b>	<b>116.628.064.667,73</b>

### 5.5.12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 sebesar Rp134.430.480.197,54 dan tahun 2021 sebesar Rp137.199.293.954,77 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-537 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	121.151.039.650,54	116.560.566.714,77
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>121.151.039.650,54</b>	<b>116.560.566.714,77</b>

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp121.151.039.650,54 dan tahun 2021 sebesar Rp116.560.566.714,77 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-538 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	PFK 1 % (BPJS-Akun 811113)	5.955.792.993,00	6.091.107.385,00
2.	Taperum	0,00	0,00
3.	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	30.664.564.900,00	22.055.104.518,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 21	22.420.673.979,00	25.235.619.663,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 22	1.334.103.670,00	1.384.037.374,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23	451.503.892,00	310.319.769,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.240.572.344,00	3.034.737.341,00
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.576.969.238,00	23.507.436.414,00
9.	PFK 8 % (PT TASPEN-Akun 811114)	29.059.944.853,00	29.529.260.531,00
10.	PFK-JKK	837.240.489,00	813.786.016,00
11.	PFK-JKM	2.511.714.690,00	2.441.355.532,00
12.	PFK-1 % (BPJS-Akun 811115) Gaji Bupati/Wk. Bupati	0,00	1.368.840,00
13.	PFK-8 % (PT TASPEN-Akun 811116) Gaji Bupati	0,00	4.211.520,00
14.	PFK-1 % (BPJS-Akun 811153) PPPK	0,00	52.063.294,00
15.	PFK-8 % (PT TASPEN-Akun 811114) PPPK	0,00	224.207.961,00
16.	811154 Setoran PFK IW PEMDA 4 % PPPK	0,00	208.252.719,00
17.	PFK-JKK PPPK	0,00	15.200.940,00
18.	PFK-JKM PPPK	0,00	45.600.987,00
19.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2021	199.988.045,00	1.474.405.818,73
20.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2020	1.416.120,00	87.487.240,08
21.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2019	0,00	45.002.851,96
22.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2022	1.896.554.437,54	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		<b>121.151.039.650,54</b>	<b>116.560.566.714,77</b>

### 5.5.13 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan/ (Penurunan) Kas merupakan hasil penjumlahan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Pada tahun 2022 terdapat penurunan kas sebesar Rp7.418.301.830,60 sedangkan pada tahun 2021 terdapat kenaikan kas sebesar Rp90.755.639.670,32 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-539 Rincian Kenaikan dan Penurunan Kas**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	197.477.002.988,40	286.538.501.557,17
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(189.908.040.664,00)	(195.989.678.339,81)
3.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	(14.868.762.000,00)	139.318.500,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(118.502.155,00)	67.497.952,96
<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>		<b>(7.418.301.830,60)</b>	<b>90.755.639.670,32</b>

### 5.5.14 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93 merupakan penjumlahan Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Saldo Awal Kas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5-540 Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	(7.418.301.830,60)	90.755.639.670,32
2.	Saldo Awal Kas	227.796.515.381,93	137.040.875.711,61
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>		<b>220.378.213.551,33</b>	<b>227.796.515.381,93</b>

Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.796.515.381,93 terdiri dari :

**Tabel 5-541 Rincian Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	207.708.972.841,60	179.556.601.565,89
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.001.111,23	18.433.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000,00	0,00
4.	Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi	10.329.468.288,89	43.083.972.311,47
5.	Kas Lainnya	2.308.771.309,61	5.137.508.504,57
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>		<b>220.378.213.551,33</b>	<b>227.796.515.381,93</b>

1. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp207.708.972.841,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp179.556.601.565,89 terdiri dari :

**Tabel 5-542 Rincian Kas di Kas Daerah**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di BUD	207.708.972.841,60	179.556.601.565,89
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>		<b>207.708.972.841,60</b>	<b>179.556.601.565,89</b>

2. Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.001.111,23 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.433.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5-543 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	4.000,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	997.111,23	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas LHP	0,00	18.433.000,00
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>1.001.111,23</b>	<b>18.433.000,00</b>

3. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar nihil terdiri dari :

**Tabel 5-544 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Wonosari	30.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

4. Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.329.468.288,89 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.083.972.311,47 terdiri dari :

**Tabel 5-545 Rincian Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di BLUD RSUD dr H Koesnadi	10.317.291.823,89	38.070.271.751,47
2.	Deposito di BLUD RSUD	0,00	5.000.000.000,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi	12.176.465,00	13.700.560,00
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. H. Koesnadi</b>		<b>10.329.468.288,89</b>	<b>43.083.972.311,47</b>

5. Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.308.771.309,61 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.137.508.504,57 terdiri dari :

**Tabel 5-546 Rincian Kas Lainnya**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di FKTP	1.767.917.917,52	4.677.675.195,48
2.	Kas di Dana BOS	540.853.392,09	459.833.309,09
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas Lainnya</b>		<b>2.308.771.309,61</b>	<b>5.137.508.504,57</b>

- a) Jumlah Kas di FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.917.917,52 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.677.675.195,48 terdiri dari :

**Tabel 5-547 Rincian Kas di FKTP**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di FKTP Curahdami	87.649.652,00	234.968.840,00
2.	Kas di FKTP Binakal	29.672.453,00	124.327.671,00
3.	Kas di FKTP Grujungan	86.517.606,00	133.552.900,00
4.	Kas di FKTP Maesan	187.116.319,00	282.065.585,00
5.	Kas di FKTP Tamanan	148.117.908,00	334.286.818,00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6.	Kas di FKTP Jambesari	55.741.806,00	178.490.940,00
7.	Kas di FKTP Pujer	100.756.434,48	412.797.193,48
8.	Kas di FKTP Tlogosari	38.175.785,00	470.726.959,00
9.	Kas di FKTP Wonosari	83.336.129,00	203.553.361,00
10.	Kas di FKTP Tapen	179.234.301,00	371.215.440,00
11.	Kas di FKTP Nangkaan	108.248.126,04	250.724.535,04
12.	Kas di FKTP Sukosari	79.080.972,00	88.041.657,00
13.	Kas di FKTP Sumber Wringin	71.197.734,00	329.185.428,00
14.	Kas di FKTP Klabang	14.368.494,00	42.374.849,00
15.	Kas di FKTP Sempol	49.997.997,04	21.034.227,04
16.	Kas di FKTP Prajekan	22.387.392,60	25.552.851,60
17.	Kas di FKTP Botolinggo	9.731.647,00	123.559.342,00
18.	Kas di FKTP Cerme	94.315.358,35	242.485.461,35
19.	Kas di FKTP Kotakulon	13.434.215,70	72.589.685,70
20.	Kas di FKTP Kademangan	43.737.123,00	74.948.018,00
21.	Kas di FKTP Tenggarang	92.688.293,00	73.098.459,00
22.	Kas di FKTP Tegalampel	59.452.742,27	54.900.734,27
23.	Kas di FKTP Taman Krocok	1.420.986,00	70.575.204,00
24.	Kas di FKTP Wringin	28.105.188,00	285.180.028,00
25.	Kas di FKTP Pakem	83.433.255,04	177.439.008,00
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di FKTP</b>		<b>1.767.917.917,52</b>	<b>4.677.675.195,48</b>

Jumlah saldo akhir kas di FKTP sebesar Rp1.767.917.917,52 bila dibandingkan dengan saldo akhir rekening koran bank sebesar Rp1.761.620.376,52 terdapat selisih sebesar Rp6.297.541,00.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi bank, selisih sebesar Rp6.297.541,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5-548 Rincian Selisih Kas di FKTP**

No	Uraian	Saldo Akhir SP2DK SPB 2022	Saldo Akhir RC Bank Jatim	Selisih	Penjelasan
1.	FKTP Curahdami	87.649.652,00	87.650.152,00	(500,00)	Sebab : Kesalahan penulisan pada cek dan bukti pindah buku sehingga ada kekurangan pembayaran Tindaklanjut: Pelunasan kekurangan pembayaran
2.	FKTP Tamanan	148.117.908,00	148.057.908,00	60.000,00	Sebab : Kesalahan input penarikan cek terlalu tinggi oleh bank Tindaklanjut: Pengembalian kelebihan penarikan dengan STS no 900/18/430.9.11/2023 tanggal 24 Januari 2023
3.	FKTP Tapen	179.234.301,00	180.314.301,00	(1.080.000,00)	Sebab : Kesalahan bank seharusnya penarikan tunai tetapi diinput setoran tunai Tindaklanjut: Penarikan kelebihan kas FKTP melalui cek seri EF733492 dan cek seri EF733493 tanggal 4 Januari 2023
4.	FKTP Tegalampel	59.452.742,27	52.134.696,27	7.318.046,00	Sebab : Kesalahan bank double transfer pembayaran kepada rekanan Tindaklanjut: Rekanan mengembalikan kelebihan transfer ke RKUD tanggal 10 Januari 2023
5.	FKTP Pakem	83.433.255,04	83.433.260,04	(5,00)	Sebab : Kesalahan pencatatan oleh bank Tindaklanjut: Penarikan kelebihan kas oleh bendahara FKTP
<b>Jumlah</b>		<b>557.887.858,31</b>	<b>551.590.317,31</b>	<b>6.297.541,00</b>	

- b) Jumlah Kas di Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp540.853.392,09 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp459.833.309,09 terdiri dari :

**Tabel 5-549 Rincian Kas di Dana BOS**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas di Dana BOS-SD	85.317.247,80	139.000.366,80
2.	Kas di Dana BOS-SMP	372.634.134,29	119.428.777,29
3.	Kas di Dana BOS untuk Perhitungan PFK Tahun 2021	0,00	201.404.165,00
4.	Kas di Dana BOS untuk Perhitungan PFK Tahun 2022	82.902.010,00	0,00
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas di Dana BOS</b>		<b>540.853.392,09</b>	<b>459.833.309,09</b>

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.6.1 Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.882.121.144.320,72 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021.
- 5.6.2 Surplus/(Defisit) LO sebesar Rp50.895.312.240,88 merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.
- 5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar minus Rp384.109.841,20 disebabkan oleh koreksi kesalahan mendasar.
- 5.6.4 Koreksi nilai persediaan sebesar Rp 4.920.225,00 disebabkan oleh penambahan nilai saldo awal persediaan berupa persediaan Alat Tulis Kantor
- 5.6.5 Koreksi kesalahan mendasar sebesar minus Rp389.030.066,20 disebabkan oleh koreksi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:
- 5.6.5.1 Koreksi piutang pajak sebesar minus Rp300.000,00 merupakan koreksi pengurangan saldo awal piutang pajak restoran.
- 5.6.5.2 Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar minus Rp27.830.900,00 terdiri dari koreksi penambahan saldo awal piutang klaim BPJS sebesar Rp770.000,00 dan koreksi pengurangan saldo awal piutang klaim BPJS sebesar Rp28.600.900,00.
- 5.6.5.3 Koreksi Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp31.659.928,80 merupakan pengurangan penyisihan piutang pajak restoran.
- 5.6.5.4 Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp8.813.950,00 merupakan pengurangan penyisihan piutang retribusi sewa toko.
- 5.6.5.5 Koreksi Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp397.065.648,00 terdiri dari pengurangan penyisihan piutang laian-lain PAD klaim BPJS sebesar Rp.187.634.853,40 dan pengurangan penyisihan piutang laian-lain PAD Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Pihak III Lainnya sebesar Rp209.430.794,60
- 5.6.5.6 Koreksi Penyisihan Piutang Lain-lain sebesar Rp144.125.500,00 merupakan pengurangan penyisihan piutang lain-lain Kredit Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 5.6.5.7 Koreksi Aset Tetap sebesar Rp37.400.000,00 merupakan koreksi penambahan saldo awal aset tetap – peralatan dan mesin – komputer.
- 5.6.5.8 Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp59.252.600,00 merupakan koreksi penambahan saldo awal aset tidak berwujud-*software*
- 5.6.5.9 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar minus Rp2.120.855.492,00 merupakan penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Tahun 2021.
- 5.6.5.10 Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.081.638.699,00 merupakan Koreksi Pengakuan Pengurangan Akumulasi Kerugian Penambahan Modal yang berasal dari PDAM.

### 5.6.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.830.841.722.238,64 dengan rincian sebagai berikut :

-	Ekuitas Awal	Rp	2.882.121.144.320,72
-	Surplus/ Defisit LO	Rp	(50.895.312.240,88)
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(384.109.841,20)
-	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>2.830.841.722.238,64</b>

**5.7 Pengungkapan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI.**

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, nilai surplus/(defisit) adalah defisit sebesar Rp7.568.962.324,40 dan Laporan Operasional Tahun 2022, nilai surplus/(defisit) adalah defisit sebesar defisit Rp50.895.312.240,88. Nilai tersebut memiliki perbedaan sebesar minus Rp43.326.349.916,48.

## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan kawasan tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Bondowoso berada pada koordinat selat 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 OC – 25,10 OC, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Terdapat lima suku/etnis di Kabupaten Bondowoso. Mayoritas dari Madura. Minoritas lainnya adalah minoritas nonpribumi, yakni suku India, Arab, dan Cina yang terdapat di ibu kota kabupaten. Umumnya dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa Jawa (dialek Surabaya) bercampur bahasa Madura. Bahkan hampir dua pertiga penduduk Bondowoso tidak bisa berbahasa Jawa sama sekali dan hanya berbahasa Madura dalam kesehariannya.

Di kabupaten Bondowoso terdapat sejumlah situs megalitik, tepatnya 12 situs, di mana ditemukan dolmen, punden berundak, menhir, sarkofagus, kubur batu, batu kenong, pelinggih dan stunchambers (batu ruang). Ada juga Goa Buto, Ekopak, Abris Saus Roche dan Area Batu.

Pariwisata, seni dan budaya merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut beberapa kawasan wisata yang berada di Kabupaten Bondowoso :

1. Kawasan Wisata Terpadu Kawah Ijen di Kecamatan Sempol dan Sumberwringin, dengan objek wisata:
  - Wisata Kawah Ijen, Kawah Telaga Weru dan Kawah Wurung
  - Wisata Air Terjun Blawan dan Gua Stalagtit
  - Wisata Pemandian Air Panas Blawan dan Pemandian Damarwulan
  - Wisata Agro Kopi Kalisat
  - Wisata Air Terjun Puloagung–Sukorejo
2. Kawasan Wisata Terpadu Lereng Argopuro di Kecamatan Pakem, dengan objek wisata:
  - Wisata Agro Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
  - Wisata Air Terjun Tancak Kembar
  - Wisata Pendakian Pegunungan Hyang (Gunung Argopuro)
3. Kawasan Wisata Pemandangan Arak-arak di Kecamatan Wringin;
4. Kawasan Wisata Pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin;
5. Kawasan Wisata Panjat Tebing Alam Patirana di Kecamatan Grujungan;
6. Kawasan Wisata Pemandian Tasnan di Kecamatan Grujungan;
7. Kawasan Wisata Sejarah Sarkopage di Kecamatan Grujungan, Maesan, Wringin, Tegalampel, Bondowoso, Wonosari, Tamanan, Jambesari Darussholah, Prajekan, Tlogosari dan Sempol;
8. Kawasan Wisata Rekreasi Alun-alun Bondowoso;
9. Kawasan Wisata Ziarah Makam Ki Ronggo di Kecamatan Tegalampel;
10. Kawasan Wisata Budaya Pedepokan Gema Buana di Kecamatan Prajekan;
11. Kawasan Wisata Kerajinan Kuningan Cindogo di Kecamatan Tapen;
12. Kawasan Wisata Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen;
13. Kawasan Wisata Budaya Upacara Adat Desa Blimbing di Kecamatan Klabang; dan

14. Kawasan Wisata Arung Jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok dan Tapen.

## 6.2 Batas Wilayah Kabupaten

Kabupaten Bondowoso mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara : Kabupaten Situbondo.
2. Bagian Selatan : Kabupaten Jember.
3. Bagian Timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
4. Bagian Barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

## 6.3 Pembagian dan Kebijakan Per Wilayah

Secara struktur wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada di wilayah bagian Timur Jawa Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2022 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa.

## 6.4 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penerapan Peraturan Daerah tersebut membawa perubahan terhadap SOTK yang telah berjalan selama ini terutama perubahan atas tugas, pokok, dan fungsi serta adanya pergeseran urusan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan masing-masing OPD. Perubahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tetap, meliputi : Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tenggarrang, Kecamatan Tegallampel, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Wringin, Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, Kecamatan Maesan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Prajekan, Kecamatan Klabang, Kecamatan Cerme, Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kecamatan Botolinggo, dan Kecamatan Sukosari.
2. Berubah nama, meliputi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi.
3. Pemecahan, meliputi : Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi.
4. Penggabungan, meliputi : Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
5. Pemecahan dan Panggabungan meliputi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di Jl. Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, memiliki 23 Kecamatan 10 Kelurahan 209 Desa serta dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terbagi : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, 7 Badan, 16 Dinas, Inspektorat, RSUD dr. H. Koesnadi, BUMD PDAM dan BUMD PT Bondowoso Gemilang.

Perubahan organisasi perangkat daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 6-13 Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

No	Organisasi Lama	Organisasi Baru
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	RSU dr H. Koesnadi	RSUD dr H. Koesnadi
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan

No	Organisasi Lama	Organisasi Baru
5.	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	- Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6.	- Bagian Administrasi Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Administrasi Perekonomian - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi - Bagian Umum dan Perlengkapan - Bagian Humas dan Protokol - Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
7.	- Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8.	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Perikanan
9.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	- Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
10.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
16.	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
19.	Inspektorat	Inspektorat
20.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
21.	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
22.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
23.	Kecamatan Bondowoso	Kecamatan Bondowoso
24.	Kecamatan Tamanan	Kecamatan Tamanan
25.	Kecamatan Tenggarang	Kecamatan Tenggarang
26.	Kecamatan Tegalmepel	Kecamatan Tegalmepel
27.	Kecamatan Curahdami	Kecamatan Curahdami
28.	Kecamatan Wringin	Kecamatan Wringin
29.	Kecamatan Pakem	Kecamatan Pakem
30.	Kecamatan Binakal	Kecamatan Binakal
31.	Kecamatan Maesan	Kecamatan Maesan
32.	Kecamatan Grujugan	Kecamatan Grujugan
33.	Kecamatan Pujer	Kecamatan Pujer
34.	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari
35.	Kecamatan Sukosari	Kecamatan Sukosari
36.	Kecamatan Tlogosari	Kecamatan Tlogosari
37.	Kecamatan Tapen	Kecamatan Tapen
38.	Kecamatan Sumberwringin	Kecamatan Sumberwringin
39.	Kecamatan Prajekan	Kecamatan Prajekan
40.	Kecamatan Klabang	Kecamatan Klabang
41.	Kecamatan Cermee	Kecamatan Cermee
42.	Kecamatan Ijen	Kecamatan Ijen
43.	Kecamatan Taman Krocok	Kecamatan Taman Krocok
44.	Kecamatan Jambesari Darussholah	Kecamatan Jambesari Darussholah
45.	Kecamatan Botolinggo	Kecamatan Botolinggo
46.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB VII**

### **Penutup**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Tahun 2022 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tahun 2022 merupakan tahun kedelapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan akuntansi berbasis akrua. Terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam. Namun dengan berbekal komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2022 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 berbasis akrua, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang lebih baik.

Bondowoso,

**BUPATI BONDOWOSO**



**SALWA ARIFIN**